



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



ETIKA PROFESI HUKUM



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ETIKA PROFESI HUKUM



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-40-3 (PDF)



9 786238 642403

Etika Profesi Hukum

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-623-8642-40-3

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan buku ini. Buku ini berjudul "**Etika Profesi Hukum**" dan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara profesi hukum dan prinsip-prinsip etika yang mengaturnya. Di era yang semakin kompleks ini, peran profesi hukum sangat penting dalam menjaga keadilan, serta menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, seiring dengan itu, tantangan etika yang dihadapi oleh para praktisi hukum juga semakin besar.

Dalam buku ini, penulis mengupas berbagai aspek etika yang harus diperhatikan oleh para profesional hukum, serta memberikan contoh-contoh konkret yang relevan dalam praktik sehari-hari. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi para mahasiswa, praktisi hukum, serta semua pihak yang berkepentingan dalam dunia hukum.

Bab pertama memberikan dasar-dasar etika hukum, menjelaskan sejarah dan latar belakangnya, serta membedakan antara etika, etika profesi, dan etika hukum. Selanjutnya, bab kedua membahas makna legal profesi dan aturan konstitusi yang mengaturnya, serta peran asosiasi pengacara dalam menjaga standar etika.

Bab ketiga mengkaji etika hakim dalam menjalankan tugas peradilan, termasuk persyaratan etika dalam kegiatan ekstra yudisial dan proses disiplin yang berlaku. Di bab keempat, fokus diberikan pada etika advokat dalam hubungannya dengan klien, mencakup persyaratan, kontrak, tarif biaya, dan penanganan konflik dalam proses pengadilan. Bab kelima membahas etika jaksa penuntut umum, termasuk asas dasar hukum, tanggung jawab terhadap terdakwa, dan keterlibatan dalam kegiatan di luar tugas resmi.

Bab keenam menyoroti pentingnya independensi pengacara dari pengaruh eksternal dan kepentingan diri, sementara bab ketujuh menguraikan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam praktik hukum dengan rujukan pada piagam CCBE dan perundang-undangan nasional. Bab kedelapan menggali prinsip loyalitas pengacara terhadap klien, serta pengaturan yang dilakukan oleh kode etik, seperti MBA.

Selanjutnya, bab kesembilan membahas prinsip-prinsip kerahasiaan dalam profesi hukum dan tantangan yang dihadapi oleh pengacara, sedangkan bab kesepuluh berfokus pada konflik kepentingan dan bagaimana pengacara dapat menghindarinya. Bab kesebelas menjelaskan pentingnya pendidikan hukum berkelanjutan dan kewajiban praktisi hukum untuk tetap kompetitif. Bab kedua belas mengkaji etika dan peraturan periklanan bagi pengacara, sedangkan bab terakhir membahas sistem disiplin dan tanggung jawab etika yang harus dipatuhi oleh pengacara. Melalui pembahasan mendalam ini, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia hukum.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami pentingnya etika dalam profesi hukum.

Semarang, Oktober 2024

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PROFESI DAN ETIKA HUKUM	1
1.1 Sejarah Latar Belakang	1
1.2 Etika, Etika Profesi Dan Etika Hukum	2
1.3 Moral Masalah Dan Moral Dilema	5
1.4 Teori Moral Kewajiban	7
BAB 2 LEGAL PROFESI	17
2.1 Makna Dari Legal Profesi	17
2.2 Aturan Konstitusi Untuk Menjalankan Profesi Hukum	21
2.3 Asosiasi Pengacara Dan Perannya Dalam Profesi Hukum	23
BAB 3 PERADILAN	26
3.1 Etis Tugas Dari Hakim Didalam Peradilan Kegiatan	27
3.2 Persyaratan Etika Hakim Dalam Kegiatan Ekstra Yudisial	41
3.3 Arbitrase Dan Mediasi	44
3.4 Pengangkatan, Penarikan, Dan Promosi Hakim.....	45
3.5 Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Persyaratan Etika Hakim	51
3.6 Prosedur Proses Disiplin	53
BAB 4 ETIKA ADVOKAT	56
4.1 Profesi, Sistem Peradilan, Dan Pemerintahan	59
4.2 Etika Persyaratan Pengacara Dalam Hubungan Dengan Klien.....	65
4.3 Kontrak Dari Advokat	66
4.4 Dasar Atau Tarif Biaya	70
4.5 Konflik Dalam Proses Pengadilan	72
BAB 5 ETIKA DARI JAKSA PENUNTUT UMUM	76
5.1 Kelayakan	76
5.2 Asas Dasar Hukum Dan Asas Etika Bagi Fungsi Jaksa Penuntut Umum	77
5.3 Sehubungan Dengan Terdakwa, Pengadilan Dan Lembaga Lain	82
5.4 Terlibat Di Dalam Kegiatan Di Luar Tugas Resmi	87
5.5 Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Kode Etik Jaksa	88
BAB 6 INDEPENDENSI ADVOKAT	90
6.1 Pendahuluan	90
6.2 Kemerdekaan Dari Pengaruh Eksternal	91
6.3 Independensi Dari Klien Dan Keterpisahan Professional	95
6.4 Kemerdekaan Dari Kepentingan Diri	99
BAB 7 KEJUJURAN, INTEGRITAS, DAN KEADILAN	103
7.1 Pendahuluan	103
7.2 Piagam CCBE	103
7.3 Hukum Perdata	104
7.4 Perundang-Undangan Nasional	107

BAB 8 LOYALITAS TERHADAP KEPENTINGAN KLIEN	111
8.1 Pendahuluan	111
8.2 Prinsip Loyalitas Dan Perlindungan Kepentingan Klien	112
8.3 Kesetiaan Pengacara Menurut Kode Etik MBA	114
BAB 9 KERAHASIAAN	116
9.1 Prinsip Kerahasiaan	116
9.2 Kerahasiaan Dalam Profesi Pengacara	116
9.3 Kerahasiaan Pengacara: Prinsip Dan Tantangan Menurut IBA	117
9.4 Kerahasiaan Profesional Menurut Kode MBA	122
BAB 10 KONFLIK KEPENTINGAN	124
10.1 Konflik Kepentingan Dalam Praktik Pengacara	124
10.2 Prinsip Penghindaran Konflik Kepentingan IBA	125
10.3 Aturan Model ABA Tentang Konflik Kepentingan	129
10.4 Panduan Kode MBA Tentang Konflik Kepentingan	131
BAB 11 PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN	134
11.1 Kompetensi Peserta Pelatihan	134
11.2 Pentingnya Pendidikan Profesional Berkelanjutan	134
11.3 Kewajiban Pendidikan Hukum Berkelanjutan	135
BAB 12 ETIKA DAN PERATURAN PERIKLANAN PENGACARA	138
12.1 Periklanan Pengacara: Ketentuan Dan Pembatasan	138
12.2 Peraturan Periklanan Untuk Pengacara Di AS Dan Inggris	140
BAB 13 SISTEM DISIPLIN DAN ETIKA PENGACARA	142
13.1 Pendahuluan	142
13.2 Proses Disipliner Dan Tanggung Jawab Pengacara	142
13.3 Sistem Disiplin Dan Sanksi Bagi Pengacara	143
Daftar Pustaka	148

BAB 1

PROFESI DAN ETIKA HUKUM

Pendahuluan

Bab ini membahas tentang etika hukum, yaitu seperangkat aturan yang mengatur perilaku anggota suatu organisasi atau profesi hukum. Etika hukum merupakan bagian dari etika profesi, yang juga mencakup profesi lain seperti guru, akuntan, insinyur, dan dokter. Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang membahas prinsip dan pilihan moral yang harus diambil oleh individu.

Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas beberapa konsep penting, termasuk arti dan karakteristik profesi, serta pentingnya etika hukum dalam konteks filsafat. Kita juga akan menjelajahi cabang-cabang filsafat lainnya, seperti etika terapan, dan membahas teori kewajiban moral, yang sangat relevan bagi mahasiswa hukum. Selain itu, kita akan membahas isu-isu moral dan dilema yang sering dihadapi dalam profesi hukum.

Bab ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama membahas sejarah dan latar belakang etika hukum. Bagian kedua menjelaskan konsep-konsep etika secara lebih mendalam. Bagian ketiga fokus pada isu-isu moral dan dilema yang mungkin dihadapi oleh para profesional hukum. Terakhir, bagian keempat akan mengenalkan teori kewajiban moral kepada para mahasiswa, untuk membantu mereka memahami pentingnya etika dalam praktik hukum.

Bab ini tidak memberikan penjelasan mendalam tentang filsafat moral, tetapi lebih berfokus pada hubungan antara etika dan etika hukum. Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk membaca lebih lanjut tentang etika, meskipun pemahaman dasar yang disajikan dalam bab ini sudah cukup untuk tujuan kita. Sebagai penutup, referensi untuk bacaan tambahan disediakan di akhir materi ini, yang akan sangat membantu bagi yang ingin mendalami lebih jauh.

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini diharapkan para siswa dapat memahami:

- Membahas itu asal dari legal profesi Dan etika
- Mendefinisikan etika, legal etika, profesi dan profesional etika
- Daftar itu diperlukan Karakteristik dari profesi
- Membahas moral Masalah Dan dilema
- Menjelaskan itu teori dari moral kewajiban

1.1 SEJARAH LATAR BELAKANG

Profesi hukum pada dasarnya dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno. Di sana, tidak ada kelas khusus yang menganggap advokasi sebagai profesi. Di pengadilan Athena, pihak-pihak yang bersengketa diperbolehkan meminta bantuan dari saudara, teman, atau orang lain yang tidak secara langsung terlibat dalam kasus tersebut. Tugas mereka terbatas pada menyusun pidato tanpa berbicara langsung atas nama pihak yang bersengketa. Seiring waktu, orang-orang ini mulai meminta imbalan untuk layanan yang mereka berikan.

Di Roma Kuno, yang dikenal sebagai asal mula hukum sipil, sistem hukum yang berkembang memberikan pengacara posisi yang penting. Profesi advokat sering kali menjadi jalan menuju jabatan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Di Roma, ada dua jenis pengacara: *juris consulti* dan *patroni*. Pengacara resmi, atau *juris consulti*, memberikan pendapat hukum yang diacu oleh hakim dan mereka biasanya menerima bayaran untuk jasa mereka. Sementara itu, *patroni* muncul di pengadilan tetapi tidak memiliki pengetahuan hukum yang mendalam. Mereka biasanya mempelajari hukum dari *juris consulti* untuk membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Namun, pada saat itu tidak ada etika profesional yang jelas bagi para pendukung hukum. Sebagai contoh, pengacara dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan diri mereka sendiri, yang dianggap sebagai praktik yang wajar.

Di Amerika, sebelum abad ke-20, tidak ada standar etika tertulis dalam profesi hukum. Namun, pada tahun 1906, American Bar Association (ABA) merumuskan kanon etika profesional untuk mengatur perilaku pengacara. ABA juga mempertimbangkan pentingnya standar bagi hakim, tetapi percaya bahwa hakim seharusnya membuat aturan mereka sendiri. Pada tahun 1919, ABA akhirnya memutuskan untuk campur tangan dan menyebarkan aturan etika bagi hakim.

Di India, profesi hukum telah ada sebelum penjajahan Inggris. Namun, bentuk profesi hukum seperti yang kita kenal saat ini dikembangkan selama masa penjajahan. Setelah India merdeka, pada tahun 1961, Undang-Undang Pengacara diundangkan. Undang-undang ini mengubah dan mengkonsolidasikan peraturan terkait praktik hukum, serta menetapkan konstitusi Dewan Pengacara dan semua pengacara di India. Bab V undang-undang ini secara khusus membahas tentang perilaku para pendukung hukum.

Di Ethiopia, profesi hukum telah ada dalam konteks hukum tradisional yang beragam, tergantung pada kelompok etnis. Misalnya, dalam sistem gada di Oromos, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum menggunakan pengacara yang dikenal sebagai *abba alenga'*. Di sisi lain, dalam tradisi Amhara, profesi hukum berasal dari praktik yang disebut *muget batatayyeq ser'at*, di mana litigasi dilakukan secara lisan dan para pihak menunjuk pengacara mereka untuk mewakili mereka di pengadilan.

Sebelum tahun 1934 Masehi, siapa pun dapat mewakili pihak-pihak dalam litigasi tanpa memerlukan izin formal. Tidak ada sistem perizinan untuk advokat pada waktu itu. Baru setelah tahun 1934, orang-orang diharuskan memiliki izin untuk mewakili pihak lain dalam proses hukum. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kode etik untuk advokat sebelum dikeluarkannya Peraturan Nomor 57 Tahun 1999.

1.2 ETIKA, ETIKA PROFESI DAN ETIKA HUKUM

Etika

Etika, seperti logika dan metafisika, merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari sifat umum moral dan pilihan moral spesifik yang harus diambil individu dalam hubungannya dengan orang lain. Etika juga sering disebut sebagai filsafat moral. Dalam bidang ini, terdapat tiga cabang utama: **metaetika**, **etika normatif**, dan **etika terapan**.

1. **Metaetika** adalah analisis tentang apa yang dimaksud dengan istilah moral, bagaimana argumen moral dibenarkan, dan apa yang terjadi saat kita membuat penilaian moral. Metaetika tidak membuat penilaian moral, tetapi berusaha memahami asumsi dan komitmen di balik percakapan dan praktik moral.
2. **Etika normatif** berfokus pada penilaian moral pada tingkat yang lebih umum dan bertujuan untuk mengembangkan teori moral yang universal. Ini mencakup tiga area utama:
 - **Aksiologi**, yang membahas teori tentang kebaikan dan kejahatan serta mencoba menjawab pertanyaan "Apa itu baik?" Misalnya, John Stuart Mill berpendapat bahwa kebaikan adalah kebahagiaan.
 - **Etika kebajikan**, yang mengeksplorasi apa yang dianggap sebagai keunggulan moral dalam karakter.
 - **Teori kewajiban moral**, yang mencakup tindakan yang secara moral diperbolehkan atau dilarang, serta apa yang diwajibkan dari agen moral. Contoh dari teori ini adalah utilitarianisme.
3. **Etika terapan** berfokus pada penerapan prinsip-prinsip etika dalam situasi konkret, membantu individu dan masyarakat menghadapi dilema moral yang nyata.

Dengan demikian, etika membantu kita memahami dan mengevaluasi tindakan serta keputusan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Etika terapan bertugas menyelesaikan masalah moral tertentu dan kasus-kasus konkret yang muncul dalam berbagai bidang kehidupan. Ia memanfaatkan wawasan dari metaetika dan etika normatif, tetapi fokus utamanya adalah mencari resolusi yang dapat diterima untuk masalah moral yang mendesak dan praktis. Salah satu bidang dalam etika terapan adalah etika profesional, di mana etika hukum merupakan salah satu cabang penting. Dengan demikian, etika hukum membantu mengatur dan menavigasi isu-isu moral yang dihadapi dalam praktik profesional di bidang hukum.

Profesi

Kata "profesi" atau "profesional" sering muncul dalam berbagai aspek hukum di Ethiopia. Misalnya, Pasal 41 Konstitusi Ethiopia menjamin hak setiap warga negara untuk memilih profesi. Selain itu, Pasal 2031 KUH Perdata mengatur tentang kesalahan profesional. Dalam Komersial Kode, Pasal 5 merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara profesional, sementara Pasal 69 Kriminal Kode menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas profesional tidak dapat dikenakan hukuman. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap profesi dalam kerangka hukum Ethiopia dan perlindungan yang diberikan kepada para profesional dalam menjalankan tugas mereka.

Mendefinisikan profesi dan profesional sering kali sulit. Banyak penulis lebih memilih untuk mengidentifikasi beberapa ciri yang diperlukan agar suatu pekerjaan dapat dianggap sebagai profesi. Pekerjaan tersebut biasanya melibatkan komponen intelektual yang signifikan, serta pelatihan yang ekstensif dan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya memerlukan waktu yang lama, tetapi juga harus spesifik dalam bidang tertentu. Misalnya, seseorang yang hanya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah tidak dapat

dianggap telah menjalani pelatihan yang ekstensif karena tidak ada spesialisasi di tingkat tersebut.

Di Ethiopia, untuk dapat berpraktik di Pengadilan Federal, seseorang harus memiliki setidaknya diploma, sesuai dengan Proklamasi No. 199/2000. Oleh karena itu, pendidikan tinggi menjadi penting dalam mempersiapkan individu untuk menjadi profesional. Pelatihan yang ekstensif harus melibatkan aspek intelektual yang memperkaya kemampuan mental peserta. Berbeda dengan pelatihan untuk keterampilan fisik seperti mengemudi atau tukang kayu, yang lebih menekankan pada keterampilan praktis, pelatihan untuk profesi seperti guru, akuntan, dan pengacara lebih fokus pada tugas dan keterampilan intelektual.

Orang yang telah menjalani pelatihan ekstensif yang melibatkan komponen intelektual biasanya memberikan layanan yang penting bagi organisasi dan masyarakat. Dalam masyarakat modern yang kompleks, kebutuhan akan layanan dari berbagai profesional sangat tinggi, seperti guru, insinyur, pengacara, dan dokter.

Meskipun ada beberapa fitur umum yang dapat ditemukan di sebagian besar profesi—seperti proses sertifikasi atau perizinan, organisasi anggota, dan otonomi dalam pekerjaan—fitur-fitur ini tidak selalu diperlukan untuk mengklasifikasikan suatu pekerjaan sebagai profesi. Secara umum, profesi adalah suatu panggilan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut, sementara seorang profesional adalah individu yang tergolong dalam kelompok terpelajar atau yang pekerjaannya memerlukan pelatihan tinggi dan keterampilan khusus.

Profesional Etika

Etika profesional adalah seperangkat aturan standar yang mengatur perilaku anggota dalam suatu profesi. Berbeda dengan etika umum yang berlaku untuk semua orang, etika profesi bersifat formal dan terstruktur, khusus untuk anggota kelompok tertentu. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas, tanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai etika yang relevan dalam bidang mereka. Dengan demikian, etika profesi memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tertentu dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Etika Hukum

Etika profesi bagi pengacara adalah etika hukum. Etika hukum adalah standar perilaku minimal yang dapat diterima dalam profesi hukum, yang melibatkan kewajiban para anggotanya terhadap satu sama lain, terhadap klien dan terhadap pengadilan. Hakim Agung Marshal (dalam penelitian oleh Charles F. Hubson tahun 2006), menjelaskan tujuan etika hukum dengan istilah berikut ini:

“Tujuan mendasar dari etika hukum adalah menjaga kehormatan dan martabat profesi hukum. Etika ini berupaya menciptakan kerjasama yang harmonis antara pengadilan dan pengacara, serta mempromosikan standar tinggi dalam penegakan keadilan. Selain itu, etika hukum bertujuan untuk menjaga reputasi dan integritas dalam hubungan antara penasihat hukum, klien, lawan, dan saksi. Hal ini juga mencakup upaya untuk membangun semangat persaudaraan di antara para pengacara dan memastikan bahwa mereka menjalankan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat secara umum.”

Menurut Hakim Agung Marshal, Ketua Hakim Amerika Serikat tahun 1801, etika hukum berperan penting dalam mempertahankan kehormatan dan martabat profesi hukum dalam upaya mempromosikan keadilan. Kehilangan kehormatan dan martabat dalam profesi hukum dapat menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap pengadilan dan hukum, yang pada gilirannya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jika keadilan tidak ditegakkan, masyarakat mungkin enggan mengajukan keluhan ke pengadilan dan cenderung menyelesaikan masalah mereka secara mandiri. Hal ini berpotensi menyebabkan tindakan balas dendam, pengrusakan properti, bahkan ancaman terhadap kehidupan, yang dapat mengakibatkan kerusakan serius pada tatanan sosial.

Untuk mencegah kehancuran masyarakat, etika hukum mengharuskan para profesional hukum untuk bertindak dengan etis. Mereka tidak boleh terlibat dalam kasus yang mengandung konflik kepentingan, mengungkapkan informasi rahasia, dan harus saling bekerja sama. Hakim, pengacara, dan jaksa bukanlah musuh; mereka harus berkolaborasi untuk mencapai keadilan. Selain itu, etika hukum menuntut advokat untuk menjaga hubungan yang terhormat dan adil dengan klien serta lawan. Misalnya, biaya yang dikenakan oleh advokat harus adil dan wajar. Biaya yang berlebihan dapat menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan sistem hukum guna melindungi hak-hak mereka, serta menyalahgunakan hubungan advokat-klien yang seharusnya didasarkan pada saling percaya dan keyakinan.

1.3 MORAL MASALAH DAN MORAL DILEMA

Isu dapat diartikan sebagai pertanyaan atau masalah yang perlu dijawab atau dipecahkan. Isu moral, secara khusus, mengangkat pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai mengenai hak dan kesejahteraan seseorang, dan sering kali berkaitan dengan karakter individu.

Pertanyaan tentang nilai lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan pertanyaan tentang fakta. Menjawab pertanyaan nilai melibatkan penilaian terhadap nilai-nilai yang dianggap penting, sementara menjawab pertanyaan fakta tidak memerlukan pertimbangan nilai. Misalnya, menjawab pertanyaan moral memerlukan prinsip-prinsip etika, sedangkan menjawab pertanyaan tentang fakta memerlukan bukti konkret.

Sebagai contoh, jika seseorang bertanya apakah suatu tindakan itu benar atau salah, itu adalah pertanyaan nilai. Namun, jika seseorang bertanya tentang fakta, seperti "Apa yang terjadi pada tanggal tertentu?" itu memerlukan bukti dan tidak melibatkan penilaian nilai. Itu perbedaan antara pertanyaan tentang nilai dan pertanyaan tentang Faktanya adalah mirip dengan perbedaan di antara pertanyaan hukum dan pertanyaan tentang fakta. Seperti yang Anda sudah dibahas dibawah prosedural hukum dan hukum bukti. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pertanyaan tentang nilai dipastikan oleh mengacu pada moralitas dan pertanyaan tentang hukum dipastikan dengan mengacu pada hukum. Oleh karena itu, perbedaan antara pertanyaan hukum dan pertanyaan nilai bermuara pada perbedaan antara hukum dan moralitas.

Masalah moral melibatkan dilema nilai (dilema moral) seperti yang digambarkan di bawah ini oleh:

“Dilema moral terjadi dalam situasi di mana seseorang tidak dapat menghindari keputusan, dan di mana pilihan untuk tidak mengambil tindakan sama saja dengan membuat keputusan. Dalam dilema moral, tidak melakukan apa pun memiliki konsekuensi moral yang setara dengan melakukan sesuatu. Dilema semacam ini sering melibatkan pengorbanan terhadap nilai-nilai moral yang signifikan, karena mereka menciptakan konflik antara nilai-nilai yang ingin kita lindungi.

Contohnya termasuk kesetiaan kepada rekan kerja, hak privasi dan kerahasiaan klien, kesejahteraan klien, kepentingan publik, kebenaran, integritas pribadi, dan minat sah individu. Setiap pilihan yang diambil dapat menimbulkan dampak yang signifikan, sehingga membuat keputusan dalam dilema moral menjadi sangat kompleks dan menantang.”

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat konflik antara dua nilai: kerahasiaan informasi dan kebebasan individu. Seni 10 Pengadilan Federal mendukung Kode Etik Dewan Menteri Peraturan No. 57/1999 membuat informasi antara klien dan advokat rahasia untuk melindungi Kanan ke pribadi di bawah Pasal 26 dari FDRE Konstitusi. Jika itu menganjurkan mengungkapkan ini informasi, TIDAK klien akan berkonsultasi seorang advokat hasil di dalam TIDAK berarti perwakilan. Oleh karena itu, kami menghargai kerahasiaan informasi klien. Di sisi lain, kami menghargai keadilan. dan kebebasan. Bukan hanya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Pasal 17 Konstitusi menjamin hak atas kebebasan.

1.4 TEORI MORAL KEWAJIBAN

Mempelajari teori kewajiban moral sangat penting bagi profesi hukum dan etika. Aturan etika hukum, seperti hukum lainnya, sering kali memerlukan interpretasi ketika tidak jelas, ambigu, atau bertentangan dengan akal sehat. Dengan memahami teori kewajiban moral, mahasiswa di bidang hukum dan etika dilengkapi dengan alat yang diperlukan untuk menghadapi situasi di mana tidak ada aturan yang jelas atau ketika aturan tersebut terbuka untuk interpretasi. Ini juga membantu mereka ketika aturan tampak mengharuskan tindakan yang secara moral tidak dapat diterima. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kewajiban moral memungkinkan para profesional hukum untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan etis dalam praktik mereka.

Utilitarianisme

Menurut filsuf dan ekonom Inggris, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill (1863), suatu tindakan dianggap benar jika dapat meningkatkan kebahagiaan dan salah jika cenderung menimbulkan penderitaan. Kebahagiaan yang dimaksud tidak hanya melibatkan pelaku tindakan, tetapi juga semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Utilitarianisme adalah teori yang menekankan bahwa keputusan yang benar secara moral adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar atau konsekuensi terbaik. Sebaliknya, pilihan yang tidak menghasilkan hasil optimal dianggap salah.

Dalam konteks ini, pilihan yang memberikan manfaat terbanyak juga diharapkan meminimalkan konsekuensi buruk. Ini berarti bahwa beberapa alternatif dapat dianggap benar, meskipun salah satu pilihan mungkin menghasilkan akibat yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh, semua dokter gigi dapat menyebabkan rasa sakit, tetapi tingkat rasa sakit yang ditimbulkan bervariasi. Oleh karena itu, dokter gigi yang paling tepat untuk dipilih adalah yang dapat meminimalkan rasa sakit, sehingga mengedepankan prinsip utilitarianisme dalam praktik medis.

Bagi kaum utilitarian, "yang baik" diartikan sebagai utilitas, yang merujuk pada kesejahteraan manusia. Menurut Jeremy Bentham, utilitas adalah sifat suatu objek yang dapat menghasilkan manfaat, kesenangan, atau kebahagiaan, serta mencegah kerugian atau penderitaan. Ini dijelaskan dalam karya Bentham yang berjudul "Perkenalan ke Prinsip Moral dan Perundang-undangan" pada tahun 1789.

Ada beberapa jenis utilitarianisme, namun untuk tujuan ini, kita akan fokus pada dua bentuk utama: utilitarianisme umum dan utilitarianisme aturan. Utilitarianisme umum menilai tindakan berdasarkan konsekuensi keseluruhan dari tindakan tersebut, sementara utilitarianisme aturan menekankan pentingnya mengikuti aturan yang, jika diterapkan secara konsisten, akan menghasilkan hasil terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua pendekatan ini menawarkan cara berbeda dalam mengevaluasi tindakan moral berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan penderitaan.

Utilitarianisme Tindakan

Utilitarianisme tindakan menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap benar jika dan hanya jika tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi terbaik. Menurut pandangan ini, yang menentukan kebenaran suatu tindakan adalah hasil yang ditimbulkan. Dengan kata lain, tindakan yang paling tepat dalam situasi tertentu adalah tindakan yang menghasilkan hasil terbaik di antara semua pilihan yang tersedia pada waktu dan tempat tersebut.

Sebaliknya, tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang lebih buruk dianggap salah. Misalnya, berbohong akan dianggap salah dalam situasi tertentu jika mengatakan kebenaran atau tetap diam menghasilkan konsekuensi yang lebih baik. Namun, berbohong bisa dianggap benar dalam konteks tertentu jika hasil dari kebohongan tersebut lebih menguntungkan secara keseluruhan dibandingkan dengan mengatakan kebenaran atau tetap diam. Ini menunjukkan bahwa penilaian moral dalam utilitarianisme tindakan sangat bergantung pada analisis konsekuensi dari setiap pilihan yang ada.

Menurut utilitarianisme tindakan, suatu tindakan tidak dapat dinilai sebagai benar atau salah secara absolut; penilaian tersebut bergantung pada situasi di mana tindakan itu dilakukan. Oleh karena itu, tindakan seperti mencuri, membunuh, atau berbohong dapat dianggap benar atau salah tergantung pada konteksnya. Misalnya, mencuri dapat dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi terbaik.

Sebagai contoh, jika seseorang, sebut saja tarmin, mencuri makanan dari joko, seorang yang kaya di desa, demi menyelamatkan kehidupan anggota keluarganya yang sedang kelaparan, maka pencurian tersebut bisa dianggap benar dalam konteks itu. Dalam pandangan ini, fokusnya adalah pada hasil akhir yang dihasilkan dari tindakan tersebut, bukan pada tindakan itu sendiri yang dianggap intrinsik baik atau buruk.

Yakobus Rachel yang merangkum bertindak utilitarianisme di dalam itu mengikuti ketentuan:

Pertama, tindakan dinilai benar atau salah semata-mata berdasarkan konsekuensinya; tidak ada faktor lain yang dianggap penting. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi terbaik. Kedua, dalam menilai konsekuensi tersebut, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, tindakan yang benar adalah yang menciptakan keseimbangan terbesar dari kebahagiaan dibandingkan dengan ketidakbahagiaan.

Ketiga, saat menghitung kebahagiaan dan ketidakbahagiaan yang mungkin ditimbulkan, tidak ada individu yang kebahagiaannya harus dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan setiap individu adalah sama pentingnya. Ini mencerminkan prinsip egalitarian dalam utilitarianisme, di mana setiap orang memiliki nilai yang setara dalam perhitungan moral.

Salah satu kesulitan dengan utilitarianisme tindakan adalah bahwa ia sering kali bertentangan dengan hati nurani kita dan keyakinan mendalam tentang keadilan dan hak asasi. Misalnya, banyak dari kita meyakini bahwa dalam banyak kasus, menyiksa seseorang adalah salah, bahkan jika tindakan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi terbaik. Gagasan tentang hak pribadi, yang menempatkan batasan pada bagaimana individu dapat diperlakukan, bertentangan dengan prinsip utilitarian, yang lebih fokus pada hasil keseluruhan.

Secara umum, keyakinan mendalam kita tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan dapat bertentangan dengan apa yang dipandang sebagai tindakan benar dalam utilitarianisme. Untuk mengatasi masalah ini, banyak kaum utilitarian memilih beralih ke utilitarianisme aturan, yang mengedepankan penerapan aturan-aturan tertentu yang, jika diikuti secara konsisten, akan menghasilkan hasil terbaik bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan hak asasi dalam analisis moral mereka.

Aturan Utilitarianisme

Menurut utilitarianisme aturan, suatu tindakan dianggap benar jika dan hanya jika tindakan tersebut sesuai dengan seperangkat prinsip atau aturan yang dirancang untuk menghasilkan konsekuensi terbaik secara keseluruhan. Berbeda dengan utilitarianisme tindakan yang menilai kebenaran suatu tindakan berdasarkan hasil spesifik yang dihasilkan, utilitarianisme aturan lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan yang telah terbukti memberikan hasil yang positif dalam banyak situasi.

Aturan-aturan ini mengatur tindakan dan diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar jika diterapkan secara konsisten. Dengan kata lain, suatu tindakan dinilai benar jika sesuai dengan aturan yang memiliki konsekuensi terbaik ketika diikuti oleh individu dalam masyarakat. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dengan prinsip utilitarian, sehingga menciptakan kerangka moral yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

Misalnya, anggaplah aturan-aturan berikut adalah anggota dari himpunan aturan-aturan tersebut kesesuaian yang menghasilkan itu terbaik konsekuensi:

- ✚ Setiap orang sebaiknya menyampaikan kebenaran.
- ✚ Tidak seharusnya seseorang mencuri milik orang lain.

- ✚ Tidak seharusnya seseorang menyiksa orang lain.
- ✚ Setiap orang sebaiknya membantu mereka yang sedang membutuhkan.
- ✚ Setiap orang berhak untuk mengembangkan bakatnya.

Misalkan dalam suatu situasi tertentu, berbohong menghasilkan konsekuensi terbaik dibandingkan dengan tindakan alternatif yang dapat saya lakukan. Berdasarkan pandangan utilitarianisme tindakan, kebohongan dalam konteks ini mungkin dianggap sebagai tindakan yang benar. Namun, menurut utilitarianisme aturan, berbohong akan dianggap salah karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yang dirancang untuk menghasilkan konsekuensi terbaik secara keseluruhan.

Dalam utilitarianisme aturan, fokusnya adalah pada penerapan aturan yang konsisten yang terbukti memberikan hasil positif dalam banyak situasi. Oleh karena itu, meskipun berbohong mungkin tampak menguntungkan dalam kasus tertentu, pelanggaran terhadap aturan yang ada dapat dianggap tidak etis, karena dapat merusak kepercayaan dan integritas dalam jangka panjang.

Utilitarianisme aturan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap salah jika tindakan tersebut melanggar aturan yang, jika diikuti oleh semua orang, akan menghasilkan konsekuensi buruk. Sebagai contoh, bayangkan Anda dan teman Anda sedang berjalan di sebuah kebun buah. Teman Anda mengusulkan untuk memetik beberapa apel, tetapi Anda menolak, mengatakan bahwa mencuri adalah salah. Teman Anda mungkin berargumen bahwa mencuri dua apel dari kebun besar tidak akan merugikan pemiliknya dan akan memberi kalian kesenangan. Namun, inti dari utilitarianisme aturan adalah bahwa pelanggaran terhadap aturan "Jangan mencuri" dianggap salah, bukan hanya karena dalam situasi ini mencuri dapat membawa konsekuensi buruk, tetapi juga karena pelanggaran tersebut dapat mengarah pada hasil yang lebih buruk jika semua orang mengikuti pola perilaku yang sama.

Pertanyaan yang harus diajukan adalah, "Apa yang terjadi jika semua orang melakukan itu?" Jika semua orang merasa berhak untuk memetik apel tanpa izin, pendapatan pemilik kebun akan hancur, dan sistem kepemilikan akan terganggu. Oleh karena itu, mencuri apel dalam kasus ini dianggap salah, karena jika semua orang melakukannya, itu akan menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Aturan Emas

Aturan emas, yang juga dikenal sebagai etika timbal balik, mengandung prinsip bahwa kita seharusnya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam konteks ini, Parlemen Agama-agama Dunia, sebuah organisasi internasional yang memfasilitasi dialog antaragama, menganggap aturan emas sebagai inti dari banyak ajaran agama besar di dunia.

Sebagai contoh, Presiden AS, John F. Kennedy, pada tahun 1963, mengacu pada aturan emas dalam pidato anti-segregasi yang disampaikannya saat pendaftaran pertama mahasiswa kulit hitam di Universitas Alabama. Dia meminta orang kulit putih untuk mempertimbangkan bagaimana rasanya diperlakukan sebagai warga negara kelas dua hanya karena warna kulit mereka. Dengan meminta masyarakat untuk mengubah perspektif mereka, Kennedy menekankan pentingnya empati dan pemahaman dalam menciptakan keadilan dan

kesetaraan.

Kennedy mengajak orang kulit putih untuk membayangkan diri mereka sebagai orang kulit hitam yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya, seperti akses ke sekolah terbaik, restoran umum, atau tempat duduk di bus. Dia yakin bahwa mereka tidak akan senang diperlakukan dengan cara demikian, meskipun itulah yang mereka lakukan terhadap orang lain. Dia mengajukan pertanyaan mendasar: "Apakah kita akan memperlakukan sesama warga Amerika seperti kita ingin diperlakukan?"

Aturan emas ini dapat dipahami dengan jelas sebagai: "Perlakukan orang lain hanya dengan cara yang Anda inginkan diperlakukan dalam situasi yang sama." Untuk menerapkannya, kita perlu membayangkan diri kita dalam posisi orang lain yang menerima tindakan tersebut. Jika kita berperilaku dengan cara tertentu terhadap orang lain, dan merasa enggan jika diperlakukan dengan cara yang sama, maka kita telah melanggar aturan ini. Penerapan aturan emas memerlukan pengetahuan dan imajinasi: kita harus memahami dampak tindakan kita terhadap orang lain dan mampu membayangkan diri kita di posisi mereka. Dengan pengetahuan, imajinasi, dan aturan emas, kita dapat mengembangkan pemikiran moral yang lebih baik.

Aturan emas sebaiknya dipahami sebagai prinsip konsistensi dalam moralitas. Ini bukan pengganti norma moral yang ada, melainkan sebuah alat untuk menguji koherensi tindakan kita terhadap keinginan kita sendiri. Aturan ini tidak memberikan jawaban pasti tentang tindakan mana yang benar atau salah; sebaliknya, ia menuntut agar tindakan kita tidak bertentangan dengan harapan yang kita miliki untuk diperlakukan dalam situasi serupa. Jika kita melanggar aturan emas, kita sebenarnya melanggar semangat keadilan dan kepedulian yang mendasari moralitas.

Aturan emas, yang ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia, sangat relevan sebagai standar dalam menyelesaikan konflik. Dalam era globalisasi, di mana interaksi antarbudaya semakin meningkat, kebutuhan akan standar umum seperti ini menjadi semakin mendesak. Dengan menggunakan prinsip ini, kita dapat mengembangkan dialog yang lebih konstruktif dan saling menghormati, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan pemahaman dan perdamaian di antara komunitas yang berbeda.

Kategoris Imperatif

Menurut Immanuel Kant (1998), imperatif adalah proposisi yang mengharuskan suatu tindakan dilakukan. Ada dua jenis imperatif: imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, memberikan panduan tentang cara terbaik untuk mencapainya. Misalnya, jika seseorang ingin mendapatkan nilai 'A' dalam mata kuliah Profesi dan Etika Hukum, maka ia harus belajar dengan giat. Dalam hal ini, tindakan belajar giat bersifat kondisional dan tergantung pada tujuan untuk meraih nilai tersebut.

Sebaliknya, imperatif kategoris bersifat mutlak dan tidak bergantung pada tujuan tertentu. Ini menyatakan bahwa suatu tindakan harus dilakukan, tanpa mempertimbangkan hasilnya. Kant menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan prinsip moral universal, yang berlaku untuk semua orang dalam situasi serupa, terlepas dari tujuan

individu. Dengan demikian, imperatif kategoris mengajak kita untuk bertindak berdasarkan prinsip yang dapat diterima secara umum, menjadikan moralitas sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Imperatif kategoris adalah perintah yang bersifat tidak bersyarat dan mengikat bagi semua orang di setiap waktu. Berbeda dengan imperatif hipotetis, yang bergantung pada kondisi atau tujuan tertentu, imperatif kategoris memerintahkan tindakan yang dianggap intrinsik benar, terlepas dari hasil atau motivasi individu. Ini berarti bahwa tindakan yang sesuai dengan imperatif kategoris harus dilakukan hanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.

Kant mengemukakan bahwa prinsip-prinsip moral harus universal dan dapat diterima oleh semua orang. Dengan demikian, imperatif kategoris mendorong individu untuk bertindak berdasarkan prinsip yang dapat diterapkan secara universal, seperti "Bertindaklah hanya menurut maksima yang dapat Anda kehendaki menjadi hukum universal." Dengan cara ini, imperatif kategoris menekankan pentingnya integritas dan konsistensi moral dalam pengambilan keputusan. Meskipun Kant berpendapat bahwa hanya ada satu imperatif kategoris dalam moralitas, ia mengemukakan beberapa formulasi untuk menjelaskan konsep ini:

- ❖ **Prinsip Kemanusiaan:** Bertindaklah dengan cara yang selalu menghormati kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam diri orang lain, tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga sebagai tujuan itu sendiri. Ini menekankan pentingnya menghargai martabat setiap individu.
- ❖ **Prinsip Kerajaan Hukum:** Bertindaklah seolah-olah tindakan Anda menjadi hukum universal yang mengatur anggota suatu kerajaan moral. Dengan kata lain, setiap tindakan yang Anda lakukan seharusnya dapat diterima sebagai prinsip hukum yang mengatur perilaku semua orang.
- ❖ **Prinsip Universalitas:** Bertindaklah hanya sesuai dengan maksima yang bisa Anda kehendaki untuk dijadikan hukum universal. Ini berarti bahwa tindakan Anda harus dapat diterapkan secara konsisten kepada semua orang dalam situasi yang sama.

Menurut rumusan pertama dari imperatif kategoris Kant, kita memiliki kewajiban untuk tidak bertindak berdasarkan maksim yang dapat menghasilkan kontradiksi logis ketika diuniversalkan. Maksim ini adalah prinsip atau aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan kita. Setiap tindakan memiliki maksim yang mendasarinya; misalnya, dalam tindakan "mencuri," maksim yang mendasarinya adalah "diperbolehkan untuk mencuri."

Selanjutnya, kita perlu mempertanyakan konsistensi maksim tersebut ketika diuniversalkan. Apakah maksim ini tetap dapat diterapkan jika semua orang melakukannya? Dalam konteks mencuri, jika semua orang mencuri, maka konsep kepemilikan pribadi akan hilang. Jika tidak ada kepemilikan, maka tindakan mencuri tidak akan memiliki makna. Dengan demikian, menguniversalkan maksim bahwa mencuri itu diperbolehkan akan menghasilkan situasi di mana tidak ada kepemilikan pribadi, dan akibatnya, tidak ada yang dapat dicuri. Oleh karena itu, maksim tersebut tidak dapat diterima secara moral, karena menciptakan kontradiksi logis yang merusak fondasi dari tindakan itu sendiri.

Karena maksim "mencuri itu boleh" tidak dapat diuniversalkan tanpa menghasilkan kontradiksi, kita memiliki kewajiban mutlak untuk tidak mengikutinya. Dengan menguniversalkan maksim tersebut, kita akan menciptakan situasi di mana tidak ada konsep kepemilikan pribadi; akibatnya, tidak ada yang bisa dicuri. Maka, menguniversalkan maksim ini bertentangan dengan dirinya sendiri dan tidak dapat diterima secara moral. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban sempurna untuk tidak mencuri.

Penyelidikan kita tidak berhenti di situ. Jika suatu maksim dapat diuniversalkan tanpa kontradiksi, kita harus menanyakan apakah keinginan untuk menjadikan maksim tersebut sebagai hukum universal akan menimbulkan pertentangan. Misalnya, dalam kasus maksim "tidak diperbolehkan untuk membantu orang miskin," kita dapat mempertimbangkan apakah maksim ini dapat diuniversalkan. Dalam hal ini, maksim tersebut tidak menimbulkan kontradiksi, karena membantu orang lain adalah nilai moral yang diakui secara universal. Dengan demikian, maksim ini dapat diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip moral yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa tindakan memberi bantuan kepada yang membutuhkan adalah sesuatu yang dapat diterima secara moral dan bahkan diharapkan dalam konteks etika Kantian.

Namun, tidak ada seorang pun yang secara konsisten menginginkan maksim "tidak diperbolehkan untuk membantu orang miskin" menjadi hukum universal, karena bahkan orang terkaya di antara kita dapat saja mendapati diri mereka dalam situasi yang membutuhkan bantuan. Jika sebuah maksim dapat diuniversalkan tetapi tidak dapat diinginkan tanpa kontradiksi, maka individu memiliki kewajiban yang tidak sempurna untuk tidak mengikutinya. Misalnya, seseorang yang makmur memiliki kewajiban tidak sempurna untuk membantu mereka yang dalam kesulitan.

Rumusan kedua menyatakan bahwa kita tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi kita dan tidak boleh memandang mereka sebagai alat semata. Sebaliknya, kita harus menghargai orang lain sebagai tujuan akhir, bukan sekadar sarana. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada nilai kemanusiaan; manusia adalah makhluk yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, jika kita menggunakan orang lain hanya untuk kepentingan kita, tindakan tersebut menjadi tidak bermoral. Singkatnya, kita harus menghindari perlakuan terhadap orang lain sebagai sarana belaka dan sebaliknya, memperlakukan mereka sebagai tujuan dalam dirinya sendiri.

Kita menggunakan orang lain hanya sebagai alat jika tindakan kita mencerminkan prinsip yang tidak dapat mereka setuju. Kant tidak menyatakan bahwa ada yang salah dengan menggunakan seseorang sebagai sarana dalam konteks kerjasama yang disepakati. Dalam skema tindakan kooperatif, setiap pihak terlibat dengan kesadaran dan persetujuan. Misalnya, pemerintah yang menyediakan makanan bersubsidi kepada badan-badan penanggulangan bencana menggunakan dan dimanfaatkan oleh badan-badan tersebut. Dalam konteks ini, setiap pihak dalam transaksi memahami bahwa mereka memiliki prinsip tindakannya sendiri, bukan sekadar objek untuk digunakan.

Namun, ada situasi di mana satu pihak dalam transaksi tidak hanya memanfaatkan pihak lain, tetapi melakukannya dengan cara yang berdasarkan prinsip-prinsip yang secara

moral tidak dapat diterima. Misalnya, dalam kasus janji palsu, pihak yang menerima janji tersebut tidak hanya dieksploitasi tetapi juga diperlakukan sebagai alat semata. Ini terjadi karena mereka tidak dapat memberikan persetujuan terhadap prinsip atau rencana penipuan yang mendasari janji palsu tersebut, meskipun penampilan situasinya tampak sebaliknya. Dalam konteks ini, perlakuan terhadap individu sebagai sarana belaka melanggar prinsip moral yang mendasar.

Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap prinsip moral yang mendasari interaksi antara individu terlihat jelas, terutama ketika berkaitan dengan penipuan dan pemaksaan. Ketika tindakan seseorang didasarkan pada maksim penipuan, mereka menggunakan orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan hak dan martabat orang lain. Tindakan ini tidak hanya salah secara moral, tetapi juga merusak dasar kepercayaan dalam interaksi sosial.

Demikian pula, pemaksaan juga melanggar prinsip moral yang sama. Pemaksaan menghilangkan kebebasan individu untuk memberikan persetujuan yang tulus. Ketika seseorang dihadapkan pada ancaman atau tekanan, pilihan mereka tidak sepenuhnya bebas; mereka terpaksa memberikan izin untuk menghindari konsekuensi yang lebih buruk. Dalam hal ini, persetujuan yang diberikan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah, karena tidak ada pilihan nyata. Kantian berargumen bahwa tindakan yang memanfaatkan orang lain baik melalui penipuan maupun pemaksaan adalah pelanggaran serius terhadap etika. Dalam kasus pemaksaan, meskipun mungkin ada beberapa elemen negosiasi, sering kali perbedaan antara tawar-menawar yang adil dan pemaksaan menjadi samar. Namun, dalam situasi yang lebih jelas, di mana satu pihak secara eksplisit mengancam pihak lain, tidak ada keraguan bahwa tindakan tersebut merugikan dan tidak adil.

Dengan demikian, baik penipuan maupun pemaksaan menyalahi prinsip Kantian yang menekankan perlunya memperlakukan setiap individu sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang lain. Dalam konteks ini, maksud dari pemaksaan adalah situasi di mana satu pihak menggunakan ancaman atau tekanan untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Ini jelas melanggar prinsip moral Kantian yang menekankan perlunya menghormati martabat dan kebebasan individu.

Contoh rentenir yang mengancam petani di desa dunia ketiga sangat menggambarkan hal ini. Ketika rentenir mengancam untuk tidak memberikan pinjaman yang diperlukan, ia menciptakan situasi di mana petani tidak memiliki pilihan yang nyata. Petani terpaksa menerima tawaran tersebut karena ancaman kehilangan kelangsungan hidup mereka. Dalam hal ini, petani diperlakukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan rentenir, tanpa memperhitungkan hak dan kebutuhan mereka sendiri.

Meskipun transaksi tersebut mungkin terlihat seperti kesepakatan komersial biasa, kenyataannya adalah bahwa di baliknya terdapat prinsip paksaan yang mendasari. Tindakan semacam ini menciptakan ketidakadilan, karena pihak yang lebih kuat memanfaatkan posisi mereka untuk mengeksploitasi yang lebih lemah. Ini bertentangan dengan etika Kantian yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri,

bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang lain. Dengan demikian, dalam konteks interaksi sosial dan ekonomi, penting untuk mengenali dan menolak praktik-praktik yang bersifat koersif dan eksploitasi, demi menjaga integritas dan martabat setiap individu.

Untuk menghindari paksaan, sangat penting bahwa semua tindakan dan kesepakatan didasarkan pada prinsip-prinsip yang memungkinkan setiap pihak untuk memiliki pilihan yang nyata dan adil. Dalam konteks negosiasi atau transaksi, ini berarti bahwa semua pihak harus dapat memilih untuk menerima atau menolak tawaran tanpa adanya tekanan atau ancaman. Semakin rentan posisi pihak lain dalam suatu transaksi, semakin sedikit kemungkinan mereka memiliki kekuatan untuk menolak tawaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang memastikan bahwa tindakan tersebut non-koersif dan tidak memanfaatkan ketidakberdayaan pihak yang lebih lemah.

Menurut pandangan Kantian (1997), tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip paksaan atau penipuan tidak dapat dianggap sah. Jika suatu tindakan mengabaikan kebebasan dan martabat individu, maka itu adalah tindakan yang salah. Dalam hal ini, baik individu, lembaga, maupun negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak memperlakukan pihak lain secara tidak adil.

Untuk mencapai keadilan dalam interaksi sosial, tidak cukup hanya mengikuti prosedur formal atau menunjukkan tanda-tanda kerjasama. Kita juga harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk membuat keputusan yang berarti, dan bahwa mereka tidak dipaksa untuk menerima tawaran yang merugikan mereka. Dengan memberikan perhatian khusus pada keadilan dan hak-hak individu, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua orang diperlakukan dengan hormat dan adil.

Dalam pandangan Kant, mengobati orang lain sebagai akhir dalam diri mereka sendiri melibatkan pengakuan terhadap martabat dan nilai intrinsik setiap individu. Ini berarti kita tidak hanya harus menghindari memperlakukan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, tetapi juga harus menghormati mereka sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan prinsip-prinsip tindakan mereka sendiri.

Namun, penting untuk diingat bahwa manusia, meskipun rasional, juga memiliki batasan. Kita semua dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, kebutuhan, dan kelemahan. Oleh karena itu, memperlakukan orang lain sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri tidak hanya melibatkan pengakuan terhadap kemampuan mereka untuk membuat pilihan rasional, tetapi juga pemahaman terhadap konteks dan kondisi yang memengaruhi keputusan mereka.

Dalam situasi di mana individu atau kelompok merasa tertekan atau tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, kita berisiko gagal dalam kewajiban kita untuk menghormati mereka sebagai individu yang otonom. Kewajiban moral kita, menurut Kant, mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka, serta untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan kita dapat memperkuat atau merugikan kebebasan dan martabat mereka.

Dengan demikian, melaksanakan prinsip ini berarti berusaha untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung otonomi dan kemampuan individu, serta menghargai peran mereka sebagai agen moral yang aktif dalam hidup mereka sendiri. Ini mengharuskan kita untuk mengedepankan keadilan, empati, dan kesadaran sosial dalam setiap interaksi kita.

Keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan mencerminkan kompleksitas kehidupan sehari-hari. Manusia tidak beroperasi sebagai kalkulator rasional yang ideal, di mana setiap tindakan dapat dievaluasi dengan sempurna berdasarkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sebaliknya, keputusan kita sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor emosional, sosial, dan situasional yang membentuk pandangan kita.

Pertama, keterbatasan kognitif kita membuat sulit untuk selalu mengakses dan mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Kita mungkin tidak mampu mengevaluasi semua pilihan yang tersedia secara menyeluruh, terutama dalam situasi yang kompleks atau berisiko. Ini mengarah pada keputusan yang sering kali didasarkan pada heuristik atau intuisi, bukan analisis yang menyeluruh.

Kedua, otonomi manusia sering kali terhambat oleh berbagai faktor eksternal, seperti ketergantungan sosial, situasi ekonomi, atau tekanan dari lingkungan. Keterbatasan ini menciptakan kondisi di mana individu mungkin merasa terpaksa untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan atau nilai-nilai mereka. Misalnya, seseorang mungkin terpaksa menerima tawaran pekerjaan yang tidak ideal karena kebutuhan finansial mendesak, meskipun itu tidak sejalan dengan aspirasi pribadi mereka.

Oleh karena itu, dalam konteks etika, penting untuk mempertimbangkan realitas ini saat kita berbicara tentang kewajiban moral. Kita harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung otonomi individu, dengan memahami bahwa setiap orang memiliki konteks unik yang mempengaruhi keputusan mereka. Ini juga berarti mengakui bahwa tindakan yang dianggap moral atau tidak moral bisa sangat bergantung pada keadaan di mana individu berada. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih empatik dan memahami kompleksitas manusia, kita dapat lebih baik memenuhi kewajiban kita untuk menghormati dan mendukung orang lain dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Kesimpulan

Karakteristik yang diperlukan dari sebuah profesi adalah pelatihan yang ekstensif, komponen intelektual dalam pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Diantara sekian banyak profesi, salah satunya adalah profesi hukum. Aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota profesi hukum disebut *etika hukum*. Ini adalah sub- cabang filsafat. Isu moral adalah pertanyaan tentang nilai dan dilema moral adalah situasi dalam yang mana seseorang tidak dapat menghindari keputusan ketika dua atau lagi konflik nilai. Itu Masalah moral dan dilema yang timbul dalam kehidupan profesional dapat diselesaikan dengan mengacu pada kaidah etika hukum atau etika profesional lainnya dan jika tidak ada, mengacu pada teori kewajiban moral dalam moral filsafat seperti sebagai utilitarianisme, keemasan aturan dan kategoris imperatif. Teori-teori ini mencoba untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Menurut utilitarianisme, hak tindakan adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi terbaik. Jumlah kebahagiaan penting untuk menentukan konsekuensi terbaik dari suatu tindakan. Tindakan yang tepat dari sudut pandang emas Aturan adalah tindakan dimana

pelaku tindakan tersebut menginginkan tindakan yang sama dilakukan kepada orang lain. Itu aturan adalah Mengerjakan bukan Mengerjakan ke yang lain Apa Anda Mengerjakan bukan ingin ke menjadi Selesai ke Anda.

Ini aturan memiliki ekspresi yang ditemukan di dalam Afrika tradisi, Dan Besar agama dari itu dunia menyukai Islam, Kekristenan, agama budha, Hinduisme Dan yang lain. Menurut Imanuel milik Kant teori dari kategoris Tindakan yang benar dan penting adalah tindakan yang pada hakikatnya baik, apa pun konsekuensinya. Menurut salah satu rumusan Kant rumus Imperatif Kategoris, seseorang harus bukan memperlakukan orang lain sebagai belaka berarti dan sebagai waktu yang sama sebaiknya memperlakukan orang lain sebagai berakhir di dalam diri.

Studi Kasus 1.1

Anjar menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan. Dia hampir tidak bisa tidur. Dia merintih kesakitan siang dan malam. Bahkan obat penghilang rasa sakit tidak dapat meredakan rasa sakitnya sedetik pun. Kerabatnya dengan dukungan masyarakat bisa mengirim anjar ke luar negeri untuk berobat. Namun tidak ada harapan untuk berobat. Jadi satu menit kehidupan anjar menjadi penderitaan baginya dan masalah bagi keluarganya. Satu-satunya kelegaan bagi anjar dan keluarganya relatif adalah kematian anjar. Makhluk menyadari hal ini anjar memutuskan untuk bunuh diri namun dia tidak bisa bunuh diri karena dia lumpuh total. Karena itu, Anjar memohon kepada teman dekatnya, Yanto, untuk membunuhnya. Apa akan menjadi milikmu keputusan jika Anda adalah Yanto?

- a. Di dalam kelompok mengadakan A survei dari bukan lebih sedikit dibandingkan 50 orang tentang milik mereka keputusan Dan alasan untuk milik mereka keputusan jika mereka adalah ditempatkan di dalam itu sepatu dari Dedi?
- b. Bisa mereka menghindari memutuskan? Mengapa?
- c. Menganalisa itu prinsip pada yang mereka membuat milik mereka keputusan.
- d. Apa adalah itu nilai-nilai itu konflik di dalam ini kasus?

BAB 2

LEGAL PROFESI

Pendahuluan

Dalam bab sebelumnya, kita telah membahas konsep etika, etika profesi, dan etika hukum. Kita juga telah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri profesi. Pemahaman tentang konsep profesi sangat penting, terutama dalam konteks profesi hukum, karena profesi hukum merupakan salah satu jenis profesi yang ada.

Sebagai salah satu kategori profesi, penting untuk memahami aspek-aspek terkait keanggotaan dalam profesi tersebut, regulasi yang mengatur profesi, serta sikap masyarakat terhadap profesi itu. Dalam bab ini, kita akan memulai dengan membahas pengertian dan hakikat profesi hukum, pengakuan legal terhadap profesi, asosiasi yang terkait, hak konstitusional dalam praktik profesi hukum, ketidakpuasan terhadap hukum profesi, serta praktik-praktik yang tidak sah dalam bidang hukum.

Untuk menyelesaikan bab ini dengan baik, siswa diharapkan menjawab pertanyaan yang disediakan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dan melaksanakan proyek yang ditugaskan. Penggunaan sumber-sumber yang disebutkan dalam bab ini sangat dianjurkan.

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ke 2 ini diharapkan, siswa akan menjadi mampu memahami:

- Membedakan legal profesi dari lainnya Profesi
- Daftar persyaratan untuk penerimaan ke legal profesi
- Menganalisa Konstitusional Kanan untuk memilih Dan latihan legal profesi
- Jelaskan sikap dari itu Anggota dari itu masyarakat terhadap legal profesi
- Membahas itu peran dari batang asosiasi di dalam itu legal profesi
- Menjelaskan itu arti Dan Efek dari tidak sah praktik dari hukum

2.1 MAKNA DARI LEGAL PROFESI

Raja Kishore Prasad, seorang hakim di India, mendefinisikan profesi hukum sebagai berikut:

“profesi hukum bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga sebuah panggilan untuk melayani keadilan dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab dalam praktik hukum. Profesi ini tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga komitmen untuk memperjuangkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dengan demikian, profesi hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan.”

Myneni menekankan bahwa tugas pengacara mencerminkan peran mereka sebagai anggota profesi hukum. Dari penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa profesi hukum tidak hanya mencakup semua orang yang terlatih dalam bidang hukum, seperti hakim dan jaksa, tetapi lebih khusus merujuk pada pengacara. Namun, profesi hukum juga melibatkan hakim, jaksa, pendidik hukum, dan berbagai profesional lainnya.

Sebagai contoh, salah satu penulis menggambarkan profesi hukum dengan merujuk pada keseluruhan peran pekerjaan yang berorientasi pada administrasi dan pemeliharaan sistem hukum. Profesi hukum mencakup pengacara, hakim, konselor, serta para ahli di bidang pendidikan hukum dan penelitian.

Profesi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat yang kompleks. Menurut Justice McCarty “alternatif terhadap pemerintahan hukum adalah kekacauan.” Berbeda dengan profesi lainnya, yang umumnya diambil semata-mata untuk mencari nafkah, profesi hukum dianggap sebagai profesi yang bermartabat tinggi. Dengan demikian, profesi hukum lebih merupakan panggilan dibandingkan sekadar bisnis, dan perbedaan antara profesi hukum dan bisnis bersifat mendasar.

Profesi hukum adalah bidang pekerjaan yang memerlukan pelatihan lanjutan dalam hukum. Di sisi lain, bisnis melibatkan kegiatan membeli, menjual, atau menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Dengan demikian, seorang profesional hukum dapat berperan sebagai pebisnis, namun sebaliknya, seorang pebisnis tidak dapat menjalankan praktik hukum.

Profesi hukum berkaitan erat dengan administrasi peradilan, di mana tujuan utamanya adalah menjaga kebebasan dan mencapai keadilan. Biaya yang dikenakan oleh pengacara atau profesional hukum lainnya berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kebebasan dan keadilan. Biaya ini hanya merupakan honorarium dan tidak tergantung pada hasil kemenangan atau kekalahan kasus yang ditangani. Dalam konteks ini, apakah pengacara menang atau kalah, biaya tetap berlaku.

Sebaliknya, dalam dunia bisnis, kerugian adalah aspek penting karena tujuan utama adalah memperoleh laba. Ketika total pendapatan lebih rendah dari total biaya, pebisnis akan mengalami kerugian, yang dapat memaksa mereka keluar dari pasar.

Profesional hukum bekerja demi kesejahteraan masyarakat; mereka melindungi ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Namun, tidak semua bisnis memberikan manfaat yang sama untuk masyarakat. Contohnya, penjualan alkohol dan narkoba dapat menjadi sumber berbagai masalah sosial dan ekonomi. Bisnis-bisnis tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua bisnis dianggap baik untuk masyarakat, sementara profesi hukum selalu berkontribusi positif bagi kesejahteraan sosial.

Kompetisi juga menjadi perbedaan lain antara profesi hukum dan bisnis. Banyak iklan di media menunjukkan persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Sebaliknya, dalam profesi hukum, tidak ada kompetisi yang jelas karena semua profesional hukum memiliki tujuan yang sama: kebebasan dan keadilan. Oleh karena itu, profesi hukum ditandai dengan kerjasama antara para profesionalnya. Mereka memiliki musuh bersama, yaitu ketidakadilan dan

pelanggaran terhadap kebebasan. Kerjasama ini juga penting antara pengadilan dan pengacara, di mana para pengacara dan jaksa publik seharusnya mendukung hakim dalam memberikan keputusan yang adil.

Penerimaan ke Legal Profesi

Penerimaan ke profesi berbeda di berbagai yurisdiksi. Berikut ini adalah pengalaman di beberapa negara:

a) Kanada

Untuk menjadi pengacara di Kanada, seseorang harus melewati tiga tahap pendidikan hukum yang berbeda. Tahapan ini meliputi: tahap pra-hukum, tahap akademik, dan tahap kejuruan. Tahap pertama terdiri dari minimal dua hingga biasanya empat tahun studi di universitas dalam program gelar sarjana. Tahap kedua adalah program gelar hukum selama tiga tahun. Tahap terakhir melibatkan pengalaman praktik di bawah bimbingan praktisi hukum, yang dikenal sebagai periode magang, di mana durasi dan jenis kursus penerimaan bervariasi. Secara keseluruhan, pendidikan hukum di Kanada biasanya memerlukan waktu tujuh hingga delapan tahun sebelum seseorang dapat berpraktik.

Periode magang dengan praktisi hukum yang berpengalaman, atau artikel magang, berlangsung selama sekitar dua belas bulan. Selain itu, siswa juga harus mengikuti kursus penerimaan pengacara, yang durasi dan kompleksitasnya bervariasi, biasanya dilakukan selama atau setelah masa magang. Di akhir periode magang, siswa harus berhasil lulus ujian kualifikasi, yang dikenal sebagai Ujian Penerimaan. Selama masa magang, mahasiswa hukum harus mencari tempat di firma hukum atau dengan praktisi hukum melalui pengajuan aplikasi tertulis dan wawancara.

Tujuan utama dari magang ini adalah untuk mempersiapkan lulusan hukum agar siap berpraktik, khususnya untuk menerapkan hukum acara dan hukum substantif yang telah mereka pelajari di sekolah hukum. Magang juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktik dalam konteks situasi nyata dan membentuk sikap profesional melalui paparan terhadap nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan tradisi dalam profesi hukum.

b) Afrika selatan

Di Afrika Selatan, untuk menjadi pengacara, seseorang harus melewati empat tahap pendidikan dan kualifikasi, serta lulus ujian advokat. Tahap pertama adalah pendidikan universitas selama empat tahun untuk meraih gelar LLB. Tahap kedua mencakup kehadiran di sekolah pelatihan hukum praktis. Tahap ketiga adalah menjalani program kepaniteraan di bawah bimbingan seorang pengacara yang berpraktik, dan tahap terakhir melibatkan pekerjaan di dalam perusahaan hukum yang berfokus pada kepentingan publik.

Setiap lulusan sekolah hukum diwajibkan untuk melengkapi gelar LLB mereka dengan mengikuti kursus praktik selama lima minggu di sekolah pelatihan hukum praktis. Jika seorang lulusan dapat mengikuti kursus pelatihan tambahan selama lima bulan, mereka hanya perlu menjalani satu tahun masa magang, bukan dua tahun. Tujuan kursus ini adalah untuk melengkapi pelatihan yang diberikan oleh firma hukum dengan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang diperlukan bagi seorang calon pengacara. Penekanan juga diberikan pada persiapan untuk Ujian Penerimaan.

Setiap lulusan hukum harus membuat kontrak kerja magang dengan seorang pengacara senior, yang dikenal sebagai prinsipal, yang telah berpraktik selama lebih dari tiga tahun. Lulusan dapat memenuhi kewajiban magang mereka di firma hukum swasta, klinik hukum, pusat keadilan, atau firma hukum yang fokus pada kepentingan publik. Dalam kontrak tersebut, calon pengacara berkewajiban untuk bekerja dengan tekun, jujur, dan dengan penuh rasa hormat terhadap prinsipal dan profesi. Sebagai imbalannya, prinsipal berjanji untuk memberikan instruksi yang tepat dalam praktik hukum, etika, dan pemahaman tentang profesi.

Tujuan dari bekerja di firma hukum yang berfokus pada kepentingan publik adalah memberikan pengalaman praktis kepada calon pengacara melalui posisi layanan masyarakat di klinik hukum yang diakreditasi oleh asosiasi hukum provinsi. Ini termasuk firma hukum kepentingan publik seperti Pusat Sumber Daya Hukum, klinik hukum berbasis universitas, dan pusat keadilan yang dikelola oleh Badan Bantuan Hukum. Klinik-klinik ini diwajibkan untuk mempekerjakan pengacara utama dengan pengalaman praktis minimal tiga tahun untuk mengawasi lulusan hukum dalam program pelayanan masyarakat. Calon pengacara akan muncul di pengadilan distrik, sementara pengacara utama akan hadir di pengadilan regional dan Pengadilan Tinggi.

Selain menjalani magang setelah lulus dari sekolah hukum, calon pengacara yang ingin berpraktik hukum juga harus lulus ujian yang terdiri dari empat bagian, termasuk hukum properti, etika, pembukuan, dan prosedur pengadilan. Lulusan dapat mengikuti ujian ini kapan saja, baik sebelum atau selama masa magang. Ujian ini bertujuan untuk menentukan apakah lulusan hukum memiliki kompetensi profesional yang diperlukan untuk berpraktik.

c) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, penerimaan dalam profesi advokat dan pengacara merupakan masalah yang diatur oleh masing-masing negara bagian. Pengacara tidak diizinkan untuk berpraktik secara nasional; mereka hanya dapat berpraktik di negara bagian tertentu. Setiap negara bagian memiliki aturan tersendiri mengenai penerimaan, dan lembaga pengadilan federal juga memiliki ketentuan yang berbeda. Di sebagian besar negara bagian, untuk memperoleh izin praktik hukum, seseorang harus lulus dari sekolah hukum, lulus ujian advokat negara bagian, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter moral yang baik.

Jika seorang pengacara ingin berpraktik di pengadilan federal, mereka harus diterima secara terpisah oleh pengadilan tersebut, karena setiap pengadilan federal memiliki kebijakan dan persyaratan sendiri. Biasanya, penerimaan diberikan atas usulan seorang pengacara yang sudah menjadi anggota pengadilan tersebut, yang dapat menjamin bahwa pemohon memiliki reputasi moral yang baik. Untuk diterima di pengadilan distrik federal, pemohon biasanya harus telah diterima di negara bagian tempat pengadilan itu berada. Sementara itu, penerimaan di pengadilan banding federal hanya memerlukan penerimaan di pengadilan

negara bagian mana pun. Untuk diterima di Mahkamah Agung Amerika Serikat, pemohon harus telah berpraktik di pengadilan negara bagian selama minimal tiga tahun.

d) Ethiopia

Penerimaan ke dalam profesi hukum di Ethiopia mirip dengan sistem di Amerika Serikat, di mana masing-masing yurisdiksi negara menetapkan persyaratan untuk praktik di pengadilan negara bagian. Untuk berpraktik di pengadilan federal, setiap warga negara Ethiopia harus memiliki salah satu dari tiga jenis lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keadilan, sesuai dengan Pasal 3 dan 7 dari Proklamasi Lisensi dan Registrasi Pengacara Pengadilan Federal Nomor 199/2000. Jenis lisensi tersebut adalah:

- Lisensi pembelaan di pengadilan federal pertama
- Lisensi pembelaan di pengadilan federal
- Lisensi pembelaan di pengadilan federal khusus

berikut ini adalah beberapa persyaratan umum untuk memperoleh lisensi.

- 1) Lulus dari lembaga yang diakui dan memiliki pengalaman.
- 2) Sesuai dengan kode, diadakan untuk mendukung administrasi keadilan.
- 3) Lulus sebagai tanda dalam proses pembelaan dan penyelidikan.
- 4) Tidak ada pengakuan atau pernyataan dalam pelanggaran yang menunjukkan ketidakpantasan dalam pelaksanaannya.
- 5) Dokumen bukti diperlukan untuk mendapatkan kebijakan Asuransi Ganti Rugi profesional.

2.2 ATURAN KONSTITUSI UNTUK MENJALANKAN PROFESI HUKUM

Pasal 41(2) Konstitusi Federal Demokratik Republik Ethiopia (FDRE) menyatakan bahwa setiap warga negara Ethiopia memiliki hak untuk memilih mata pencaharian, pekerjaan, dan profesi mereka. Dalam konteks ini, "profesi" mencakup setiap kegiatan yang menjadi sumber penghidupan seseorang, tidak hanya yang diakui oleh hukum atau kebiasaan, tetapi juga aktivitas yang dipilih secara bebas, meskipun tidak sesuai dengan definisi tradisional tentang profesi. Oleh karena itu, warga negara Ethiopia memiliki hak konstitusional untuk memilih profesi hukum sebagai sumber penghidupan mereka.

Konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau pengecualian terhadap hak ini. Artinya, satu-satunya syarat minimum untuk menikmati hak memilih profesi hukum adalah menjadi warga negara Ethiopia. Namun, Proklamasi No. 199/2000 menjelaskan bahwa tidak semua warga negara Ethiopia dapat berpraktik hukum; hanya mereka yang telah mempelajari hukum dan lulus ujian masuk yang diizinkan untuk melakukannya.

Sementara itu, Undang-Undang Dasar Jerman, di bawah Pasal 12(1) ayat 2, menyatakan bahwa praktik perdagangan, pekerjaan, dan profesi dapat diatur oleh atau berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini memberi wewenang kepada badan legislatif Jerman untuk membuat peraturan yang mempengaruhi pilihan atau praktik profesi. Namun, badan legislatif tidak dapat mengatur pilihan dan praktik profesi dengan cara yang sama. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah dalam mengatur pilihan profesi lebih terbatas

dibandingkan dengan pengaturan praktik profesi.

Ketidakpuasan dengan Legal Profesi

Pasal 41(2) Konstitusi Federal Demokratik Republik Ethiopia (FDRE) menyatakan bahwa setiap warga negara Ethiopia memiliki hak untuk memilih mata pencaharian, pekerjaan, dan profesi mereka. Dalam konteks ini, "profesi" mencakup setiap aktivitas yang menjadi sumber penghidupan seseorang, tidak hanya yang diakui oleh hukum atau kebiasaan, tetapi juga kegiatan yang dipilih secara bebas, meskipun tidak sesuai dengan definisi tradisional tentang profesi. Oleh karena itu, warga negara Ethiopia memiliki hak konstitusional untuk memilih profesi hukum sebagai sumber penghidupan mereka.

Karena tidak ada batasan yang ditetapkan, persyaratan minimum untuk menikmati hak memilih profesi hukum adalah menjadi warga negara Ethiopia. Dengan demikian, setiap warga negara Ethiopia berhak memilih profesi hukum. Namun, Proklamasi No. 199/2000 menjelaskan bahwa tidak semua warga negara Ethiopia dapat berpraktik hukum; hanya mereka yang telah belajar hukum dan berhasil lulus ujian masuk yang diizinkan untuk melakukannya.

Ketidakpuasan terhadap Profesi Hukum

Ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan peradilan, terutama dalam profesi hukum, bukanlah hal baru. Sejak lama, keluhan terhadap sistem hukum sudah ada, tetapi yang menjadi masalah adalah ketidakpuasan yang terus-menerus. Salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan sistem yang tidak adil, yang mengarah pada intimidasi terhadap saksi dan pemeriksaan silang yang sensasional. Hal ini menciptakan ketidakpuasan publik dan merusak administrasi peradilan.

Selain itu, perilaku tidak sopan di antara para advokat semakin memperburuk pandangan masyarakat terhadap profesi hukum. Banyak advokat yang berbicara satu sama lain dengan kurang menghormati, menggunakan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan, dan melupakan kewajiban etis untuk saling menghargai.

Sekolah hukum juga berkontribusi pada masalah ini dengan mengarahkan mahasiswa untuk mencari perdebatan daripada solusi yang adil. Mereka tidak dilatih untuk menemukan titik temu antara pihak-pihak yang bersaing, melainkan lebih fokus pada sistem adversarial yang cenderung memperbesar perbedaan. Akibatnya, proses pengadilan sering kali menjadi pahit dan berkepanjangan, jauh dari penyelesaian yang konstruktif.

Komersialisasi dan praktik penagihan yang bermasalah juga menjadi penyebab ketidakpuasan terhadap profesi hukum. Banyak advokat yang beralih dari fungsi profesional menjadi bisnis, lebih fokus pada aspek komersial ketimbang melayani klien dengan baik. Salah satu alasan utama di balik pencarian kasus dan inisiasi litigasi adalah untuk mendapatkan honorarium yang lebih tinggi. Keberadaan firma hukum besar menciptakan persepsi bahwa mereka menerima kasus-kasus yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Praktik penagihan yang bermasalah turut berkontribusi pada pandangan negatif publik terhadap profesi hukum. Contohnya, penagihan untuk lebih dari satu klien atas pekerjaan yang sama atau jam kerja yang identik, biaya tambahan untuk layanan dari vendor luar, serta

biaya yang tidak wajar untuk layanan internal seperti fotokopi dan pencarian data. Selain itu, dasar yang digunakan untuk biaya-biaya ini sering kali tidak diungkapkan dengan jelas sebelumnya atau disamarkan dalam faktur, sehingga klien tidak sepenuhnya memahami dan mengerti biaya yang dikenakan kepada mereka.

2.3 ASOSIASI PENGACARA DAN PERANNYA DALAM PROFESI HUKUM

Asosiasi pengacara memiliki peran yang krusial dalam profesi hukum. Di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat, asosiasi ini sangat berpengaruh dan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung integritas profesi. Sementara itu, di yurisdiksi lain, seperti Ethiopia, peran asosiasi pengacara cenderung terbatas. Berikut adalah penjelasan mengenai peran asosiasi pengacara di AS dan Ethiopia..

a) Asosiasi Pengacara Amerika (American Bar Association)

American Bar Association (ABA) didirikan pada tahun 1878 dengan tujuan meningkatkan pendidikan hukum, menetapkan persyaratan untuk mendapatkan izin praktik, dan memfasilitasi pertukaran ide serta informasi di antara para anggotanya. Selama bertahun-tahun, ABA telah berperan penting dalam pengembangan yurisprudensi di Amerika, menetapkan syarat pendidikan formal bagi calon pengacara, merumuskan prinsip-prinsip etika yang mengatur praktik hukum, serta mendirikan American Law Institute (ALI) dan Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Kedua organisasi ini bertujuan untuk mendorong administrasi peradilan yang adil dengan mempromosikan keseragaman dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, ABA juga telah terlibat secara aktif dalam merekomendasikan dan memilih kandidat untuk peradilan federal, mengakreditasi sekolah hukum, serta menyempurnakan aturan etika dan peradilan hukum.

Etiopia Batang Asosiasi

Ikatan Pengacara Ethiopia (EBA) melaksanakan tiga kegiatan utama: Pendidikan Hukum Berkelanjutan (CLE), Reformasi Hukum dan Advokasi, serta Layanan Bantuan Hukum. Pendidikan Hukum Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum para pengacara, serta menciptakan kesadaran mengenai perkembangan hukum terbaru di antara anggotanya melalui lokakarya. Dalam konteks Reformasi Hukum dan Advokasi, EBA mengusulkan amandemen serta undang-undang baru untuk berkontribusi pada perkembangan hukum dan administrasi peradilan di Ethiopia, serta meningkatkan kesadaran tentang hukum dan hak asasi manusia melalui penelitian dan publikasi. Dalam hal ini, EBA menerbitkan buletin dua bulanan dan jurnal dua tahunan. Selain itu, EBA menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui kerja sama dengan asosiasi lainnya.

Namun, peran EBA tidak sebesar peran ABA. EBA berpartisipasi dalam berbagai komite, termasuk Dewan Disiplin Advokat, Komite Evaluasi Lisensi, dan Dewan Sertifikasi Kompetensi, sesuai dengan ketentuan Proklamasi Lisensi Advokat dan Pendaftaran No. 199/2000. Namun, pada tahun 2006, Kementerian Kehakiman melarang EBA berpartisipasi dalam komite tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki perwakilan advokat. EBA kemudian kembali bergabung dengan komite tersebut pada Mei 2006 setelah mencapai

kesepahaman dengan Menteri dan Menteri Negara Kehakiman. Oleh karena itu, EBA tidak memiliki kontrol penuh dalam menjalankan dukungan hukum secara independen.

Tidak sah Praktik di dalam Legal Profesi

Praktik Tidak Sah merujuk pada pelaksanaan layanan profesional, seperti perawatan medis atau bantuan hukum, oleh individu yang tidak memiliki izin dari negara untuk melakukannya. Dalam konteks hukum, praktik hukum yang tidak sah adalah tindakan hukum oleh seseorang, biasanya bukan pengacara, yang tidak memiliki izin atau persetujuan untuk berpraktik hukum di yurisdiksi tertentu. Ini mencakup praktik hukum oleh individu atau entitas yang tidak berwenang, serta penggunaan istilah seperti pengacara, konselor hukum, atau istilah lain yang dapat menimbulkan kesan bahwa mereka memiliki otoritas untuk berpraktik di negara bagian tersebut.

Masyarakat belum sepenuhnya sepakat mengenai praktik hukum yang tidak sah. Beberapa berpendapat bahwa tidak seharusnya ada undang-undang yang melarang praktik tanpa izin, dengan alasan bahwa profesi hukum menggunakan undang-undang tersebut untuk mempertahankan monopoli atas layanan hukum, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh non-pengacara.

Di sisi lain, para profesional hukum berusaha untuk mengesahkan undang-undang yang melarang praktik hukum yang tidak sah, dengan tujuan melindungi masyarakat dari individu yang tidak terlatih dan berpotensi memberikan layanan yang tidak memadai. Profesi hukum, bersama dengan sebagian besar badan legislatif, meyakini bahwa kepentingan publik lebih baik dilayani dengan membatasi pelaksanaan layanan advokasi hanya kepada anggota profesi yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

Proklamasi Lisensi dan Registrasi Pengacara Pengadilan Federal No. 199/2000 tidak mencantumkan ketentuan mengenai "praktik yang tidak berwenang." Meskipun demikian, larangan praktik hukum yang tidak sah tetap berlaku di yurisdiksi lain. Berdasarkan Proklamasi No. 199/2000, praktik hukum yang tidak sah didefinisikan sebagai penyediaan layanan advokasi tanpa izin atau lisensi yang sah. Dengan demikian, hanya pengacara yang berlisensi yang diperbolehkan untuk menyusun gugatan, kontrak, dan dokumen hukum lainnya untuk orang lain.

Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan ini. Seseorang yang tidak memiliki izin advokasi diperbolehkan untuk memberikan layanan advokasi kepada anggota keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3(2) Proklamasi No. 199/2000. Seperti di negara-negara lain, praktik hukum yang tidak sah dianggap sebagai tindak pidana di Ethiopia dan dapat dihukum dengan denda antara 2.000 bir hingga 10.000 bir, atau dengan hukuman penjara antara enam bulan hingga dua tahun, sesuai dengan Pasal 31 Proklamasi No. 199/2000. Hukuman ini dapat meningkat jika terdapat ketentuan lain dalam Kitab Hukum Pidana yang menetapkan hukuman lebih berat.

Walaupun ada peraturan yang melarang praktik hukum yang tidak sah, penerapannya seringkali menjadi isu bagi profesi hukum. Penegakan hukum menjadi sulit, baik karena bukti praktik hukum yang tidak sah sulit didapatkan, maupun karena banyak jaksa yang

menempatkan kasus ini sebagai prioritas rendah dalam penegakan hukum.

Kesimpulan

Profesi hukum merupakan kumpulan pengacara atau semua yang terlibat dalam administrasi peradilan. Profesi hukum adalah bangsawan profesi dan sangat berbeda dari bisnis. Itu Tujuan dari Anggota profesi hukum adalah pencapaian keadilan Dan kebebasan tidak memaksimalkan keuntungan. Penerimaan pada profesi ini biasanya memerlukan nilai kelulusan pada ujian advokat dan moral yang baik karakter. Setiap orang Ethiopia memiliki kanan ke memilih legal profesi sebagai A cara dari mata pencaharian.

Itu anggota dari masyarakat tidak puas dengan profesi hukum karena antara lain, penyalahgunaan dari musuh sistem, komersialisasi dari itu profesi, Dan bermasalah penagihan praktik. Profesi dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan kepercayaan diri di dalam legal profesi.

Asosiasi advokat memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengembangkan profesi hukum. Tingkat keterlibatan asosiasi-asosiasi ini dalam profesi ini berbeda-beda di setiap yurisdiksi. lainnya. Di beberapa yurisdiksi seperti AS, asosiasi pengacara sangat kuat. Sebaliknya, mereka sangat lemah di Etiopia. Tidak sah praktik dari hukum adalah merender pembelaan layanan tanpa izin dari itu kompeten otoritas. Dia adalah A kejahatan dapat dihukum dengan Bagus atau hukuman penjara.

Studi Kasus 1

Mengadakan A riset pada tidak sah praktek hukum di dalam milikmu sekitar Dan laporan secara terperinci pada:

- a. Itu prevalensi dari tidak sah praktik
- b. Pandangan para advokat, hakim, jaksa, dan anggota masyarakat lainnya terhadap tidak sah praktik dari hukum
- c. Itu memengaruhi dari tidak sah praktik dari hukum pada legal profesi Dan itu kualitas dari layanan keitu masyarakat

Di dalam melakukan ini riset, Anda bisa membuat menggunakan dari, di antara yang lain, wawancara, kasus Dan literatur.

Studi Kasus 2

Di dalam A kelompok mengadakan sebuah wawancara dengan bukan lebih sedikit lebih dari lima puluh Anggota dari itu publik di dalam milikmu sekitar pada:

- 1) Milik mereka pandangan pada legal profesi
- 2) Milik mereka pendapat ke arah pendukung, pendukung biaya
- 3) Tiga teratas Profesi dari milik mereka pilihan Dan Bagaimana mereka pangkat hukum di antara milik mereka pilihan
- 4) Apa profesi mereka akan memilih untuk milik mereka anak-anak atau kerabat
- 5) Berdasarkan wawancara ini, mengukur tingkat kepuasan anggota masyarakat terhadap layanan hukum.profesi sebagai tinggi, sedang atau rendah.

BAB 3

PERILAKU PERADILAN

Pendahuluan

Pada unit sebelumnya, kita telah membahas konsep etika, profesi, dan teori kewajiban moral. Kita mengeksplorasi bagaimana individu, baik itu seorang petani, advokat, insinyur, anggota parlemen, pedagang, perdana menteri, presiden, maupun dokter, membedakan yang benar dan yang salah berdasarkan teori-teori kewajiban moral seperti utilitarianisme, aturan emas, dan imperatif kategoris. Namun, perilaku tertentu yang mungkin dianggap benar bagi orang biasa bisa jadi tidak berlaku bagi hakim, advokat, jaksa penuntut umum, atau profesional lainnya. Oleh karena itu, kita memerlukan seperangkat aturan perilaku yang dapat membimbing para profesional ini dalam menjalankan tugas mereka.

Salah satu seperangkat aturan tersebut adalah kode etik peradilan. Dalam unit ini, kita akan membahas kode etik peradilan, serta hal-hal terkait seperti pengangkatan, penarikan, dan pemberhentian hakim. Kita juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi etika peradilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran kode etik tersebut.

Dalam konteks etika hakim, kita akan membahas isu-isu seperti kewajiban untuk bersikap independen, kewajiban untuk tidak memihak, kewajiban untuk kompeten dan tekun, kewajiban untuk memperlakukan semua pihak di pengadilan secara setara, serta promosi kemandirian peradilan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi kesopanan di antara para hakim dan kegiatan sosial atau bisnis yang harus dihindari oleh hakim yang sedang menjabat.

Metode pengangkatan, penarikan, dan pemberhentian hakim memiliki dampak signifikan terhadap independensi peradilan. Dalam memulai studi unit ini, penting untuk memahami keberadaan Kode Etik Peradilan Federal di Ethiopia, serta Proklamasi Pembentukan Dewan Administrasi Peradilan Federal. Juga disarankan untuk mempertimbangkan kode etik peradilan dari negara-negara regional di Ethiopia dan instrumen internasional seperti Prinsip Bengaluru tentang Peradilan. Referensi tambahan akan disediakan di akhir unit ini.

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini diharapkan para siswa akan mampu memahami:

- ✓ Membahas etis tugas dari Hakim di dalam Dan keluar dari pengadilan
- ✓ Menjelaskan itu proses dari peradilan janji temu, penarikan Dan pemindahan.
- ✓ Mengenali faktor itu memengaruhi etis tugas dari Hakim
- ✓ Menganalisa aturan di dalam Kode Bahasa Inggris dari Peradilan Mengadakan ke mengenali milik mereka pelanggaran
- ✓ Mengenali alasan di belakang aturan dari Kode dari Peradilan Mengadakan
- ✓ Mengenali Tujuan itu Kode dari Peradilan Mengadakan melayani
- ✓ Menentukan tanggung jawab untuk Hakim WHO melanggar Kode dari Peradilan Mengadakan

- ✓ Menghormati Kode dari Peradilan Mengadakan

3.1 ETIS TUGAS DARI HAKIM DIDALAM PERADILAN KEGIATAN

Kemerdekaan

Sesuai dengan pembukaan Kode Etik Hakim Federal Ethiopia (2001), independensi peradilan merupakan prasyarat untuk penyelenggaraan peradilan yang demokratis dan imparial. Kode etik ini menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip yang menjaga independensi peradilan, yang menjadi tanggung jawab lembaga peradilan itu sendiri. Prinsip serupa juga terdapat dalam instrumen hukum internasional seperti Prinsip-prinsip Perilaku Peradilan Bangalore, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Menurut Nilai 1 dari Prinsip-prinsip Perilaku Peradilan Bangalore, independensi peradilan terdiri dari dua aspek: individual dan kelembagaan. Aspek individual, yang dikenal sebagai kemandirian pribadi atau pengambilan keputusan, merujuk pada kondisi mental hakim yang harus terlepas dari pengaruh eksternal. Keamanan masa jabatan dan jaminan finansial sangat penting untuk memastikan independensi dalam pengambilan keputusan. Keamanan masa jabatan berarti bahwa hakim tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang oleh cabang pemerintahan lain (eksekutif atau legislatif) hingga mereka pensiun atau menjabat seumur hidup. Tanpa jaminan tersebut, hakim mungkin terpaksa membuat keputusan yang menguntungkan badan eksekutif atau legislatif demi menjaga posisi mereka, bukan berdasarkan hukum dan bukti.

Keamanan finansial mengacu pada hak hakim untuk mendapatkan kompensasi yang tidak dapat dikurangi selama menjabat. Jika gaji hakim dapat dipotong atau dinaikkan berdasarkan kebijaksanaan eksekutif atau legislatif, maka independensi keputusan mereka terancam. Dalam situasi seperti ini, hakim mungkin merasa terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dan bukti.

Pasal 78(1) Konstitusi FDRE menegaskan bahwa peradilan harus independen baik di tingkat federal maupun negara bagian. Pasal 79(2) menyatakan bahwa hakim bebas dari campur tangan dalam bentuk apa pun, sehingga peradilan dilindungi dari intervensi oleh cabang eksekutif, legislatif, atau badan lain. Hakim juga menikmati jaminan masa jabatan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 79(4), yang menegaskan bahwa mereka tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang atau atas kebijakan eksekutif atau legislatif.

Independensi peradilan bukan hanya ditentukan oleh ketentuan yang mengatur pemilihan, kompensasi, dan masa jabatan hakim (Jonson 1012). Norma etika peradilan memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku hakim dan memberikan makna konkret terhadap gagasan independensi dalam pengambilan keputusan (Ibid). Hakim harus bebas dari tekanan yang tidak semestinya saat melaksanakan tugas mereka. Aturan mengenai kode etik hakim terkait independensi dalam pengambilan keputusan mencakup komunikasi, penerimaan hadiah, dan hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 23 Kode Etik Peradilan Federal melarang komunikasi *ex parte*, yang mengharuskan hakim tidak membahas substansi kasus yang sedang diproses di pengadilan.

Hakim tidak boleh memberikan pendapat mengenai kasus yang belum diputuskan kepada media. Aturan ini melindungi hak dasar untuk didengar (Johnson 1015) dan memastikan bahwa keputusan hakim hanya didasarkan pada hukum dan bukti. Komunikasi *ex parte* merusak kepercayaan publik dan menghalangi transparansi dalam proses litigasi.

Pasal 23 tidak membedakan antara orang-orang yang dapat diajak diskusi oleh hakim dan mereka yang tidak boleh. Ketentuan ini melarang semua komunikasi pribadi yang tidak resmi, kecuali komunikasi di antara hakim yang menangani kasus yang sama. Bahkan komunikasi dengan hakim lain yang tidak terlibat dalam kasus tersebut dilarang.

Penerimaan sumbangan juga dapat mempengaruhi independensi hakim. Pasal 25 dari Kode Etik Peradilan Federal melarang hakim menerima suap, hadiah, atau keuntungan lain terkait dengan keputusan kasus. Sumbangan kepada hakim dalam konteks kasus yang belum terselesaikan dapat menciptakan rasa kewajiban di pihak penerima dan harapan untuk adanya timbal balik dari pemberi. Situasi seperti ini dapat mengganggu proses peradilan, karena keputusan mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan di luar fakta dan hukum.

Sumbangan kepada hakim menimbulkan dua risiko bagi administrasi peradilan (Ibid). Pertama, ada kemungkinan keputusan diambil berdasarkan pengaruh yang tidak tepat. Kedua, meskipun hakim tidak terpengaruh, masyarakat mungkin tetap merasa ada ketidakberpihakan. Persepsi ketidakberpihakan ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sumbangan atau manfaat lain yang dilarang berdasarkan Pasal 25 mencakup sumbangan atau keuntungan yang diterima sebagai imbalan atas keputusan kasus yang telah diputuskan (atau yang akan diputuskan) oleh hakim. Namun, hakim tidak dilarang menerima hadiah, seperti yang diberikan pada perayaan ulang tahun anak mereka. Sumbangan terlarang dan manfaat lainnya dapat bervariasi dalam bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tiket penerbangan, penggunaan kondominium, pembayaran tunai, makanan, atau diskon pada pembelian barang seperti kertas dinding atau sewa mobil. Jika seorang hakim menerima kompensasi untuk tindakan di luar yudisial, jumlahnya harus setara atau kurang dari kompensasi yang diterima oleh individu yang bukan ahli hukum untuk tugas serupa.

Sumbangan kepada hakim dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung adalah yang diterima langsung oleh hakim, sementara sumbangan tidak langsung diberikan kepada orang lain yang memiliki hubungan kepentingan dengan hakim. Contohnya, seorang penggugat yang membayar utang hakim atau anak dari hakim yang menerima sumbangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang atau telah diputuskan oleh hakim tersebut.

Hubungan yang berpotensi menimbulkan masalah yang dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan hakim mencakup hubungan keluarga dan kegiatan di luar jangkauan yudisial. Dalam konteks ini, seorang hakim mungkin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan di luar hukum dan bukti yang ada, yang bertentangan dengan aturan mengenai ketidakberpihakan dan kegiatan ekstra-yudisial.

Akuntabilitas

Perwakilan yang dipilih memiliki tanggung jawab kepada rakyat yang mereka wakili.

Sebagai contoh, anggota parlemen bertanggung jawab kepada masyarakat menurut Pasal 54(4) Konstitusi. Begitu juga, eksekutif bertanggung jawab kepada Rumah Perwakilan Rakyat sesuai Pasal 72(2). Namun, ada pendapat yang berargumen bahwa lembaga peradilan seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban karena independensinya sebagai lembaga yang tidak dipilih dan menikmati jaminan masa jabatan. Salah satu pendukung pandangan ini adalah Lord Donaldson, mantan Master dari Gulungan dan seorang pakar hukum terkemuka.. Donaldson mengatakan:

"Hakim adalah tanpa konstituen Dan jawaban yang bisa dijawab ke TIDAK satu kecuali ke aku kesadaran Dan hukum "

Dalam konteks saat ini yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, lembaga peradilan tidak bisa luput dari pengawasan ketat terhadap kinerja dan perilaku anggotanya. Terdapat pandangan yang telah lama ada yang menyatakan bahwa karena hakim menjalankan tugasnya sebagian besar di depan publik dan memberikan penilaian yang terperinci, mereka secara otomatis memberikan penjelasan yang memadai tentang kinerja mereka. Hal ini menciptakan keyakinan bahwa keterbukaan dalam proses pengadilan sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Misalnya, Hakim Michael Kirby mengemukakan setiap saran bahwa hakim tidak bertanggung jawab, dan berpendapat:

"Kami sudah memiliki kerja sama itu paling bertanggung jawab cabang dari pemerintahan dalam satu pengertian: keputusan kita adalah buatan pengadilan terbuka. aku menghabiskan sebagian besar kehidupan kerja, saya melakukan tugas sehari-hari di depan umum yang tidak sesuatu yang terjadi di sebagian besar bidang kegiatan, tentu saja tidak dalam birokrasi. Selain itu, keputusan-keputusan pengadilan melewati berbagai macam tinjauan dari pengadilan yang lebih rendah sampai pengadilan tertinggi di negara ini dan dalam pengertian itu dapat diungkapkan secara terbuka, dikritik, dikomentari dan dibenarkan dalam keputusan yang beralasan pembuatan. Sekarang memang benar bahwa di negara ini, hakim tidak dipilih dan dalam artian mereka adalah bukan secara langsung bertanggung jawab ke itu rakyat. Tetapi mereka adalah ditunjuk oleh politisi WHO adalah bertanggung jawab ke rakyat"

Menurut Hakim Michael Kirby (1996) dari Pengadilan Tinggi Australia, ada tiga hal yang menjadi tanggung jawab hakim: Pertama, hakim memberikan putusan di depan publik. Kedua, putusan hakim dapat ditinjau oleh pengadilan banding. Ketiga, hakim diangkat oleh eksekutif atau legislatif yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Kirby juga menekankan bahwa kritik dan komentar terhadap putusan pengadilan adalah mekanisme penting untuk akuntabilitas. Hak untuk mengomentari dan mengkritik keputusan pengadilan merupakan bagian integral dari proses akuntabilitas. Pengadilan, seperti cabang pemerintahan lainnya, tidak kebal terhadap kritik. Namun, tidak semua bentuk

Kode Etik Hukum – Dr. Agus Wibowo

kritik publik mendukung akuntabilitas. Kritik yang tidak bertanggung jawab dapat merusak independensi peradilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung Bhagwati India mengatakan:

“Ada kecenderungan jahat dari sebagian pihak untuk menyerang hakim jika keputusan yang diambil tidak berjalan sesuai keinginan mereka atau tidak sesuai dengan pandangan mereka. Tentu saja, tidak ada salahnya untuk mengevaluasi secara kritis penilaian yang diberikan oleh seorang hakim karena, seperti yang diamati oleh Lord Atkin, Keadilan bukanlah kebajikan yang terkurung dan dia harus diizinkan untuk menanggung kritik Dan hormat, meskipun blak-blakan, komentar dari orang-orang biasa. Namun kritik yang tidak pantas atau tidak sopan Hakim berasal dari ketidakpuasan dengan keputusan merupakan A serius terobosan terhadap independensi peradilan dan, apapun bentuknya atau membentuk yang seperti kritik mengambil, dia memiliki tidak bisa dihindari memengaruhi dari mengikis itu kemerdekaan dari itu pengadilan.

Setiap serangan terhadap hakim atas keputusan yang diberikannya adalah serangan terhadap kemerdekaan peradilan karena itu mewakili sebuah upaya pada bagian dari mereka yang melakukan kritik semacam itu untuk memaksa kesesuaian hukum dengan keputusan mereka sendiri prasangka Dan, dengan demikian, pengaruh itu keputusan proses pembuatan.

Sangat penting dalam negara yang berdasarkan hukum bahwa setiap keputusan harus berdasarkan hukum dan tidak dibawah tekanan suatu kelompok atau kelompok lain atau dibawahancaman dari merugikan kritik oleh tidak bertanggung jawab wartawan atau bermaksud jahat politisi, dan jika seorang hakim takut akan kritik pribadi dari pihak politik atau tekanan kelompok atau wartawan ketika memutuskan kasus dia akan tentu merusak itu kemerdekaan dari itu pengadilan.

Sayangnya, hal ini terjadi di beberapa negara dan mereka yang terlibat di dalam seperti tidak pantas atau tanpa pengendalian diri Dan bahkan terkadang kejam kritikan atau serangan terhadap hakim tidak menyadari betapa besar kerusakan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. lembaga itu pengadilan.

Kritik publik yang sah terhadap kinerja peradilan adalah penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum. Ketika masyarakat dapat mengawasi dan menilai keputusan hakim, hal ini membantu menjaga integritas peradilan. Namun, kritik yang tidak bertanggung jawab, terutama dari politisi dan jurnalis, dapat mengganggu independensi hakim. Dalam konteks ini, hakim sering kali menghadapi dilema antara membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan bukti atau memilih jalan yang lebih aman untuk menghindari kritik.

Ketidakpastian ini dapat memengaruhi keputusan hakim, sehingga mereka mungkin merasa tertekan untuk membuat putusan yang tidak menciptakan gelombang kritik publik, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika publik merasa keputusan hakim dipengaruhi oleh kekhawatiran akan kritik, mereka

dapat kehilangan kepercayaan dalam sistem hukum, dan ini berpotensi merusak fondasi demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat perlu mendorong dialog yang sehat tentang keputusan peradilan tanpa menciptakan iklim ketakutan bagi hakim untuk menjalankan tugas mereka dengan independen dan adil.

Pengadilan modern berfungsi tidak hanya dalam sengketa antara individu, tetapi juga dalam kasus yang melibatkan pemerintah dan warga negara. Ini termasuk tanggung jawab untuk menilai konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif, yang bisa memicu konflik antara cabang-cabang pemerintahan. Dalam beberapa negara, seperti India, Malaysia, dan Singapura, pengadilan memiliki wewenang untuk menegakkan penghinaan pengadilan sebagai respons terhadap kritik publik yang dianggap merugikan, meskipun kritik tersebut mungkin sah.

Selain itu, ada mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban hakim melalui proses disiplin yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran hukum. Proses banding berfungsi untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam keputusan sebelumnya, sementara disiplin bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim di masa depan. Pembalikan keputusan di pengadilan banding tidak selalu menjamin perlindungan bagi publik dari hakim yang berulang kali menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Penting untuk memahami bahwa proses disiplin tidak tergantung pada adanya banding; disiplin dapat diambil terlepas dari status keputusan yang sedang dalam proses banding. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hakim adalah penting untuk menjaga integritas sistem peradilan, serta untuk melindungi kepercayaan publik terhadap keadilan dan independensi pengadilan.

Beberapa pengadilan telah mempertanyakan apakah penerapan independensi peradilan dalam proses disipliner benar-benar mencerminkan konsep independensi itu sendiri. Dalam pengertian tradisional, independensi peradilan mengacu pada pemisahan antara cabang yudikatif dan cabang legislatif serta eksekutif. Prinsip ini menuntut hakim untuk mematuhi konstitusi dan hukum tanpa intervensi dari cabang lain pemerintah.

Langkah-langkah konstitusional yang melindungi independensi peradilan dirancang untuk menjaga kebebasan cabang yudikatif dari pengaruh legislatif dan eksekutif, bukan untuk melindungi hakim secara individu dari tanggung jawab. Independensi tidak berarti bahwa hakim memiliki kekuasaan tak terbatas untuk bertindak semena-mena atau mengabaikan hukum.

Dalam konteks Konstitusi FDRE, Dewan Administrasi Peradilan memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim yang melanggar peraturan disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada larangan campur tangan dari cabang pemerintahan lain, hakim tidak kebal terhadap proses disipliner.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi disipliner tidak seharusnya dijatuhkan hanya karena kesalahan hukum. Menghukum hakim karena kesalahan hukum dapat merusak independensi peradilan. Kesalahan adalah bagian dari proses pengambilan keputusan, dan

tidak adil untuk menghukum hakim yang sering kali bekerja di bawah tekanan dan membuat ratusan keputusan. Kesalahan hukum harus dipahami dalam konteks bahwa semua juri dapat membuat kesalahan, dan pendekatan yang adil harus diterapkan dalam penegakan akuntabilitas hakim.

Semua juri membuat kesalahan hukum. Terkadang ini adalah karena yang berlaku prinsip hukum adalah tidak jelas. Di waktu lain, prinsip-prinsipnya jelas, tetapi apakah prinsip-prinsip tersebut berlaku pada situasi tertentu mungkingtidak menjadi. Apakah seorang hakim memiliki melakukan kesalahan hukum adalah seringkali menjadi pertanyaan yang tidak memihak dan orang-orang yang memiliki latar belakang hukum dapat dengan wajar tidak setuju. Dan apakah kesalahan hukum telah dilakukan selalu merupakan pertanyaan yang ditentukan setelah kejadian, bebas dari tuntutan keadaan darurat yang ada saat itu keputusan tertentu yang dimaksud telah dibuat. Selain itu, jika setiap kesalahan hukum atau penyalahgunaan kebijaksanaan menjadikan hakim dikenakan sanksi disiplin dan pembatalan, independensi peradilan akan terganggu. terancam (Abu-abu).

Hakim perlu diizinkan untuk memutuskan berdasarkan keyakinan mereka mengenai hukum yang berlaku, tanpa tekanan dari pertimbangan luar tentang hukuman atau ganjaran. Ini adalah esensi dari independensi peradilan. Jika mereka menghadapi sanksi hanya karena kesalahan hukum, hakim akan terjebak dalam pilihan yang sulit: membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti atau menghindari kritik dan sanksi dengan mengeluarkan keputusan yang lebih aman. Dalam situasi ini, akuntabilitas peradilan dapat mengancam independensi, sehingga menimbulkan konflik antara dua prinsip penting ini.

Untuk memastikan kedua prinsip dapat berjalan bersama, kesalahan hukum yang sederhana tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim. Namun, ini tidak berarti bahwa semua kesalahan hukum harus dibiarkan tanpa hukuman. Kesalahan yang jelas, pola kesalahan hukum yang berulang, keputusan yang diambil dengan itikad buruk, atau kesalahan hukum yang serius harus tetap menjadi subjek penegakan disiplin. Dengan cara ini, sistem peradilan dapat mempromosikan independensi sambil tetap menjaga akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kesalahan hukum yang jelas adalah kesalahan yang tidak dapat disangkal, di mana tidak ada keraguan atau pertanyaan mengenai legalitasnya. Ini terjadi ketika keputusan hakim bertentangan dengan hukum yang tegas dan tidak ada ambiguitas dalam penafsirannya. Jika keputusan tersebut masih dapat diperdebatkan atau dianggap sebagai kesalahan yang sepele (*de minimis*), maka tidak dapat dianggap sebagai kesalahan hukum yang jelas. Pembalikan keputusan oleh pengadilan banding saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa hakim telah melakukan kesalahan hukum yang layak dikenakan sanksi.

Pola kesalahan hukum, terutama yang berulang, memerlukan tindakan disipliner. Jika seorang hakim terus-menerus melakukan kesalahan hukum meskipun jenisnya berbeda, mereka harus dikenai sanksi. Keputusan yang diambil dengan itikad buruk, seperti menetapkan jaminan yang tidak wajar sebagai bentuk balas dendam terhadap terdakwa, juga dapat dikenakan sanksi disipliner. Kesalahan hukum yang serius, terutama yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, juga harus menjadi perhatian utama dalam

sistem disiplin peradilan.

Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan adalah salah satu tugas etika dasar hakim dalam menjalankan kegiatan peradilan. Hal ini merupakan kualitas mendasar dari seorang hakim dan atribut kepedulian terhadap peradilan. Menurut nilai 2 dari Prinsip-Prinsip Perilaku Yudisial Bangalore, ketidakberpihakan sangat penting untuk menjalankan tugas peradilan dengan baik. Hal ini tidak hanya berlaku untuk keputusan itu sendiri tetapi juga untuk proses di mana keputusan tersebut dibuat. Kode Etik Peradilan Federal dalam mukadimahnya menekankan bahwa administrasi peradilan yang tidak memihak adalah tujuan peradilan yang independen. Ketidakberpihakan dan kemandirian merupakan tugas etis hakim yang terpisah dan berkaitan erat. Ketidakberpihakan dan independensi saling menguatkan.

Independensi adalah prasyarat yang diperlukan untuk ketidakberpihakan dan merupakan prasyarat untuk mencapai ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan tidak dapat terjadi tanpa adanya independensi, namun independensi dapat terjadi tanpa adanya ketidakberpihakan. Dengan demikian, seorang hakim independen yang bebas dari pengaruh apa pun, baik dari sayap pemerintahan (eksekutif & legislatif) atau orang lain, dapat bersikap memihak karena persepsi atau kepentingannya sendiri.

Ada dua aspek dalam persyaratan ketidakberpihakan. Kedua aspek tersebut adalah ketidakberpihakan subjektif dan objektif. Ketidakberpihakan subjektif atau nyata terjadi ketika seorang hakim memiliki prasangka atau bias terhadap satu pihak atau pihak lain atau hasil tertentu.

Sebagai contoh, seorang hakim yang telah ditentukan untuk memutuskan mendukung penggugat meskipun kasusnya layak, secara subjektif memihak. Ketidakberpihakan subjektif biasanya dianggap ada. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan pihak yang berperkara. Ketidakberpihakan yang obyektif atau yang dianggap ada ketika pengamat yang wajar bebas dari keraguan yang sah atas ketidakberpihakan pengadilan. Perilaku pribadi hakim tidak menjadi masalah. Apakah hakim benar-benar bias atau tidak, tidak akan menjadi pertimbangan untuk menentukan adanya ketidakberpihakan yang obyektif. Ada orang-orang yang berintegritas tinggi yang memutuskan perkara dengan melawan kepentingan mereka atau kepentingan keluarga mereka. Orang-orang seperti itu menentukan masalah secara tidak memihak. Namun, keterlibatan kepentingan hakim tersebut atau kerabatnya dapat memberikan persepsi kepada pengamat yang wajar bahwa hakim tersebut tidak netral. Tujuan dari persyaratan etika ketidakberpihakan yang obyektif adalah untuk menghindari persepsi seperti itu di antara para anggota pengadilan. Persepsi keberpihakan mengikis kepercayaan publik terhadap pengadilan, yang merupakan salah satu nilai yang ingin dicapai oleh Kode Etik Peradilan Federal.

Ada ketidakberpihakan subjektif atau nyata ketika seorang hakim memiliki prasangka atau bias terhadap salah satu pihak. Bias adalah kecenderungan atau prasangka. Prasangka adalah penilaian yang terbentuk sebelumnya yang dibentuk tanpa dasar fakta. Bias atau prasangka adalah -kecondongan, kecenderungan, pembengkokan atau kecenderungan ke satu sisi atau sisi lain atau hasil tertentu (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan). Bias adalah

suatu kondisi atau keadaan pikiran, sikap, atau sudut pandang yang mempengaruhi atau mewarnai penilaian dan membuat hakim tidak dapat menjalankan fungsinya secara tidak memihak dalam kasus tertentu.

Hakim dapat mengekspresikan bias mereka dengan kata-kata atau secara fisik. Penyalahgunaan kekuasaan yang menghina adalah manifestasi dari bias atau prasangka. Dengan demikian, jika hakim menggunakan kata-kata yang menyinggung salah satu kelompok etnis, maka mereka menunjukkan bias mereka terhadap anggota kelompok etnis tersebut. Demikian pula, jika hakim secara tidak tepat menghukum pihak, saksi atau pengacara untuk penghinaan terhadap pengadilan, ada manifestasi dari bias atau prasangka. Prinsip 2.2 dari Prinsip-prinsip Perilaku Peradilan Bangalore menyatakan bahwa;

"Hakim harus memastikan bahwa perilakunya baik di dalam maupun di luar pengadilan menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, profesi hukum, dan pihak-pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan."

Hakim harus menghindari tindakan apa pun yang dalam pikiran orang yang berakal sehat akan menimbulkan kecurigaan yang masuk akal tentang kurangnya ketidakberpihakan dalam pelaksanaan fungsi peradilan (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan). Di pengadilan, hakim harus menghindari teguran yang tidak dapat dibenarkan terhadap advokat yang menghina dan komentar yang tidak pantas tentang pihak yang berperkara dan saksi. Hakim harus menghindari campur tangan yang terus menerus dalam pelaksanaan kasus. Hakim tidak boleh menempatkan diri mereka pada posisi advokat untuk memeriksa atau menguji saksi.

Hakim memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk mengklarifikasi masalah. Namun, hak tersebut tidak boleh sampai pada tahap mengajukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh para pihak atau advokat mereka. Selain itu, hakim harus menghindari komunikasi *ex parte* dengan para pihak atau perwakilan mereka. Dalam hal ini, Pasal 23 Kode Etik Peradilan Federal melarang hakim untuk mendiskusikan manfaat dari kasus yang tertunda dengan badan lain. Dengan demikian, hakim tidak dapat mendiskusikan masalah ini apalagi dengan para pihak dan advokat mereka bahkan dengan teman dekat dan kerabat mereka.

Di luar pengadilan, hakim harus menghindari membuat pernyataan yang menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu. Pernyataan semacam itu dapat menimbulkan kesan keberpihakan, terutama jika pihak-pihak yang berperkara adalah anggota partai yang berseberangan dengan partai yang menjadi lawannya. Konflik kepentingan hakim dalam kasus ini menimbulkan keberpihakan yang nyata maupun yang dirasakan. Oleh karena itu, hakim harus mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Ketika konflik kepentingan terjadi, para hakim harus mengundurkan diri atau didiskualifikasi atau dengan menggunakan kata-kata atau pasal 27 Proklamasi No. 25/1996 (Proklamasi Pengadilan Federal), para hakim harus menarik diri dari kasus-kasus tersebut.

Menurut Pasal 24 Kode Etik Hakim Federal, para hakim harus mengundurkan diri dari mosi mereka sendiri segera setelah mereka mengetahui adanya alasan-alasan yang membuat

mereka tidak dapat menangani kasus tersebut. Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 27(1) Proklamasi Pengadilan Federal No. 25/1996. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Hubungan hakim dengan para pihak atau advokat mereka [Pasal 27(1)(a), (b) & (d)]
2. Hubungan hakim dengan kasus [Pasal 27(1)(c)] dan
3. Alasan lain [Pasal 27(1)(e)]

Dalam ketiga kasus ini, seorang hakim tidak harus menunggu permohonan dari para pihak. Jika seorang hakim tidak mengundurkan diri, ia akan didiskualifikasi atas permintaan para pihak. Para pihak akan membayar untuk penerapan diskualifikasi yang tidak tepat. Sekarang, mari kita bahas setiap alasan penolakan.

a) Hubungan dengan Para Pihak atau Advokat mereka

Hakim harus mengundurkan diri ketika salah satu pihak atau advokat mereka adalah keluarga mereka sendiri karena hubungan darah atau pertalian keluarga. Dengan demikian, hakim tidak boleh mengadili perkara antara saudara atau iparnya dengan orang lain. Hakim juga tidak boleh memimpin sebuah kasus di mana mereka memiliki hubungan keluarga dengan advokat para pihak. Sebagai contoh, seorang hakim diharuskan untuk mengundurkan diri jika advokat terdakwa adalah sepupunya. Pasal 27(1)(b) mengatur hubungan selain hubungan berdasarkan konsanguinity atau afinitas. Dengan demikian, hakim yang tidak memiliki hubungan konsanguinitas atau afinitas diharuskan untuk mengundurkan diri, jika mereka sebelumnya bertindak sebagai perwakilan hukum, tutor atau advokat dari salah satu pihak.

Sebagai contoh, Candra adalah seorang advokat di pengadilan federal hingga Maret 2007. Selama menjadi advokat, beliau mewakili Tuan Gatot dalam sebuah gugatan terhadap Ethiopian Insurance Corporation dan memenangkan kasus tersebut. Pada bulan Maret 2008, Candra ditunjuk sebagai hakim di pengadilan tinggi federal. Jika gugatan oleh Tuan Gatot terhadap Ethiopian Insurance Corporation diajukan ke hadapan Sendi, ia harus mengundurkan diri dari kasus tersebut. Pasal 27(1)(d) memberikan bukti adanya hubungan yang tidak baik antara hakim dengan para pihak atau pengacara mereka. Hakim seperti halnya orang lain memiliki hubungan ekonomi, sosial, atau hubungan lain dengan orang lain. Dengan demikian, jika Tuan X, seorang hakim pengadilan tingkat pertama, menggugat Tuan wawan, seorang pedagang, di pengadilan tinggi atas wanprestasi dalam kontrak, Tuan iwan harus mengundurkan diri dari kasus di mana Wawan menggugat beni di pengadilan tingkat pertama sejauh kasus di pengadilan tinggi belum diputuskan.

b) Hubungan dengan Materi

Para hakim harus mengundurkan diri ketika mereka memiliki hubungan dengan perkara yang mereka tangani. Mereka mungkin pernah bertindak dalam kapasitas tertentu sebelumnya. Sebagai contoh, seorang hakim adalah saksi materiil dalam perkara tersebut atau hakim sebelumnya memutuskan perkara tersebut sebagai arbiter, pegawai negeri sipil atau berpartisipasi dalam perkara sebagai konsiliator atau mediator. Dengan demikian, seorang hakim yang sebelumnya memutuskan perkara sebagai arbiter harus mengundurkan diri dari perkara tersebut.

c) Alasan Penolakan Lainnya

Pasal 27(1)(e) memberikan batasan untuk semua alasan penolakan. Ketentuan ini menjadikan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 27(1)(a) hingga 27(1)(d) sebagai contoh ilustratif alasan penolakan. Dengan demikian, alasan lain yang merupakan alasan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ketidakadilan dapat dilakukan dan termasuk dalam kategori ini.

Alasan tersebut dapat mencakup hubungan sosial atau bisnis dari seorang hakim, pengetahuan pribadi tentang bukti, hubungan pribadi yang tidak tercakup dalam Pasal 27(1)(a) sampai 27(1)(d). Setelah menjadi hakim, para pejabat tidak menarik diri dari masyarakat. Mereka tetap memiliki kehidupan di luar bangku pengadilan. Para hakim memiliki hubungan sosial dan bisnis dengan orang lain. Sebagai contoh, hakim dapat berpartisipasi dalam perkumpulan sosial seperti idir atau iqub. Mereka juga dapat melakukan kegiatan keagamaan tertentu. Mereka dapat menghadiri gereja atau masjid. Hakim juga dapat berpartisipasi dalam bisnis. Mereka dapat memiliki saham dalam organisasi bisnis tertentu atau mereka dapat memiliki minibus komersial atau menjalankan hotel.

Pertimbangkan kasus hipotetis berikut ini. Kamal telah menjadi hakim selama lima tahun terakhir. Ia menjalankan kegiatan yudisialnya dengan kompeten dan tekun. Ia bukan hanya seorang hakim yang rajin dan kompeten, namun juga seorang yang memiliki integritas tinggi dalam kehidupan religiusnya. Kamal biasanya menghadiri gereja St. Karena integritas moralnya yang tinggi, ia diberi jabatan dalam administrasi gereja St. Dia bekerja sama dengan Karina, seorang imam senior yang dihormati. Karina tidak hanya dipercaya oleh Kamal tetapi juga oleh masyarakat luas. Kemarin Kamal tidak bisa mempercayai matanya. Dituduh melakukan pemerkosaan, Karina berada di ruang sidang bersama dua orang polisi. Haruskah Kamal memimpin kasus Karina? Atas dasar apa dia harus mengundurkan diri? Apakah dia melanggar Kode Etik Peradilan pengadilan federal jika dia tidak menolak untuk mengundurkan diri?

Situasi yang sama dapat terjadi dalam bisnis dan hubungan sosial lainnya. Sebagai contoh, sebuah mobil Toyota milik Ibu Shanti seorang hakim pengadilan tinggi federal, menabrak seorang pejalan kaki, Bapak Brian. Dapatkah Ibu Shanti memimpin klaim kompensasi oleh Bapak Brian? Kasus-kasus hubungan bisnis dan sosial ini tidak termasuk dalam Pasal 27(1)(a) hingga Pasal 27(1)(d). Lalu pertanyaannya adalah apakah ketidakadilan dapat terjadi jika Brian atau Shanty yang memimpin kasus tersebut. Dalam kasus Brian, ada kemungkinan untuk mempercayai apa yang dikatakan Karina, apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Hal ini berdampak negatif terhadap bukti-bukti penuntutan.

Dalam kasus Shanti mungkin ada prasangka terhadap hak-hak Brian. Dengan demikian, dalam kedua kasus tersebut ketidakadilan dapat terjadi. Akibatnya, para hakim (Brian dan Shanty) seharusnya mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 24 Kode Etik Perilaku Yudisial hakim federal dan Pasal 27 (1) (e) Proklamasi No. 25/1996 (sebagaimana telah diubah). Setiap hubungan sosial atau bisnis tidak boleh menjadi dasar untuk menolak atau menarik diri seorang hakim dari kasus tersebut. Fakta bahwa hakim dan salah satu pihak atau advokat mereka menghadiri gereja yang sama atau berdoa di masjid yang sama tidak dapat menjadi dasar penolakan. Demikian pula, jika hakim dan salah satu pihak atau advokat mereka

termasuk dalam satu idir, ketidakberpihakan hakim tidak boleh dipertanyakan. Secara khusus, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan untuk menentukan penolakan ketika seorang hakim atau kerabat hakim memiliki hubungan sosial atau bisnis atau kontak dengan advokat, pihak, korban atau saksi (atau kerabat dekat mereka).

- 1) Durasi hubungan atau kontak;
- 2) Isi percakapan selama hubungan atau kontak;
- 3) Sifat dan keadaan hubungan atau kontak;
- 4) Frekuensi pertemuan atau percakapan;
- 5) Ketergantungan pribadi pada hubungan;
- 6) Apakah hubungan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang sedang diproses;
- 7) Dalam hubungan bisnis, apakah hakim menerima perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain;
- 8) Apakah hubungan tersebut telah menjadi subjek publisitas media; dan
- 9) Pernyataan yang distribusikan kepada hakim atau orang lain tentang hubungan tersebut (Miller).

Pengetahuan pribadi mengenai fakta-fakta yang disengketakan dapat menjadi dasar penolakan bagi hakim. Hakim dapat memperoleh pengetahuan tertentu tentang kasus atau para pihak sebelum kasus ditugaskan kepada mereka. Pengetahuan tersebut juga dapat diperoleh dari sumber ekstra yudisial atau pemeriksaan pribadi oleh hakim ketika kasus sedang berjalan (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan).

Hakim diwajibkan untuk mendasarkan keputusan mereka pada hukum dan bukti. Namun, ketika seorang hakim memiliki pengetahuan pribadi tentang fakta yang disengketakan, ia dapat bergantung pada pengetahuannya untuk menentukan perselisihan daripada kesaksian para saksi atau bukti lain yang dihasilkan oleh para pihak. Semua pengetahuan tentang fakta yang disengketakan tidak dapat menjadi dasar penolakan. Sebagai contoh, pengetahuan pribadi mengenai fakta-fakta yang disengketakan tidak dapat menjadi dasar penolakan jika hal tersebut diperoleh dari putusan sebelumnya dalam kasus yang sama atau melalui adjudikasi kasus dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi yang sama karena pihak tersebut telah muncul di hadapan hakim dalam kasus sebelumnya.

Hubungan antara hakim dan pihak-pihak yang berperkara atau advokat mereka yang diatur dalam pasal 27(1) Proklamasi No. 25/1996 tidak menyeluruh. Sebagai contoh, hal ini tidak mencakup hubungan seperti hubungan romantis, atau persahabatan. Hubungan-hubungan ini memiliki kekuatan yang sama dengan hubungan berdasarkan konsanguinity atau afinitas. Seseorang yang mengutamakan kerabatnya karena hubungan semenda atau afinitas juga mengutamakan kekasih atau temannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan dapat terjadi pada para pihak ketika salah satu pihak atau kuasa hukumnya adalah kekasih atau teman dari hakim.

Kompetensi dan Ketekunan Ketidakmampuan dan ketidakefisienan merupakan alasan untuk memberhentikan hakim sesuai dengan pasal 79(4) Konstitusi FDRE. Keputusan dewan administrasi peradilan negara bagian atau federal harus disetujui oleh dua pertiga suara mayoritas dewan negara bagian atau dewan perwakilan rakyat untuk memberhentikan

seorang hakim dari jabatan peradilan. Apabila ketidakmampuan dan ketidakefisienan tidak membuat hakim diberhentikan dari jabatannya, maka hakim dapat dikenai tindakan disipliner lainnya.

Tugas etis kompetensi membutuhkan pengetahuan hukum, keterampilan, ketelitian dan persiapan" (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan). Seorang hakim yang kompeten memiliki pengetahuan hukum yang baik. Hakim tersebut juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi yudisialnya. Sebagai contoh, seorang hakim harus memiliki keterampilan untuk menulis surat panggilan, putusan, dan perbedaan pendapat. Seorang hakim yang kompeten harus melaksanakan kegiatan yudisialnya dengan teliti. Artinya, ia harus melakukan kegiatan yudisialnya dengan hati-hati dengan cara yang terperinci sehingga tidak ada yang terlupakan. Jika hakim membuat keputusan yang teliti, maka tidak akan ada masalah yang tidak terjawab. Para hakim juga harus melakukan persiapan yang diperlukan.

Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang atau gangguan fisik atau mental seorang hakim mempengaruhi kompetensinya. Tidak ada orang yang berakal sehat yang dapat membuat penilaian yang baik di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Gangguan fisik yang sama seperti gangguan pendengaran dapat mempengaruhi kompetensi hakim karena hakim harus mendengar kesaksian saksi dan membuat keputusan berdasarkan kesaksian tersebut. Seorang hakim dikatakan rajin apabila ia mempertimbangkan dengan bijaksana, memutuskan tanpa memihak, dan bertindak cepat. Hakim memiliki kewajiban etis untuk secara serius dan bijaksana mempertimbangkan masalah yang ada di hadapannya.

Keputusan mereka tidak boleh melibatkan bias atau prasangka. Keputusan tersebut harus didasarkan pada hukum dan bukti. Hakim yang rajin akan memutuskan perkara dengan cepat karena mereka tidak boleh membuang-buang waktu atau energi. Ketekunan dapat dipengaruhi oleh beban kerja, kecukupan sumber daya, waktu untuk penelitian, pertimbangan dan penulisan, dan tugas-tugas yudisial selain duduk di pengadilan. Seorang hakim yang memiliki banyak kasus yang masuk ke dalam majelisnya tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dalam waktu beberapa hari. Menurut Pasal 4 Kode Etik Hakim, tugas utama hakim adalah menerapkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tugas ini mengandaikan pengetahuan hakim tentang hukum. Artinya, seorang hakim tidak dapat mengabaikan atau mengaku tidak tahu hukum. Hakim memiliki tugas untuk meningkatkan dan mempertahankan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi mereka yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yudisial dengan baik (Prinsip-Prinsip Perilaku Yudisial Bangalore, Paragraf 6(3)). Mereka harus melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan hukum mereka (Pasal 6 Kode Etik Peradilan Federal).

Kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan hukum ini dapat dilakukan secara individu dan kolektif. Setiap hakim memiliki kewajiban individu untuk membaca undang-undang dan buku-buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber lain tentang hukum. Mereka harus sadar untuk terus mengikuti perkembangan hukum dan sistem hukum. Secara kolektif, para hakim memiliki kewajiban etis untuk menyelenggarakan pelatihan terutama bagi hakim yang baru diangkat dan belum berpengalaman. Tentu saja, kegagalan untuk berpartisipasi atau

penolakan untuk berpartisipasi dalam pelatihan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik peradilan. Pelatihan adalah cara utama untuk meningkatkan dan memelihara pengetahuan hukum. Pelatihan sangat penting untuk pelaksanaan tugas yudisial yang kompeten dan tekun. Pelatihan ini tidak boleh terbatas pada bidang teknis hukum

Pelatihan ini harus mencakup masalah-masalah sosial yang penting seperti gender, ras, budaya asli, keanekaragaman agama, status HIV/AIDS dan kecacatan (Ibid). Disposisi yang cepat dari sebuah kasus adalah salah satu aspek dari ketekunan. Hal ini mengharuskan hakim untuk memutuskan perkara dengan cepat (Prinsip-Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore, Paragraf 6(5) dan Pasal 7 dari Kode Etik Hakim Federal). Hakim harus menghilangkan penundaan yang dapat dihindari dan biaya yang tidak perlu. Untuk itu, hakim harus mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai. Namun, efisiensi tidak memberikan hak kepada hakim untuk mengabaikan hak para pihak untuk didengar.

Kewajiban lain yang harus dilakukan adalah kewajiban untuk tepat waktu. Pasal 22 Kode Etik Hakim Federal mewajibkan para hakim untuk menghormati jam kerja pengadilan. Hakim tidak dapat mangkir dari tugas mereka sesuka hati. Sudah jelas bahwa hakim harus tepat waktu. Jika hakim tidak tepat waktu atau mangkir dari pekerjaan, mereka tidak dapat bekerja dengan baik karena mereka tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yudisial. Kegagalan untuk menghormati jam kerja juga memiliki efek negatif pada disposisi yang cepat dari kasus. Ketidakhadiran dari tugas atau tidak tepat waktu harus tanpa alasan yang masuk akal atau izin untuk melanggar kode etik peradilan.

Di bawah prinsip-prinsip perilaku yudisial Bangalore, para hakim diharuskan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan dalam semua proses pengadilan (Prinsip-prinsip Perilaku Yudisial Bangalore, Paragraf 6(6)). Ketertiban mengacu pada tingkat keteraturan dan kesopanan yang diperlukan untuk menjamin bahwa urusan pengadilan akan diselesaikan sesuai dengan aturan yang mengatur persidangan. Para hakim harus memastikan bahwa argumen para pihak disampaikan dengan sopan.

Mereka tidak boleh membiarkan para pihak atau pengacara mereka menghina pihak lain. Decorum mengacu pada suasana yang penuh perhatian dan para peserta dan publik bahwa masalah di depan pengadilan menerima pertimbangan yang serius dan adil (Ibid). Oleh karena itu, hakim tidak boleh membiarkan anggota masyarakat yang hadir di pengadilan berperilaku dengan cara yang menarik perhatian hakim dan para pihak. Sebagai contoh, hakim harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari gangguan pada persidangan karena suara-suara yang mengganggu yang dibuat oleh publik. Pasal 11 Kode Etik Hakim Federal mewajibkan para hakim untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan korektif terhadap pihak yang berperilaku tidak pantas atau yang mencoba menunda disposisi kasus melalui cara-cara yang tidak pantas. Dengan demikian, menjaga ketertiban dan kesopanan pengadilan adalah salah satu aspek dari tugas etis hakim yang kompeten dan tekun. Seorang hakim yang membiarkan para pihak atau pihak lain di pengadilan menunjukkan perilaku yang tidak pantas yang mempengaruhi pemeriksaan perkara berarti tidak mempertimbangkan perkara dengan bijaksana.

Kesabaran, martabat, dan kesopanan adalah atribut penting dari tugas etis kompetensi
Kode Etik Hukum – Dr. Agus Wibowo

dan ketekunan. Hakim harus sabar, bermartabat, dan sopan dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang berperkara, saksi, advokat, dan pihak lain (Prinsip-Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore, Paragraf 6(6)). Pasal 18 Kode Etik Peradilan Federal mengharuskan hakim untuk bersikap bijaksana, sopan, sabar, dan hati-hati. Cara hakim berperilaku sangat penting untuk menjaga ketidakberpihakan mereka. Perilaku yang tidak pantas terhadap para pihak atau advokat mereka akan memberikan kesan bias. Perilaku yang tidak sopan terhadap pihak yang berperkara melanggar hak-hak mereka untuk didengar dan membahayakan martabat pengadilan. Perlakuan yang tidak sopan terhadap para pihak mempengaruhi kepuasan mereka terhadap penanganan kasus mereka.

Oleh karena itu, hakim harus selalu bersikap sopan dan menghormati martabat semua pihak yang ada di hadapannya. Teguran yang tidak dapat dibenarkan terhadap advokat, komentar yang menyinggung pihak-pihak yang berperkara adalah beberapa tindakan yang bertentangan dengan Pasal 18 Kode Etik Peradilan. Kesetaraan Menurut Pasal 5 Kode Etik Yudisial federal, hakim harus memperlakukan semua pihak yang berperkara di pengadilan secara setara dan melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh membiarkan hubungan keluarga, agama, bangsa, kebangsaan, politik, sosial, atau hubungan lain yang mempengaruhi kinerja jabatan peradilan. Banyak instrumen internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konstitusi FDRE melarang diskriminasi atas dasar ras, bangsa, kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, harta benda, kelahiran atau alasan lainnya.

Undang-undang ini mengakui bahwa kesetaraan di hadapan hukum adalah atribut penting dari keadilan. Menurut Kode Etik Peradilan federal, kesetaraan adalah fitur kinerja peradilan yang sangat terkait dengan ketidakberpihakan peradilan. Kegagalan untuk memperlakukan semua orang secara setara di depan pengadilan menyiratkan keberpihakan pengadilan. Dalam mempromosikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak di pengadilan, hakim harus menghindari stereotip, diskriminasi gender, dan komentar yang merendahkan. Hakim tidak boleh membentuk gagasan tetap tentang para pihak yang mungkin tidak benar. Sebagai contoh, hakim tidak boleh terpengaruh oleh sikap masyarakat yang menganggap bahwa anggota kelompok etnis tertentu berpotensi melakukan tindak kriminal. Seorang hakim harus mengoreksi stereotip semacam itu. Hakim harus memastikan bahwa pengadilan memberikan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan.

Hakim harus menghindari ucapan, gerak tubuh, atau perilaku yang menunjukkan diskriminasi gender. Dengan demikian, mengomentari penampilan fisik pengacara perempuan dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Hakim tidak boleh menunjukkan prasangka terhadap seseorang atau kelompok dengan alasan yang tidak relevan, hakim harus menghindari komentar, gerak tubuh, ekspresi, atau perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai menunjukkan rasa tidak hormat. Mereka juga harus menghindari komentar yang menghina. Hakim harus memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa staf pengadilan, pihak-pihak yang berperkara, dan pengacara tidak mendiskriminasi orang lain dengan alasan yang tidak relevan.

Kesopanan di antara para Hakim Kesopanan adalah kesantunan atau kesopanan. Kritik yang tidak sopan terhadap sesama hakim adalah ketidaksopanan. Ketidaksopanan menyiratkan kurangnya rasa hormat dan kerja sama di antara para hakim. Pasal 9 Kode Etik Yudisial mewajibkan hakim pengadilan federal untuk melaksanakan tugas yudisial mereka dengan bekerja sama dengan kolega mereka. Hal ini mengharuskan para hakim untuk menghormati satu sama lain. Administrasi peradilan adalah kerja tim. Kurangnya kerja sama di antara para hakim secara serius merusak semangat tim.

Oleh karena itu, kesopanan di antara para hakim merupakan salah satu ciri khas dari temperamen peradilan. Hakim harus menjadi model kesopanan. Hakim membuat opini ketika mereka memutuskan sebuah kasus. Mereka membuat komentar kritis tentang hakim lain atau pengadilan atau peradilan ketika mereka memutuskan suatu kasus. Hakim juga dapat memberikan komentar kritis terhadap hakim lain di depan umum atau secara pribadi meskipun mereka tidak sedang memutus perkara, misalnya di media. Komentar-komentar kritis ini, baik yang disampaikan dalam catatan pengadilan dalam bentuk pendapat mayoritas atau perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) atau pendapat hakim pengadilan banding, baik yang disampaikan di luar catatan pengadilan di depan umum maupun secara pribadi, biasanya dapat menimbulkan isu-isu kesopanan di antara para hakim.

Hakim harus menghindari serangan pribadi terhadap sesama hakim ketika mereka menulis pendapat mayoritas, pendapat yang sependapat, atau pendapat yang tidak sependapat. Oleh karena itu, merendahkan pendapat yang berbeda dengan mengatakan 'bodoh' merupakan tindakan yang tidak sopan. Hakim pengadilan banding harus menghindari serangan pribadi terhadap hakim pengadilan yang lebih rendah. Mereka harus ingat bahwa mereka duduk -dalam menilai kasus, bukan sesama hakim. Serangan pribadi, baik yang dilakukan oleh hakim yang menulis pendapat mayoritas atau hakim pengadilan banding, tidak ada hubungannya dengan administrasi pengadilan. Sebaliknya, hal tersebut mengikis rasa hormat publik terhadap pengadilan banding. Pembatalan putusan merupakan teguran bagi hakim pengadilan yang lebih rendah. Kritik lain terhadap hakim adalah berlebihan. Serangan pribadi juga dapat mengurangi pengaruh hakim di antara rekan-rekannya.

Hakim tidak boleh mengkritik hakim lain di depan umum. Sebagai contoh, Hakim Andi, seorang hakim pengadilan tinggi federal, tidak boleh mengatakan bahwa Hakim Septian, seorang hakim pengadilan tingkat pertama federal, tidak kompeten, korup, dan sebagainya. Kritik semacam itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap kualitas keadilan yang diberikan oleh hakim yang menjadi sasaran kritik. Hal ini juga menimbulkan keraguan pada temperamen hakim yang mengkritik.

3.2 PERSYARATAN ETIKA HAKIM DALAM KEGIATAN EKSTRA YUDISIAL

Kegiatan ekstra yudisial adalah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas yudisial. Hakim adalah manusia biasa yang memiliki hubungan ekonomi, sosial, politik, agama, komersial, dan hubungan lainnya dengan orang lain. Mereka memiliki kehidupan di luar pengadilan. Hampir setiap hakim harus menabung, berinvestasi dan/atau menyimpan dana, baik dana tersebut dikumpulkan sebelum menjadi hakim atau hanya sebagai bentuk kehati-

hatian dalam mengelola pendapatan yang ada. Dengan demikian, setiap hakim terlibat dalam beberapa jenis kegiatan keuangan. Kode etik peradilan federal tidak melarang bisnis tertentu atau kegiatan lain. Pasal 28 melarang secara umum kegiatan yang konsisten dengan tugas yudisial berdasarkan Pasal. Pasal 27 hakim dilarang menggunakan jabatannya untuk memajukan kepentingan pribadi.

Di beberapa yurisdiksi, hakim diizinkan untuk melakukan kegiatan tertentu dan dilarang melakukan kegiatan lain Di Amerika Serikat, hakim dilarang melakukan kegiatan tertentu seperti praktik hukum.

Tujuan utama melarang atau membatasi hakim untuk terlibat dalam kegiatan ekstra yudisial tertentu bukanlah untuk mencegah pengaturan bisnis hakim. Tujuan pembatasan atau pelarangan adalah untuk menghindari kesan keberpihakan. Aturan yang membatasi kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas yudisial bertujuan untuk menghindari kegiatan yang dapat mengganggu tugas yudisial, menghilangkan konflik kepentingan antara hakim dan para pihak atau pengacara mereka, menghindari penyalahgunaan jabatan yudisial, dan menjaga martabat peradilan. Berikut ini adalah beberapa daftar kegiatan yang diperbolehkan atau dilarang bagi hakim. Investasi Pasif Di Amerika Serikat, investasi pasif diperbolehkan bagi para hakim. Investasi pasif meliputi kepemilikan saham, obligasi, saham reksadana, dan instrumen keuangan lainnya.

Lubet berpendapat bahwa tidak mungkin untuk melarang investasi pasif karena investasi pasif jarang menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan, penghinaan, atau campur tangan dalam tugas peradilan. Investasi pasif tidak memakan waktu karena hakim dapat mengelola investasi pasif setelah jam kerja atau saat istirahat, di hari kerja. Investasi pasif menimbulkan masalah konflik kepentingan. Hakim harus mendiskualifikasi diri mereka sendiri setiap kali ada konflik kepentingan. Menurut paragraf 23 dari prinsip-prinsip perilaku yudisial Bangalore, hakim harus mengurangi kemungkinan penolakan atau diskualifikasi dari bangku pengadilan. Penolakan atau diskualifikasi tidak dapat dihindari, namun hakim memiliki kewajiban etis untuk mengurangi konflik kepentingan yang tidak perlu yang memiliki kewajiban etis untuk mengurangi konflik kepentingan yang tidak perlu yang muncul ketika hakim memiliki kepentingan keuangan dalam organisasi dan entitas lain yang muncul secara teratur di pengadilan.

Kewajiban untuk mengurangi kemungkinan penolakan dibebankan kepada hakim karena penolakan memberikan beban kepada para pihak, advokat mereka dan menunda administrasi peradilan serta memberikan beban kerja yang tidak proporsional bagi anggota pengadilan lainnya. Oleh karena itu, investor pasif harus mengurangi kemungkinan penolakan atau diskualifikasi. Eksploitasi jabatan yudisial dapat muncul dalam konteks investasi pasif meskipun tidak sering terjadi seperti dalam mencari keuntungan nyata dan memperdagangkan keterlibatan bisnis aktif dan/atau promosi amal atau korupsi yang sebenarnya. Seorang hakim yang menggunakan informasi rahasia yang diperolehnya melalui proses persidangan untuk mengembangkan kepentingan pribadi dalam properti dan menekan pihak yang berperkara untuk menjual properti tersebut kepadanya dengan harga yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hakim tersebut telah melakukan eksploitasi jabatan

kehakiman-dalam kasus seperti ini, investasi pasif dilarang. Bahkan investasi pasif di bidang-bidang tertentu seperti perusahaan yang memiliki izin minuman keras dan perjudian dilarang di AS karena bisnis semacam itu dapat dianggap tidak bermartabat atau secara inheren merusak.

Manajemen Aktif dapat dilihat sebagai penggunaan waktu dan energi untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji hakim. Di Amerika Serikat, hakim dilarang menjadi pejabat, direktur, manajer, penasihat, atau karyawan dari bisnis apa pun. Tentu saja dalam banyak kasus, menjadi pejabat, direktur, manajer, penasihat, atau karyawan dari bisnis apa pun dapat mempengaruhi imparialitas, mengganggu pelaksanaan tugas yudisial yang benar, atau melibatkan hakim dalam transaksi yang sering terjadi dengan advokat atau orang-orang yang mungkin datang ke pengadilan. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, hakim sama sekali dilarang untuk mengelola dan terlibat dalam bisnis. Ketika aktivitas keuangan menjadi lebih aktif secara pribadi dan menyita waktu, maka aktivitas tersebut lebih mungkin untuk dilarang meskipun tidak mengganggu tugas peradilan.

Praktik Hukum

Prinsip-Prinsip Perilaku Yudisial Bangalore melarang hakim untuk berpartisipasi dalam praktik hukum. Prinsip ini menyatakan dalam ayat 4(12) bahwa seorang hakim tidak boleh berpraktik hukum selama ia memegang jabatan yudisial. Praktik hukum termasuk pekerjaan yang dilakukan di luar pengadilan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan proses pengadilan. Beberapa contoh praktik hukum adalah meyakinkan dan memberikan nasihat hukum tentang berbagai hal, menyiapkan dan melaksanakan instrumen hukum yang mencakup bidang bisnis dan hubungan kepercayaan yang luas dan urusan lainnya menyiapkan pembelaan di pengadilan dan dokumen-dokumen hukum seperti surat wasiat dan kontrak juga dilarang.

Di Amerika Serikat, apa yang disebut dalam Pasal 2 Proklamasi No. 199/2000 sebagai jasa advokasi dilarang bagi para hakim. Dengan demikian, praktik hukum identik dengan jasa advokasi. Larangan berpraktik hukum ini juga berlaku untuk mewakili anggota keluarga dekat. Satu-satunya pengecualian dalam hal ini adalah hakim yang mewakili diri mereka sendiri. Bahkan dalam hal ini, hakim harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan menerima perlakuan istimewa.

Bertindak sebagai Fidusia Hakim dilarang bertindak dalam kapasitas fidusia di bawah kode etik yudisial model ABA dan prinsip-prinsip perilaku yudisial Bangalore. Hakim dilarang menjadi eksekutor, administrator, wali, pengampu, atau fidusia lainnya. Tidak menjadi masalah apakah hakim menerima remunerasi untuk jasa mereka atau bekerja secara gratis. Larangan ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pihak-pihak swasta dapat mengambil keuntungan dengan meminta seorang hakim untuk bertindak sebagai pelaksana, wali amanat, administrator atau wali. Satu-satunya pengecualian terhadap larangan untuk bertindak sebagai fidusia adalah untuk anggota keluarga dan teman dekat.

Seorang hakim dapat bertindak sebagai eksekutor, administrator, wali amanat, wali atau fidusia lainnya atau wali harta peninggalan atau orang atau anggota keluarga atau teman dekat jika layanan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas peradilan yang tepat,

asalkan hakim melakukannya tanpa remunerasi. Dasar pemikirannya adalah bahwa pelayanan keluarga merupakan faktor penyeimbang yang cukup untuk mengimbangi segala bentuk keuntungan yang tampak bagi pihak lain.

3.3 ARBITRASE DAN MEDIASI

Arbitrase dan mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter atau mediator biasanya menerima remunerasi untuk menyelesaikan sengketa di Kami. Kode etik yudisial model ABA melarang hakim untuk bertindak sebagai arbiter atau mediator. Larangan ini berlaku bahkan jika arbiter atau mediator tidak mencampuri tugas peradilan karena arbitrase atau mediasi tidak mencampuri tugas peradilan. Karena proses arbitrase dapat diajukan ke pengadilan di mana hakim tersebut duduk, pengadilan dapat ditarik ke dalam kontroversi sosial dan politik di mana hakim bertindak sebagai arbiter, kantor yudisial dapat dieksploitasi oleh arbiter. Kantor peradilan dapat dieksploitasi dalam upaya untuk mengamankan martabatnya, dan dapat dialihkan dalam kasus di mana biaya hakim akan menjadi ribuan dolar. Integritas peradilan biasanya dianggap kurang diperhatikan jika seorang hakim mengambil keuntungan finansial dari kantor peradilan dengan memberikan layanan penyelesaian sengketa pribadi untuk mendapatkan keuntungan finansial sebagai kegiatan ekstra yudisial.

Pendidikan Hakim dapat berpartisipasi dalam pendidikan masyarakat dan/atau pendidikan hukum. Paragraf 4(11) dari Prinsip-Prinsip Perilaku Yudisial Bangalore menyatakan bahwa "Tunduk pada pelaksanaan tugas yudisial yang tepat, hakim dapat menulis, memberi ceramah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan atau hal-hal yang terkait". "Seorang hakim memiliki posisi yang unik untuk berkontribusi pada peningkatan hukum, sistem hukum dan administrasi peradilan baik di dalam maupun di luar yurisdiksi hakim. Kontribusi tersebut dapat berupa berbicara, menulis, mengajar, atau berpartisipasi dalam kegiatan ekstra yudisial lainnya".

Seorang hakim dapat berkontribusi pada pendidikan hukum dan profesional dengan memberikan kuliah, berpartisipasi dalam konferensi dan seminar, menilai sidang pelatihan mahasiswa, dan bertindak sebagai penguji. Seorang hakim juga dapat berkontribusi pada literatur sebagai penulis atau editor. Kegiatan profesional oleh hakim seperti itu adalah untuk kepentingan publik dan harus didorong. Pembatasan bagi hakim dalam hal ini adalah bahwa hakim harus menghindari mengomentari kasus yang tertunda atau yang akan datang. Mereka harus menjaga agar kegiatan menulis, mengajar dan sejenisnya tidak mengganggu tugas-tugas yudisial, misalnya, dengan menghabiskan banyak waktu hakim.

Kegiatan Politik Hakim tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan politik. Menurut Pasal 8(2) Proklamasi No. 24/1996 (Proklamasi Pembentukan Komisi Administrasi Yudisial Federal), "[t]idak ada orang yang dapat secara bersamaan menjabat sebagai hakim saat menjadi anggota organisasi politik apa pun." Ketentuan ini melarang keanggotaan dalam organisasi politik.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, seorang hakim tidak dapat erpidato atas nama

Kode Etik Hukum – Dr. Agus Wibowo

organisasi politik; secara terbuka mendukung atau menentang seorang kandidat untuk jabatan publik apa pun; meminta dana untuk, membayar penilaian, atau memberikan kontribusi kepada organisasi politik atau calon pejabat publik; menghadiri atau membeli tiket makan malam atau acara lain yang disponsori oleh organisasi politik atau calon pejabat publik; mencari, menerima, atau menggunakan dukungan dari organisasi politik;.

Keanggotaan dalam Organisasi Hakim, seperti halnya warga negara lainnya, memiliki kebebasan berserikat dalam melaksanakan hal ini. Hakim dapat bergabung dengan serikat pekerja atau asosiasi profesional yang didirikan untuk memajukan dan melindungi kondisi pelayanan atau gaji hakim atau berkumpul dengan hakim lain untuk serikat pekerja atau asosiasi semacam itu. Para hakim juga dapat berpartisipasi dalam komunitas, organisasi nirlaba dan badan pengurusnya, contohnya, termasuk organisasi amal, dewan universitas atau sekolah, badan keagamaan, dewan rumah sakit, klub sosial, organisasi olahraga dan organisasi yang memajukan kepentingan budaya atau seni.

Namun, Tidaklah tepat bagi hakim untuk berpartisipasi dalam suatu organisasi yang tujuannya bersifat politis jika kegiatannya dapat menimbulkan kontroversi publik atau jika organisasi tersebut secara teratur atau sering terlibat dalam litigasi. Tidak boleh ada permintaan yang berlebihan terhadap waktu hakim. Seorang hakim tidak boleh menjadi penasihat hukum. Hakim tidak boleh meminjamkan namanya dalam penggalangan dana apa pun.

3.4 PENGANGKATAN, PENARIKAN, DAN PROMOSI HAKIM

Penunjukan Yudisial

Prosedur seleksi, pengangkatan, dan promosi hakim mengatur perekrutan dan kepegawaian pengadilan, dan dapat menjadi syarat utama untuk memastikan akuntabilitas peradilan. Namun, lembaga peradilan dapat mengalami tekanan eksternal dan internal yang berbeda, tergantung pada apakah hakim ditunjuk oleh eksekutif dan legislatif, atau direkrut dan dipromosikan dari dalam peradilan karir atau dari sistem kepegawaian nasional. Prosedur seleksi, pengangkatan, dan promosi, serta transparansi dari prosedur-prosedur tersebut penting untuk menjamin independensi peradilan dan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Akan tetapi, independensi dan akuntabilitas peradilan dapat dijamin melalui berbagai pengaturan kelembagaan.

Secara umum, negara-negara dengan sistem peradilan karier cenderung mendorong independensi kelembagaan pengadilan. Di negara-negara dengan sistem peradilan karier, seleksi, pengangkatan, dan promosi hakim dilakukan dari dalam sistem karier yudisial atau pegawai negeri. Pada saat yang sama, sistem peradilan karier dapat memberikan kontrol yang besar kepada, misalnya, ketua pengadilan dan/atau komisi pelayanan yudisial seperti dewan administrasi peradilan, yang pada gilirannya dapat membatasi dan menghukum kemandirian hakim secara individual. Prosedur seleksi dan promosi hakim non-karier dilakukan melalui penunjukan oleh eksekutif, legislatif, atau kombinasi keduanya, dan juga melalui pemilihan umum partisan dan non-partisan. Prosedur seleksi dan promosi hakim seperti ini cenderung mendorong akuntabilitas peradilan terhadap kekuatan eksternal, seperti pemerintah, partai

politik, kelompok kepentingan, dan publik.

Namun, hal itu dilakukan dengan harga yang mahal, yaitu membatasi independensi pengadilan secara keseluruhan dan independensi hakim secara individu. Di Amerika Serikat dan Kanada, misalnya, pengangkatan hakim non-karier diadopsi. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, sebagian besar negara menerapkan beberapa bentuk peradilan karier atau mekanisme campuran karier dan non-karier untuk seleksi dan pengangkatan hakim, tergantung pada tingkat pengadilan yang terlibat. Pengecualian terdapat di negara-negara di mana eksekutif dan/atau legislatif dan partai politik menentukan seleksi, pengangkatan, dan promosi hakim, seperti di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Di negara-negara ini, pelatihan hukum, standar dan kualifikasi hakim cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem peradilan karier.

Masa Jabatan dan Mekanisme Pemecatan Hakim

Masa jabatan hakim dan mekanisme untuk mendisiplinkan dan memberhentikan hakim sama pentingnya dalam menjamin independensi peradilan seperti halnya proses pemilihan, pengangkatan, dan promosi hakim. Masa jabatan hakim berkontribusi untuk melindungi hakim dari tekanan eksternal dan independensi mereka di pengadilan. Para hakim tidak perlu dijamin untuk menjabat seumur hidup, tetapi masa jabatan yang terlalu terbatas dapat merusak perkembangan independensi peradilan. Demikian juga, mekanisme untuk mendisiplinkan dan memberhentikan hakim diperlukan untuk memastikan akuntabilitas peradilan dan mencegah terjadinya miscarriage of justice karena adanya gangguan dan disabilitas pada hakim. Namun, masa jabatan hakim yang terlalu pendek, keharusan untuk pensiun pada usia yang relatif muda, dan prosedur yang bersifat ad hoc, sewenang-wenang, dan tidak jelas dalam mendisiplinkan dan memberhentikan hakim dapat merusak wibawa jabatan hakim dan kemandirian institusional pengadilan.

Kriteria untuk Penunjukan

Keterampilan Hukum

Kualitas utama yang diperlukan dari seorang hakim adalah kepemilikan, atau kapasitas untuk mengembangkan, keterampilan hukum profesional yang diperlukan untuk pekerjaan peradilan. Keterampilan ini termasuk pengetahuan tentang bukti, prosedur dan praktik, pengetahuan tentang hukum, kemampuan analitis, kapasitas untuk menyelesaikan kasus dengan lancar dan efisien dan kapasitas untuk memberikan keputusan yang beralasan dengan ketepatan waktu yang wajar.

Kualitas Pribadi

Kualitas pribadi tertentu sangat diperlukan. Ini adalah kualitas seperti integritas, ketidakberpihakan, industri, rasa keadilan yang kuat, dan kemauan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Tidak diragukan lagi, kualitas-kualitas lain juga diperlukan. Karena keadilan tidak lagi merupakan kebajikan yang tertutup, kemampuan untuk berkomunikasi dengan komunitas hukum dan masyarakat tentang hukum dan pekerjaan pengadilan lebih dihargai daripada sebelumnya.

Kualitas Khusus untuk Pengadilan dan Kantor Kehakiman Tertentu Jelas bahwa kualitas tertentu mungkin diperlukan untuk hakim yang ditunjuk untuk pengadilan spesialis. Demikian

pula, kualitas tertentu mungkin diperlukan untuk jabatan-jabatan yudisial tertentu. Posisi Ketua Pengadilan, kepala pengadilan dan pemimpin divisi dan hakim yang mungkin memiliki tanggung jawab administratif khusus memerlukan kualitas khusus yang berbeda.

Penunjukan Hakim di Amerika Serikat

Hakim-hakim Mahkamah Agung, hakim-hakim pengadilan banding dan pengadilan distrik, dan hakim-hakim Pengadilan Perdagangan Internasional, diangkat berdasarkan Pasal III Konstitusi. Mereka dicalonkan dan diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan harus dikonfirmasi oleh suara mayoritas Senat. Hakim-hakim Pasal III diangkat untuk seumur hidup, dan mereka hanya dapat diberhentikan oleh Kongres melalui proses pemakzulan yang ditentukan dalam Konstitusi. Lembaga peradilan tidak berperan dalam proses pencalonan atau konfirmasi. Kriteria utama untuk penunjukan sebagai hakim federal adalah total prestasi karier dan akademis seseorang. Tidak ada ujian yang diberikan kepada para calon hakim. Sebaliknya, seseorang yang ingin menjadi hakim diharuskan untuk mengisi serangkaian formulir yang panjang yang menjelaskan secara rinci kualifikasi pribadi dan pencapaian kariernya, termasuk hal-hal seperti latar belakang akademis, pengalaman kerja, tulisan-tulisan publik, kegiatan intelektual, kasus-kasus hukum yang pernah ditangani, dan aktivitas di luar pekerjaan. Para kandidat juga harus menjalani wawancara ekstensif, investigasi latar belakang, dan pertanyaan lanjutan.

Politik merupakan faktor penting dalam pengangkatan hakim-hakim Pasal III. Para calon biasanya dipilih oleh Presiden dari daftar calon yang disediakan oleh para Senator atau pemegang jabatan lain dari partai Presiden sendiri di negara bagian tempat pengangkatan akan dilakukan. Selain itu, calon yang diajukan oleh Presiden harus hadir secara langsung dalam sidang dengar pendapat di hadapan Komite Kehakiman Senat, dan Senat harus melakukan pemungutan suara untuk mengukuhkan setiap hakim. Hakim-hakim Pasal III biasanya dicalonkan oleh Presiden dari kalangan pengacara terkemuka, hakim pengadilan federal yang lebih rendah, hakim pengadilan negara bagian, atau profesor hukum yang berdomisili di distrik atau sirkuit di mana pengadilan tersebut berada.

Setiap hakim federal ditunjuk untuk mengisi jabatan hakim yang spesifik dan berwenang di distrik atau sirkuit tertentu. Hakim tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus di pengadilan lain kecuali mereka secara resmi ditunjuk untuk melakukannya. Karena beban kasus yang berat di distrik tertentu, hakim dari pengadilan lain sering diminta untuk mengadili kasus di distrik tersebut.

Pengangkatan dan Pemecatan Hakim di India

Di India, hakim-hakim Mahkamah Agung ditunjuk oleh eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif tidak memiliki peran dalam penunjukan para hakim. Namun, para hakim Mahkamah Agung tidak dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa persetujuan legislatif. Bacalah kutipan-kutipan berikut ini dari Konstitusi India Shukla mengenai pengangkatan hakim-hakim Mahkamah Agung. Setiap hakim Mahkamah Agung diangkat oleh presiden dengan surat perintah di bawah tangan dan meterai. Kekuasaan presiden untuk mengangkat hakim tidaklah tanpa batas. Konstitusi secara tegas mengharuskannya untuk berkonsultasi dengan para hakim di Mahkamah Agung, dan pengadilan tinggi, yang dianggap perlu. Konstitusi juga

mengharuskannya untuk selalu berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung India dalam penunjukan hakim selain Ketua Mahkamah Agung India.

Menurut penafsiran pengadilan atas ketentuan-ketentuan ini, proses penunjukan hakim diprakarsai oleh Ketua Mahkamah Agung melalui sebuah kolegium yang terdiri dari dirinya sendiri dan empat hakim paling senior di pengadilan. Rekomendasi dari kolegium tersebut mengikat presiden. Akan tetapi, ia dapat tidak menunjuk seseorang yang karena alasan tertentu dianggap tidak layak untuk diangkat. Dalam hal demikian, kolegium harus mempertimbangkan kembali rekomendasinya. Dalam pertimbangan ulang, kolegium dapat membatalkan nama orang yang tidak dianggap cocok oleh presiden atau mengulangi rekomendasinya. Dalam kasus terakhir, presiden harus menerima rekomendasi tersebut. Konstitusi tidak memberikan indikasi mengenai prosedur penunjukan Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa sebagai suatu aturan, hakim paling senior di Mahkamah Agung akan selalu ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung India jika ia memenuhi syarat untuk ditunjuk.

Ayat (3) dari [Pasal 124] menetapkan kualifikasi seorang hakim Mahkamah Agung. Ia harus pernah menjadi hakim Pengadilan Tinggi di India selama sekurang-kurangnya lima tahun atau advokat dengan masa kerja sepuluh tahun, atau menurut pendapat Presiden, seorang ahli hukum yang terhormat. Selain kualifikasi formal ini, penekanan besar telah diberikan pada kualitas-kualitas lain dari seorang hakim seperti kejujuran, ketidakberpihakan, kemandirian, dan lain-lain untuk memastikan kemandirian dan kompetensi peradilan; penekanan besar telah diberikan pada kemampuan seseorang yang akan ditunjuk sebagai hakim.

Seorang hakim dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menulis surat di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden. Ia juga dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat (4) [Pasal 124]. Seorang hakim Mahkamah Agung dapat diberhentikan atas perintah Presiden karena terbukti melakukan pelanggaran atau tidak cakap. Tetapi kekuasaan Presiden untuk memberhentikan hakim hanya dapat dilaksanakan setelah sebuah pidato dari setiap Dewan Perwakilan Rakyat, yang didukung oleh mayoritas dari total keanggotaan Dewan tersebut dan mayoritas tidak kurang dari dua pertiga dari anggota Dewan yang hadir dan memberikan suara, disampaikan kepada Presiden dalam sesi yang sama untuk pemberhentian tersebut. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan setelah tuduhan terhadap hakim terbukti, yaitu setelah diselidiki dan diputuskan oleh pengadilan yang tidak memihak.

Pengangkatan, Penarikan dan Pemecatan Hakim di Ethiopia

Dewan Administrasi Yudisial Federal

Di Etiopia, ketiga cabang pemerintahan berpartisipasi dalam penunjukan hakim di pengadilan Etiopia yang dibentuk oleh konstitusi FDRE. Lembaga yudikatif tidak memiliki suara dalam penunjukan presiden dan wakil presiden pengadilan tinggi regional atau Mahkamah Agung federal (Pasal 81(1) & (3)). Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung federal ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas rekomendasi Perdana Menteri. Presiden dan wakil presiden dari mahkamah agung negara bagian ditunjuk oleh dewan negara bagian masing-masing atas rekomendasi dari kepala eksekutif negara bagian.

Keputusan akhir mengenai penunjukan ketua dan wakil ketua pengadilan tinggi berada di tangan legislatif. Perdana Menteri atau kepala eksekutif tidak dapat menunjuk seseorang untuk jabatan yudisial jika orang tersebut dianggap tidak layak untuk jabatan tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan negara bagian. Dengan demikian, untuk menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi negara bagian atau Mahkamah Agung federal, seseorang harus mendapatkan dukungan dari eksekutif dan legislatif. Hakim federal pada tingkat mana pun kecuali Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Agung ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari daftar yang diajukan oleh Perdana Menteri. Daftar ini berisi calon-calon yang dipilih oleh Dewan Administrasi Yudisial federal.

Eksekutif negara bagian kurang terlibat dalam pengangkatan hakim jika dibandingkan dengan pemerintah federal. Dalam pemerintahan federal, Perdana Menteri terlibat dalam penunjukan setiap hakim federal. Kepala eksekutif negara bagian hanya dapat berpartisipasi dalam penunjukan presiden dan wakil presiden pengadilan tinggi negara bagian. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas penunjukan hakim biasa di pengadilan di tingkat mana pun. Bahkan mereka tidak dapat menunjuk ketua pengadilan tinggi.

Semua hakim pengadilan negara bagian kecuali ketua dan wakil ketua mahkamah agung ditunjuk oleh dewan negara bagian atas rekomendasi dari dewan administrasi peradilan negara bagian. Dalam merekomendasikan hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung kepada dewan negara bagian, dewan administrasi peradilan negara bagian harus mendapatkan pandangan dari dewan administrasi peradilan federal. Dewan administrasi peradilan Federal terdiri dari sembilan anggota. Tiga di antaranya adalah perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Enam anggota lainnya berasal dari pengadilan federal. Mereka adalah ketua pengadilan tingkat pertama federal, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung; dua hakim paling senior, satu dari Mahkamah Agung dan satu lagi dari pengadilan tinggi; dan wakil ketua Mahkamah Agung federal. Dewan ini diketuai oleh ketua Mahkamah Agung federal.

Dewan tersebut diberi mandat untuk menyeleksi calon hakim; mengeluarkan Peraturan Disiplin dan Kode Etik untuk hakim federal; memutuskan pemindahan, gaji, tunjangan, promosi, tunjangan kesehatan, dan penempatan hakim federal; meneruskan pendapat kepada dewan administrasi peradilan negara bagian, dan menentukan masalah disiplin (Pasal 5 Proklamasi No. 24/1996). Kriteria untuk Penunjukan Yudisial Menurut Pasal 8 Proklamasi No. 24/1996 (Proklamasi Pembentukan Komisi Administrasi Yudisial Federal), Dewan Administrasi Yudisial federal merekomendasikan seseorang untuk menjadi hakim ketika orang tersebut memenuhi kriteria berikut.

1. Kebangsaan

Warga negara asing tidak dapat menjadi hakim federal. Pengetahuan tentang budaya dan bahasa di samping pelatihan di Ethiopia tidak dapat membuat seseorang memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Sebagai contoh, seorang warga negara Prancis yang lulus sarjana hukum dari Universitas Haramaya dan fasih berbahasa Amharik tidak dapat menjadi hakim. Seseorang adalah orang Etiopia jika kedua atau salah satu orang tuanya adalah orang Etiopia. (Pasal 6 Konstitusi).

2. Kesetiaan pada Konstitusi

Untuk dapat terpilih sebagai hakim federal, seseorang harus setia kepada konstitusi Republik Demokratik Federal Etiopia. Seseorang dikatakan setia kepada konstitusi apabila ia menghormati dan melindungi konstitusi. Sebagai contoh, seseorang yang mencoba untuk menjungkirbalikkan dengan paksa organ-organ yang ditetapkan oleh konstitusi tidak dianggap setia kepada konstitusi.

3. Pelatihan Hukum atau Keterampilan Hukum

Kelulusan dari universitas atau perguruan tinggi bukan merupakan prasyarat untuk menjadi hakim. Keterampilan hukum yang memadai sudah cukup untuk menjadi hakim. Keterampilan hukum ini dapat diperoleh tanpa harus masuk sekolah hukum melalui pengalaman di pengadilan.

4. Ketekunan, Rasa Keadilan dan Perilaku yang Baik

Seseorang yang rajin melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dengan memperhatikan setiap detail. Orang yang ceroboh tidak akan direkomendasikan untuk menjadi hakim oleh dewan administrasi peradilan. Seseorang harus bersikap adil terhadap orang lain ketika mereka membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak adil dalam keputusan yang mereka buat sebagai individu tidak dapat direkomendasikan untuk posisi tersebut. Untuk dapat direkomendasikan sebagai hakim, seseorang harus memiliki perilaku yang baik. Seseorang dikatakan berkelakuan baik apabila ia memiliki kebiasaan yang dihargai oleh masyarakat. Sebagai contoh, kebiasaan pemabuk tidak dapat dianggap memiliki perilaku yang baik. Demikian pula, seseorang yang melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dan lain-lain tidak dapat dianggap memiliki perilaku yang baik.

5. Persetujuan

Persetujuan dari seseorang diperlukan. Jika seseorang tidak suka menjadi hakim, dewan administrasi peradilan federal tidak boleh merekomendasikannya untuk menduduki jabatan hakim. Seseorang tidak berkewajiban untuk memangku jabatan hakim.

6. Usia

Seseorang harus mencapai usia 25 tahun untuk menjadi hakim. Seseorang mencapai usia dewasa pada usia delapan belas tahun. Mereka dianggap mampu melakukan tindakan yuridis pada usia ini. Pasal 8 dari proklamasi No. 24/1996 mensyaratkan tujuh tahun tambahan setelah usia dewasa untuk menjadi hakim. Seorang anggota Dewan Administrasi Yudisial menominasikan seseorang yang menurutnya cocok untuk jabatan hakim. Artinya, setiap anggota dewan memberikan nama-nama orang yang, menurut pendapatnya, memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Sebagai hasilnya, dewan akan memiliki daftar nama-nama orang yang akan dipilih menjadi hakim. Anggota dewan yang menominasikan calon hakim tidak berkewajiban untuk memberikan rincian dari calon hakim yang dinominasikannya.

Pada langkah berikutnya, ketua dewan memberikan profil para nominator kepada dewan. Ia memberikan rincian tentang calon hakim seperti tingkat pendidikan, publikasi, pengalaman kerja, karakter, kewarganegaraan, dan lain-lain kepada dewan. Berdasarkan rincian yang diberikan oleh ketua, dewan memilih calon hakim yang dianggap memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Dewan tidak memilih beberapa orang yang dianggap kurang

memenuhi syarat. Setelah seleksi oleh dewan, ketua dewan menyampaikan calon hakim yang terpilih kepada perdana menteri. Perdana menteri dapat menolak beberapa atau merekomendasikan semua calon hakim untuk diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rekomendasi dewan tidak mengikat perdana menteri. Perdana menteri memiliki keleluasaan untuk menolak semua calon hakim. Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk para hakim dengan suara terbanyak. DPR dapat menolak semua calon hakim atau hanya menolak beberapa orang. DPR tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk menunjuk badan apapun yang direkomendasikan oleh perdana menteri.

Penarikan dan Pemindehan Hakim Para hakim harus menarik diri dari kasus apabila alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 27 Proklamasi No.25/1996 terpenuhi (Pasal 24 Kode Etik Peradilan Federal). Lihat ketidakberpihakan di bagian 2.3. Eksekutif memainkan peran penting dalam penunjukan hakim federal. Akan tetapi, eksekutif tidak mempunyai peran dalam memberhentikan hakim dari jabatannya. Pasal 79 dari konstitusi menetapkan bahwa hakim dapat diberhentikan dari jabatannya hanya berdasarkan keputusan dewan administrasi yudisial dan persetujuan atas keputusan tersebut dari badan legislatif, dewan negara bagian atau Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan badan legislatif dapat memberhentikan hakim hanya dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan ini adalah:

- ✚ Pelanggaran Peraturan Disiplin
- ✚ Ketidakmampuan atau ketidakefisienan yang parah
- ✚ Ketidakmampuan untuk menjalankan tugas yudisial karena sakit

3.5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSYARATAN ETIKA HAKIM

Di antara banyak faktor yang mempengaruhi perilaku etis hakim yang perlu diperhatikan adalah remunerasi, sumber daya pengadilan, beban kerja, dan kegiatan di luar pengadilan. Remunerasi yang kecil dapat membuat hakim rentan terhadap pelanggaran disiplin peradilan. Remunerasi seperti itu dapat menggoda hakim untuk mencari suap dari pihak yang berperkara atau advokat mereka. Karena keterbatasan finansial, hakim dapat menjual keadilan kepada masyarakat. Gaji yang kecil juga dapat mendorong hakim untuk melakukan bisnis lain untuk menambah penghasilan mereka. Mereka mungkin terlibat dalam bisnis paruh waktu dan bisnis semacam itu dapat mempengaruhi tugas-tugas resmi hakim dengan mengambil banyak waktu dan energi hakim. Oleh karena itu, remunerasi yang kecil untuk hakim memiliki pengaruh terhadap independensi etis hakim.

Kelangkaan sumber daya di pengadilan mempengaruhi perilaku etis hakim. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia atau material. Ketersediaan sumber daya seperti komputer, buku-buku di perpustakaan dan perlengkapan lain yang diperlukan dapat meningkatkan kinerja peradilan. Sebagai contoh, seorang hakim harus kompeten dengan memperbarui pengetahuannya tentang hukum. Tetapi jika undang-undang tersebut tidak tersedia untuk hakim tersebut atau buku-buku tidak tersedia, maka akan sangat sulit bagi hakim untuk mengikuti perkembangan hukum. Beban kerja para hakim mempengaruhi kewajiban etis mereka untuk bekerja dengan tekun. Sangat sulit untuk memutuskan perkara secara menyeluruh. Seorang hakim dengan beban kerja yang berlebihan tidak dapat

Kode Etik Hukum – Dr. Agus Wibowo

memperhatikan rincian masalah. Untuk memberikan keputusan yang dipertimbangkan dengan baik, setiap hakim membutuhkan waktu untuk penelitian dan perenungan. Adalah naif untuk mengharapkan keputusan yang bijaksana dari seorang hakim yang sibuk. Oleh karena itu, kegagalan untuk melakukan penelitian dapat mengakibatkan kesalahan hukum yang mengerikan yang membuat hakim dikenakan tindakan disipliner. Kegiatan ekstra yudisial dapat membawa hakim pada konflik kepentingan dengan para pihak yang berperkara atau pengacara mereka. Akibatnya, seorang hakim dapat dianggap memihak meskipun ia tidak mengetahui adanya hubungan tersebut dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak.

Kewajiban (Tanggung Jawab) Atas Pelanggaran Aturan Perilaku

Pelanggaran kode etik yudisial dapat berakibat pada tindakan disipliner. Tindakan yang mengakibatkan pelanggaran kode etik yudisial juga dapat membuat hakim tertentu bertanggung jawab secara perdata dan/atau pidana. Sebagai contoh, menerima suap dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan hukuman pidana karena penyusunan dilarang menurut Kode Etik Yudisial dan KUHP.

Badan Pendisiplinan

Dewan Administrasi Peradilan Federal diberi wewenang untuk mendisiplinkan hakim yang melanggar Kode Etik Peradilan Federal. Pengadilan biasa tidak mengadili masalah disipliner. Bahkan mereka tidak memiliki yurisdiksi banding atau kekuasaan untuk meninjau kembali masalah disipliner.

Tindakan Disiplin

Tindakan disipliner yang akan dijatuhkan kepada hakim yang melanggar Kode Etik Hakim Federal diatur dalam Pasal 10 Aturan Disiplin Hakim Federal. Hukuman-hukuman tersebut disusun dalam urutan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hukuman-hukuman tersebut adalah

- a) Peringatan lisan
- b) Peringatan tertulis
- c) Denda tidak melebihi tiga bulan gaji
- d) Penurunan jabatan dan pemotongan gaji
- e) Pemberhentian dari jabatan

Peringatan adalah disiplin yang paling tidak serius. Peringatan tidak mengakibatkan hilangnya hak.

Tujuan utama dari peringatan adalah untuk mengajarkan hakim agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peringatan dapat bersifat publik atau pribadi. Peringatan publik dipublikasikan di media massa atau sarana lain seperti poster. Peringatan pribadi tidak akan diungkapkan kepada publik melalui media massa atau poster. Tata tertib persidangan menggunakan teguran lisan dan tertulis. Teguran lisan dijatuhkan kepada hakim atas pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Teguran tertulis dijatuhkan kepada hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang lebih berat dari pelanggaran yang dapat dijatuhi teguran lisan.

Aturan proses disipliner tidak menyebutkan hal tersebut. Tampaknya Dewan Administrasi Yudisial memiliki wewenang untuk mempublikasikannya. Denda dijatuhkan

untuk pelanggaran Kode Etik Yudisial yang dianggap lebih serius oleh Dewan Administrasi Yudisial dibandingkan dengan pelanggaran yang hanya mendapatkan peringatan. Jumlah maksimum denda tergantung pada gaji hakim yang melanggar Kode Etik Yudisial. Misalnya, denda maksimum untuk seorang hakim yang gajinya Rp.20.000.000 adalah Rp.60.000.000. Akibatnya, dua orang hakim yang melakukan tindakan yang sama dalam situasi yang sama dapat membayar jumlah denda yang berbeda jika gaji mereka berbeda. Dapat dikatakan bahwa pembayaran denda sesuai dengan kemampuan membayar. Jika denda harus dipotong dari gaji hakim, maka tidak boleh melebihi sepertiga dari total pembayaran.

Dewan Administrasi Yudisial menurunkan pangkat dan memotong gaji hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik Yudisial yang lebih serius daripada kasus-kasus di atas. Penurunan pangkat bersamaan dengan pemotongan gaji. Tergantung pada beratnya pelanggaran, penurunan pangkat dapat berupa penurunan pangkat satu tingkat atau beberapa tingkat. Penurunan pangkat maksimum membuat hakim yang melanggar Kode Etik Yudisial menjadi setara dengan hakim yang baru diangkat. Tidak ada batasan pada kekuasaan Dewan sehubungan dengan jumlah pemotongan gaji. Tampaknya pemotongan gaji tidak boleh menghasilkan remunerasi yang kurang dari gaji yang sesuai dengan pangkat yang paling rendah. Tindakan disipliner yang paling serius adalah pemecatan dari jabatan yudisial. Dalam hal ini, keputusan Dewan Administrasi Yudisial harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan negara bagian.

3.6 PROSEDUR PROSES DISIPLIN

Prosedur pendisiplinan hakim bukan merupakan sistem yang bersifat permusuhan. Dewan Administrasi Yudisial memulai proses terhadap hakim dan memutuskannya. Bahkan ketika pemohon adalah pihak ketiga, pemohon tidak berkewajiban untuk membuktikan kasus terhadap hakim.

1. Inisiasi Setiap orang dapat memulai proses disipliner terhadap hakim

Tidak ada persyaratan kepentingan pribadi dalam hal ini, tidak seperti pasal 33 (2) Hukum Acara Perdata. Pihak-pihak dalam gugatan, advokat, hakim, jaksa penuntut umum, saksi, anggota masyarakat dapat menjadi pemohon (Pasal 5(1) Aturan Proses Disiplin). Seorang anggota Dewan atau Dewan itu sendiri dapat memulai proses tersebut. Seseorang yang menuduh adanya pelanggaran kode etik mengajukan permohonan tertulis dengan bukti-bukti kepada Dewan secara langsung atau melalui ketua pengadilan (Pasal 6). Apabila permohonan diajukan kepada para ketua pengadilan, maka para ketua pengadilan meneruskan permohonan tersebut kepada Dewan.

2. Penyelidikan

Dewan Administrasi Yudisial akan menolak permohonan dan memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon jika ternyata permohonan tersebut tidak berdasar. Akan tetapi, Dewan Administrasi Yudisial akan meneruskan permohonan kepada Departemen Peninjauan Kembali apabila tidak terdapat bukti yang cukup [Pasal 7(a)]. Departemen Peninjauan Kembali akan mengirimkan petisi dan bukti-bukti kepada termohon. Departemen ini menerima pernyataan pembelaan dari tergugat. Departemen ini akan menyerahkan

laporan dan penjelasan kepada Dewan setelah menyelidiki dokumen, berkas, dan orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut (Pasal 9).

3. Pendengaran

Dewan melakukan pemeriksaan ketika meyakini bahwa petisi yang diajukan terhadap seorang hakim adalah tepat. Dewan juga melakukan pemeriksaan ketika laporan dari Departemen Peninjauan Kembali Putusan menunjukkan adanya pelanggaran Kode Etik Yudisial. Dewan menetapkan tanggal untuk pemeriksaan dan memerintahkan hakim untuk hadir pada tanggal tersebut. Komisi ini akan memperingatkan, mendenda, menurunkan pangkat atau memberhentikan hakim dari jabatannya berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran disiplin jika ditemukan pelanggaran Kode Etik Yudisial yang dilakukan oleh hakim.

Kesimpulan

Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan pengangkatan dan seleksi hakim: seleksi dan pengangkatan hakim karier dan seleksi dan pengangkatan hakim non-karier. Sementara pengangkatan hakim karier mendorong independensi kelembagaan pengadilan, metode yang kedua mendorong akuntabilitas peradilan. Para hakim ditunjuk oleh badan legislatif atas rekomendasi eksekutif di antara daftar yang disediakan oleh peradilan di Ethiopia. Dengan demikian, ketiga cabang pemerintahan berpartisipasi dalam pengangkatan hakim di Ethiopia. Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya apabila keputusan dewan administrasi yudisial disetujui oleh legislatif.

Proses seleksi dan pengangkatan hakim sangat mempengaruhi independensi peradilan. Konstitusi FDRE mengatur tentang independensi yudisial secara institusional dan keputusan. Independensi peradilan tidak hanya merupakan fungsi dari ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan pengangkatan, pemecatan, dan kompensasi hakim. Tugas etis para hakim dan kepatuhan terhadap Kode Etik Peradilan memainkan peran penting dalam mencapai independensi yudisial yang menentukan. Oleh karena itu, para hakim harus menghindari komunikasi *ex parte*, donasi, dan hubungan bermasalah lainnya. Independensi peradilan tidak boleh menjadi topeng untuk menghindari akuntabilitas peradilan. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim harus tidak memihak, kompeten dan tekun, sopan, memperlakukan semua pihak yang dihadapinya dengan setara. Pengadilan harus menjaga aspek obyektif dan subyektif dari ketidakberpihakan. Para hakim meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum mereka, mengikuti pelatihan dan menyelesaikan kasus dengan cepat. Dalam kegiatan ekstra-yudisial, para hakim tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak konsisten dengan kegiatan yudisial. Para hakim bertanggung jawab atas hukuman mulai dari peringatan lisan hingga pemecatan dari jabatannya atas pelanggaran kode etik peradilan.

Studi Kasus

Melakukan penelitian melalui wawancara, tinjauan literatur dan metodologi lainnya dan menulis esai singkat tentang salah satu judul berikut:

1. Pemindahan dan promosi hakim
2. Pemindahan dan promosi hakim federal di Ethiopia
3. Pemindahan dan promosi Hakim Negara Bagian Regional Nasional (pilih salah satu negara bagian dari negara bagian regional nasional Ethiopia, misalnya

- Oromia, Afar, dll.)
4. Dampak mutasi dan promosi hakim terhadap independensi peradilan. Masalah yang harus Anda tangani termasuk namun tidak terbatas pada
 - a) Prosedur promosi hakim
 - b) Tahapan-tahapan kenaikan pangkat hakim (dari yang terendah ke yang tertinggi)[misalnya hakim junior, hakim senior, dll. Dapatkah seorang hakim dipromosikan dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi atau dari pengadilan tinggi ke mahkamah agung?]
 - c) Kriteria untuk promosi
 - d) Bagaimana gaji hakim meningkat? (misalnya dengan bertambahnya tahun masa kerja)
 - e) Pemandahan hakim dari satu pengadilan ke pengadilan lain
 - f) Dapatkah hakim dipindahkan dari pengadilan negara bagian ke pengadilan federal

BAB 4

ETIKA ADVOKAT

Pendahuluan

Konstitusi FDRE menjamin hak dasar terdakwa untuk diwakili oleh pengacara. Nasihat sesuai pilihannya, dan jika dia tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya dan akan mengakibatkan kesalahan hukum, harus diberikan bantuan hukum dengan biaya negara (lihat Pasal 20(5)). Demikian pula, narapidana dan tahanan mempunyai hak untuk dikunjungi oleh hukum mereka dewan (lihat Pasal 21) dari konstitusi yang sama. Semua mengandaikan keberadaan atau pengakuan konstitusional terhadap profesional hukum, advokat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kekaisaran Ethiopia berdasarkan pasal 2205(2) dari JUDUL XIV juga mengakui jenis hubungan keagenan khusus ini. Hubungan dalam konteks ini adalah hubungan klien-pengacara. Masalah selanjutnya adalah siapa advokat, klien dan bagaimana hubungan klien-advokasi dibangun?

Dalam arti sempit advokat adalah orang yang berbicara atas nama orang lain dan layanan advokasi adalah berbicara untuk orang lain. Kamus khusus yang terkenal, kamus hukum Black juga mendefinisikan itu sebagai orang yang membantu, membela, memohon atau menuntut orang lain. Bahkan jika kata berbicara itu sempit dan tidak melibatkan semua kegiatan yang dilakukan oleh advokat pada atas nama yang lain, itu pasti menyiratkan semacam dari representasi. Kecuali luasnya, Kamus Hukum Black juga menyiratkan hal yang sama. Oleh karena itu kita dapat dengan sehat menyimpulkan bahwa advokasi adalah jenis lembaga khusus dan seorang advokat adalah agen spesial.

Mengapa spesial? Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan hukum, dan agen tersebut adalah pengacara yang mengenal ilmu pengetahuan, keterampilan dan mengembangkan sikap tertentu dalam bidang hukum. Pemerintah Federal Pengadilan pendukung perizinan dan registrasi proklamasi No 1999/2000 pada Pasal 2(2) memberikan definisi yang paling luas dan berwenang menyatakan jasa advokasi berarti penyusunan kontrak, nota kesepahaman, dokumen amandemen atau pembubarannya atau dokumen yang akan diajukan ke pengadilan (penyiapan perkara), litigasi di pengadilan atas nama pihak ketiga, dan termasuk penyediaan jasa konsultasi hukum untuk pertimbangan atau dengan pertimbangan, atau untuk pertimbangan langsung atau tidak langsung di masa mendatang.

Mengenai definisi ini, advokasi melayani tidak hanya terbatas pada kegiatan yang menganjurkan melakukan atas nama dari kliennya sehubungan dengan ke pihak-pihak tetapi juga pribadi layanan kepada klien sendiri seperti layanan hukum konsultasi. Selain itu, hal ini tidak membatasi advokasi layanan tidak hanya untuk lembaga pengadilan, tetapi juga mencakup kegiatan profesional hukum seperti penyusunan kontrak dan dokumen lainnya terkait advokasi proklamasi ini. Sub 3 memberikan definisi operasional advokat sebagai pengacara yang namanya tercatat dalam daftar untuk memberikan advokasi dinas. Artikel ini

memilih untuk menggunakan pengacara daripada mendefinisikan advokat dalam arti ketat istilah. Sekali lagi frasa yang namanya terdaftar dalam daftar menyiratkan tidak semua pengacara tetapi mereka yang memenuhi elemen atau persyaratan untuk menjadi advokat di Ethiopia. Inilah yang kami sebut kelayakan yang disediakan berdasarkan Pasal 4, 8,9 dan 10 dari proklamasi yang disebutkan di atas.

Definisi ini sangat komprehensif dan operasional karena pada satu tangan advokat harus bisa menjadi seorang pengacara profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum dan di sisi lain ia harus memenuhi persyaratan minimal seperti kewarganegaraan, kesesuaian perilaku untuk menjalankan peradilan dengan baik, tidak pernah dihukum dan dijatuhi hukuman dalam sebuah pelanggaran yang menunjukkan perilaku tidak pantasnya dll. Setelah mengatakan hal ini, mari kita bahas persyaratan etika dasar pendukung dalam berbagai aspek seperti seperti halnya dengan berkenaan dengan profesinya, kliennya, lawannya, rekan sekerja, pengadilan, masyarakat dan sistem peradilan negara secara keseluruhan.

Satuan Tujuan

Pada akhir unit ini, siswa dapat melakukan:

- ✓ membahas itu pra kondisi ke menjadi sebuah menganjurkan
- ✓ menjelaskan arti dari sebuah menganjurkan Dan pembelaan melayani
- ✓ Mengidentifikasi Jenis dari pembelaan melayani
- ✓ Mengenali dasar etis prinsip diperlukan dari sebuah menganjurkan cuek hubungan tidak ada

4.1 PROFESI, SISTEM PERADILAN, DAN PEMERINTAHAN

Berbeda dengan orang biasa, bahkan seorang advokat profesional memiliki sejumlah kewajiban etika tanggung jawab yang unik untuk profesi advokasi. Dia harus bertindak sesuai dengan aturan perilaku profesional, termasuk kehormatan, martabat, dan integritas. Tugas pertama dan terpenting adalah menjunjung tinggi rasa hormat untuk itu profesi di dalam umum, hukum. Misalnya, advokat tidak boleh mengucapkan kata kata atau menerbitkan tulisan yang bertentangan dengan hukum negara yang diakui dengan norma-norma atau menghasut siapapun termasuk kliennya untuk melanggar hukum. Kedua, dia memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dan harus bekerja sama demi keadilan dengan menunjukkan usaha khusus untuk administrasi mesin peradilan.

Terutama dia harus mendukung lembaga publik terutama hakim. Dia tidak boleh bertindak dengan cara yang merugikan administrasi peradilan khususnya. Dia mungkin tidak membuat pernyataan publik yang dapat merugikan sebuah kasus yang tertunda di hadapan pengadilan dan juga tidak boleh menimbulkan perselisihan atau menimbulkan perselisihan dengan mencari-cari kekurangan, ketidaksempurnaan, atau kekurangan dalam judul atau dokumen yang bersifat pribadi dan menjadikannya pusat perhatian orang lain dengan tujuan memperoleh kontrak bagi dirinya sendiri atau suatu lembaga untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Advokat dapat melakukan pembelaan terhadap klien terlepas dari apa pendapat

pribadinya tentang kesalahan atau tanggung jawab (lihat Pasal 5 federal kode pengacara pengadilan dari perilaku, peraturan dewan menteri No.57/99). Dengan cara yang sama dia harus menghindari prosedur apapun yang sifatnya hanya menunda-nunda dan bekerja sama dengan advokat lainnya untuk memastikan administrasi peradilan yang tepat. Selain itu, ia harus hadir bila kehadirannya diperlukan dalam kasus atau suatu perkara yang telah ditanganinya kecuali jika ia dihalangi oleh keadaan dan telah memberikan pemberitahuan sedini mungkin tentang ketidakhadirannya yang direncanakan kepada klien, pengadilan, dan pihak lawan.

Selain itu dia harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh yang baik dari ini adalah layanan publik Pro Bono. Pasal 20(5) Konstitusi FRDE menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk diwakili oleh pengacara dewan pilihan mereka, dan jika mereka tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayarnya dan akan terjadi kesalahan hukum, akan disediakan dengan perwakilan hukum atas biaya negara. Demikian pula dengan federal kode pengacara pengadilan perilaku, dewan peraturan menteri Nomor 57/99 menyediakan sebagai setiap menganjurkan sebaiknya memberikan setidaknya 50 jam dari hukum layanan, di setahun, bebas dari biaya atau pembayaran minimum. Layanan akan diberikan kepada:

- 1) Orang yang tidak mampu untuk membayar
- 2) Organisasi amal, organisasi sipil dan lembaga masyarakat
- 3) Orang yang diminta pengadilan untuk menandatangani layanan hukum
- 4) Komunitas dan lembaga yang bekerja untuk meningkatkan hukum, profesi hukum dan sistem peradilan.

Salah satu tujuan utama dari layanan advokasi adalah untuk membantu (mendukung) mesin peradilan. Anggapan adalah kemungkinan dari terjadinya kesalahan pengangkutan keadilan tinggi tanpa adanya bantuan hukum (advokasi). Layanan advokasi sangat penting untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah dan memberikan penyimpangan apa yang pantas mereka dapatkan atau tempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan dari apa yang pernah terjadi. Hal ini memungkinkan untuk meminimalkan terjadinya ketidakadilan yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan orang awam atau pihak yang lemah dalam produksi dari bagian-bagian dari bukti dan persuasi, pepatah Amharik (Kayayaz yikededal, kanegager yiferedal) relevan dengan ini.

Dengan demikian layanan advokasi dapat menyeimbangkan ketidakseimbangan dari pihak yang berperkara dalam proses persidangan dan berperan dalam upaya mencapai keadilan. Advokat harus membantu tetapi tidak membuat masalah atau menimbulkan masalah baru. Seorang advokat mempunyai tanggung jawab untuk membantu organ-organ administrasi keadilan dalam upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap hukum dan pencapaian dari keadilan. Dia harus mempromosikan pendidikan dan informasi cara relevan dengan praktiknya. Selain itu, ia harus berkontribusi pada pengembangan profesinya sejauh yang dia bisa melalui pertukaran pengetahuan dan pengalamannya dengan advokat lain

4.2 ETIKA PERSYARATAN PENGACARA DALAM HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Di awal bab ini, kami telah mencoba mendefinisikan siapa advokat dan apa itu layanan advokasi. Yang tersisa di sini adalah siapa klien? Dan bagaimana hubungan advokat-klien dapat dibangun? Oleh karena itu klien mungkin didefinisikan itu sebagai orang yang menggunakan jasa seorang profesional, dalam konteks ini pengacara (advokat).

Kamus Hukum Black juga didefinisikan sebagai orang atau entitas yang mempekerjakan seorang profesional untuk saran atau bantuan bidang pekerjaan profesional tersebut. Hubungan hukum terbentuk ketika seseorang menyatakan kepada **advokat** niatnya untuk memberikan jasa hukum untuk advokat tersebut menyatakan kepada klien untuk melakukan hal yang sama. Masalah lain yang sering muncul dalam Hubungan klien-advokat adalah pengulangan hubungan tersebut.

Meskipun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa untuk mencapai status klien atau untuk menyebut ikatan hubungan klien-pengacara harus ada hubungan jangka panjang atau berulang namun tampaknya ada pemahaman umum bahwa bahkan satu kontak saja sudah cukup dan praktik ini memperkuat posisi ini. Setelah hubungan terjalin, ada pepatah lama dan tentu saja benar bahwa klien adalah raja, yang mengandung makna bahwa klien layak mendapatkan penghormatan, kepentingan mereka harus dijaga dan dilindungi. Ini hubungan dari itu menganjurkan adalah itu paling peka hubungan dari semua hubungan.

Sebagian besar klien adalah orang awam, emosional, dan tidak familiar dengan sistem peradilan. Dan biasanya datang untuk mendapatkan layanan, saran, dan atau dukungan profesional termasuk representasi. Oleh karena itu, dedikasi yang tinggi, sikap toleransi, berpandangan jauh ke depan dan pengertian yang sadar diharapkan dari seorang advokat. Ia harus bertindak sebagai seorang dokter yang memperlakukan pasiennya secara manusiawi dan baik hati. Dia harus mendengarkan semua ide kliennya dan mendiagnosis kasus sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, menilai bukti nilai dari potongan bukti kasus tersebut, menilai kemungkinan menang atau kalah dan menyarankan ADR setiap kali dia berpikir bahwa hasil yang diinginkan dapat diperoleh jika kasus kliennya diselesaikan dengan penyelesaian secara damai daripada penyelesaian secara hukum.

Umumnya, klien biasanya mencari bantuan hukum untuk menghadapi situasi dan hubungan yang tidak dikenal. Posisi klien biasanya berupa kebutuhan dan sering kali berupa kesulitan. Masalah klien dapat melibatkan kepentingan pribadi dan properti yang signifikan, kebebasan dan tanggung jawab individu, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Untuk memperoleh nasihat dan bantuan yang efektif dalam dalam hal seperti ini, klien harus menaruh kepercayaannya Advokat. Untuk memberikan nasihat dan bantuan tersebut, seorang advokat harus memiliki keterampilan, ketekunan, dan dapat dipercaya. Pada saat yang sama, seorang advokat harus setia pada persyaratan hukum dan peraturan profesional. Tanggung jawab ini dimulai ketika seorang pengacara diminta untuk membantu klien. Mereka harus melanjutkan semua fungsi yang dapat dilakukan pengacara atas nama klien.

Ketekunan

Ketekunan menyiratkan kehati-hatian yang biasanya melibatkan upaya untuk

melakukannya. Seorang advokat harus bertindak dengan ketekunan dan ketepatan dalam melayani klien. Advokat harus mengejar masalah atas nama klien meskipun ada tantangan, penghalang, atau ketidaknyamanan pribadi. Dan advokat harus bisa mengambil tindakan hukum dan etis apapun yang diperlukan untuk membenarkan klien. Seorang advokat harus bertindak dengan komitmen dan dedikasi terhadap klien.

Namun, ia tidak terikat untuk menekan setiap keuntungan yang mungkin diperoleh klien. Ia memiliki kebijaksanaan profesional dalam menentukan cara yang suatu masalah harus ditangani. Beban kerjanya harus dikontrol sehingga setiap masalah dapat ditangani dengan baik. Mungkin tidak ada kekurangan profesional yang lebih dibenci daripada penundaan. Kepentingan klien sering kali dapat terpengaruh secara negatif oleh berlalunya waktu atau perubahan kondisi dalam kasus ekstrim, seperti ketika seorang advokat mengabaikan periode pembatasan, posisi hukum klien dapat dihancurkan.

Bahkan ketika kepentingan klien tidak terpengaruh secara substansi, dampak prosedural seperti penundaan yang tidak wajar dan dapat menyebabkan klien merasa cemas dan merusak kepercayaan terhadap kredibilitas pengacara. Kecuali jika hubungan tersebut diakhiri maka ia harus menyelesaikan semua masalah yang ditangani untuk klien. Jika seorang advokat telah melayani klien selama periode yang substansial dalam berbagai masalah, klien terkadang berasumsi bahwa advokat tersebut akan terus melayani secara berkelanjutan kecuali ada pemberitahuan penarikan. Keraguan tentang apakah hubungan klien-advokat masih ada sebaiknya diperjelas atau diklarifikasi, sebaiknya secara tertulis, sehingga yang tidak akan keliru dan menganggap urusan klien masih diurus advokat meskipun sudah berhenti. Misalnya, jika seorang advokat telah menangani proses peradilan atau administratif yang menghasilkan sebuah hasil merugikan klien tapi belum pernah diinstruksikan secara khusus tentang dalam upaya banding, ia harus memberi tahu klien tentang kemungkinan banding sebelum melepaskan tanggung jawab atas masalah tersebut.

Kompetensi

Salah satu syarat etika seorang advokat dalam hubungannya dengan kliennya sebagai pengacara adalah memberikan keterangan yang kompeten layanan. Yang dimaksud dengan representasi yang kompeten adalah kemampuan advokat untuk memberhentikan tanggung jawabnya terhadap kliennya dengan cara yang cukup baik dan kompeten karena hal ini membutuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap, ketelitian dan persiapan hukum. Dalam menentukan apakah seorang advokat menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam urusan tertentu, faktor-faktor yang relevan termasuk kompleksitas relatif dan sifat khusus dari masalah tersebut, pengalaman umum advokat, dan pelatihan di bidang yang bersangkutan, persiapan studi advokat mampu memecahkan masalah tersebut karena advokat menetapkan kompetensi di bidang yang bersangkutan. Advokat mampu memberikan masalah tersebut dan apakah layak untuk merujuk masalah tersebut kepada, atau berasosiasi atau berkonsultasi dengan, advokat yang memiliki kompetensi mapan di bidang yang dimaksud. Dalam banyak kasus, kecakapan yang dibutuhkan adalah kecakapan seorang dokter umum. Keahlian di bidang hukum tertentu mungkin diperlukan dalam beberapa keadaan.

Seorang advokat tidak harus memiliki pelatihan khusus atau pengalaman sebelumnya untuk menangani permasalahan hukum yang belum dikenali. Seorang advokat yang baru diterima bisa saja memiliki kompetensi yang sama dengan praktisi yang tidak dikenalnya. Advokat yang baru diterima bisa kompeten sebagai praktisi dengan pengalaman jangka panjang. Beberapa keterampilan hukum penting seperti analisis kasus, evaluasi bukti dan penyusunan hukum diperlukan dalam semua masalah hukum. Mungkin, keterampilan hukum yang paling mendasar adalah menentukan jenis masalah hukum yang mungkin terjadi dalam suatu situasi, keterampilan yang tentu saja melampaui pengetahuan khusus apa pun. Seorang advokat mungkin menerima representasi dimana tingkat yang dibutuhkan (diperlukan) dari kompetensi dapat dicapai melalui persiapan yang matang. Hal ini juga berlaku bagi seorang advokat yang ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi orang yang tidak memiliki perwakilan hukum.

Ketelitian Dan Persiapan

Penanganan yang kompeten terhadap suatu masalah tertentu mencakup penyelidikan dan analisis terhadap unsur-unsur faktual dan hukum dari masalah tersebut, dan penggunaan metode dan prosedur yang memenuhi standar praktisi yang kompeten. Ini juga mencakup persiapan yang memadai. Perhatian dan persiapan yang diperlukan ditentukan dalam sebagian berdasarkan apa yang dipertaruhkan yaitu litigasi besar dan kompleks transaksi. Biasanya memerlukan penanganan yang lebih rumit dibandingkan dengan masalah yang kurang penting.

Memelihara Kompetensi

Untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, seorang advokat harus terlibat dalam studi berkelanjutan dan program pengembangan profesi hukum. Jika sistem tinjauan sejawat telah ditetapkan, advokat harus mempertimbangkan memanfaatkannya dalam keadaan yang tepat. Ia tidak boleh menangani suatu perkara yang ia tahu atau seharusnya tahu bahwa ia tidak kompeten untuk menanganinya, tanpa mengaitkan dirinya dengan advokat lain yang kompeten untuk menangani perkara tersebut, dengan persiapan yang memadai dalam keadaan tersebut.

Komunikasi

Kurangnya keterbukaan merupakan salah satu sumber utama kesalahpahaman dalam hubungan advokat-klien. Oleh karena itu, advokat harus transparan kepada kliennya secara praktis dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Oleh karena itu, ia harus menjaga agar klien tetap diberi informasi secara wajar tentang status suatu perkara dan segera memenuhi permintaan informasi yang wajar. Ia harus menjelaskan suatu perkara sejauh yang diperlukan secara wajar untuk memungkinkan klien membuat keputusan yang terinformasi mengenai perwakilan tersebut.

Klien harus mempunyai informasi yang cukup untuk berpartisipasi secara cerdas dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan representasi dan cara yang mereka gunakan harus diupayakan sejauh klien bersedia dan mampu untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, seorang advokat yang bernegosiasi atas nama klien harus memberikan fakta-fakta yang

relevan dengan perkara tersebut, menginformasikan klien tentang komunikasi dari pihak lain, dan mengambil langkah-langkah wajar lainnya yang memungkinkan klien untuk membuat keputusan mengenai tawaran serius dari pihak lain. Seorang advokat yang menerima tawaran dari penasihat hukum lawan dalam suatu sengketa perdata atau tawaran kesepakatan dalam kasus pidana harus segera menginformasikan klien tentang isi tawaran tersebut, kecuali diskusi sebelumnya dengan klien telah menjelaskan bahwa proposal tersebut akan ditolak.

Meskipun klien memberikan wewenang kepada advokat, klien tetap harus diberitahu tentang status perkara tersebut. Kecukupan komunikasi bergantung sebagian pada jenis nasihat atau bantuan yang terlibat. Misalnya, dalam negosiasi di mana ada waktu untuk menjelaskan proposal, advokat harus meninjau semua ketentuan penting dengan klien sebelum melanjutkan kesepakatan. Dalam litigasi, seorang pengacara harus menjelaskan strategi umum dan prospek keberhasilan dan biasanya harus berkonsultasi dengan klien tentang taktik yang dapat melukai atau memaksa orang lain. Di sisi lain, seorang advokat biasanya tidak dapat diharapkan untuk menjelaskan strategi persidangan atau negosiasi secara rinci. Prinsip panduannya adalah bahwa ia harus memenuhi harapan klien yang wajar untuk informasi sesuai dengan tugas untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien, serta kebutuhan keseluruhan klien terkait dengan karakter perwakilan.

Biasanya informasi yang diberikan sesuai untuk klien yang merupakan orang dewasa yang memahami dan bertanggung jawab. Namun, memberikan informasi secara penuh sesuai dengan standar ini mungkin tidak praktis, misalnya ketika klien adalah seorang anak yang mengalami keterbatasan mental. Ketika klien adalah suatu organisasi atau kelompok, seringkali tidak mungkin atau tidak tepat untuk memberitahu setiap anggota tentang urusan hukum mereka. Biasanya advokat harus mengarahkan komunikasi kepada pejabat yang sesuai dalam organisasi. Berkenaan dengan banyak hal rutin, suatu sistem pelaporan terbatas atau sesekali dapat diatur dengan klien. Kebutuhan praktis juga mungkin mengharuskan seorang advokat bertindak untuk klien tanpa konsultasi sebelumnya.

Menahan Informasi

Dalam beberapa keadaan, seorang advokat mungkin dibenarkan untuk menunda penyampaian informasi ketika klien cenderung bereaksi tidak bijaksana terhadap komunikasi yang segera. Misalnya, ia mungkin menahan diagnosis psikologis seorang klien ketika psikiater yang memeriksa menunjukkan bahwa pengungkapan tersebut akan membahayakan klien. Seorang advokat tidak boleh menahan informasi demi kepentingan atau kenyamanan sendiri. Aturan atau perintah pengadilan yang mengatur litigasi mungkin menetapkan bahwa informasi yang diberikan kepada seorang pengacara tidak boleh diungkapkan kepada klien.

Tugas Dari Kerahasiaan

Informasi klien yang bersifat rahasia terdiri dari informasi tentang klien atau masalah klien yang terdapat dalam komunikasi lisan, dokumen, atau bentuk komunikasi lainnya, kecuali informasi yang secara umum diketahui, jika pengacara atau agen pengacara mempelajari atau mendapatkan informasi tersebut. Selama proses mewakili klien atau berkonsultasi dengan klien potensial, terlepas dari hubungan informasi tersebut berkaitan

dengan klien tertentu (selain klien potensial yang tidak pernah diwakili oleh pengacara), dan informasi itu dipercayakan kepada pengacara dalam keadaan yang menunjukkan secara wajar bahwa pengacara harus menggunakan dan melindungi informasi tersebut atas nama klien yang bersangkutan.

Seperti yang telah dinyatakan di atas, advokat harus bersikap transparan. Kerahasiaan adalah kunci untuk bersikap transparan. Kecuali jika pihak-pihak ini memiliki kewajiban kerahasiaan satu sama lain, mereka akan merasa takut akan pengungkapan informasi pribadi dan enggan untuk menyampaikan kebenaran sepenuhnya. Patuhi kewajiban etis seorang advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien tidak hanya memfasilitasi pengembangan fakta-fakta penting untuk perwakilan klien yang tepat, tetapi juga mendorong orang untuk mencari bantuan hukum lebih awal. Dengan demikian hal ini sangat memengaruhi efektivitas hubungan tersebut.

Prinsip dasar dalam hubungan klien-pengacara adalah bahwa advokat harus menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan perwakilan. Dengan demikian, klien didorong untuk berkomunikasi secara penuh dan jujur dengan advokat, bahkan mengenai hal-hal yang memalukan atau dapat merugikan secara hukum. Prinsip kerahasiaan diberlakukan dalam dua badan hukum yang saling terkait, yaitu hak privasi pengacara-klien (yang mencakup doktrin hasil kerja) dalam hukum pembuktian dan aturan kerahasiaan yang ditetapkan dalam etika profesional. Hak privasi pengacara-klien berlaku dalam proses peradilan dan proses lainnya di mana seorang advokat dipanggil sebagai saksi atau diminta untuk menyajikan bukti mengenai klien.

Aturan kerahasiaan klien-pengacara berlaku dalam situasi lain ketika bukti diminta dari advokat melalui paksaan hukum. Aturan kerahasiaan berlaku tidak hanya untuk hal-hal yang dikomunikasikan secara rahasia oleh klien tetapi juga untuk semua informasi yang berkaitan dengan representasi, apa pun sumbernya. Seorang advokat tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kecuali sebagaimana diizinkan atau diwajibkan oleh aturan Etika Profesi atau Hukum. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan perwakilan juga berlaku bagi pengacara pemerintah yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perwakilan mereka.

Umumnya seorang advokat tidak boleh mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan representasinya atau yang berkaitan dengan perwakilan klien. Dan di banyak sistem hukum, termasuk milik kita, kewajiban ini berlanjut bahkan setelah berakhirnya hubungan klien-advokat, sesuai dengan pasal 10(3) undang-undang federal kode pengacara pengadilan Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Kerja (Permendiknas) yang menyatakan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan advokat tidak boleh berhenti karena penghentian dari kontrak dengan klien. Tapi ini tugas kerahasiaan tidak bersifat mutlak, artinya dapat dikecualikan. Berikut ini adalah pengecualiannya:

1. Jika itu adalah pengetahuan umum.
2. Seorang advokat dapat mengungkapkan informasi tersebut sejauh yang dianggapnya perlu dengan alasan yang wajar.

3. Mengenai hubungan antara klien dan pengacara, ketika klien memberikan persetujuan setelah ia diberi informasi yang memadai mengenai penggunaan atau pengungkapan tersebut.
4. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga, ketika pengacara bertindak dengan wewenang yang sebenarnya atau yang tampak.
5. Untuk mencegah klien melakukan tindakan kriminal yang diyakini oleh advokat dapat mengakibatkan kematian yang segera atau cedera fisik yang signifikan.
6. Untuk membangun klaim atau pembelaan atas nama advokat dalam sebuah sengketa antara dirinya dan klien, untuk membangun pembelaan terhadap tuduhan kriminal atau klaim sipil terhadap advokat yang berdasarkan pada tindakan dimana klien terlibat atau untuk menanggapi tuduhan dalam proses apapun yang berkaitan dengan perwakilan advokat terhadap klien.
7. Pengungkapan yang diizinkan, seorang pengacara secara implisit diizinkan untuk mengungkapkan informasi tentang klien etika dianggap perlu dalam melaksanakan perwakilan, kecuali sejauh instruksi klien atau keadaan khusus membatasi wewenang tersebut. Dalam litigasi, misalnya advokat dapat mengungkapkan informasi dengan mengakui fakta yang tidak dapat diperdebatkan, atau dalam negosiasi dengan membuat pengungkapan yang memfasilitasi kesimpulan yang memuaskan.
8. Pengungkapan yang merugikan klien:
 - a) Aturan kerahasiaan memiliki beberapa pengecualian terbatas. Ketika seorang pengacara mengetahui informasi tentang klien, ia mungkin menyadari bahwa klien berniat melakukan bahaya serius terhadap orang lain. Namun, sejauh seorang pengacara diharuskan atau diizinkan untuk mengungkapkan maksud klien, klien akan terhambat untuk mengungkapkan fakta-fakta yang memungkinkan pengacara memberikan nasihat melawan tindakan yang salah. Publik lebih terlindungi jika komunikasi yang penuh dan terbuka oleh klien didorong daripada jika komunikasi tersebut terhambat.
 - b) Beberapa situasi harus dibedakan. Pertama, pengacara tidak boleh memberikan nasihat atau membantu klien dalam perilaku yang bersifat kriminal atau penipuan. Lihat Aturan 1.2 (d). Demikian pula, pengacara memiliki kewajiban berdasarkan Aturan 3.3 (a)(4) untuk tidak menggunakan bukti yang palsu. Kewajiban ini pada dasarnya merupakan contoh khusus dari kewajiban yang diatur dalam Aturan 1.2 (d) untuk menghindari membantu klien dalam perilaku kriminal atau penipuan.
 - c) Kedua, advokat mungkin telah terlibat secara tidak sengaja dalam perilaku masa lalu klien yang bersifat kriminal atau penipuan. Dalam situasi seperti itu, pengacara tidak melanggar aturan perilaku karena untuk "memberikan nasihat atau bantuan" dalam perilaku kriminal atau penipuan memerlukan pengetahuan bahwa perilaku tersebut memiliki karakter tersebut.
 - d) Ketiga, pengacara mungkin mengetahui bahwa klien berniat melakukan tindakan yang bersifat kriminal dan kemungkinan akan mengakibatkan kematian yang segera

atau cedera fisik yang signifikan. Dalam hal ini, pengacara memiliki kebijaksanaan profesional untuk mengungkapkan informasi guna mencegah akibat tersebut. Pengacara dapat melakukan pengungkapan untuk mencegah pembunuhan atau cedera serius yang diyakini secara wajar dimaksudkan oleh klien. Sangat sulit bagi seorang pengacara untuk "tahu" kapan niat jahat tersebut benar-benar akan dilaksanakan, karena klien mungkin berubah pikiran.

- 9) Menggunakan Atau Mengungkapkan Informasi Untuk Meningkatkan Kepentingan Atau Untuk Tujuan Hukum Kecuali jika klien telah mengarahkan sebaliknya, seorang pengacara dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia klien yang bersifat rahasia misalnya ketika pengacara secara wajar percaya bahwa hal itu akan meningkatkan kepentingan klien dalam perwakilan, contohnya:
 - a. Memberikan secara rahasia kepada rekan-rekan pengacara, seperti karyawan, age lain, kontraktor dan orang lain yang membantu pengacara dalam mewakili klien.
 - b. Dengan menyampaikan bukti atau argumen dalam poses peradilan, atau
 - c. Dengan mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia kepada orang lain atau ketika pengacara secara wajar percaya bahwa hal tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan klien untuk memberikan informasi tersebut secara rahasia kepada rekan-rekan pengacara, seperti karyawan, agen lain, kontraktor, dan orang lain yang membantu pengacara dalam memfasilitasi urusan bisnis dan praktik hukum firma pengacara serta tujuan pengembangan profesional.
- 10) Menggunakan Atau Mengungkapkan Informasi Kapan Diperlukan oleh Hukum Seorang pengacara dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia klien ketika diwajibkan oleh hukum, misalnya ketika diperintahkan untuk melakukan hal tersebut oleh pengadilan, jika pengacara mengambil tindakan yang wajar langkah-langkah yang tepat untuk aset itu informasi tersebut bersifat istimewa atau jika tidak dilindungi terhadap penyingkapan.
- 11) Menggunakan Atau Mengungkapkan Informasi Untuk Pembelaan Diri Pengacara Seorang pengacara dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia sejauh yang dianggapnya perlu untuk membela diri terhadap tuduhan oleh pihak mana pun bahwa pengacara atau orang yang tindakannya menjadi tanggung jawab pengacara bertindak secara salah selama mewakili klien yang informasinya digunakan atau diungkapkan.
- 12) Menggunakan atau mengungkapkan informasi untuk mencegah kematian atau cedera fisik yang serius setelah upaya oleh pengacara, jika memungkinkan, untuk membujuk klien, seorang pengacara dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia jika dan sejauh yang diyakini pengacara secara wajar:
 - 1) Klien berniat untuk melakukan kejahatan atau penipuan yang mengancam akan menyebabkan kematian atau cedera fisik yang serius
 - 2) Penggunaan atau pengungkapan pengacara adalah:
 - a. Secara wajar sesuai untuk mencegah tindakan tersebut

- b. Diperlukan mengingat adanya kemungkinan kematian atau cedera yang mendesak
- 13) Menggunakan Atau Mengungkapkan Informasi Untuk Mencegah Kerugian Finansial Yang Signifikan setelah upaya oleh pengacara, jika memungkinkan, untuk membujuk klien, seorang pengacara dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia sejauh yang diyakini pengacara secara wajar yaitu:
1. Klien berniat untuk melakukan kejahatan atau penipuan yang mengancam akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
 2. Jasa pengacara digunakan dalam perilaku klien dan kerugian tersebut kemungkinan besar akan terjadi jika pengacara tidak mengambil tindakan.
 3. Pengungkapan atau penggunaan oleh pengacara adalah:
 - a. Secara wajar untuk mencegah suatu tindakan.
 - b. Perlu mengingat adanya kemungkinan kerugian finansial yang signifikan dan mendesak.

4.3 KONTRAK DARI ADVOKAT

Untuk memulai dari sudut pandang yang lebih luas, kontrak advokasi diatur oleh prinsip umum hukum kontrak, terutama hukum agensi. Area utama yang ditekankan dan sering kali menjadi sumber konflik dunia yakni masalah yang terkait dengan ruang lingkup perwakilan dan perjanjian biaya. Mari kita bahas masing-masing secara terpisah.

Ruang Lingkup Perwakilan

Baik advokat maupun klien memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap tujuan dan cara representasi. Klien memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan tujuan untuk dilayani oleh hukum representasi, dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kewajiban profesional pengacara. Dalam batasan tersebut, klien juga memiliki hak untuk berkonsultasi dengan advokat mengenai cara yang akan digunakan dalam mengejar tujuan tersebut. Pada saat yang sama, seorang advokat tidak diwajibkan untuk mengejar tujuan atau menggunakan cara tertentu hanya karena klien menginginkannya.

Bahkan jika ia bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya, advokat tetap bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik jika ia melaksanakan perbuatan salah kliennya. Perbedaan yang jelas antara tujuan dan cara terkadang sulit ditentukan, dan dalam banyak kasus, hubungan klien-advokat bersifat kerjasama. Dalam hal cara, advokat harus mengambil tanggung jawab untuk isu-isu teknis dan taktik hukum, tetapi harus mengacu pada klien terkait pertanyaan seperti biaya yang akan dikeluarkan dan perhatian terhadap pihak ketiga yang mungkin terpengaruh secara negatif. Hukum yang mendefinisikan ruang lingkup wewenang advokat dalam litigasi bervariasi di antara yurisdiksi.

Selain itu, perwakilan hukum tidak boleh ditolak kepada orang-orang yang tidak mampu membayar layanan hukum, atau yang kasusnya kontroversial atau menjadi subjek ketidaksetujuan publik. Dengan cara yang sama, mewakili seorang klien tidak berarti menyetujui pandangan atau aktivitas klien tersebut. Tujuan atau ruang lingkup layanan yang

diberikan oleh seorang pengacara dapat dibatasi oleh kesepakatan dengan klien atau oleh syarat-syarat di mana layanan pengacara disediakan untuk klien. Misalnya, biaya retainer dapat ditetapkan untuk tujuan yang secara khusus didefinisikan. Perwakilan yang diberikan melalui lembaga bantuan hukum mungkin tunduk pada batasan terkait jenis kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut. Perwakilan yang diberikan melalui lembaga bantuan hukum mungkin terikat pada batasan mengenai jenis kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut. Syarat-syarat di mana perwakilan dilakukan dapat mengecualikan tujuan atau cara tertentu. Pembatasan semacam itu dapat mengecualikan tujuan atau cara yang dianggap pengacara sebagai bertentangan atau tidak bijaksana.

Sebuah Kesepakatan

Pada materi ini akan membahas tentang ruang lingkup perwakilan harus sesuai dengan aturan Etika Profesi dan hukum lainnya. Dengan demikian, klien tidak boleh diminta untuk menyetujui perwakilan yang dibatasi sedemikian rupa sehingga melanggar kode etik atau menyerahkan hak untuk menghentikan layanan pengacara atau hak untuk menyelesaikan litigasi yang mungkin ingin dilanjutkan oleh pengacara.

Transaksi Kriminal, Penipuan, dan Transaksi Terlarang

Seorang advokat diharuskan memberikan pendapat yang jujur mengenai konsekuensi sebenarnya yang tampaknya akan dihasilkan dari perilaku klien. Fakta bahwa seorang klien menggunakan nasihat dalam tindakan yang bersifat kriminal atau penipuan tidak, dengan sendirinya, menjadikan seorang advokat sebagai pihak dalam tindakan tersebut. Namun, seorang advokat tidak boleh dengan sengaja membantu klien dalam perilaku kriminal atau penipuan. Ada perbedaan penting antara menyajikan analisis aspek hukum dari perilaku yang dipertanyakan dan merekomendasikan cara di mana suatu kejahatan atau penipuan dapat dilakukan tanpa konsekuensi.

Ketika tindakan klien sudah dimulai dan sedang berlangsung, tanggung jawab advokat menjadi sangat sensitif. Ia tidak diizinkan untuk mengungkapkan kesalahan klien. Namun, ia diharuskan untuk menghindari memperkuat tujuan tersebut, misalnya, dengan menyarankan cara untuk menyembunyikannya. Seorang pengacara yang mungkin tidak dapat terus membantu klien dalam perilaku yang awalnya dianggapnya sah secara hukum tetapi kemudian ditemukan bersifat kriminal atau penipuan. Oleh karena itu, pengunduran diri dari perwakilan mungkin diperlukan. Ketika klien adalah seorang fidusia, advokat mungkin dibebani dengan kewajiban khusus dalam berurusan dengan seorang penerima manfaat. Oleh karena itu, seorang advokat seharusnya tidak berpartisipasi dalam transaksi yang tidak sah; misalnya, transaksi untuk melaksanakan tindakan kriminal atau penipuan atau untuk menghindari kewajiban apa pun, termasuk penghindaran kewajiban pajak.

Seorang advokat harus mematuhi keputusan klien mengenai tujuan perwakilan dan harus berkonsultasi dengan klien mengenai cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ia harus mematuhi keputusan klien apakah akan menerima tawaran penyelesaian suatu perkara. **Dalam menentukan ruang lingkup perwakilan**, advokat harus berperan besar dan **tidak seharusnya menganggap perwakilan yang melanggar hukum**. Misalnya, ia tidak

boleh memberi nasihat kepada klien untuk terlibat, atau membantu dalam perilaku yang ia ketahui bersifat kriminal atau penipuan, tetapi ia dapat membahas konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diusulkan dengan klien dan dapat memberi nasihat atau membantu klien untuk melakukan upaya itikad baik dalam menentukan validitas, ruang lingkup, arti, atau penerapan hukum. Ketika ia mengetahui bahwa klien mengharapkan bantuan yang tidak diizinkan oleh aturan etika profesional atau hukum lainnya, advokat harus berkonsultasi dengan klien mengenai batasan yang relevan terhadap perilaku pengacara.

Perjanjian Biaya

Terkait dengan perjanjian biaya, kode sipil mengadopsi prinsip bahwa imbalan bersifat kontraktual. Namun, ini tidak tanpa pengecualian. Tetapi ini bukan tanpa pengecualian. Baik prinsip maupun pengecualian tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Agen berhak atas imbalan yang ditetapkan dalam kontrak; jika tidak ada ketentuan dalam kontrak, agen tidak berhak atas imbalan, kecuali ia melaksanakan agensi dalam ruang lingkup tugas profesionalnya..." (lihat Pasal 2219 & 2220 Kode Sipil). Kode etik untuk advokat juga mengatur bahwa advokat harus mengenakan dan menerima biaya yang adil, wajar, dan legal dalam batas maksimum (skala) untuk klaim yang telah ditentukan dan biaya kontingensi yang wajar. Biaya tersebut wajar dan masuk akal jika dibenarkan oleh keadaan dan sesuai dengan layanan profesional yang diberikan. Dalam menentukan jumlah biaya, advokat harus secara khusus mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- (a) Pengalaman, reputasi, dan kemampuan pengacara atau pengacara yang memberikan layanan tersebut;
- (b) Waktu dan tenaga yang dibutuhkan, kebaruan dan kesulitan dari pertanyaan yang terlibat, serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan hukum dengan baik.
- (c) Kesulitan dari pertanyaan yang terlibat.
- (d) Pentingnya perkara tersebut.
- (e) Tanggung jawab yang diemban.
- (f) Pelaksanaan layanan profesional yang tidak biasa atau layanan profesional yang memerlukan kompetensi atau kecepatan yang luar biasa.
- (g) Kemungkinan, jika terlihat oleh klien, bahwa penerimaan pekerjaan tertentu akan menghalangi pekerjaan lain oleh pengacara.
- (h) Biaya yang biasanya dikenakan di daerah tersebut untuk layanan hukum serupa.
- (i) Jumlah yang terlibat dan hasil yang diperoleh.
- (j) Biaya yudisial dan ekstrayudisial yang ditetapkan dalam tarif.
- (k) Batasan waktu yang ditetapkan oleh klien atau oleh keadaan.
- (l) Sifat dan lama hubungan profesional dengan klien; dan
- (m) Apakah biaya tersebut bersifat tetap atau kontingensi.

Secara umum, advokat harus menghindari semua metode dan sikap yang dapat memberikan citra profit-seeking atau karakter komersial pada profesinya.

Seorang advokat harus, sebelum menyetujui untuk memberikan layanan profesional

kepada klien, memastikan bahwa klien memiliki semua informasi yang berguna mengenai sifat dan syarat finansial dari layanan tersebut dan memperoleh persetujuannya, kecuali jika ia dapat secara wajar menganggap bahwa klien sudah mengetahui informasi tersebut. Seorang advokat yang berpraktik dalam kemitraan atau perusahaan saham bersama harus memastikan bahwa biaya dan biaya layanan profesional yang diberikan oleh para advokat selalu dicantumkan secara terpisah pada setiap faktur atau pernyataan biaya yang dikirimkan kemitraan atau perusahaan saham kepada klien, kecuali jika pembayaran jumlah sekaligus telah disepakati secara tertulis dengan klien. Namun, dalam kasus terakhir, pernyataan atau faktur harus menjelaskan layanan profesional yang diberikan oleh advokat.

Seorang advokat harus memberikan kepada klien semua penjelasan yang diperlukan untuk memahami faktur atau pernyataan biaya serta syarat dan ketentuan pembayaran, kecuali jika telah dibuat kesepakatan tertulis dengan klien untuk menerima pembayaran jumlah sekaligus atau jika ia dapat secara wajar menganggap bahwa klien sudah mengetahui informasi tersebut. Advokat tidak boleh mengakhiri kesepakatan dengan klien untuk menerima atau menerima gaji dari klien dengan menyerahkan biaya yang seharusnya ia terima dari pihak lawan. Selain bunga hukum, satu-satunya bunga yang dapat dikumpulkan oleh seorang advokat atas akun yang belum dibayar adalah bunga yang telah disepakati secara tertulis dengan klien. Bunga yang dikenakan tersebut harus sesuai dengan suku bunga hukum yang ditetapkan oleh undang-undang; misalnya Pasal 1751 Kode Sipil, atau dengan suku bunga yang wajar.

Ketika seorang advokat melakukan aktivitas profesionalnya dalam sebuah perusahaan saham bersama yang didirikan untuk tujuan tersebut, biaya dan imbalan yang terkait dengan layanan profesional yang diberikan olehnya dalam dan atas nama perusahaan tersebut akan menjadi milik perusahaan saham bersama tersebut, kecuali jika disepakati sebaliknya. Advokat harus memastikan bahwa klien diinformasikan tentang biaya, komisi, atau biaya ekstrajudisial yang dibayarkan kepadanya oleh pihak ketiga. Dalam hal apapun di mana seorang advokat mengenakan biaya ekstrajudisial, ia harus memberitahukan klien bahwa biaya yudisial dapat diberikan oleh pengadilan dan membuat perjanjian yang menentukan cara biaya tersebut akan dipertimbangkan dalam menetapkan biaya layanan profesional.

Ketika advokat belum secara teratur mewakili klien, dasar atau tarif biaya harus disampaikan kepada klien, sebaiknya secara tertulis, sebelum atau dalam waktu yang wajar setelah memulai perwakilan. Biaya dapat bersifat kontingensi berdasarkan hasil dari perkara yang dilayani, kecuali dalam perkara di mana biaya kontingensi dilarang oleh hukum. Perjanjian biaya kontingensi harus dibuat secara tertulis dan harus menyebutkan metode yang digunakan untuk menentukan biaya, termasuk persentase atau persentase yang akan diperoleh pengacara dalam hal penyelesaian, persidangan, atau banding, serta biaya litigasi dan biaya lainnya yang akan dikurangkan dari pemulihan, dan apakah biaya tersebut akan dikurangkan sebelum atau setelah biaya kontingensi dihitung. Setelah selesai dengan perkara biaya kontingensi, pengacara harus memberikan kepada klien pernyataan tertulis yang menyatakan hasil perkara tersebut dan, jika ada pemulihan, menunjukkan pembayaran

kepada klien dan metode penentuannya.

4.4 DASAR ATAU TARIF BIAYA

Ketika advokat secara teratur mewakili klien, biasanya mereka akan memiliki pemahaman mengenai dasar atau tarif biaya. Namun, dalam hubungan klien-advokat yang baru, pemahaman tentang biaya harus segera dibentuk. Tidak perlu menyebutkan semua faktor yang mendasari dasar biaya, tetapi hanya faktor-faktor yang secara langsung terlibat dalam perhitungannya. Cukup, misalnya, untuk menyatakan bahwa tarif dasar adalah biaya per jam atau jumlah tetap atau jumlah yang diestimasi, atau untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin diperhitungkan dalam menetapkan jumlah akhir biaya. Ketika terjadi perkembangan selama perwakilan yang membuat estimasi sebelumnya menjadi tidak akurat, estimasi yang direvisi harus diberikan kepada klien. Pernyataan tertulis mengenai biaya mengurangi kemungkinan salah paham. Memberikan klien dengan memorandum sederhana atau salinan jadwal biaya yang biasa digunakan oleh advokat sudah cukup jika dasar atau tarif biaya telah dijelaskan.

Ketentuan Pembayaran

Seorang advokat dapat meminta pembayaran di muka untuk biaya, tetapi wajib mengembalikan bagian yang belum diperoleh. Ia juga dapat menerima properti sebagai pembayaran untuk layanan, seperti kepemilikan dalam suatu usaha, asalkan ini tidak melibatkan perolehan kepentingan hak atas perkara atau pokok permasalahan litigasi yang bertentangan dengan aturan perilaku yang berlaku. Namun, biaya yang dibayar dalam bentuk properti alih-alih uang mungkin akan mendapatkan pengawasan khusus karena melibatkan pertanyaan mengenai nilai layanan serta pengetahuan khusus advokat tentang nilai properti tersebut.

Sebuah kesepakatan tidak boleh dibuat dengan ketentuan yang mungkin mendorong advokat untuk secara tidak tepat mengurangi layanan untuk klien atau melaksanakannya dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan klien. Tidak boleh dibuat perjanjian yang ketentuannya dapat mendorong advokat untuk secara tidak patut membatasi layanan bagi klien atau melakukannya dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan klien. Misalnya, seorang advokat tidak boleh membuat kesepakatan di mana layanan hanya akan diberikan hingga jumlah tertentu ketika dapat diperkirakan bahwa layanan yang lebih luas kemungkinan akan dibutuhkan, kecuali situasi tersebut dijelaskan dengan memadai kepada klien.

Jika tidak, klien mungkin harus bernegosiasi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut di tengah proses atau transaksi. Namun, adalah wajar untuk menentukan sejauh mana layanan berdasarkan kemampuan bayar klien. Seorang advokat tidak boleh mengeksploitasi pengaturan biaya yang didasarkan terutama pada biaya per jam dengan menggunakan prosedur yang tidak efisien. Ketika ada keraguan apakah biaya kontinjensi selaras dengan kepentingan terbaik klien, advokat harus menyajikan struktur biaya alternatif dan menjelaskan implikasinya dengan jelas. Selain itu, hukum yang berlaku dapat memberlakukan

pembatasan biaya kontinjensi, termasuk batas persentase yang dapat dikenakan, memastikan klien mendapat informasi lengkap tentang pilihan mereka dan potensi konsekuensi keuangan.

Konflik Kepentingan Secara Umum

Seorang advokat tidak boleh mewakili klien jika perwakilan tersebut akan bertentangan langsung dengan klien lain, kecuali:

1. Dia memiliki keyakinan yang wajar bahwa perwakilan tersebut tidak akan berdampak negatif pada hubungan dengan klien lainnya.
2. Setiap klien memberikan persetujuan setelah konsultasi.

Loyalitas Kepada Klien

Loyalitas adalah elemen penting dalam hubungan antara advokat dan klien. Konflik kepentingan yang tidak diizinkan dapat ada sebelum perwakilan dimulai, dalam hal ini perwakilan tersebut harus ditolak. Advokat harus mengadopsi prosedur yang wajar, sesuai dengan ukuran dan jenis firma serta praktiknya, untuk menentukan baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi mengenai pihak-pihak dan isu-isu yang terlibat serta untuk mengetahui apakah ada konflik kepentingan yang aktual atau potensial.

Jika konflik tersebut muncul setelah perwakilan dimulai, advokat harus menarik diri dari perwakilan tersebut. Ketika lebih dari satu klien terlibat dan advokat menarik diri karena munculnya konflik setelah perwakilan, apakah dia dapat melanjutkan untuk mewakili salah satu klien akan ditentukan oleh aturan perilaku yang relevan. Secara umum, loyalitas kepada klien melarang melakukan perwakilan yang langsung bertentangan dengan klien tersebut tanpa persetujuan klien. Aturan umumnya adalah bahwa advokat biasanya tidak boleh bertindak sebagai advokat melawan orang yang diwakilinya dalam perkara lain, bahkan jika perkara itu sepenuhnya tidak terkait.

Di sisi lain, perwakilan simultan dalam perkara yang tidak terkait dari klien yang kepentingannya hanya umumnya bertentangan, seperti perusahaan ekonomi yang bersaing, tidak memerlukan persetujuan dari klien masing-masing. Loyalitas kepada klien juga terganggu ketika advokat tidak dapat mempertimbangkan, merekomendasikan, atau menjalankan langkah yang tepat untuk klien karena tanggung jawab atau kepentingan lainnya. Konflik tersebut secara efektif menutup alternatif yang seharusnya tersedia untuk klien. Konflik yang mungkin ada tidak dengan sendirinya menghalangi perwakilan. Pertanyaan kritis adalah kemungkinan bahwa konflik akan terjadi dan, jika terjadi, apakah itu akan secara material mengganggu penilaian profesional independen advokat dalam mempertimbangkan alternatif atau menutup jalur tindakan yang seharusnya dikejar untuk kepentingan klien. Pertimbangan harus diberikan apakah klien ingin mengakomodasi kepentingan lain yang terlibat.

Seorang klien dapat memberikan persetujuan untuk perwakilan meskipun konflik ada. Namun, terkait dengan perwakilan yang langsung bertentangan dengan klien, dan terkait dengan batasan material pada perwakilan klien, ketika seorang advokat yang tidak berkepentingan akan menyimpulkan bahwa klien seharusnya tidak setuju untuk perwakilan dalam keadaan tersebut, pengacara yang terlibat tidak dapat dengan tepat meminta

persetujuan tersebut atau memberikan perwakilan berdasarkan persetujuan klien. Ketika lebih dari satu klien terlibat, pertanyaan mengenai konflik harus diselesaikan untuk setiap klien. Selain itu, mungkin ada keadaan di mana tidak mungkin untuk melakukan pengungkapan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan. Misalnya, ketika advokat mewakili klien yang berbeda dalam perkara terkait dan salah satu klien menolak untuk memberikan persetujuan untuk pengungkapan yang diperlukan agar klien lainnya dapat membuat keputusan yang terinformasi, pengacara tidak dapat dengan tepat meminta yang terakhir untuk memberikan persetujuan.

Minat Advokat

Kepentingan pribadi advokat tidak boleh diizinkan untuk mempengaruhi representasi klien secara negatif. Misalnya, kebutuhan advokat akan pendapatan seharusnya tidak mendorongnya untuk mengambil perkara yang tidak dapat ditangani dengan kompeten dan dengan biaya yang wajar. Jika integritas perilaku advokat dalam suatu transaksi dipertanyakan secara serius, mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin baginya untuk memberikan nasihat yang objektif kepada klien. Advokat tidak boleh membiarkan kepentingan bisnis terkait memengaruhi representasi, misalnya dengan merujuk klien ke suatu usaha di mana advokat memiliki kepentingan yang tidak diungkapkan.

4.5 KONFLIK DALAM PROSES PENGADILAN

Sejumlah aturan perilaku melarang representasi pihak-pihak yang berlawanan dalam litigasi. Representasi simultan dari pihak-pihak, seperti penggugat bersama atau tergugat bersama, yang kepentingannya dalam litigasi dapat bertentangan, dapat menyebabkan konflik yang tidak diizinkan. Konflik yang tidak diizinkan dapat muncul akibat perbedaan substansial dalam kesaksian pihak-pihak, ketidakcocokan posisi terkait pihak lawan, atau adanya kemungkinan penyelesaian klaim atau tanggung jawab yang sangat berbeda.

Konflik semacam ini dapat terjadi baik dalam kasus pidana maupun perdata. Potensi konflik kepentingan dalam mewakili beberapa tergugat dalam kasus pidana sangat serius, sehingga biasanya advokat harus menolak untuk mewakili lebih dari satu tergugat bersama. Di sisi lain, representasi bersama orang-orang dengan kepentingan serupa diperbolehkan jika risiko dampak negatifnya minimal. Secara umum, advokat tidak boleh bertindak sebagai advokat melawan klien yang ia wakili dalam perkara lain, meskipun perkara tersebut sepenuhnya tidak terkait. Namun, ada keadaan di mana advokat dapat bertindak sebagai advokat melawan klien. Misalnya, seorang advokat yang mewakili suatu perusahaan dengan berbagai operasi dapat menerima pekerjaan sebagai advokat melawan perusahaan tersebut dalam perkara yang tidak terkait, asalkan hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan advokat dengan perusahaan atau jalannya perkara, dan jika kedua klien memberikan persetujuan setelah berkonsultasi.

Dengan cara yang sama, pengacara pemerintah dalam beberapa keadaan dapat mewakili pegawai pemerintah dalam proses di mana lembaga pemerintah menjadi pihak lawan. Kelayakan representasi bersamaan dapat bergantung pada sifat litigasi. Misalnya,

gugatan yang menuduh penipuan melibatkan konflik yang lebih besar dibandingkan dengan gugatan untuk deklarasi terkait interpretasi hukum. Advokat juga dapat mewakili pihak-pihak dengan posisi antagonis pada suatu pertanyaan hukum yang muncul dalam kasus yang berbeda, kecuali representasi salah satu klien akan terpengaruh secara negatif. Dengan demikian, biasanya tidak salah untuk mengajukan posisi tersebut dalam kasus yang sedang berjalan di pengadilan yang berbeda, tetapi mungkin tidak tepat untuk melakukannya dalam kasus yang sedang berlangsung di pengadilan banding pada saat yang sama.

Kepentingan Pihak Yang Membayar Jasa Advokat

Seorang advokat dapat dibayar dari sumber lain selain klien, asalkan klien diinformasikan tentang fakta tersebut dan memberikan persetujuan, serta pengaturan tersebut tidak mengkompromikan kewajiban loyalitas advokat kepada klien. Misalnya, ketika seorang penanggung dan tertanggungnya memiliki kepentingan yang bertentangan dalam suatu masalah yang timbul dari perjanjian asuransi kewajiban, dan penanggung diwajibkan untuk menyediakan penasihat khusus untuk tertanggung, pengaturan tersebut harus menjamin independensi profesional penasihat khusus.

Begitu juga, ketika sebuah perusahaan dan direktur atau karyawannya terlibat dalam kontroversi yang memiliki kepentingan yang bertentangan, perusahaan dapat menyediakan dana untuk perwakilan hukum terpisah bagi direktur atau karyawannya, jika klien memberikan persetujuan setelah berkonsultasi dan pengaturan tersebut menjamin independensi profesional advokat. Konflik kepentingan dalam konteks selain litigasi kadang-kadang sulit untuk dinilai. Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan apakah ada potensi untuk efek negatif termasuk durasi dan kedekatan hubungan advokat dengan klien yang terlibat, fungsi yang dilakukan oleh advokat, kemungkinan bahwa konflik yang sebenarnya akan muncul, dan kemungkinan prejudis terhadap klien akibat konflik tersebut jika muncul. Pertanyaannya sering kali berkaitan dengan kedekatan dan tingkat konflik.

Misalnya, seorang advokat tidak dapat mewakili beberapa pihak dalam negosiasi yang kepentingannya secara fundamental saling bertentangan, tetapi perwakilan bersama diperbolehkan ketika klien secara umum memiliki kepentingan yang sejalan meskipun ada beberapa perbedaan kepentingan di antara mereka. Pertanyaan konflik juga dapat muncul dalam perencanaan warisan dan administrasi warisan. Seorang advokat mungkin diminta untuk menyiapkan surat wasiat untuk beberapa anggota keluarga, seperti suami dan istri, dan tergantung pada keadaan, konflik kepentingan dapat muncul. Dalam administrasi warisan, identitas klien mungkin tidak jelas berdasarkan hukum di yurisdiksi tertentu.

Berdasarkan satu pandangan, klien adalah fidusia; menurut pandangan lain, klien adalah warisan atau trust, termasuk penerima manfaatnya. Advokat harus menjelaskan hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat. Dengan cara yang sama, seorang advokat untuk perusahaan atau organisasi lain yang juga merupakan anggota dewan direksi harus menentukan apakah tanggung jawab dari dua perannya dapat bertentangan. Ia mungkin diminta untuk memberikan nasihat kepada perusahaan dalam masalah yang melibatkan tindakan para direktur. Pertimbangan harus diberikan pada frekuensi situasi tersebut dapat

muncul, potensi intensitas konflik, dampak pengunduran diri advokat dari dewan, dan kemungkinan perusahaan memperoleh nasihat hukum dari advokat lain dalam situasi tersebut. Jika ada risiko material bahwa peran ganda tersebut akan mengkompromikan independensi penilaian profesional advokat, maka advokat tidak boleh menjabat sebagai direktur.

Konflik Yang Dituduhkan Oleh Pihak Lawan

Menangani pertanyaan tentang konflik kepentingan adalah tanggung jawab utama advokat yang melakukan perwakilan. Dalam litigasi, pengadilan dapat mengangkat pertanyaan ini ketika ada alasan untuk menyimpulkan bahwa advokat telah mengabaikan tanggung jawabnya. Dalam kasus pidana, penyelidikan oleh pengadilan biasanya diperlukan ketika seorang advokat mewakili beberapa terdakwa. Ketika konflik tersebut begitu jelas sehingga mempertanyakan administrasi keadilan yang adil atau efisien, penasihat hukum yang berlawanan dapat dengan tepat mengangkat pertanyaan tersebut. Namun, keberatan semacam itu harus dilihat dengan hati-hati, karena bisa disalahgunakan sebagai teknik untuk melakukan intimidasi.

Konflik Dari Minat: Transaksi Terlarang

Seorang advokat tidak boleh melakukan transaksi bisnis dengan klien atau dengan sengaja memperoleh kepemilikan, penguasaan, jaminan, atau kepentingan finansial lain yang bertentangan dengan klien, kecuali:

1. Transaksi dan syarat di mana dia memperoleh kepentingan tersebut adalah adil dan wajar bagi klien serta sepenuhnya diungkapkan dan disampaikan secara tertulis kepada klien dengan cara yang dapat dipahami dengan wajar oleh klien.
2. Klien diberikan kesempatan yang wajar untuk mencari nasihat dari penasihat hukum independen dalam transaksi tersebut.
3. Klien memberikan persetujuan secara tertulis untuk itu.

Seorang advokat tidak boleh menggunakan informasi yang terkait dengan perwakilan klien untuk merugikan klien, kecuali klien memberikan persetujuan setelah berkonsultasi. Dia juga tidak boleh menyusun instrumen yang memberikan kepada advokat atau orang yang terkait dengannya, seperti orang tua, anak, saudara, atau pasangan, substansi dari klien, termasuk hadiah testamenter. Selain itu, seorang advokat tidak boleh membuat atau merundingkan perjanjian yang memberikan hak sastra atau media kepada advokat untuk menggambarkan atau mengisahkan berdasarkan informasi yang sebagian besar berkaitan dengan perwakilan sebelum akhir perwakilan.

Sekali lagi, seorang advokat tidak boleh memberikan bantuan keuangan kepada klien sehubungan dengan litigasi yang sedang berlangsung atau yang dipertimbangkan, kecuali:

- 1) Seorang advokat dapat membiayai biaya pengadilan dan pengeluaran litigasi, yang pengembaliannya dapat bergantung pada hasil perkara tersebut; dan
- 2) Seorang advokat yang mewakili klien yang tidak mampu dapat membayar biaya pengadilan dan pengeluaran litigasi atas nama klien tersebut.

Seorang advokat tidak boleh menerima kompensasi untuk mewakili klien dari pihak lain selain klien kecuali:

- a. Klien memberikan persetujuan setelah berkonsultasi.
- b. Tidak ada gangguan terhadap independensi penilaian profesional pengacara atau terhadap hubungan antara pengacara dan klien.
- c. Informasi yang berkaitan dengan representasi klien dilindungi.

Seorang advokat yang mewakili dua atau lebih klien tidak boleh terlibat dalam membuat penyelesaian agregat dari klaim yang diajukan oleh atau terhadap klien, atau dalam kasus pidana, perjanjian agregat mengenai pengakuan bersalah atau *nolo contendere*, kecuali setiap klien memberikan persetujuan setelah berkonsultasi, termasuk pengungkapan tentang keberadaan dan sifat semua klaim atau pengakuan yang terlibat serta partisipasi masing-masing orang dalam penyelesaian tersebut.

Seorang advokat tidak boleh membuat perjanjian yang membatasi tanggung jawabnya kepada klien untuk malpraktek secara prospektif, kecuali diperbolehkan oleh hukum dan klien tersebut diwakili secara independen dalam membuat perjanjian, atau menyelesaikan klaim untuk tanggung jawab tersebut dengan klien atau mantan klien yang tidak diwakili tanpa terlebih dahulu memberi nasihat kepada orang tersebut secara tertulis bahwa perwakilan independen adalah hal yang sesuai.

Seorang advokat yang memiliki hubungan dengan advokat lain sebagai orang tua, anak, saudara, atau pasangan tidak boleh mewakili klien dalam perwakilan yang langsung bertentangan dengan orang yang diketahui diwakili oleh advokat lain kecuali dengan persetujuan klien setelah berkonsultasi mengenai hubungan tersebut.

Demikian pula, seorang advokat tidak boleh memperoleh kepentingan kepemilikan dalam pokok perkara atau subjek litigasi yang sedang ditangani untuk klien, kecuali advokat tersebut dapat:

- 1) Mengakuisisi hak gadai yang diberikan oleh hukum untuk mengamankan biaya atau pengeluaran advokat; dan
- 2) Mengontrak dengan klien untuk biaya kontingen yang wajar dalam kasus perdata.

BAB 5

ETIKA DARI JAKSA PENUNTUT UMUM

Pendahuluan

Sebagai prinsip, penuntutan mengacu pada proses atau tindakan dalam suatu proses pidana di mana seorang terdakwa diadili. Jaksa penuntut umum adalah pejabat publik dan tentu saja seorang pengacara yang mewakili pemerintah (publik) melawan terdakwa (tersangka) dalam proses pidana di depan pengadilan. Dalam kasus-kasus luar biasa, jaksa penuntut umum juga dapat terlibat dalam perkara perdata atas nama pemerintah. Ia adalah seorang pengacara, karena fungsinya (penuntutan) memerlukan pengetahuan hukum, keterampilan, dan etika.

Oleh karena itu, sebagian besar negara mengatur dalam bagian kelayakan bahwa kandidat untuk diangkat sebagai jaksa penuntut umum haruslah seorang pengacara yang lulus dari sekolah hukum yang terakreditasi. Ia juga merupakan pejabat karena harus diangkat oleh organ yang berwenang yang mengelola jabatan jaksa penuntut umum di tingkat federal atau regional. Kebutuhan untuk pengangkatan ini bertujuan untuk memastikan kepercayaan publik.

Berbeda dengan pegawai negeri sipil, yang hanya memerlukan hubungan kerja, ia harus mendapatkan persetujuan dari organ lain. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaksa penuntut umum yang melibatkan kepentingan publik yang sensitif. Sebelum kita membahas persyaratan etika dasar bagi jaksa penuntut umum, mari kita lihat tujuan utama dari penuntutan publik secara umum dan fungsi dasar jaksa penuntut umum secara khusus.

5.1 KELAYAKAN

Sebagian besar negara menetapkan kriteria minimum untuk mengenal status Jaksa Penuntut Umum atau kandidat yang diangkat sebagai jaksa penuntut umum. Kriteria yang paling umum meliputi:

- Usia
- Kewarganegaraan
- Kesetiaan dan penerimaan terhadap hukum nasional negara yang bersangkutan, terutama konstitusi
- Menjadi seorang pengacara
- Persyaratan etika, terutama kejujuran, integritas, loyalitas, ketidakberpihakan, legalitas, ketekunan, dan memiliki citra publik yang baik
- Tidak memiliki catatan kriminal, kecuali pelanggaran kecil dan pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan pengaduan atau telah dihukum tetapi telah dipulihkan
- Beberapa negara mensyaratkan pengalaman

Dengan cara yang serupa, Peraturan Dewan Menteri Pengadilan Federal No. 44/1998 Pasal 4 menetapkan persyaratan untuk pengangkatan jaksa penuntut umum yang menyatakan

bahwa setiap orang yang merupakan warga negara Ethiopia; setia pada Konstitusi FDRE; lulusan hukum dengan gelar atau diploma dari universitas yang diakui; menunjukkan dirinya melalui ketekunan, loyalitas, dan karakter baik; serta berusia 18 tahun ke atas dapat diangkat sebagai jaksa.

Terdapat tiga kategori persyaratan untuk memenuhi tanggung jawab penuntutan, yaitu kesetiaan terhadap hukum, pengetahuan di bidang hukum, dan perilaku pribadi, tanpa mengabaikan masalah kewarganegaraan dan usia. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi persyaratan tersebut memenuhi syarat untuk diangkat ke posisi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dari peraturan yang sama.

Tujuan Penuntutan Umum

- (1) Kantor Jaksa Penuntut Umum akan menjadi institusi integral dari kekuasaan yudikatif yang akan melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan hukum secara independen, dalam batas-batas wewenang yang ditetapkan oleh hukum ini.
- (2) Tujuan dasar dari Kantor Jaksa Penuntut Umum adalah untuk bertindak jika terjadi pelanggaran hukum dan memastikan tinjauan atas pelanggaran tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- (3) Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat dari Kantor Jaksa Penuntut Umum yang memegang posisi yang diatur oleh hukum yang relevan.

Yang Harus Dilakukan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Mengawasi kegiatan lembaga penyelidikan dan kegiatan operatif lembaga lainnya
- 2) Mengorganisir, melaksanakan, dan melakukan penyelidikan pra-persidangan
- 3) Memulai dan melanjutkan penuntutan pidana
- 4) Menuntut atas nama Negara
- 5) Mengawasi pelaksanaan hukuman
- 6) Melindungi hak dan kepentingan sah individu serta Negara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
- 7) Mengajukan klaim dan permohonan kepada pengadilan dalam kasus-kasus yang diatur oleh hukum
- 8) Menghadiri tinjauan pengadilan terhadap kasus-kasus ketika diharuskan oleh hukum.

5.2 ASAS DASAR HUKUM DAN ASAS ETIKA BAGI FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM

Jaksa Dasar Hukum

Dengan memperhatikan norma-norma yang tidak dapat diubah, dasar hukum dari kegiatan jaksa penuntut umum adalah hukum nasional negara yang bersangkutan, terutama Konstitusi.

Independensi Jaksa Penuntut Umum

Dalam aktivitasnya, jaksa publik harus independen dari pengaruh lembaga atau pejabat lain baik dari cabang legislatif maupun eksekutif dan hanya tunduk pada hukum. Selain aspek intrinsik, secara eksternal pemerintah harus menciptakan kondisi yang mendukung agar mereka tetap independen, melindungi mereka dari pengaruh publik dengan menyediakan

fasilitas yang diperlukan, termasuk keamanan pribadi dan pekerjaan.

Dilarang bagi Kabinet Menteri, lembaga negara atau pemerintah daerah, pegawai negeri, perusahaan dan organisasi dari jenis apa pun, serta individu untuk ikut campur dalam kegiatan Kantor Jaksa Publik saat sedang menyelidiki kasus atau melaksanakan fungsi lain dari kantor tersebut; khususnya, jaksa publik senior memiliki hak untuk mengambil alih yurisdiksi atas kasus mana pun; namun, mereka tidak boleh menginstruksikan jaksa mana pun untuk melakukan aktivitas yang bertentangan dengan keyakinan mereka.

Selain itu, jaksa publik berhak menolak atau mengungkapkan informasi tentang materi pemeriksaan atau penyelidikan yang sedang ditinjau oleh Kantor Jaksa Publik. Dilarang mengadakan demonstrasi, aksi unjuk rasa, dan tindakan lain yang diorganisir di dalam premises Kantor Jaksa Publik. Untuk upaya mempengaruhi jaksa publik dengan cara yang melanggar hukum atau untuk campur tangan dalam kegiatan Kantor Jaksa Publik, individu akan dikenakan sanksi sesuai hukum.

Secara umum, jaksa publik harus bebas dalam menjalankan tugas profesionalnya, terpisah dari kepentingan pribadi atau pengaruh eksternal. Ia harus independen dalam penilaiannya dan tidak terikat pada afiliasi mana pun yang dapat membahayakan penilaiannya terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Di bidang penuntutan, jaksa publik tidak boleh bertindak demi kepentingan individu, pihak, atau kelompok mana pun dalam menjalankan tugas publiknya.

Independensi tersebut jelas merupakan prasyarat untuk memberikan keputusan resmi yang tidak memihak, karena ketidakberpihakan ini diharuskan di bawah Pasal 136(1) Prosedur Pidana Ethiopia tahun 1961. Jaksa publik sering terlibat dalam sistem peradilan sebagai pihak yang mewakili publik tetapi tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau warna kulit antara kasus yang dihadapi dan orang-orang yang menjadi objek keputusan hukum penuntutan atau aktivitas lain yang berkaitan dengan tanggung jawab profesionalnya. Peraturan Komisi Anti-Korupsi No. 4/2002 dalam Pasal 5(1) mengatur bahwa setiap jaksa publik harus membela independensi penuntutan, bersikap jujur, dan menjaga reputasi serta kehormatan profesinya.

Independensi tersebut jelas merupakan prasyarat untuk memberikan keputusan resmi yang tidak memihak, karena ketidakberpihakan ini diharuskan di bawah Pasal 136(1) Prosedur Pidana Ethiopia tahun 1961. Jaksa publik sering terlibat dalam sistem peradilan sebagai pihak yang mewakili publik tetapi tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau warna kulit antara kasus yang dihadapi dan orang-orang yang menjadi objek keputusan hukum penuntutan atau aktivitas lain yang berkaitan dengan tanggung jawab profesionalnya. Peraturan Komisi Anti-Korupsi No. 4/2002 dalam Pasal 5(1) mengatur bahwa setiap jaksa publik harus membela independensi penuntutan, bersikap jujur, dan menjaga reputasi serta kehormatan profesinya.

Pasal 8(6) dari peraturan yang sama menegaskan aturan etika serupa yang menyatakan bahwa jaksa harus mengambil langkah yang diperlukan agar tidak membahayakan independensi penuntutan dan menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh penyidik, pengadilan,

dan pihak lainnya. Isu independensi dan ketidakberpihakan ini memiliki implikasi kuat terhadap kepercayaan publik dan keyakinan terhadap upaya penuntutan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk membawa perdamaian, ketertiban, dan keamanan yang langgeng bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, jaksa publik harus independen dan tidak memihak dalam semua upayanya untuk mengidentifikasi pelanggar yang sebenarnya serta melindungi warga yang tidak bersalah dari gangguan yang tidak semestinya dalam proses tersebut.

Kekebalan Dari Jaksa Penuntut Umum

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan bebas dalam lingkup kekuasaannya, hukum harus menjamin semacam privilese atau pengecualian dari tanggung jawab. Misalnya, jaksa publik dapat memulai penuntutan pidana, melakukan penahanan, penangkapan, pemanggilan secara paksa, dan pelaksanaan penggeledahan oleh jaksa publik harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Jaksa publik tidak boleh ditahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum administratif. Untuk pelanggaran administratif yang dilakukan, sanksi disipliner dapat dikenakan pada jaksa publik. Sistem informasi, sarana komunikasi, termasuk sarana komunikasi elektronik, hanya dapat dikendalikan, disalin, dan diintervensi dengan persetujuan otoritas yang berwenang.

Kerahasiaan

Jaksa publik harus menghormati prinsip kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama menjalankan tugas resminya, kecuali untuk alasan hukum. Kerahasiaan ini tidak hanya mencakup larangan untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh dalam kapasitas resmi, tetapi juga mengharuskan jaksa publik untuk tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau membiarkan penggunaan informasi tersebut demi kepentingan individu swasta lainnya.

Tujuan utama dari jabatan jaksa adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat umum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Kode Pidana. Tidak boleh ada pertimbangan lain yang mendorong jaksa publik dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Informasi yang diketahui oleh jaksa publik dalam pelaksanaan tugas publiknya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, informasi tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk mempromosikan kepentingan pribadi jaksa publik atau individu swasta lainnya.

Pasal 6 Peraturan Dewan Menteri No. 44/1998, terkait dengan kerahasiaan, menyatakan bahwa setiap jaksa tidak boleh mengungkapkan kepada siapa pun informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas resminya, kecuali jika pengungkapan tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas hukumnya, kecuali informasi tersebut dianggap tidak penting atau merupakan pengetahuan publik. Jaksa juga tidak boleh mengungkapkan informasi, proses, rencana, atau hal serupa yang telah dinyatakan rahasia, kepada pihak mana pun, kecuali atas perintah otoritas tertinggi atau jika orang tersebut secara hukum diizinkan untuk mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa jaksa publik, saat memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik, harus menggunakan dan mengungkapkan informasi

tersebut demi kepentingan publik dan sesuai dengan hukum. Prinsip etika yang sama juga tercantum dalam Pasal 5(5) Peraturan Anti-Korupsi No. 4/2002, yang menyatakan bahwa kecuali diizinkan atau disetujui oleh organ atau orang yang berwenang, jaksa publik, baik saat berada dalam maupun keluar dari komisi, tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia.

Kompetensi Dan Ketekunan

Kompetensi mengacu pada kemampuan jaksa publik untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jaksa publik harus kompeten dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan mewakili masyarakat di bidang tugasnya. Mereka harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan atau pelatihan yang mengikuti perkembangan hukum terkini.

Karena jaksa terlibat dalam tugas yang berkaitan langsung dengan hukum, mereka harus selalu mengenali hukum yang berlaku. Hanya hukum yang berlaku yang mengikat jaksa publik, pengadilan, dan terdakwa dalam proses pidana. Mengetahui hukum yang ada dan cara penerapannya memerlukan pengalaman di bidang tersebut. Oleh karena itu, jaksa publik harus terampil dalam menerapkan hukum pada kasus yang dihadapi. Tanggung jawab ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum, yang menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang diemban.

Untuk memenuhi kepentingan publik tersebut, jaksa harus selalu waspada dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Aturan etika tentang kompetensi yang berlaku bagi hakim dan pengacara juga berlaku bagi jaksa publik, meskipun dengan tanggung jawab yang berbeda. Ketiga profesi ini adalah pengacara yang harus selalu kompeten dalam menangani tanggung jawab mereka.

Peraturan Dewan Menteri No. 44/1998 Pasal 63 menyatakan, "Setiap jaksa publik harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya." Ia diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas biasa dan tugas lain yang terkait dengan pangkat dan posisi yang telah ditetapkan. Pasal 9 Peraturan No. 4/2002 dari Komisi Anti-Korupsi menyatakan bahwa untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi profesionalnya, setiap jaksa publik memiliki kewajiban etis profesional untuk mempelajari hukum Ethiopia dan mengikuti perkembangan pemikiran hukum terkini.

Oleh karena itu, kompetensi profesional dalam tugas jaksa publik berkaitan dengan kualifikasi sehari-hari dalam menjalankan tanggung jawabnya. Evaluasi kelayakan jaksa publik tidak hanya dilakukan saat mereka menjabat, tetapi juga berlangsung sepanjang waktu mereka menjalankan tugas mewakili kepentingan masyarakat umum.

Jaksa publik juga diharapkan untuk bekerja dengan tekun dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Mereka harus mengambil keputusan tepat waktu, mempertimbangkan penggunaan uang publik dan kepercayaan masyarakat, serta menghormati hak atas persidangan yang cepat bagi terdakwa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19(4) Konstitusi FDRE.

Jaksa publik diharapkan memanfaatkan waktu dan sumber daya publik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Mereka harus berada di kantor selama jam kerja dan

melaksanakan tugas tepat waktu. Pasal 15 Peraturan No. 44/1998 mengharuskan jaksa publik untuk menghormati jam kerja pemerintah. Pasal 61 dari regulasi yang sama menyatakan bahwa setiap jaksa publik harus mengabdikan seluruh energi dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang setia demi kepentingan dan manfaat pemerintah serta masyarakat.

Loyalitas Dan Penghindaran Konflik Dari Minat

Dalam semua kegiatannya, jaksa publik diharapkan untuk setia. Seperti namanya, jaksa publik selalu mewakili kepentingan pemerintah. Faktanya, pemerintah adalah perwakilan dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, secara etis, jaksa publik diwajibkan untuk setia pada kepentingan pemerintah dan masyarakat. Mereka diharapkan untuk mengabdikan seluruh energi dan kemampuannya dalam memberikan layanan yang loyal demi melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Konflik Dari Minat

Konflik kepentingan mengacu pada situasi di mana ada kontradiksi tertentu dengan tanggung jawab seseorang, yang menghalangi kemampuan untuk membuat keputusan secara adil dan tanpa bias. Hal ini bisa terjadi dalam bidang penuntutan. Jaksa publik mungkin menghadapi kasus di mana dia tidak dapat memberikan keputusan yang independen dan tidak memihak karena adanya kepentingan langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga, mitra, dan sejenisnya. Pertanyaannya adalah apakah jaksa publik dapat menangani masalah tersebut mengetahui adanya konflik kepentingan.

Tidak diragukan lagi bahwa jaksa publik tidak boleh menangani suatu masalah ketika dia mengetahui adanya konflik kepentingan. Pasal 68(1) dari Peraturan Dewan Menteri No. 44/1998 menyatakan bahwa setiap jaksa harus segera melaporkan kepada atasannya tentang kasus di mana kepentingannya atau kepentingan kerabat atau temannya bertentangan dengan tugasnya, dan meminta agar kasus tersebut ditangani oleh jaksa lain. Dalam hal ini, jelas bahwa ketika jaksa publik mengetahui adanya konflik kepentingan dalam suatu kasus, dia harus mengundurkan diri atau mendiskualifikasi dirinya sendiri dari penanganan kasus tersebut. Prinsip etika yang sama juga diatur dalam Pasal 6(9) dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 4/2002, yang menyebutkan bahwa setiap jaksa publik harus menghindari penanganan kasus pribadi atau keluarga yang sedang ditangani oleh jaksa lain.

Masalah konflik kepentingan ini berfungsi untuk melindungi independensi dan ketidakberpihakan demi kepercayaan publik, yang merupakan motivasi di balik pelayanan publik. Jaksa publik tidak boleh berpartisipasi dalam proses pengadilan terkait suatu kasus, dan tidak boleh memeriksa aplikasi di mana hakim atau penasihat dalam kasus tersebut, atau orang yang kegiatannya sedang diselidiki oleh jaksa publik tersebut, adalah pasangan dari jaksa tersebut atau kerabat dekat tanpa batas derajat, atau terkait dengan jaksa publik tersebut dalam hubungan sampingan dalam tiga derajat pertama, atau terkait dalam dua derajat pertama dalam hubungan keluarga.

Dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas, jaksa publik tersebut harus menolak dirinya sendiri. Jika jaksa publik tersebut tidak menolak diri, maka setiap orang yang hak atau kepentingannya mungkin dilanggar dapat mengajukan permohonan untuk pencabutan jaksa

tersebut, yang harus disampaikan kepada jaksa senior atau ke pengadilan. Permohonan pencabutan tersebut akan ditinjau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

5.3 SEHUBUNGAN DENGAN TERDAKWA, PENGADILAN DAN LEMBAGA LAIN

Pencapaian keadilan merupakan hasil dari upaya kumulatif semua cabang pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Ethiopia saat ini, yang menganut federalisme, cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat federal dan regional harus bekerja sama atau menunjukkan semacam saling ketergantungan, sambil menjaga area independensi yang diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan bersama ini. Kantor penuntut umum, baik secara institusional maupun individu, merupakan bagian dari proses ini, dan perilakunya harus sesuai dengan tujuan tersebut.

Kantor penuntut umum adalah lembaga hierarkis yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kehakiman (di tingkat federal) atau kepada Biro Kehakiman (di tingkat regional). Ini menunjukkan bahwa jaksa publik merupakan bagian dari organ eksekutif pemerintah. Biasanya, yang diharapkan dari pemerintah suatu negara, khususnya pemerintah demokratis, adalah memberikan keadilan yang adil kepada masyarakat. Dalam usaha untuk memberikan keadilan yang adil, organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan memainkan peran penting. Berbagai organ tersebut harus bertindak melalui subdivisi masing-masing, di mana penuntutan umum merupakan salah satu divisi dari organ eksekutif.

Etika Dalam Tahap Praperadilan

Sehubungan dengan hubungan antara jaksa publik dan orang yang dicurigai, jaksa publik mungkin melakukan kegiatan investigasi tertentu. Ada hak-hak tertentu yang diakui oleh hukum yang diberikan kepada orang yang dicurigai. Setiap kali melakukan penyelidikan, jaksa publik diharapkan untuk secara jelas mengungkapkan hak-hak yang diakui oleh hukum kepada tersangka. Misalnya, jika jaksa publik yang melakukan interogasi terhadap tersangka, dia diharapkan untuk memberi tahu bahwa tersangka memiliki hak untuk tetap diam dan bahwa apa pun yang diucapkan akan digunakan sebagai bukti terhadapnya di pengadilan. Oleh karena itu, adalah tidak etis untuk menyembunyikan informasi yang menguntungkan tersangka selama proses penyelidikan.

Selain itu, tidak pantas jika jaksa publik melanggar hak-hak yang diakui secara hukum dari orang yang sedang dituntut. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, fakta bahwa seseorang dicurigai dan dituntut atas suatu kejahatan tidak berarti bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan. Hasil akhirnya bisa berupa vonis bersalah atau dibebaskan. Terlepas dari apa pun hasilnya, jaksa publik diharapkan untuk menghormati hak-hak orang yang dituntut. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga personel di bawah kendali jaksa publik harus menghormati hak-hak tersangka. Jaksa publik diharapkan memastikan bahwa polisi serta personel lain di bawah kendalinya menghormati dan tidak mengganggu hak-hak orang yang dicurigai.

Sebagai bagian dari kewajibannya untuk menghormati hak-hak orang yang dicurigai, jaksa publik selalu diharapkan untuk menghindari mengambil tindakan yang akan membatasi

hak bergerak dari tersangka. Setiap kali ada kebutuhan untuk mempengaruhi kebebasan bergerak tersangka, tindakan tersebut harus sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum. Jaksa publik harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan meminta perintah pengadilan untuk membatasi kebebasan bergerak tersangka atau mengambil tindakan koersif terhadap orang tersebut. Dalam hubungan ini, jaksa publik diharapkan untuk bersikap netral. Dia harus selalu bertindak secara independen, berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum.

Adalah jelas bahwa jaksa publik selalu mewakili pemerintah dan, dengan demikian, masyarakat luas. Meskipun demikian, dalam kapasitas jabatannya sebagai jaksa, jaksa publik seharusnya tidak menunjukkan bias yang tidak perlu terhadap terdakwa. Orang yang dituduh mungkin terbukti tidak bersalah dan dibebaskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, adalah tidak etis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.

Selama Persidangan

Kegiatan jaksa publik juga berlanjut selama proses persidangan kasus. Kami telah membahas standar etika yang diharapkan dari jaksa publik pada tahap pra-persidangan. Setelah penyelidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas kepada jaksa publik. Setelah menerima berkas penyelidikan, jaksa publik memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan atau tidak. Jika jaksa publik memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan terhadap tersangka karena kurangnya cukup bukti, dia akan menutup berkas tersebut. Dia dapat memerintahkan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan cukup bukti. Namun, jika terdapat cukup bukti menurut penilaian jaksa publik dan dia memutuskan untuk mengajukan tuntutan terhadap tersangka, jaksa publik akan memasuki tahap persidangan. Dalam bagian ini, kami akan membahas persyaratan etika yang diharapkan dari jaksa publik pada tahap persidangan.

Ketika jaksa publik mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan, dia harus selalu hadir di pengadilan. Dalam setiap sidang publik, pihak penuntut umum harus diwakili. Secara etis, jaksa publik diharapkan untuk menghormati penundaan. Jika jaksa publik tidak dapat hadir karena alasan yang berada di luar kendalinya (*force majeure*), dia harus memberi tahu kantor penuntut umum sesegera mungkin. Ini berhubungan langsung atau tidak langsung dengan hak-hak orang yang dicurigai. Selain hadir di pengadilan, jaksa publik juga harus menghormati prinsip perdebatan publik dan adversarial. Kecuali dalam kasus-kasus luar biasa yang diatur oleh hukum, perdebatan di pengadilan harus terbuka untuk umum. Hanya dalam situasi di mana sidang publik mempengaruhi kepentingan tertentu, hukum melarang sidang publik. Oleh karena itu, jaksa publik tidak seharusnya meminta sidang dilakukan secara tertutup kecuali hukum mempersediakannya. Jika jaksa publik melakukannya, maka dia dianggap telah melanggar standar etika.

Jaksa publik juga diharapkan untuk menghormati prinsip perdebatan adversarial. Dalam semua kasus, proses di pengadilan harus bersifat adversarial. Prinsip perdebatan adversarial mengharuskan adanya persidangan yang adil, di mana kedua pihak dalam kasus tersebut didengar dengan baik. Dalam proses pidana, jaksa publik tidak boleh mengajukan

kasusnya sebagai penggugat dengan cara yang berbeda dari yang diatur oleh hukum. Dia tidak boleh meminta agar keputusan hanya didasarkan pada bukti yang dia ajukan atau hanya bukti dari dirinya yang diterima. Sebagai salah satu syarat persidangan yang adil adalah komunikasi tepat waktu dari bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, jaksa publik harus selalu mematuhi kewajiban untuk menyampaikan bukti kepada orang yang dituntut atau perwakilannya secara tepat waktu.

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, orang yang dituduh dapat dihukum atau dibebaskan. Orang yang dituntut dapat dibebaskan karena dia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan, atau bahkan jika dia telah melakukan kejahatan, karena jaksa publik tidak dapat membuktikan apa yang telah dituduhkan. Selama proses pengadilan, jaksa publik harus menghindari prasangka terhadap orang yang dituntut. Tidak ada situasi permusuhan antara terdakwa dan jaksa publik. Oleh karena itu, jaksa publik tidak boleh memiliki posisi yang bias terhadap tersangka. Selain itu, jaksa publik harus selalu menyampaikan hukum dengan benar. Jika jaksa publik menyalahartikan hukum atau bukti, itu adalah perilaku yang melanggar standar etika.

Secara dasar, fungsi jaksa publik berada dalam bidang hukum pidana. Namun, dalam beberapa kasus luar biasa yang diatur oleh hukum, jaksa publik dapat terlibat dalam perkara perdata. Sebaliknya, tidak etis jika jaksa publik mengklaim untuk campur tangan dalam proses perdata. Biasanya, proses perdata adalah tindakan antara warga negara swasta. Hal yang sama berlaku untuk kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan pengaduan. Jaksa publik juga tidak boleh sembrono dalam pengawasan pelaksanaan hukuman pidana. Fungsi jaksa publik dapat dikatakan lengkap dan efektif ketika dieksekusi. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab etisnya untuk mengikuti nasib dari vonis kriminal, bekerja sama dengan unit-unit administrasi pemerintah lainnya seperti administrasi penjara. Dalam pengawasan tersebut, jaksa publik harus memastikan bahwa hak konstitusi orang yang dipenjarakan dihormati dan dijaga. Dengan demikian, kelalaian dari pihak jaksa publik merupakan pelanggaran terhadap standar etika.

Pengadilan

Kegiatan jaksa publik sangat terkait dengan pengadilan. Dalam hubungan sehari-harinya dengan hakim, jaksa publik harus menghormati independensi para hakim. Jaksa publik diharapkan untuk menerima dan mematuhi perintah serta keputusan yang dibuat oleh hakim. Secara etis, tidak dapat diterima jika jaksa publik memberikan komentar kritis mengenai keputusan yang diambil oleh hakim. Namun, penting untuk dicatat bahwa jaksa publik tidak boleh dihalangi untuk mengajukan argumen terkait permohonan banding. Secara umum, kecuali untuk alasan yang diatur oleh hukum, jaksa publik harus menghindari perilaku atau tindakan yang mengganggu independensi hakim. Selain itu, jaksa publik harus mengenakan pakaian yang sesuai dan mengenakan jubah saat tampil di pengadilan, sesuai dengan Pasal 6(2) Peraturan 4/2002 Komisi Anti-Korupsi. Hal ini dilakukan untuk menghormati martabat pengadilan.

Lembaga Lainnya

Keadilan merupakan hasil kumulatif dari upaya berbagai organ pemerintah. Untuk

berkontribusi pada mesin keadilan secara umum, jaksa publik harus bekerja sama dengan institusi lain sambil menjaga area independensinya. Isolasi yang berlebihan menjadi ketinggalan zaman dan tidak efektif. Tugas etis utama jaksa publik di institusi-institusi ini berkaitan dengan ketaatan. Oleh karena itu, jaksa publik harus mematuhi perintah atasannya, seperti kementerian kehakiman, biro keadilan, dan pejabat di berbagai dewan dan tingkat, termasuk pengadilan.

Dengan kata lain, dalam menjalankan tugas resminya, jaksa publik tidak boleh menolak untuk mematuhi perintah atasannya. Menolak perintah atasannya akan melanggar standar etika profesinya. Namun, perintah tersebut haruslah wajar dan sah. Jaksa publik tidak terikat untuk menerima perintah yang jelas melanggar hukum atau bertentangan dengan kode etik profesinya. Dalam hal ini, ia tidak dapat dihukum karena pembangkangan. Atas keabsahan perintah yang meragukan, tanggung jawab ada pada atasan.

Telah dibahas sebelumnya bahwa kantor kejaksaan publik berada dalam hierarki di bawah Kementerian Kehakiman di tingkat Pemerintah Federal dan di bawah Biro Kehakiman di tingkat Pemerintah Daerah. Hierarki ini menunjukkan bahwa jaksa publik menghormati perintah dari Kementerian Kehakiman atau Biro, sesuai dengan situasinya. Sebagai konsekuensi, seorang jaksa publik diharapkan untuk menerima perintah untuk menyerahkan kasus tertentu kepada jaksa publik lain. Alasan di balik hal ini adalah bahwa kejaksaan publik tidak terpisahkan. Setiap anggota kantor kejaksaan dapat menggantikan anggota lainnya kapan saja selama proses berlangsung. Oleh karena itu, seorang jaksa publik tidak dapat menolak untuk melanjutkan proses yang dimulai oleh jaksa lainnya. Jika ada keberatan atau penolakan dari seorang jaksa publik tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hal ini dianggap sebagai penyimpangan dari standar etika yang ditetapkan.

Kaitannya Dengan Polisi

Polisi dan jaksa penuntut umum harus bekerja sama untuk pemeliharaan perdamaian dan ketertiban. Hubungan antara mereka harus berjalan lancar. Jaksa penuntut umum sebagai atasan harus bersikap etis dan menerima fakta bahwa polisi adalah asisten mereka, terutama tidak boleh memaksa untuk menaati perintah yang tidak masuk akal. Salah satu tugas jaksa penuntut umum terkait dengan kegiatan polisi adalah mengawasi aktivitas peradilan polisi. Dalam beberapa kasus, polisi mungkin menangkap individu secara tidak sah atau individu yang ditangkap secara sah mungkin tinggal di kantor polisi tanpa alasan yang jelas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak semestinya, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk mengawasi aktivitas peradilan polisi. Jaksa penuntut umum dapat menjalankan tugas ini dengan sering mengunjungi kantor polisi. Selain melakukan kunjungan rutin, jaksa penuntut umum diharapkan untuk hadir secara langsung di tempat terjadinya kejahatan serius yang dilaporkan. Jika jaksa penuntut umum gagal atau menolak menjalankan tugas ini, itu berarti menyimpang dari standar etika. Karena kantor penuntut umum secara hierarkis berada di bawah Kementerian Hukum atau Biro Hukum, polisi juga berada di bawah perintah jaksa penuntut umum. Namun, ini tidak berarti bahwa untuk semua tujuan, kepolisian berada di bawah kantor penuntut umum. Ini hanya berlaku untuk masalah penyidikan kriminal di mana

jaksa penuntut umum dapat memerintahkan kepolisian.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, jaksa penuntut umum dapat menggunakan kekuatan. Kekuatan yang digunakan haruslah kekuatan publik. Dalam semua kasus penggunaan kekuatan publik, jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa penggunaan tersebut diperlukan. Terkadang, menggunakan kekuatan publik menjadi satu-satunya opsi bagi jaksa penuntut umum atau organ lain untuk menjalankan fungsi yang diharapkan. Misalnya, dalam penyidikan kejahatan tertentu, tersangka mungkin menolak memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah rumah atau tempat tinggalnya. Dalam kasus seperti itu, selama ada surat perintah penggeledahan, penggunaan kekuatan yang sesuai menjadi diperlukan. Sebaliknya, jika kekuatan publik digunakan sementara ada alternatif lain, itu tidak dapat dibenarkan.

Kaitannya Dengan Publik

Sebagai orang biasa, seorang jaksa penuntut umum dapat memiliki interaksi sosial dengan masyarakat di mana ia tinggal. Namun, keterlibatannya harus terbatas dan sesuai dengan prinsip etika jaksa penuntut umum. Ia harus selalu menunjukkan perilaku dan sikap yang baik. Sepanjang waktu, jaksa penuntut umum harus menjadi contoh kewarganegaraan yang baik dengan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dengan menunjukkan perilaku dan sikap yang baik, jaksa penuntut umum dapat membangun citra publik yang positif dan memenangkan kepercayaan masyarakat. Ia harus selalu ingat bahwa ia adalah agen masyarakat dan pemerintah dalam penegakan keadilan.

Semua kegiatannya harus dibatasi agar tidak mempengaruhi kepentingan material dan psikologis (martabat) masyarakat. Selain itu, ia harus berupaya agar tidak melanggar hak asasi manusia dan hak demokratis individu secara umum. Beberapa contoh kegiatan sensitif dalam interaksi sosialnya adalah meminjam, menerima sumbangan, terlibat dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan, dan tindakan memalukan lainnya yang tidak sesuai dengan status sebagai jaksa penuntut umum.

Peminjaman Uang Dan Hadiah

Kehidupan penuh dengan suka dan duka. Kita sebagai manusia terbatas dan tidak sempurna dalam banyak aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Sumber daya terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Dalam perjalanan hidupnya, jaksa publik mungkin mengalami kekurangan. Dalam situasi seperti itu, ia dapat meminta pinjaman dari orang lain. Karena orang biasanya tidak sepenuhnya mandiri, tidak adil jika jaksa publik dilarang total untuk meminjam uang hanya karena ia adalah agen publik. Oleh karena itu, kita harus membiarkannya meminjam, tetapi dengan batasan tertentu dan dari orang-orang tertentu. Pertanyaannya adalah, jika jaksa publik diizinkan meminjam uang, seberapa terbatas ia atau seberapa terbataskah para pemberi pinjamnya? Tidak jelas seberapa sering jaksa publik dapat meminjam uang dari orang-orang tertentu ini. Peraturan di bawah Pasal 66 menyatakan bahwa peminjaman yang berkelanjutan dilarang. Namun, perlu dipertanyakan seberapa sering dianggap sebagai peminjaman yang berkelanjutan. Namun, dapat dikatakan bahwa jaksa publik seharusnya tidak terlalu bergantung pada pinjaman dari orang lain.

Dalam hidupnya, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk hidup dari gaji bulanan dan pendapatan legal lainnya. Jika kehidupan jaksa publik sangat bergantung pada pinjaman, hal ini mungkin dapat memengaruhi kemampuannya untuk melindungi kepentingan pemerintah dan publik. Masalah utama adalah bahwa jaksa publik harus menjalani hidup yang ekonomis agar tidak terpapar pada godaan untuk meminjam. Secara umum, Pasal 67 dari peraturan administrasi jaksa federal melarang jaksa untuk meminta atau menerima imbalan atau kompensasi dalam bentuk apa pun dari orang mana pun sehubungan dengan layanan yang telah diberikan atau yang akan diberikan di masa depan. Jaksa adalah pegawai publik yang dibayar oleh pemerintah untuk layanan yang diberikannya. Imbalan yang diterimanya adalah gaji dan tunjangan yang ia terima dari pemerintah. Oleh karena itu, ia tidak diizinkan untuk menerima imbalan dari siapapun sehubungan dengan layanan yang telah ia berikan atau yang diharapkan untuk diberikan. Uang, hadiah dalam bentuk barang, atau bentuk imbalan lainnya yang diminta atau diterima seharusnya tidak diterima oleh jaksa publik dari individu atau organisasi terkait dengan tugas resmi yang telah atau akan dilaksanakannya.

Kami telah melihat di atas bahwa jaksa publik tidak sepenuhnya dilarang untuk meminjam uang dari orang lain. Namun, ini tidak berarti bahwa ia diizinkan untuk meminjam uang dari siapapun yang ia mau. Sangat dilarang bagi jaksa publik untuk meminjam uang dari orang yang memiliki kontak dengannya dalam melaksanakan tugas resminya. Misalnya, tidak adil jika jaksa publik diizinkan meminjam dari terdakwa yang dihadapinya atau yang sedang dalam proses penyelidikan. Ide di balik hal ini cukup jelas: jaksa publik tidak akan memberikan pelayanan yang setia demi kepentingan pemerintah dan publik.

Penyingkapan Dari Penghasilan

Meskipun jaksa publik tidak sepenuhnya dilarang untuk terlibat dalam kegiatan bisnis menghasilkan pendapatan di luar profesinya yang dibatasi, adalah kewajibannya secara etis untuk mengungkapkan pendapatan yang diperoleh dari keterlibatan ini.

5.4 TERLIBAT DI DALAM KEGIATAN DI LUAR TUGAS RESMI

Jaksa publik pada prinsipnya harus devosi dan dedikasi terhadap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setiap prioritas harus diberikan kepada tugas utamanya untuk mewakili publik dalam kasus yang melibatkan kepentingan umum. Pasal 71 Regulasi Dewan Menteri mengatur bahwa setiap jaksa harus, selama jam kerja normal, mengerahkan seluruh energi dan perhatian pada tugas resmi yang menjadi tanggung jawabnya (sub (1)). Ia juga tidak boleh melakukan kegiatan luar yang akan mengganggu pelayanannya atau yang dengan cara apa pun bertentangan dengan tugasnya atau tidak konsisten dengan posisinya sebagai jaksa (sub (2)). Namun, aturan ini tidak bersifat mutlak, seperti yang dapat dipahami dari pernyataan kedua di atas dan Pasal 71(1), yang menyatakan bahwa jaksa publik dapat diinstruksikan untuk bekerja di kantor pemerintahan lain atau perusahaan publik setelah menerima perintah yang sesuai.

Di sini terlihat bahwa tanpa mempengaruhi pekerjaan di kantor kejaksaan, jaksa publik dapat diperintahkan untuk terlibat dalam aktivitas pemerintahan lain selama aktivitas

tersebut berkaitan dengan kepentingan publik, dan jaksa publik dalam semua aktivitasnya mewakili publik. Sebagaimana juga dapat dipahami dari pembacaan sub (1)(b) Pasal 71, jaksa publik dapat berpartisipasi dalam kegiatan lain di luar tugas kejaksaan, asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan tugas utamanya. Jika kegiatan tersebut tidak menghalangi jaksa publik untuk melaksanakan tanggung jawab penuntutan secara efektif. Contohnya, jaksa publik dapat mengajar, melatih, dan memberikan kuliah mengenai hukum serta masih dapat menulis tentang hukum tanpa mengurangi tanggung jawab kantor. Namun, dalam melakukannya, jaksa publik harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Kementrian Kehakiman sesuai dengan sub (2) yang sama. Selain itu, kegiatan tersebut harus dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari organ terkait yang menjadi tanggung jawab jaksa publik. Secara umum, kegiatan tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kode etik profesional jaksa.

Etis Pertimbangan Lainnya

Fungsi jaksa publik tidak kompatibel dengan keanggotaan dalam aktivitas partisan, termasuk partai politik atau organisasi politik lainnya. Dapatkah jaksa publik menjadi anggota kelompok politik tertentu di Ethiopia? Meskipun isu tersebut tidak secara khusus diatur dalam kode etik jaksa publik, pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan apakah aktivitas tersebut bertentangan dengan ketidakberpihakan dan independensi; martabat profesi; waktu kerja; kepercayaan dan keyakinan publik; atau masalah konflik kepentingan. Jika jawabannya positif, jaksa publik tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik.

Jaksa publik harus mengenakan pakaian yang diterima secara sosial dan bersantai di tempat yang bermartabat di luar kantor. Setiap jaksa publik harus selalu menunjukkan perilaku dan sikap baik di dalam dan di luar kantor untuk memenangkan penghormatan dan kepercayaan publik. Ia harus memenuhi segala yang diharapkan untuk melindungi martabat profesinya, seperti yang dapat dipahami dari pembacaan Pasal 62 Peraturan No 44/1998. Secara khusus, jaksa publik tidak boleh melaksanakan tugasnya dalam keadaan mabuk karena alkohol atau obat, dan harus menjaga diri agar tidak terjerat kecanduan, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Anti-Korupsi No 4/2002.

Selain itu, jaksa publik dilarang meminjam uang secara terus-menerus dan dilarang keras meminjam uang atau berusaha meminjam uang dari anggota publik yang berhubungan dengan tugas resmi (Pasal 66 Peraturan Dewan Menteri). Lebih jauh, ia diharuskan untuk tidak meminta atau menerima imbalan atau pertimbangan dalam bentuk apa pun dari siapa pun terkait dengan layanan yang telah diberikan atau yang diharapkan untuk diberikan, sesuai dengan Pasal 68 peraturan yang sama. Jaksa publik juga diharuskan untuk menggunakan peralatan kantor hanya sejauh yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tepat, sesuai dengan Pasal 70 dari peraturan yang sama.

5.5 TANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA

Sebagai kode etik yang merupakan bagian dari hukum, mereka harus ditegakkan (dikenakan sanksi). Dan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilanggar dan orang-orang

yang terkena dampak, jaksa publik akan bertanggung jawab secara kriminal, administratif, atau perdata.

Administratif (Disipliner) Kewajiban

Tanggung jawab administratif jaksa publik atas pelanggaran kode etik diatur oleh Pasal 81 dan seterusnya dari regulasi administrasi jaksa federal. Berdasarkan regulasi ini, jaksa publik dapat dikenakan sanksi disipliner yang bersifat ringan atau berat. Sanksi ringan meliputi: peringatan tertulis, denda yang tidak melebihi gaji sebulan, dan penolakan kenaikan gaji berikutnya. Dasar untuk menjatuhkan sanksi ini meliputi: kurangnya usaha dan ketekunan dalam pekerjaan, kegagalan untuk berkoordinasi dengan rekan kerja, menghalangi kelancaran pelaksanaan pekerjaan, peminjaman yang terus-menerus, dan kesalahan serupa.

Ada juga sanksi disipliner yang berat; sanksi serius meliputi penurunan jabatan dan pemecatan. Pelanggaran disipliner yang mengakibatkan sanksi berat antara lain: menerima atau meminta suap, pemalsuan dokumen dengan niat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak ketiga, menciptakan ketidaknyamanan bagi publik akibat keterlambatan pelayanan tanpa alasan yang baik, memicu keributan di tempat kerja, ketidakhadiran yang teratur tanpa alasan yang baik atau tanpa izin, melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral dan etika yang baik di tempat kerja, serta kesalahan serupa.

Tanggung Jawab Pidana

Ketika kepentingan publik terpengaruh akibat pelanggaran kode etik yang dinyatakan dalam berbagai undang-undang pidana, termasuk rujukan silang yang dibuat oleh kode etik untuk jaksa publik, ia akan bertanggung jawab secara pidana. Mengenai tingkat tanggung jawab, seperti yang telah dijelaskan di atas, maksimum tanggung jawab administratif untuk pelanggaran administratif serius adalah pemecatan. Namun, tanggung jawab pidana dapat melampaui batas ini, termasuk pembatasan kebebasan seperti penjara.

Tanggung Jawab Perdata

Saat melanggar kode etik, tindakan atau kelalaian jaksa publik tidak hanya terbatas pada mempengaruhi kepentingan publik dan birokrasi, tetapi juga meluas pada dampak terhadap kepentingan material (ekonomi) atau moral individu atau kelompok, serta masalah sipil secara umum. Oleh karena itu, ia harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami, di samping tanggung jawab pidana dan administratifnya, sesuai dengan ketentuan hukum perdata; misalnya, Pasal 2027 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kekaisaran Ethiopia.

BAB 6

INDEPENDENSI ADVOKAT

6.1 PENDAHULUAN

Independensi advokat merupakan salah satu nilai inti profesi hukum; suatu asas yang dihormati baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum umum. Hampir semua kode etik internasional dan nasional mengatur berbagai tugas advokat yang menjamin independensi advokat. Independensi profesi hukum secara tegas diatur dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 53 Konstitusi nasional menyatakan jabatan advokat merupakan layanan publik yang otonom dan mandiri, yang memberikan bantuan hukum dan melaksanakan mandat publik sesuai dengan hukum. Asas independensi juga terdapat dalam Undang-Undang Advokat, dan Kode MBA.

Kode Etik CCBE dan Prinsip-prinsip IBA secara tegas mengakui independensi advokat sebagai asas inti profesi hukum di seluruh dunia. Kode Etik CCBE menekankan tugas advokat kepada klien, pengadilan, profesi hukum secara umum, dan masyarakat. Pembukaan Kode Etik CCBE menyatakan fungsi seorang pengacara membebankan padanya berbagai kewajiban hukum dan moral (terkadang tampak saling bertentangan) terhadap:

1. Klien.
2. Pengadilan dan otoritas lain yang di hadapannya pengacara membela kepentingan klien atau bertindak atas nama klien.
3. Profesi hukum secara umum dan masing-masing anggotanya secara khusus.
4. Masyarakat yang menganggap keberadaan profesi yang bebas dan independen, yang diikat oleh rasa hormat terhadap aturan yang dibuat oleh profesi itu sendiri, sebagai sarana penting untuk melindungi hak asasi manusia dalam menghadapi kekuasaan negara dan kepentingan lain dalam masyarakat.

Prinsip Piagam CCBE (a) adalah kemandirian seorang pengacara, dan kebebasan pengacara untuk memperjuangkan kasus klien. Menurut Komentar CCBE tentang Piagam Prinsip Inti Profesi Hukum Eropa (Komentar CCBE tentang Piagam), seorang pengacara harus independen dari negara dan kepentingan kuat lainnya dan harus tetap independen dari kliennya jika pengacara ingin mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga dan pengadilan.

Demikian pula, Pembukaan Prinsip-prinsip IBA menekankan tugas pengacara terhadap kliennya pengacara menempatkan kepentingan klien mereka di atas kepentingan mereka sendiri, dan berusaha untuk mendapatkan penghormatan terhadap Aturan Hukum. Prinsip-prinsip IBA adalah "Independensi". Seorang pengacara harus menjaga independensi dan diberikan perlindungan yang ditawarkan oleh independensi tersebut dalam memberikan nasihat dan representasi yang tidak bias kepada klien. Komentar IBA menjelaskan bahwa seorang pengacara harus bertindak untuk klien dalam kapasitas profesional yang bebas dari arahan, kendali, atau campur tangan.

Undang-Undang Pengacara secara eksplisit menetapkan independensi pengacara.

Pasal 7 Undang-Undang Pengacara menyatakan bahwa seorang pengacara perorangan menjalankan profesi hukum secara independen. Aturan 13 Kode MBA menetapkan bahwa seorang pengacara harus mencegah sikap yang tidak benar dari perwakilan pengadilan atau lembaga terhadap dirinya sendiri dan klien. Menurut CCBE, IBA, dan MBA, seorang pengacara dikatakan independen ketika ia mampu mengutamakan kepentingan klien dan bertindak tanpa campur tangan apa pun dalam hubungan pengacara-klien, termasuk tekanan dari luar dan kepentingan pengacara itu sendiri. Dengan demikian, ada tiga dimensi independensi pengacara:

- Independensi dari pengaruh eksternal.
- Independensi dari klien dan keterpisahan profesional.
- Independensi dari kepentingan pribadi pengacara.

Meskipun prinsip independensi pengacara bersifat universal, penting untuk memahami bahwa apa yang dimaksud dengan independensi sangat bervariasi tergantung pada tradisi hukum. Setiap pemahaman tentang prinsip independensi yang berkaitan dengan tugas etis seorang pengacara bergantung pada peran pengacara dan nilai-nilai yang melekat pada profesi hukum dalam sistem hukum tertentu.

Persamaan dan perbedaan dalam penafsiran independensi pengacara paling baik dilihat dan ditangani dengan membandingkan cara-cara di mana berbagai kode menangani ketiga dimensi independensi ini.

6.2 KEMERDEKAAN DARI PENGARUH EKSTERNAL CCBE

Prinsip (a) Piagam CCBE adalah kemerdekaan pengacara, dan kebebasan pengacara untuk memperjuangkan kasus klien. Komentar CCBE menyatakan bahwa seorang pengacara harus bebas secara politik, ekonomi, dan intelektual dalam mewakili klien. Ini berarti bahwa pengacara harus independen dari negara dan kepentingan kuat lainnya, dan tidak boleh membiarkan independensinya dikompromikan oleh tekanan yang tidak pantas dari rekan bisnis. Pengacara juga harus tetap independen dari kliennya sendiri jika pengacara ingin mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga dan pengadilan. Memang, tanpa independensi dari klien, tidak ada jaminan kualitas pekerjaan pengacara.

Kode Etik CCBE menambahkan perincian lebih lanjut pada prinsip ini: “seorang pengacara harus menghindari segala bentuk gangguan terhadap independensinya dan berhati-hati untuk tidak mengorbankan standar profesionalnya demi menyenangkan klien, pengadilan, atau pihak ketiga.” Independensi diperlukan, terlepas dari apakah itu masalah yang tidak mengandung sengketa atau litigasi. Jika seorang pengacara memberi nasihat hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk melayani kepentingan pribadinya, atau sebagai respons terhadap tekanan dari luar, nasihat semacam itu tidak memiliki nilai.

IBA

Komentar IBA menyatakan bahwa penting sekali bagi penyelenggaraan peradilan dan penerapan Aturan Hukum bahwa seorang pengacara bertindak untuk klien dalam kapasitas

profesional yang bebas dari arahan, kendali, atau campur tangan. Komentar IBA mencatat bahwa akan sulit bagi seorang pengacara untuk melindungi klien jika ia menjadi sasaran campur tangan dari orang lain, terutama mereka yang berkuasa. Komentar IBA selanjutnya menjelaskan bahwa pengacara yang berpraktik secara individu, pemerintah, dan masyarakat sipil harus mengutamakan independensi profesi hukum di atas aspirasi pribadi.

Hukum Perdata

Di Prancis, Pasal 1.1 Peraturan Internal Nasional Prancis tentang Profesi Advokat (RIN Prancis) menyatakan profesi pengacara adalah profesi yang bebas dan independen dalam bentuk apa pun yang dipraktikkannya. Berdasarkan Pasal 1.3 RIN, pengacara harus menjalankan fungsi mereka dengan independensi RIN Prancis tidak memberikan panduan lebih lanjut tentang tugas independensi pengacara. Christian Charrière-Bournazel, Mantan Kepala Asosiasi Pengacara Paris dan Presiden Dewan Nasional Pengacara, memberikan satu penjelasan tentang arti independensi, sementara kebebasan menyiratkan hak bagi setiap orang untuk menjalankan hak pribadi mereka demi kepentingan mereka sendiri yang hanya dibatasi oleh persyaratan hukum, independensi bagi seorang pengacara mengandung muatan etika.

Independensi seorang advokat tidak berarti kebebasan untuk menjalankan hak, tetapi kemauan untuk selalu memberikan jarak yang cukup agar tindakan yang dianggapnya bermanfaat oleh advokat tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah etika. Menurut Christian Charrière-Bournazel, bertindak dengan hati nurani tidak dapat dipisahkan dari bertindak dengan independensi. Artinya, dalam independensinya, advokat berpedoman pada nilai-nilai dasar hukum, tugas, dan kehormatan. Christian Charrière-Bournazel mengemukakan bahwa meskipun advokat Prancis bebas untuk membela atau menentang negara, administrasi atau hakim, atau pejabat mereka, begitu seorang advokat terlibat dalam kehidupan politik (misalnya, menjadi Menteri), hal ini tidak akan sesuai dengan praktik hukumnya.

Seorang advokat Prancis harus independen dari pengaruh eksternal. Pasal 16 RIN Prancis melarang seorang advokat untuk berpartisipasi dalam sebuah jaringan jika hal itu membahayakan independensinya. Berdasarkan Pasal 16.1 RIN Prancis, jaringan didefinisikan sebagai setiap pengaturan interprofesional formal atau informal antara satu atau lebih pengacara dan setiap anggota profesi atau bisnis lain, yang membangun komunitas kepentingan yang langgeng dengan tujuan mengembangkan klien saat ini atau calon klien dan/atau mempromosikan penyediaan layanan tambahan. Misalnya, independensi pengacara akan terganggu jika pengacara setuju untuk berada dalam posisi bawahan atau tunduk pada pengawasan aktivitas profesional mereka oleh profesional non-pengacara lain, atau pengaturan yang mengarah pada distribusi atau pembagian pendapatan atau distribusi remunerasi.

Di Jerman, Undang-Undang Pengacara Federal melarang pengacara untuk menjalin ikatan apa pun yang dapat mengancam independensi profesional mereka. Aturan Praktik Profesional Jerman menginstruksikan pengacara untuk melindungi klien mereka dari otoritas

negara dan administrasi yang dapat melanggar hak-hak mereka. Peraturan Praktik Profesional Jerman menetapkan bahwa seorang pengacara adalah penasihat dan perwakilan independen dalam semua masalah hukum dan harus melindungi kliennya dari hilangnya hak-hak. Untuk tujuan ini, pengacara harus melindungi klien dari keputusan yang salah yang diambil oleh pengadilan dan otoritas dan harus bertindak sebagai pengaman kliennya terhadap pelanggaran hak-haknya yang tidak konstitusional dan terhadap pemerintah yang melampaui kekuasaannya.

Di Belanda, Peraturan Perilaku Asosiasi Pengacara Belanda memastikan independensi pengacara dari orang lain. Mereka harus menjalankan tugas mereka sepenuhnya secara independen. Hal ini tidak sesuai, misalnya, dengan pemberian komisi kepada perantara atau pihak ketiga lainnya untuk tujuan mengamankan perjanjian, atau dengan membuat pengaturan dengan orang selain klien mereka sendiri tentang cara penanganan masalah. Di Belgia, berdasarkan Kode Etik Pengacara Flemish Bar, independensi merupakan tugas penting seorang pengacara. Kode Etik Flemish mengharuskan independensi absolut, bebas dari semua tekanan, terutama dari kepentingan pengacara sendiri atau pengaruh luar. Seorang pengacara harus menghindari segala bentuk gangguan terhadap independensinya dan tidak boleh mengabaikan etika profesi demi menyenangkan klien, hakim, atau pihak ketiga dalam semua kegiatan. Demikian pula, Kode Etik Pengacara Federal yang berbahasa Prancis dan Jerman menetapkan bahwa pengacara memiliki kewajiban untuk mewakili klien mereka secara bebas, tanpa dibimbing oleh kepentingan lain selain kepentingan yang sah dan keadilan. Merupakan kewajiban seorang pengacara untuk membela dan menasihati klien dengan segala independensi dan kebebasannya.

Hukum Umum

Kode etik hukum umum memiliki ketentuan serupa tentang independensi pengacara. Seorang pengacara tidak dapat dengan tekun memperjuangkan kepentingan klien jika ia tunduk pada arahan, kendali, atau tekanan dari pihak ketiga. Di AS, Aturan Model ABA menetapkan bahwa "dalam mewakili klien, seorang pengacara harus menjalankan penilaian profesional yang independen dan memberikan nasihat yang jujur. Untuk menjaga independensi, seorang pengacara AS harus tidak mengizinkan orang yang merekomendasikan, mempekerjakan, atau membayar pengacara tersebut untuk mengarahkan atau mengatur penilaian profesional pengacara tersebut. Pihak ketiga mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dari kepentingan klien misalnya, meminimalkan waktu dan uang yang dihabiskan untuk representasi atau kepentingan dalam cara tertentu representasi tersebut berkembang. Seorang pengacara AS dapat menerima kompensasi dari pihak ketiga jika klien menyetujuinya dan tidak ada campur tangan terhadap independensi pengacara dalam penilaian profesional atau hubungan klien-pengacara.

Di Inggris, independensi pengacara merupakan tugas inti. Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa kepentingan keadilan dan kepentingan terbaik klien hanya dapat dilayani dengan baik, jika Anda pengacara berperilaku jujur dan menjaga independensi Anda dari tekanan eksternal. Buku Pegangan BSB memberikan contoh-contoh bagaimana seorang

pengacara dapat dianggap mengkompromikan independensinya:

1. Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan komisi atau biaya rujukan (berapa pun jumlahnya) atau hadiah (selain barang-barang yang nilainya kecil) kepada klien mana pun, klien profesional (seperti pengacara atau pengacara lainnya), atau perantara lainnya.
2. Meminjamkan uang kepada klien, klien profesional, atau perantara lainnya tersebut.
3. Menerima sejumlah uang (baik sebagai pinjaman atau lainnya) dari klien, klien profesional, atau perantara lainnya, kecuali jika hal tersebut merupakan pembayaran atas layanan profesional atau penggantian biaya atau pengeluaran yang dilakukan atas nama klien.

Peraturan Perundang-undangan Nasional

Seperti di negara-negara lain yang dibahas di atas, pengacara di sini juga harus bebas dari campur tangan, kontrol, dan tekanan dari pihak lain. Berdasarkan Pasal 2.3 Undang-Undang Advokat, untuk menolak campur tangan dari pihak lain, pengacara harus dibimbing secara eksklusif oleh kepentingan pihak yang mereka lindungi, dengan kemampuan terbaik mereka dan dengan sarana hukum. Misalnya, otoritas negara tidak boleh mencampuri hubungan pengacara-klien dengan menyembunyikan informasi atau dokumen yang diperlukan, kecuali jika itu merupakan rahasia negara. Menurut Pasal 3-a(1) Undang-Undang Advokat, otoritas negara dan otoritas lokal, serta badan hukum dan perorangan yang memiliki kekuasaan publik berkewajiban untuk memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengacara dalam kasus tertentu, kecuali jika hal itu bertentangan dengan tugas untuk menjaga kerahasiaan profesi.

Pasal 13 Kode Etik Advokat menyatakan bahwa seorang pengacara berkewajiban untuk menunjukkan rasa hormat terhadap pengadilan dan lembaga tempat ia menghadap. Kewajiban ini tidak berarti bahwa setiap perwakilan dari badan-badan ini dapat mencampuri, mengarahkan, atau mengendalikan hubungan pengacara-klien. Sebaliknya, Peraturan 13 menetapkan bahwa seorang pengacara harus mencegah sikap yang tidak benar dari perwakilan badan-badan tersebut terhadap dirinya sendiri dan klien. Pengacara harus melakukannya dengan cara dan instrumen hukum. Berdasarkan Peraturan 13, sebagai pelindung penerapan hukum dan hak serta kepentingan klien, pengacara wajib menunjukkan perlawanan yang terhormat terhadap pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan martabat pribadi.

Berdasarkan Peraturan 14, hubungan persahabatan atau kekeluargaan antara pengacara dan hakim, orang yang bekerja di lembaga tersebut, pejabat yang dipilih atau ditunjuk, anggota partai politik tidak boleh dikedepankan selama pengacara tersebut bertugas. Peraturan 14 selanjutnya menetapkan bahwa akan sangat tidak bermartabat bagi seorang pengacara untuk menggunakan hubungan ini demi keuntungan klien atau merugikan pihak lawan.

6.3 INDEPENDENSI DARI KLIEN DAN KETERPISAHAN PROFESIONAL CCBE

Prinsip (a) dari Komentar CCBE tentang Piagam tersebut menyatakan pengacara juga harus tetap independen dari kliennya sendiri jika ia ingin mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga dan pengadilan. Komentar CCBE tentang Piagam tersebut selanjutnya menjelaskan: tanpa independensi ini tidak ada jaminan kualitas pekerjaan pengacara.

Pasal 2.1.1 dari Kode Etik CCBE menyatakan independensi absolut pengacara sama pentingnya untuk mempercayai proses peradilan seperti imparialitas hakim. Menurut Kode Etik CCBE, seorang pengacara harus menghindari segala bentuk gangguan terhadap independensinya dan “berhati-hati untuk tidak mengorbankan standar profesionalnya demi menyenangkan klien, pengadilan, atau pihak ketiga.

IBA

Komentar IBA tidak secara khusus mengatur independensi dari klien. Komentar tersebut menyiratkan bahwa seorang pengacara tidak boleh mengorbankan independensinya demi menyenangkan klien. Misalnya, klien berhak mengetahui kemungkinan keberhasilan kasusnya dan mengharapkan nasihat yang independen, tidak bias, dan jujur, terlepas dari apakah nasihat tersebut sesuai dengan keinginan klien atau tidak.

Hukum Perdata

Di Prancis, seorang pengacara pada umumnya bebas memutuskan apakah akan menangani suatu kasus atau tidak. Peraturan Internal Paris Bar menetapkan bahwa pengacara berhak menghentikan misinya, ia harus memberi tahu kliennya tepat waktu. Namun, jika seorang pengacara memutuskan untuk berhenti mewakili klien, hal ini tidak boleh membahayakan pembelaan klien dan pengacara harus melakukan yang terbaik untuk memungkinkan klien memperoleh perwakilan lebih lanjut. Dalam masalah pidana, jika seorang pengacara ditunjuk untuk mewakili klien, ia tidak bebas menolak perwakilan atau menarik diri dari kasus tersebut kecuali ada alasan yang membenarkan untuk melakukannya. Presiden Pengadilan Kasasi atau Bâtonnier, yang menunjuk pengacara, memutuskan apakah alasan tersebut cukup.

Dalam kasus di Pengadilan Kasasi Pas-de-Calais, dua pengacara yang mewakili klien memutuskan untuk keluar dari persidangan dan mengundurkan diri dari kasus tersebut klien mereka juga bermaksud untuk tidak berpartisipasi dalam persidangan. Salah satu pengacara dipekerjakan oleh klien. Yang lainnya ditunjuk oleh Presiden Pengadilan Kasasi. Pengadilan Kasasi menilai bahwa pengacara yang ditunjuk tidak dapat menolak untuk mewakili kliennya dan tidak dapat meninggalkan ruang sidang, terutama karena Presiden menolak menyetujui alasan yang diajukannya untuk pengunduran diri. Pengadilan Kasasi tidak menentang pengunduran diri pengacara lainnya. Dari keputusan ini, dapat disimpulkan bahwa, secara umum, pengacara Prancis independen dari klien dan dapat mengundurkan diri dari kasus tersebut. Namun, jika seorang pengacara ditunjuk untuk menangani kasus tersebut oleh Presiden Courd’assises atau oleh Bâtonnier, pengacara tersebut tidak bebas untuk menolak mewakili klien atau menarik diri dari kasus tersebut.

Di Prancis, setelah seorang pengacara Prancis menerima kasus, pengacara tersebut memiliki kewajiban untuk memberi nasihat kepada klien mengenai apa yang menurutnya merupakan strategi terbaik untuk mewakili klien. Secara umum, pengacara Prancis tidak dapat menentang instruksi klien dalam arti bahwa mereka tidak dapat menerapkan strategi yang berbeda dari yang diperintahkan oleh klien. Jika setelah menasihati klien, klien tidak ingin mengikuti nasihat pengacara tersebut, pengacara tersebut memiliki hak untuk menarik diri dari kasus tersebut jika instruksi klien tersebut bertentangan dengan hati nurani pengacara atau apa yang menurutnya terbaik bagi klien. Ikatan Pengacara Val d'Oise menjelaskan bahwa seorang pengacara menjaga independensi intelektualnya dari klien dengan kebebasan argumentasinya di hadapan pengadilan, yang mungkin berbeda dari apa yang diusulkan klien, dan merupakan tanggung jawabnya pengacara untuk memastikan pembelaan terbaik yang mungkin.

Dalam aspek lain dari independensi pengacara Prancis, ketika seorang pengacara hanya memiliki satu klien, dan klien tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi bagi firma pengacara tersebut, independensi pengacara tersebut dapat terganggu. Christian Charrière-Bournazel menunjukkan bahwa meskipun tidak ada aturan eksplisit yang melarang pengacara untuk bertindak hanya untuk satu klien, jelas bahwa independensi pengacara dalam kasus seperti itu akan terbatas.

Berbagai aturan etika mengenai konflik kepentingan dan penarikan yang dibahas di atas menekankan independensi pengacara Prancis dari pihak ketiga dan klien. Seperti yang dijelaskan oleh akademisi, independensi pengacara dari klien adalah salah satu landasan etika hukum Prancis bersama dengan independensi dari pengadilan dan pengacara lainnya. Seorang pengacara tidak memiliki tanggung jawab untuk menerima kasus sesungguhnya, adalah tugasnya untuk 'menilai' kliennya sebelum menerima ringkasan. Setelah ringkasan diterima, seorang pengacara tidak memiliki tanggung jawab untuk terus bertindak untuk klien dan dapat menarik jasanya setelah pemberitahuan yang tepat.

Meskipun konsep ini mungkin asing bagi pengacara hukum umum, interpretasi pengacara Prancis tentang independensi merupakan hasil dari peran pengacara dalam sistem Prancis. Pengacara Prancis bukanlah agen klien, tetapi orang independen yang meminjamkan kefasihan dan kredibilitasnya kepada seseorang yang dia yakini, dan yang membutuhkan bantuannya. Kadang-kadang ia menjamin klien dengan menyatakan keyakinannya pada tujuan mereka, yang merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pengacara di Amerika Serikat.

Di Jerman, pengacara dapat menolak menerima kasus jika ditangani oleh klien pribadi. Undang-Undang Pengacara Federal menetapkan bahwa pengacara yang dimintai bantuan profesional dan tidak ingin menerima kasus harus segera memberi tahu klien dan memberikan kompensasi atas segala kerusakan yang timbul akibat keterlambatan yang lalai dalam membuat pernyataan tersebut. Namun, pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai penasihat hukum dalam masalah pidana memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat hukum. Pengacara hanya dapat menolak memberikan layanan hukum jika ada alasan yang

dapat dibenarkan untuk melakukannya. Alasan yang dapat dibenarkan tersebut dapat mencakup: penyakit pengacara atau beban kerja yang berlebihan, klien tidak mau bekerja sama, hilangnya kepercayaan bersama yang serius antara pengacara dan klien karena perilaku klien, atau pendapatan dan/atau aset klien tidak membenarkan pemberian bantuan hukum.

Di Belanda, pengacara memikul tanggung jawab penuh untuk menangani kasus. Ini berarti bahwa pengacara tidak boleh menghindari tanggung jawab ini dengan menggunakan instruksi yang diterima dari klien mereka. Aturan Perilaku Belanda menetapkan bahwa pengacara tidak dapat melakukan tindakan apa pun yang bertentangan dengan keinginan klien. Namun, sering kali pengacara dan klien akan tidak setuju mengenai suatu tindakan. Peraturan Perilaku Belanda menetapkan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat antara advokat dan kliennya mengenai cara penanganan kasus, dan perselisihan ini tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama, advokat harus mengundurkan diri. Namun, jika seorang pengacara memutuskan untuk mengundurkan diri, ia harus melakukannya dengan cara yang hati-hati dan memastikan bahwa klien mengalami sesedikit mungkin kerugian.

Di Belgia, menurut Kode Etik Flemish, seorang pengacara bertindak hanya setelah ia menerima instruksi untuk melakukannya dari kliennya. Seorang pengacara dapat menerima instruksi dari pengacara lain yang mewakili klien atau otoritas yang kompeten, dan jika kompetensi dan kewenangan mereka tidak jelas, pengacara harus melakukan upaya yang wajar untuk menetapkan identitas, kompetensi, dan kewenangan orang atau organisasi tempat ia menerima instruksi tersebut. Kode Etik Flemish menetapkan bahwa seorang pengacara tidak boleh mengundurkan diri dari suatu kasus dengan cara atau dalam keadaan di mana klien tidak akan dapat memperoleh bantuan hukum pada waktunya, untuk mencegah klien menderita kerugian. Demikian pula, OBFK Kode Etik menetapkan bahwa seorang pengacara harus membela dan menasihati kliennya dengan kemandirian dan kebebasan penuh. Kode tersebut selanjutnya menetapkan bahwa seorang pengacara harus memastikan bahwa pelaksanaan tugasnya tidak terancam oleh klien, pengadilan, atau pihak ketiga. Tidak seperti kode-kode yang dibahas di atas, Kode Etik OBFK menetapkan bahwa peserta pelatihan wajib melaksanakan tugas mereka dengan tekun, tanpa mengurangi hak mereka untuk menolak kasus yang tampaknya tidak adil bagi mereka.

Hukum Umum

Di AS, seorang pengacara pada umumnya tidak independen dari klien dan harus mematuhi keputusan klien. Klien bertanggung jawab untuk memutuskan tujuan representasi dan pengacara harus berkonsultasi dengan klien mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam masalah pidana, pengacara harus secara khusus mematuhi keputusan klien tentang apakah akan mengajukan pembelaan atau menerima tawar-menawar pembelaan, apakah akan mengesampingkan persidangan juri, dan apakah klien akan bersaksi. Kemandirian pengacara berarti bahwa mewakili klien, termasuk perwakilan berdasarkan penunjukan, tidak merupakan persetujuan atau dukungan atas pandangan dan aktivitas politik, sosial, atau moral klien. Pengacara tidak dapat menolak perwakilan hukum hanya karena tujuan klien tidak populer atau kontroversial.

Di Inggris, berdasarkan Buku Pegangan BSB, seorang pengacara tidak dapat menolak untuk mengajukan kasus kliennya hanya karena pengacara tersebut tidak yakin bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan pernyataan klien, selama kasus positif yang diajukannya sesuai dengan instruksi pengacara dan tidak menyesatkan pengadilan. Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa peran pengacara ketika bertindak sebagai advokat atau melakukan litigasi adalah untuk menyampaikan kasus klien Anda, dan bukan Anda yang memutuskan apakah kasus klien Anda dapat dipercaya atau tidak.

Perundang-undangan Nasional

Kode MBA mengatur independensi pengacara dari klien dan pelepasan profesional. Namun, tidak seperti di Prancis, independensi ini tidak mutlak dan bergantung pada berbagai faktor. Menurut Aturan 5, independensi pengacara berarti bahwa pengacara tidak mengidentifikasi dirinya dengan klien, tetapi menjaga tingkat fungsi yang terhormat mewakili atau membela klien. Berdasarkan Aturan 7, pengacara menjaga independensi dan keterpisahan profesional dengan menyajikan secara jujur kepada klien gambarannya tentang kemungkinan hasil persidangan, terlepas dari apakah gambaran tersebut sesuai dengan keinginan klien.

Independensi dari klien tidak berarti bahwa pengacara dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Berdasarkan Aturan 1 Kode MBA, seorang pengacara wajib menangani suatu kasus kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menolak representasi tersebut. Aturan 1 Kode MBA memberikan contoh alasan yang dapat dibenarkan. Dalam masalah perdata, pengacara dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum dengan alasan yang terbatas, seperti beban kerja yang berlebihan, atau jika klien tidak mampu membayar biaya. Namun, dalam masalah pidana, ketidakmampuan klien untuk membayar tidak membenarkan penolakan untuk memberikan bantuan hukum. Dalam kasus seperti itu, seorang pengacara harus mengambil alih pembelaan kecuali jika ia memiliki alasan yang objektif atau pribadi, seperti penyakit yang diderita pengacara, atau jika klien gagal membayar pembelaan tertentu dalam kasus yang sama.

Aturan 2 dari Kode MBA menetapkan bahwa jika pengacara memutuskan untuk menarik diri dari kasus tersebut, ia harus melakukannya dengan hati-hati, memastikan bahwa penarikan diri tersebut tidak akan merugikan pembelaan klien. Berdasarkan Aturan 2, pengacara berhak untuk menarik diri dari suatu kasus hanya jika ia menyadari alasan yang mengharuskan penarikan diri setelah menerima kasus tersebut. Berdasarkan Aturan 22, jika klien meminta pengacara untuk mewakilinya terhadap kebenaran materiil, pengacara dapat, tetapi tidak wajib, menolak untuk mewakili klien lebih lanjut. Bahkan saat itu, pengacara tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan kerugian bagi klien. Kode MBA tidak menentukan tindakan mana yang dapat dianggap merugikan. Contoh tindakan yang merugikan adalah memberi tahu hakim tentang niat klien untuk berbohong dan menarik diri dari kasus tersebut. Dalam skenario seperti itu, pengacara tidak hanya akan merugikan klien, tetapi juga melanggar tugas kerahasiaan profesional berdasarkan Aturan 20.

6.4 KEMERDEKAAN DARI KEPENTINGAN DIRI

Faktor-faktor seperti kepentingan pribadi dan pribadi dapat mengganggu objektivitas dan independensi pengacara. Seringkali kepentingan finansial pengacara dapat bertentangan dengan tugas pengacara terhadap kliennya. Konflik kepentingan pribadi hanyalah salah satu jenis konflik kepentingan yang dapat mengganggu tanggung jawab profesional pengacara. Secara umum, konflik kepentingan adalah situasi ketika kemampuan pengacara untuk mewakili klien dibatasi secara material oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak ketiga. Mungkin ada berbagai jenis konflik kepentingan, termasuk konflik antara pengacara dan klien, antara klien pengacara yang bekerja sama, antara klien saat ini dan klien sebelumnya, dan konflik karena tugas pengacara terhadap pihak ketiga. Berbagai jenis konflik kepentingan akan dibahas secara rinci di Bagian 5. Bagian ini akan membahas secara singkat satu jenis yaitu konflik kepentingan antara pengacara dan klien.

CCBE

Komentar CCBE tentang Piagam tersebut menetapkan bahwa pengacara tidak boleh menerima klien jika terdapat konflik kepentingan antara klien dan pengacara. Jika konflik tersebut muncul selama proses representasi, pengacara harus berhenti bertindak. Kode Etik CCBE mewajibkan pengacara untuk mendahulukan kepentingan klien tersebut di atas kepentingan pengacara itu sendiri atau kepentingan sesama anggota profesi hukum.

IBA

IBA menjelaskan keadaan di mana kepentingan pengacara mengganggu kepentingan terbaik klien dan penilaian profesional pengacara, termasuk:

1. Keterlibatan pengacara dalam transaksi bisnis dengan klien tanpa pengungkapan yang tepat dan persetujuan klien.
2. Ketika pengacara terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas saat bertindak untuk klien dan kepentingan tersebut mengambil alih atau cenderung mengambil alih kepentingan klien.
3. Kecuali diizinkan oleh hukum, secara sadar memperoleh kepemilikan, kepemilikan, atau hak jaminan yang merugikan klien.
4. Memegang atau memperoleh kepentingan finansial dalam pokok perkara yang sedang ditangani oleh pengacara, baik di hadapan pengadilan atau badan administratif atau tidak, kecuali, jika diizinkan oleh hukum, untuk perjanjian biaya bersyarat dan hak gadai untuk mengamankan biaya.

Hukum Perdata

RIN Prancis mengakui bahwa representasi klien dapat dibatasi jika ada risiko konflik kepentingan. Pasal 4.1 RIN menetapkan bahwa pengacara harus, kecuali para pihak sepakat, berhenti bertindak untuk semua klien yang bersangkutan ketika konflik kepentingan muncul, ketika kerahasiaan berisiko dilanggar atau ketika independensi pengacara berisiko dikompromikan. Bila terdapat risiko serius akan terjadinya konflik kepentingan di masa mendatang, para pengacara wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari semua pihak yang terdampak sebelum setuju untuk bertindak mewakili lebih dari satu pihak.

Pasal 4.2 menetapkan bahwa konflik kepentingan terjadi jika pengacara tidak dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tanpa mengorbankan kepentingan satu atau lebih pihak, atau jika pengacara dipaksa untuk mengajukan kasus yang berbeda dari kasus yang akan dipilih jika kepentingan satu pihak diwakili. Tidak seperti aturan hukum umum tentang konflik kepentingan, RIN Prancis tidak memberikan situasi konkret di mana konflik dapat membatasi independensi pengacara atau menjelaskan apakah konflik dapat diabaikan. Maya Goldstein Bolocan menjelaskan bahwa meskipun konflik aktual tidak dapat diabaikan, konflik potensial dapat diabaikan. Phillip Genty menjelaskan bahwa dalam praktiknya penentuan apakah ada konflik kepentingan sepenuhnya berada di tangan pengacara, dan persetujuan klien untuk mengabaikan konflik tidak diminta atau dihormati.

Di Jerman, berdasarkan Undang-Undang Pengacara Federal, seorang pengacara tidak boleh menangani suatu kasus jika ia sebelumnya telah bertindak dalam kasus yang sama sebagai hakim, arbiter, jaksa penuntut umum, anggota layanan publik, atau notaris. Aturan Praktik Profesional Jerman tidak mendefinisikan konflik kepentingan, tetapi melarang pengacara untuk bertindak jika konflik kepentingan tersebut ada. Undang-Undang Pengacara Federal mencantumkan sejumlah situasi ketika konflik kepentingan terjadi. Namun, konflik antara klien dan pengacara tidak termasuk.

Di Belanda, Aturan Perilaku Belanda menyatakan bahwa kepentingan klien, bukan kepentingan pribadi advokat, yang menentukan cara advokat menangani kasus. Di Belgia, Kode Etik Flemish menetapkan bahwa pengacara tidak boleh bertindak jika hal ini menimbulkan konflik kepentingan atau ancaman substansial dari konflik semacam itu antara dirinya dan klien. Demikian pula, berdasarkan Kode Etik OBF, mencegah konflik kepentingan adalah salah satu tugas utama seorang pengacara. Kode Etik OBF memastikan independensi dengan melarang pengacara melakukan aktivitas berbayar lainnya (kecuali dalam kasus yang jarang terjadi seperti dalam pendidikan atau politik) atau campur tangan dalam situasi di mana mungkin ada konflik kepentingan.

Hukum Umum

Di AS, independensi mengharuskan seorang pengacara untuk bertindak tanpa kepentingan pribadi yang tidak pantas dalam kasus klien. Jika terdapat risiko signifikan bahwa representasi akan dibatasi oleh kepentingan pribadi pengacara, representasi tersebut dilarang. Aturan Model ABA memberikan beberapa larangan terhadap perilaku yang mungkin berdampak buruk pada hubungan pengacara-klien karena kepentingan pribadi pengacara. Misalnya, seorang pengacara dilarang melakukan transaksi bisnis dengan klien atau secara sadar memperoleh kepemilikan, kepemilikan, jaminan, atau kepentingan keuangan lainnya yang merugikan klien. Larangan ini ada karena pelatihan hukum pengacara yang dipadukan dengan hubungan kepercayaan antara pengacara dan klien menciptakan situasi di mana pengacara dapat mengambil keuntungan dari klien.

Misalnya, jika seorang pengacara menyusun kontrak yang melibatkan dirinya dan kliennya, pengacara tersebut dapat memanfaatkan ketidaktahuan klien akan teknis hukum dan menyusun ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan bagi pengacara itu sendiri.

Contoh lain dari kepentingan yang tidak pantas adalah situasi di mana seorang pengacara berinvestasi di sebuah perusahaan, dan kemudian mewakili penggugat dalam gugatan terhadap perusahaan tersebut. Gugatan terhadap perusahaan tersebut dapat membahayakan kepentingan bisnis pengacara, dan pada saat yang sama, pengacara harus bersemangat dalam mewakili kepentingan kliennya. Di Inggris, pengacara dilarang bertindak jika terdapat konflik kepentingan antara kepentingan pengacara itu sendiri dan kepentingan calon klien. Buku Pegangan BSB menyatakan:

Contoh saat Anda mungkin tidak dapat mempertahankan independensi Anda termasuk tampil sebagai advokat dalam suatu perkara di mana Anda kemungkinan akan dipanggil sebagai saksi (kecuali perkara yang kemungkinan akan Anda panggil sebagai saksi bersifat sampingan atau kecil dalam konteks litigasi secara keseluruhan dan tidak mungkin menyebabkan keterlibatan Anda dalam perkara tersebut digugat di kemudian hari). Namun, jika Anda berencana untuk menarik diri dari suatu perkara karena tampaknya Anda kemungkinan akan menjadi saksi pada pertanyaan fakta yang material, Anda hanya boleh menarik diri jika Anda dapat melakukannya tanpa membahayakan kepentingan klien.

Perundang-undangan Nasional

Kode MBA juga melindungi independensi pengacara dari konflik kepentingan antara pengacara dan klien. Tersirat dalam ketentuan Kode MBA bahwa seorang pengacara harus menghindari konflik kepentingan pribadi yang dapat mengganggu penilaian profesionalnya yang independen. Berdasarkan Pasal 26, untuk menjamin kebebasan dan independensi advokat, advokat wajib menahan diri dari kepentingan pribadi, khususnya kepentingan materiil, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap moralnya.

Menurut Pasal 17(4) UU Advokat, ketika seorang advokat mewakili dua pihak dalam masalah hukum, kontrak, atau masalah lainnya, advokat diwajibkan untuk secara sadar melindungi kepentingan kedua belah pihak, terlepas dari pihak mana yang meminta dan/atau membayar bantuan tersebut. Demikian pula, berdasarkan Pasal 4 UU MBA, advokat wajib secara sadar melindungi kepentingan kedua belah pihak dan jika terjadi perselisihan antara para pihak berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh advokat, maka advokat tidak boleh mewakili salah satu pihak. Artinya, ketika pihak lain selain klien membayar biaya advokat, hal ini tidak boleh memengaruhi tugas advokat terhadap kliennya.

Kesimpulan

Meskipun independensi pengacara merupakan prinsip dasar dalam semua sistem hukum, prinsip yang sama memiliki makna yang berbeda tergantung pada tradisi dan praktik hukum. Ada perbedaan substansial dalam kontur independensi pengacara antara negara-negara hukum perdata Eropa yang harus diperhatikan, terutama jika berpraktik di luar negeri.

Secara umum, prinsip independensi di semua yurisdiksi memiliki beberapa tugas umum, seperti:

- Bertindak dengan penuh semangat demi kepentingan kliennya; tetapi semangat tersebut harus diimbangi dengan larangan menghalangi administrasi peradilan yang adil.

- Menarik diri dari kasus hanya jika ada alasan yang membenarkan untuk melakukannya.
- Bertindak tanpa kepentingan pribadi yang tidak pantas dalam masalah klien.

Semua yurisdiksi mengakui perlunya profesi hukum untuk independen dari tekanan luar. Beberapa aturan profesional nasional, seperti Aturan Perilaku Belanda, menetapkan bahwa pengacara harus menghindari campur tangan dari pihak ketiga dan perantara dalam hubungan pengacara-klien. Aturan Model ABA secara tegas menyatakan bahwa pihak yang membayar biaya pengacara tidak boleh mengarahkan atau mengendalikan representasi kepentingan klien oleh pengacara. Hal ini serupa dengan Aturan 4 dari Kode MBA yang mengharuskan pengacara untuk mewakili kepentingan terbaik klien terlepas dari sumber pembayaran.

Sementara kode nasional lain yang dibahas di atas secara implisit melindungi pengacara dari campur tangan pemerintah, Pasal 3 Undang-Undang Pengacara secara tegas memastikan bahwa pengacara dilindungi dari campur tangan otoritas negara, yang sejalan dengan Kode Etik CCBE dan ketentuan Prinsip IBA. Selain itu, menurut Pasal 3-a Undang-Undang Pengacara, otoritas negara harus memberikan informasi yang diperlukan kepada pengacara.

Pengacara nasional independen dari klien mereka sampai batas tertentu. Tidak seperti di Prancis, di mana independensi pengacara praktis mutlak, berdasarkan Aturan 1 dari Kode MBA, pengacara adalah perwakilan dan pembela kliennya, dan tidak boleh menolak representasi tanpa alasan yang membenarkan. Aturan 1 dari Kode MBA mengatur beberapa alasan tersebut, serupa dengan daftar yang terdapat dalam Aturan Praktik Profesional Jerman.

Beberapa kode nasional, seperti Prancis, Belanda, dan Belgia secara khusus menetapkan bahwa jika seorang pengacara memutuskan untuk menarik diri dari kasus, ia harus melakukannya dengan hati-hati, memastikan bahwa klien tidak akan menderita kerugian. Kode MBA memuat persyaratan serupa. Berdasarkan Aturan 22, pengacara yang menarik diri dari kasus tidak boleh mengambil "tindakan apa pun yang dapat merugikan klien". Tidak seperti kebanyakan kode nasional, Kode MBA tidak memiliki bagian khusus yang membahas tentang konflik kepentingan. Namun, kebutuhan untuk menghindari konflik tersebut tersirat dalam Aturan 4 dan 23, yang mewajibkan pengacara untuk menghindari kepentingan pribadi atau material apa pun dalam masalah klien dan secara sadar mewakili kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi hukum bilateral.

BAB 7

KEJUJURAN, INTEGRITAS, DAN KEADILAN

7.1 PENDAHULUAN

Prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan merupakan prinsip umum dalam etika profesi di semua negara. Kode nasional merumuskan prinsip ini dalam ketentuan tugas pengacara untuk bersikap jujur, jujur di hadapan pengadilan, bermartabat, menghormati, dan bersikap sopan kepada rekan sejawat. Kode MBA mengharuskan pengacara untuk bersikap jujur kepada klien, menghormati administrasi peradilan yang adil, dan bersikap sopan kepada pihak lawan. Salah satu dilema etika yang dihadapi oleh pengacara adalah bagaimana cara terbaik untuk tetap setia kepada klien, memanfaatkan setiap keuntungan demi keuntungannya, dan menjaga kerahasiaan sekaligus memenuhi tugas kejujurannya kepada pengadilan.

7.2 PIAGAM CCBE

Piagam CCBE memuat beberapa prinsip yang membahas berbagai aspek kejujuran, integritas pribadi, dan keadilan pengacara. Prinsip (d) Piagam CCBE adalah martabat dan kehormatan profesi hukum, serta integritas dan reputasi baik dari masing-masing pengacara. Komentar CCBE menjelaskan bahwa mempertahankan prinsip ini diperlukan jika pengacara ingin dipercaya oleh klien, pihak ketiga, pengadilan, dan negara. Ini berarti bahwa pengacara tidak boleh terlibat dalam perilaku tercela, baik dalam praktik hukum atau dalam kegiatan bisnis lainnya atau bahkan dalam kehidupan pribadi, yang dapat mencemarkan nama baik profesi". Kode Etik CCBE menetapkan bahwa hubungan kepercayaan hanya dapat terjalin jika kehormatan, kejujuran, dan integritas pribadi seorang pengacara tidak diragukan lagi. Nota Penjelasan CCBE tidak memberikan komentar apa pun terhadap aturan ini.

Berdasarkan prinsip (i) Piagam CCBE, pengacara harus menghormati aturan hukum dan administrasi peradilan yang adil. Komentar CCBE tentang Piagam tersebut menjelaskan bahwa bagian dari peran pengacara adalah menjadi peserta dalam administrasi peradilan yang adil. Menurut Komentar CCBE tentang Piagam tersebut, gagasan yang sama terkadang diungkapkan dengan menggambarkan pengacara sebagai 'petugas pengadilan' atau sebagai 'menteri kehakiman'. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pengacara tidak boleh dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pengadilan, dan dia juga tidak boleh berbohong kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas profesionalnya.

Komentar CCBE tentang Piagam memberikan panduan umum untuk situasi ketika larangan ini bertentangan dengan kepentingan klien: pengacara berhak meminta bantuan asosiasi pengacara. Akan tetapi, disebutkan bahwa pada analisis terakhir, pengacara hanya dapat mewakili kliennya dengan sukses jika pengacara tersebut dapat diandalkan oleh pengadilan dan pihak ketiga sebagai perantara tepercaya dan sebagai peserta dalam

penyelenggaraan peradilan yang adil. Agaknya, ini berarti bahwa dalam kasus ketika klien meminta pengacara untuk mengorbankan tugasnya kepada pengadilan dan penyelenggaraan peradilan yang adil untuk mengajukan kasus yang tidak jujur, tugas pengacara kepada pengadilan berlaku.

Pasal 4.2 dari Kode Etik CCBE menetapkan bahwa pengacara harus memiliki perhatian yang semestinya terhadap penyelenggaraan persidangan yang adil. Nota Penjelasan CCBE menjelaskan bahwa pengacara tidak boleh menghubungi hakim tanpa terlebih dahulu memberi tahu pengacara yang bertindak untuk pihak lawan atau menyerahkan barang bukti, catatan, atau dokumen kepada hakim tanpa mengomunikasikannya tepat waktu kepada pengacara di pihak lain kecuali langkah-langkah tersebut diizinkan berdasarkan aturan prosedur yang relevan. Menurut prinsip (h) Piagam CCBE, rasa hormat terhadap rekan sejawat profesional mewakili lebih dari sekadar penegasan perlunya kesopanan. Komentar CCBE tentang Piagam menafsirkan prinsip ini berkaitan dengan peran pengacara sebagai perantara, yang dapat dipercaya untuk mengatakan kebenaran, mematuhi aturan profesional, dan menepati janjinya. Ini berarti bahwa pengacara harus menyelesaikan masalah yang kontroversial dengan cara yang beradab, berurusan satu sama lain dengan itikad baik, dan tidak menipu.

IBA

Prinsip IBA 2 menetapkan bahwa seorang pengacara harus selalu menjaga standar kejujuran, integritas, dan keadilan tertinggi terhadap klien pengacara, pengadilan, kolega, dan semua orang yang berhubungan profesional dengan pengacara. Ini berarti bahwa pengacara tidak boleh membuat pernyataan fakta atau hukum yang salah dalam rangka mewakili klien atau gagal mengoreksi pernyataan fakta atau hukum material yang salah yang sebelumnya dibuat oleh pengacara. Komentar IBA juga mencatat bahwa pengacara harus bersikap profesional terhadap klien, pihak lain, pengadilan, personel pengadilan, dan publik. Ini termasuk kesopanan, integritas profesional, martabat pribadi, keterusterangan, ketekunan, rasa hormat, kesopanan, dan kerja sama. Komentar IBA mencatat bahwa pengacara tidak boleh memperlakukan pengadilan, pengacara lain, atau publik dengan cara yang tidak bersahabat. Prinsip IBA menetapkan bahwa ada standar yang berbeda tentang apa yang diharapkan dari pengacara tergantung pada tanggung jawab mereka, dan bahwa ekspresi tanggung jawab ini bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya.

7.3 HUKUM PERDATA

Semua hukum perdata menetapkan prinsip kehormatan, kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap administrasi peradilan yang tepat melalui berbagai ketentuan dan berbagai tugas pengacara. Di Prancis, pengacara harus menghormati asas kehormatan, keadilan, ketidakberpihakan, kolegialitas, kebijaksanaan, moderasi, dan kesopanan. Berdasarkan Peraturan Internal Paris Bar, melecehkan atau bersikap diskriminatif terhadap seseorang akan menjadi pelanggaran asas dasar.

RIN Prancis mencirikan pengacara sebagai petugas pengadilan dan peserta penting

dalam praktik hukum. Pasal 1bis RIN Prancis memberikan satu contoh tentang cara menyelesaikan konflik antara tugas pengacara terhadap pengadilan dan terhadap klien. Pasal 1 bis menjelaskan bahwa jika ada alasan untuk mencurigai bahwa nasihatnya akan digunakan untuk melakukan atau melanjutkan pelanggaran, pengacara harus berusaha mencegah klien, dan jika gagal, ia harus menarik diri dari kasus tersebut. Di Jerman, Undang-Undang Pengacara Federal menetapkan bahwa seorang pengacara tidak boleh berperilaku dengan kurangnya objektivitas dalam praktik profesionalnya. Ini termasuk perilaku yang melibatkan penyebaran kebohongan secara sadar atau membuat pernyataan yang merendahkan ketika pihak lain yang terlibat atau jalannya persidangan tidak memberikan alasan untuk pernyataan tersebut. Berdasarkan Aturan Praktik Profesional Jerman, seorang pengacara harus jujur kepada kliennya, misalnya, dengan memberi tahu klien tentang setiap peristiwa dan tindakan yang diambil terkait kasus tersebut, tentang ketersediaan bantuan hukum, atau dengan segera menjawab pertanyaan klien.

Dalam hubungan dengan pihak lawan, Undang-Undang Pengacara Federal melarang pengacara Jerman untuk menghubungi atau bernegosiasi dengan pihak lain secara langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengacara pihak tersebut. Selain itu, jika seorang pengacara ingin menarik perhatian koleganya pada fakta bahwa ia melanggar tugas profesional, hal ini harus dilakukan secara rahasia. Di Belanda, Aturan Perilaku Belanda menetapkan bahwa peran pengacara dalam administrasi peradilan menempatkan mereka dalam posisi istimewa. Pengacara harus menggunakan posisi istimewa ini dengan benar dan bahkan bukan terutama karena posisi dan hak istimewa ini dapat terancam jika digunakan secara tidak tepat, tetapi karena hal tersebut merupakan komitmen terhadap masyarakat. Dalam hubungan dengan klien, pengacara harus selalu berusaha untuk mendasarkan hubungan timbal balik mereka pada kesopanan dan kepercayaan.

Di Belanda, tugas kejujuran terhadap pengadilan tercermin dalam tugas pengacara untuk tidak memberikan informasi faktual yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui tidak benar. Pengacara harus menghindari mengekspresikan diri mereka dalam istilah-istilah yang tidak perlu menyinggung dan harus mempertimbangkan kepentingan yang dapat dibenarkan dari pihak lain dan pihak ketiga mana pun. Pengacara harus menghindari menghubungi pihak pada suatu masalah yang mereka ketahui bahwa pihak ini menerima bantuan dari seorang advokat, selain dari agensi advokat yang dimaksud, kecuali advokat tersebut memberi mereka izin untuk menghubungi pihak tersebut secara langsung. Hal yang sama berlaku ketika pihak tersebut menghubungi mereka secara langsung.

Di Belgia, Kode Etik Flemish mengatur kewajiban kolegialitas. Ini berarti bahwa pengacara harus menjunjung tinggi hak pembelaan, menghormati sifat permusuhan dari proses hukum, dan tidak menyesatkan. Kewajiban kolegialitas mendorong hubungan kepercayaan di antara pengacara demi kepentingan klien. Demikian pula, berdasarkan Kode Etik OBF, seorang pengacara berkewajiban untuk setia kepada klien dan menghormati pengadilan dan pihak ketiga, prinsip kolegialitas dan menahan diri dari segala perilaku yang dapat berdampak buruk pada kehormatan profesi hukum.

Hukum umum

Di AS, Aturan Model ABA mengatur kejujuran, integritas pribadi, dan keadilan melalui berbagai tugas pengacara. Misalnya, Aturan Model ABA 2.1 mengatur bahwa pengacara harus memberikan nasihat yang jujur. Artinya, pengacara harus memberikan nasihat yang lugas yang mengungkapkan penilaian jujur pengacara. Komentar terhadap Aturan 2.1 menjelaskan bahwa seorang pengacara berusaha untuk mempertahankan moral klien dan dapat memberikan nasihat dalam bentuk yang dapat diterima sebagaimana kejujuran mengizinkannya. Pengacara tidak boleh dicegah untuk memberikan nasihat yang jujur karena prospek bahwa nasihat tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan klien.

Berdasarkan Aturan Model ABA 3.3, seorang pengacara tidak boleh dengan sengaja membuat pernyataan fakta atau hukum yang salah kepada pengadilan, gagal mengoreksi pernyataan palsu yang sebelumnya dibuat oleh pengacara, atau memberikan bukti yang diketahui oleh pengacara sebagai salah. Komentar terhadap Aturan ini menjelaskan bahwa meskipun pengacara dalam proses yang bersifat adversarial tidak diharuskan untuk menyajikan eksposisi hukum yang tidak memihak atau untuk menjamin bukti yang diajukan dalam suatu perkara, pengacara tidak boleh membiarkan majelis hakim disesatkan oleh pernyataan hukum atau fakta atau bukti palsu yang diketahui oleh pengacara sebagai salah. Jika pengacara mengetahui bahwa klien pengacara atau saksi dipanggil oleh pengacara telah memberikan bukti material palsu, pengacara harus mengambil tindakan perbaikan, termasuk pengungkapan ke pengadilan. Namun, pengacara tidak dapat menolak kesaksian terdakwa dalam masalah pidana.

Tindakan perbaikan, menurut Komentar, adalah untuk memprotes klien secara rahasia, memberi tahu klien tentang tugas pengacara untuk bersikap jujur dan mencari kerja sama klien sehubungan dengan penarikan atau perbaikan pernyataan atau bukti palsu. Jika ini gagal, pengacara harus mengambil tindakan perbaikan lebih lanjut, seperti menarik diri dari representasi. Dalam meminta izin untuk menarik diri, pengacara hanya dapat mengungkapkan informasi yang cukup diperlukan untuk mematuhi tugas keterusterangan ke pengadilan. Jika penarikan ditolak atau tidak akan memperbaiki situasi, pengacara harus membuat pengungkapan tersebut sebagaimana yang cukup diperlukan untuk memperbaiki situasi, bahkan jika itu melanggar tugas kerahasiaan.

Peraturan Model ABA 3.4 mengharuskan seorang pengacara untuk bersikap adil kepada pihak lawan. Ini berarti bahwa pengacara tidak boleh, misalnya, secara melawan hukum menghalangi akses pihak lain terhadap bukti, menghancurkan atau menyembunyikan dokumen apa pun yang memiliki nilai pembuktian, membuat permintaan yang tidak masuk akal, atau menyatakan pengetahuan pribadi tentang fakta-fakta. Peraturan Model ABA 3.5 melarang secara melawan hukum memengaruhi hakim, juri, atau pejabat lainnya, berkomunikasi dengan orang-orang ini di luar pengadilan dan proses pengadilan, atau terlibat dalam tindakan yang mengganggu pengadilan.

Di Inggris, menurut Buku Pegangan BSB, bertindak dengan kejujuran dan integritas merupakan tugas inti. Kewajiban untuk bertindak dengan kejujuran dan integritas mencakup

beberapa persyaratan. Berdasarkan persyaratan ini, seorang pengacara tidak boleh dengan sengaja atau ceroboh menyesatkan atau mencoba menyesatkan siapa pun, mendorong saksi untuk memberikan kesaksian yang menyesatkan atau tidak jujur, atau melatih, berlatih dengan, atau membimbing saksi. Buku Pegangan BSB mencatat bahwa dalam keadaan tertentu, tugas tersebut mengesampingkan tugas untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien. Misalnya, seorang pengacara diharuskan untuk menarik perhatian pengadilan atas setiap keputusan atau ketentuan yang mungkin merugikan kepentingan klien Anda. Hal ini khususnya penting ketika Anda tampil melawan penggugat yang tidak diwakili secara hukum.

Sehubungan dengan administrasi peradilan, tugas pengacara terhadap pengadilan mengesampingkan tugas inti lainnya, jika dan sejauh keduanya tidak konsisten. Jika klien memerintahkan seorang pengacara untuk bertindak tidak etis, tugas pengacara terhadap pengadilan akan mengesampingkan tugas terhadap klien, tunduk pada tugas kerahasiaan. Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa jika ada risiko bahwa pengadilan akan disesatkan kecuali pengacara mengungkapkan informasi rahasia klien, pengacara harus meminta izin klien. Jika klien menolak untuk mengizinkan pengungkapan, pengacara harus berhenti bertindak dan memberikan instruksinya. Namun, pengacara tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pengadilan.

Dalam *Rondel v. Worlsey*, Lord Reid menjelaskan keseimbangan antara tugas pengacara kepada klien dan kepada pengadilan: setiap pengacara memiliki tugas kepada kliennya tanpa rasa takut, untuk mengemukakan setiap isu, mengajukan setiap argumen, dan mengajukan setiap pertanyaan, betapapun tidak menenangkan, yang menurutnya akan membantu kasus kliennya. Namun, sebagai pejabat pengadilan yang terlibat dalam administrasi peradilan, ia memiliki tugas utama kepada pengadilan, kepada standar profesinya, dan kepada publik, yang dapat dan sering kali menyebabkan konflik dengan keinginan kliennya atau dengan apa yang menurut klien merupakan kepentingan pribadinya. Penasihat hukum tidak boleh menyesatkan pengadilan, ia tidak boleh mencemarkan nama baik pihak lain atau saksi yang tidak memiliki dasar yang cukup dalam informasi yang dimilikinya, ia tidak boleh menyembunyikan wewenang atau dokumen yang dapat merugikan kliennya tetapi hukum atau standar profesinya mengharuskannya untuk menunjukkannya.

Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa perilaku yang menyinggung atau tidak terhormat terhadap pihak ketiga, ketidakjujuran, viktimisasi atau pelecehan yang melanggar hukum, atau penyalahgunaan posisi profesional, upaya untuk menyesatkan pihak lawan, juga akan dianggap sebagai pelanggaran tugas kejujuran dan integritas.

7.4 PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Kode MBA mencerminkan prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan melalui berbagai tugas pengacara. Aturan 7 Kode MBA menetapkan tugas pengacara untuk menyajikan secara jujur kepada klien gambarannya tentang kemungkinan hasil persidangan dan untuk memberi tahu klien tentang status terkini kasus tersebut. Seorang pengacara memiliki tugas untuk menghormati administrasi peradilan yang adil. Berdasarkan Peraturan 15, pengacara tidak

boleh menyalahgunakan fakta dan keadaan hukum dalam presentasinya. Berdasarkan Peraturan 22, pengacara tidak boleh memalsukan bukti atau menasihati saksi untuk memberikan kesaksian palsu.

Peraturan 22 mengizinkan pengacara untuk menarik diri jika klien bersikeras pada pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Peraturan 14 dari Kode MBA memberikan beberapa panduan tentang cara bertindak dalam situasi ketika seorang pengacara memiliki hubungan persahabatan atau kekeluargaan antara pengacara dan hakim, orang yang bekerja di lembaga tersebut, pejabat yang dipilih atau ditunjuk, anggota partai politik. Peraturan 14 melarang seorang pengacara untuk mencoba menggunakan hubungan ini untuk keuntungan klien, atau merugikan pihak lawan, atau pihak ketiga mana pun. Menurut Peraturan 11, ketika pengacara memiliki hubungan persahabatan dengan pihak lawan, ia harus memberi tahu klien sebelum litigasi dimulai untuk menghindari keraguan yang mungkin dimiliki klien atas kesetiaan pengacara tersebut. Berdasarkan Peraturan 23, seorang pengacara yang mengetahui informasi saat mewakili atau menjadi anggota suatu badan hukum, tidak boleh menggunakan informasi ini dengan cara apa pun untuk melawan badan hukum tersebut. Berdasarkan Pasal 13, pengacara harus menunjukkan rasa hormat terhadap pengadilan dan melindungi martabat pengadilan dan lembaga yang dia hadapi. Kode MBA secara khusus menunjukkan bahwa tugas ini sama sekali tidak mengurangi semangat dan kesetiaan pengacara dalam mewakili kepentingan klien. Berdasarkan Pasal 15, pengacara bertindak atas nama klien di hadapan pengadilan dan lembaga dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum klien. Pasal 13 menyatakan bahwa dia harus mencegah sikap yang tidak benar dari perwakilan pengadilan terhadap kliennya. Rasa hormat terhadap pengadilan tidak berarti bahwa pengacara harus tunduk kepada pengadilan dan tidak memberikan perlindungan yang agresif kepada klien. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 11, pengacara harus bertindak dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut, sesuai dengan hukum dan Kode MBA.

Kode MBA membahas kemungkinan adanya konflik antara tugas pengacara untuk menghormati administrasi peradilan yang adil dan tugas untuk bertindak demi kepentingan klien. Pasal 22 menginstruksikan bahwa jika klien meminta pengacara untuk mewakilinya terhadap kebenaran material, pengacara dapat, tetapi tidak wajib, menolak untuk mewakili klien lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 22, ketika seorang pengacara memutuskan untuk menarik diri dari perwakilan, pengacara tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dapat membahayakan klien. Berdasarkan Pasal 21, jika penarikan diri tidak diizinkan atau tidak akan memperbaiki situasi, pengacara dapat meminta bantuan dan persetujuan pengungkapan dari MBA.

Kode MBA memastikan bahwa hubungan pengacara dengan pihak lawan dan kolega harus jujur, berintegritas, dan adil. Berdasarkan Pasal 11, seorang pengacara tidak boleh melihat pihak lawan sebagai musuh, tetapi sebagai lawan biasa yang mungkin percaya bahwa dirinya benar seperti klien yang diwakili oleh pengacara. Berdasarkan Pasal 18, tidak dapat diterima untuk mengambil alih klien dari pengacara lain berdasarkan koneksi, referensi, atau

untuk mencuri klien pengacara lain dengan menawarkan harga yang lebih rendah untuk layanan. Berdasarkan Pasal 11, advokat harus menghormati hubungan advokat-klien dan tidak boleh melakukan “kontak apa pun dengan klien lawan tanpa sepengetahuan kliennya [sendiri] dan kuasa hukum dari pihak lawan.

Kode MBA menetapkan bahwa dalam kasus pidana dengan beberapa terdakwa bersama, pembelaan yang disebut sangat kejam umumnya dilarang. Berdasarkan Pasal 18, pengacara tidak boleh mengarahkan dan mengarahkan pembelaannya untuk memberatkan terdakwa bersama lainnya, kecuali jika itu demi kepentingan kliennya. Seorang pengacara tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang tidak memiliki perwakilan hukum. Berdasarkan Pasal 11, tugas pengacara untuk bersikap jujur, berintegritas, dan adil melarang penggunaan pengetahuan lawan yang kurang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil bagi klien, terutama jika pihak lain tidak memiliki pengacara.

Kesimpulan

Prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan pengacara tercantum dalam berbagai undang-undang nasional. Tidak ada ketentuan yang mengatur semua aspek dari prinsip ini. Hal ini tercermin dalam sejumlah tugas pengacara terhadap klien, pengadilan, pihak lawan, dan rekan kerja. Prinsip yang sama dapat diutarakan dengan istilah yang sedikit berbeda, seperti kolegialitas, kesopanan, kesopanan, kehati-hatian, martabat, dll. Beberapa undang-undang perdata tidak memiliki ketentuan yang mengatur situasi ketika ada ketegangan antara tugas untuk bersikap jujur kepada pengadilan dan tugas untuk menjaga kesetiaan kepada klien. Agaknya, dalam sistem hukum perdata, di mana hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi, pengacara jarang menghadapi dilema yang mungkin dihadapi pengacara hukum umum ketika klien bermaksud memberikan kesaksian palsu.

Dalam hukum perdata, kode menekankan peran pengacara dalam administrasi peradilan yang adil. Seperti yang disarankan Piagam CCBE, tugas pengacara terhadap pengadilan mengesampingkan tugas kepada klien ketika kepentingan langsung klien bertentangan dengan larangan pengacara untuk memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada pengadilan. Hal ini juga berlaku untuk yurisdiksi hukum umum. Sementara pengacara hukum umum tidak memiliki tugas untuk memberikan semua fakta material kasus kepada pengadilan, atau menjamin bukti yang diajukan, mereka dilarang dengan sengaja menyesatkan pengadilan, memberikan bukti palsu, atau merusak bukti dengan cara lain. Namun, modalitas tugas-tugas ini berbeda antara sistem hukum perdata dan hukum umum.

Tugas inti berupa kejujuran, integritas, dan keadilan pada dasarnya sama di semua yurisdiksi dan mengharuskan untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan dengan klien, menghormati administrasi peradilan yang adil dengan tidak pernah memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pengadilan, dan memperlakukan rekan kerja, termasuk pengacara lawan dengan rasa hormat dan sopan. Serupa dengan itu, Aturan 15 dan 22 dari Kode MBA mencerminkan prinsip CCBE tentang administrasi peradilan yang adil, yang umum bagi aturan nasional semua yurisdiksi, yang melarang pengacara untuk mengajukan

bukti palsu atau menyesatkan pengadilan dengan menyalahgunakan keadaan faktual dan hukum dalam masalah tersebut.

Kode MBA mengharuskan kejujuran dalam hubungan dengan klien. Aturan 7 berisi ketentuan, serupa dengan yang ada dalam Aturan Praktik Profesional Jerman, yang mengharuskan representasi yang jujur dalam hasil masalah, serta memperbarui dan memberi tahu klien tentang kemajuan dalam kasus tersebut. Mirip dengan Prancis, Belanda, dan Belgia, Aturan 7 dari Kode MBA menetapkan bahwa ketika pengacara mengundurkan diri, ia harus memastikan bahwa hal itu tidak melibatkan tindakan yang merugikan klien. Kode MBA memuat beberapa ketentuan yang memuat prinsip penghormatan terhadap kolega, sebagaimana diwajibkan oleh CCBE. Tidak seperti kode hukum perdata lainnya, Aturan 18 Kode MBA menetapkan bahwa pengacara tidak boleh menggunakan pembelaan untuk memberatkan terdakwa lainnya. Mirip dengan Belanda, Aturan 11 Kode MBA tidak mengizinkan pengacara untuk menghubungi klien lawan tanpa memberi tahu pihak lawan. Tidak seperti kebanyakan kode hukum perdata, Aturan 11 Kode MBA menetapkan bahwa pengacara tidak boleh menyalahgunakan ketidaktahuan pihak yang tidak terwakili untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil bagi kliennya sendiri.

BAB 8

LOYALITAS TERHADAP KEPENTINGAN KLIEN

8.1 PENDAHULUAN

Loyalitas dan kemampuan untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien merupakan elemen penting dalam hubungan antara pengacara dan klien. Kewajiban loyalitas pengacara terhadap klien tercermin dalam kewajiban etis lainnya, seperti kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan, dan menjaga independensi dari pengaruh eksternal. Setelah seorang pengacara menangani kasus, prinsip loyalitas melarang pengunduran diri dari kasus ketika keadaan menjadi tidak menyenangkan dan kecil kemungkinannya untuk memenangkan kasus. Loyalitas mengharuskan pengacara untuk memenuhi kewajiban mereka dengan komitmen dan dedikasi, untuk diandalkan, dan untuk tidak menyerah, bahkan jika itu berarti bahwa pengacara harus menguatkan dirinya untuk menghadapi tantangan mewakili yang terburuk di antara kita.

Prinsip loyalitas tercermin dalam yurisdiksi hukum perdata dan hukum umum melalui berbagai kewajiban pengacara. Demikian pula, berdasarkan Aturan 2 Kode MBA, pengacara harus tetap loyal kepada klien dan mencoba membangun hubungan kepercayaan. Prinsip (e) Piagam CCBE adalah kesetiaan kepada klien. Komentar Piagam tersebut menyatakan bahwa kesetiaan kepada klien merupakan inti dari peran pengacara. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dalam hubungan pengacara-klien. Agar tetap setia kepada klien, pengacara harus independen, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan klien.

CCBE mencatat bahwa beberapa masalah perilaku profesional yang paling pelik muncul dari interaksi antara prinsip kesetiaan kepada klien dan prinsip-prinsip yang menetapkan tugas pengacara yang lebih luas, seperti martabat dan kehormatan, rasa hormat terhadap rekan sejawat profesional, dan khususnya, rasa hormat terhadap aturan hukum dan administrasi peradilan yang adil. Komentar CCBE menjelaskan bahwa dalam menangani masalah tersebut, pengacara harus menjelaskan kepada klien bahwa pengacara tidak dapat mengorbankan tugasnya kepada pengadilan dan administrasi peradilan untuk mengajukan kasus yang tidak jujur atas nama klien. Kode Etik CCBE mengatur kewajiban pengacara untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien. Pasal 2.7 menyatakan bahwa tunduk pada ketaatan pada semua aturan hukum dan perilaku profesional, seorang pengacara harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik klien dan harus mengutamakan kepentingan tersebut di atas kepentingan pengacara itu sendiri atau kepentingan sesama anggota profesi hukum.

Ketentuan ini menekankan asas umum bahwa pengacara harus selalu mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingannya sendiri dan kepentingan lain yang mungkin bertentangan dengan kepentingan klien. Prinsip-prinsip PHI menetapkan bahwa merupakan asas umum bagi seorang pengacara untuk memperlakukan kepentingan klien sebagai yang terpenting dengan syarat tidak ada konflik dengan tugas pengacara di pengadilan dan

kepentingan keadilan, untuk menaati hukum, dan untuk menjaga standar etika. PHI menjelaskan bahwa pengacara dalam semua urusan mereka dengan pengadilan harus bertindak dengan kompetensi dan kejujuran. Mereka harus bertindak secara kompeten, tekun, cepat dan menghindari konflik apa pun dengan tugas mereka di pengadilan.

Komentar PHI terhadap asas 5 menjelaskan bahwa pengacara harus berurusan dengan klien mereka tanpa pengaruh kepentingan apa pun yang mungkin bertentangan dengan kepentingan terbaik klien, dan bertindak dengan komitmen dan dedikasi dalam mengejar kepentingan klien. Kesetiaan terhadap kepentingan klien berarti bahwa seorang pengacara harus memperjuangkan suatu perkara atas nama klien meskipun ada tentangan, halangan, atau ketidaknyamanan pribadi bagi pengacara tersebut, dan mengambil tindakan hukum dan etika apa pun yang mungkin diperlukan untuk membela tujuan atau usaha klien. Pengacara juga harus menjaga kerahasiaan.

Untuk melindungi kepentingan klien mereka dan menasihati mereka secara kompeten, seorang pengacara juga harus memberikan semua informasi yang relevan kepada klien mereka. Ia tidak boleh terlibat dalam, atau membantu klien mereka dengan, tindakan yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau berdampak buruk pada kepentingan keadilan, atau dengan sengaja melanggar hukum. Komentar IBA mencatat bahwa tugas pengacara untuk melindungi kepentingan klien dimulai dari pengacara yang mengajukan tuntutan dan tetap berlaku hingga mereka dibebaskan secara efektif dari kasus tersebut atau penyelesaian akhir dari seluruh pokok perkara litigasi.

8.2 PRINSIP LOYALITAS DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KLIEN

Kode etik nasional tidak selalu memuat ketentuan eksplisit mengenai kepentingan terbaik klien dan mungkin tidak menjelaskan arti dari kesetiaan. Loyalitas dan kepentingan klien tersirat, misalnya, dalam ketentuan mengenai konflik kepentingan, kerahasiaan, dan independensi. Di Prancis, Pasal 1.3 RIN Prancis menyatakan bahwa pengacara harus menghormati asas loyalitas. Berdasarkan Pasal 2.1 RIN, seorang pengacara adalah orang kepercayaan klien yang diperlukan. Menurut RIN Prancis, loyalitas adalah salah satu nilai yang merupakan asas dasar profesi.

Di Jerman, Aturan Praktik Profesional Jerman menginstruksikan bahwa seorang pengacara harus melindungi kliennya dari hilangnya hak. Untuk tujuan ini, ia harus mendampingi klien dengan maksud untuk membentuk hukum, menghindari konflik, dan menyelesaikan perselisihan. Aturan Praktik Profesional Jerman menetapkan bahwa seorang pengacara harus melindungi klien dari keputusan yang salah yang diambil oleh pengadilan dan otoritas dan harus bertindak sebagai pelindung kliennya terhadap pelanggaran hak-haknya yang tidak konstitusional dan terhadap pemerintah yang melampaui kekuasaannya.

Di Belanda, berdasarkan Aturan Perilaku Belanda, menjaga kepentingan klien merupakan inti dari fungsi pengacara. Aturan Perilaku Belanda mengharuskan pengacara untuk menangani kasus dengan cara yang baik dan hati-hati. Misalnya, mereka tidak boleh menggunakan cara yang tidak pantas, seperti mengumumkan atau mengambil langkah-

langkah yang tidak sesuai dengan tujuan yang ada dalam pikiran mereka. Pengacara harus menghindari konflik kepentingan dan harus berhati-hati dalam menangani masalah yang dipercayakan kepada mereka.

Di Belgia, menurut Kode Etik Flemish, seorang pengacara harus melindungi kepentingan kliennya dengan menegakkan hak-hak pembelaan. Dia harus menghormati sifat konfrontatif dari proses hukum dan tidak menyesatkan siapa pun. Pengacara memiliki kewajiban kesetiaan untuk mempromosikan administrasi peradilan yang adil dan tepat. Kesetiaan mengharuskan menjaga kerahasiaan diskusi dan kontak antara pengacara dan klien. Kode Etik Flemish menetapkan bahwa seorang pengacara harus membela kepentingan kliennya dengan itikad baik dan tanpa rasa takut, terlepas dari kepentingannya sendiri, dan terlepas dari konsekuensi apa pun bagi dirinya sendiri atau orang lain. Demikian pula, berdasarkan Kode Etik OBF, kesetiaan terhadap klien mengharuskan pengacara untuk menghormati rahasia profesional dan independensi pengacara dalam hubungan dengan klien dan publik.

Hukum umum

Di AS, Peraturan 1.7(a) melarang pengacara melakukan representasi jika ada konflik kepentingan. Ini adalah bagian dari tugas kesetiaan pengacara AS. Berdasarkan Peraturan 1.7(a), pengacara tidak boleh mengambil posisi yang secara langsung merugikan klien pengacara saat ini. Komentar 1 pada Aturan 1.7 dari Aturan Model ABA menjelaskan bahwa kesetiaan dan penilaian independen merupakan elemen penting dalam hubungan pengacara dengan klien. Aturan 1.9 mencerminkan tugas kesetiaan yang dimiliki pengacara kepada mantan klien. Aturan 1.9 melarang pengacara mengambil posisi yang secara langsung merugikan mantan klien dalam masalah yang sama atau yang secara substansial terkait. Prinsip ini juga tercermin dalam yurisprudensi AS. Misalnya, dalam *Strickland v. Washington*, Mahkamah Agung AS menggambarkan tugas kesetiaan sebagai mungkin tugas penasihat yang paling mendasar.

Di Inggris, menurut Buku Pegangan BSB, merupakan tugas inti untuk bertindak demi kepentingan terbaik setiap klien. Pengacara berkewajiban untuk memajukan kepentingan terbaik klien tanpa rasa takut dan dengan segala cara yang tepat dan sah. Mereka harus melakukannya tanpa memperhatikan kepentingan mereka sendiri atau konsekuensi apa pun terhadap pengacara (yang dapat mencakup, untuk menghindari keraguan, diharuskan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi dampak pelanggaran). Pengacara harus melindungi kepentingan klien tanpa memperhatikan konsekuensi bagi orang lain (baik bagi klien profesional Anda, pemberi kerja, atau orang lain mana pun).

Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa pengacara berkewajiban untuk memajukan dan melindungi kepentingan klien mereka sejauh hal itu konsisten dengan hukum dan dengan tugas utama mereka kepada pengadilan. Buku Pegangan BSB selanjutnya menjelaskan bahwa tugas pengacara kepada pengadilan tidak menghalangi untuk mengajukan kasus klien hanya karena pengacara tidak yakin bahwa faktanya seperti yang dinyatakan klien selama kasus positif apa pun yang Anda ajukan sesuai dengan instruksi Anda dan Anda tidak menyesatkan

pengadilan. Peran pengacara ketika bertindak sebagai advokat atau melakukan litigasi adalah untuk menyajikan kasus klien, dan bukan pengacara yang memutuskan apakah kasus klien dapat dipercaya.

8.3 KESETIAAN PENGACARA MENURUT KODE ETIK MBA

Kode MBA secara eksplisit mengatur tugas pengacara untuk setia kepada klien. Berdasarkan Aturan 2, seorang pengacara harus tetap setia kepada klien dan berusaha membangun hubungan kepercayaan. Aturan 2 melarang pembatalan representasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Berdasarkan Aturan 5, seorang pengacara harus bertindak dengan komitmen dan secara sadar mewakili kepentingan kliennya dengan menggunakan seluruh sarana yang tersedia, yang diizinkan oleh Hukum atau peraturan lainnya. Berdasarkan Peraturan 6, seorang pengacara tidak boleh menerima tawaran untuk mewakili pihak lawan dan tidak boleh melakukan kegiatan lain yang terkait dengan kasus tersebut tetapi bertentangan dengan kepentingan klien selama kasus tersebut berlangsung. Berdasarkan Peraturan 4, ketika seorang pengacara menyusun dokumen hukum bilateral, seperti kontrak, tugas kesetiaan mengharuskan pengacara untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, terlepas dari siapa yang membayar imbalan, dan dalam kasus perselisihan, pengacara tidak boleh mewakili salah satu pihak. Berdasarkan Peraturan 11, jika pengacara memiliki hubungan yang baik dengan pihak lawan, tugas kesetiaan kepada klien mengharuskan pengacara untuk memberi tahu klien tentang hubungan semacam ini sebelum litigasi dimulai. Peraturan 23 mencerminkan tugas kesetiaan kepada mantan klien.

Peraturan 22 dan 23 menetapkan bahwa pengacara harus merahasiakan informasi yang diperoleh selama mewakili mantan klien dan tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk melawan klien ini. Kesimpulan Prinsip kesetiaan berlaku umum di semua yurisdiksi. Kesetiaan menciptakan kepercayaan yang memungkinkan representasi yang efektif. Semua aspek lain dari hubungan pengacara-klien, seperti menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan dan independensi berasal dari dan memperkuat tugas utama pengacara untuk setia. Setelah prinsip kesetiaan dilanggar, hal itu memengaruhi setiap keputusan dalam representasi dan setiap aspek hubungan pengacara-klien.

Kode MBA mengkodifikasi tugas kesetiaan dan memuat tugas pengacara yang umum untuk sistem hukum perdata dan hukum umum. Berdasarkan Kode MBA, tugas kesetiaan berarti bahwa pengacara harus menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan profesional, tetap independen, dan bertindak dengan komitmen dan ketekunan. Pengacara harus memperlakukan kepentingan klien mereka sebagai yang terpenting, dengan tetap berada dalam kerangka hukum dan Kode MBA. Aturan 2 mewajibkan pengacara untuk menangani kasus tersebut dan memberikan beberapa alasan pembenar, serupa dengan yang ada di bawah Aturan Praktik Profesional Jerman. Seperti di AS dan Inggris, dan konsisten dengan Aturan Perilaku Belanda dan ketentuan Kode Etik Flemish, berdasarkan Aturan 5 pengacara nasional harus mewakili klien mereka dengan semangat dan komitmen

menggunakan semua cara yang tersedia, dibatasi oleh hukum dan Kode MBA saja. Mirip dengan kode-kode lain yang dibahas di atas, Aturan 4, 6, 11 dari Kode MBA yang mengatur konflik kepentingan memastikan bahwa pengacara tetap setia kepada klien mereka. Mirip dengan ketentuan dalam Kode Flemish, aturan 22 dan 23 dari Kode MBA, melindungi rahasia profesional yang dipelajari selama mewakili mantan klien, melengkapi tugas kesetiaan pengacara dan melarang mereka menggunakan informasi rahasia terhadap mantan klien.

BAB 9

KERAHASIAAN

9.1 PRINSIP KERAHASIAAN

Prinsip kerahasiaan komunikasi antara pengacara dan klien mendorong komunikasi yang jujur dan penuh antara pengacara dan klien mereka. Prinsip ini memastikan kepercayaan yang menjadi ciri hubungan antara pengacara dan klien dan membantu pengacara dalam memberikan bantuan hukum yang efektif dengan diberikan semua informasi yang relevan. Prinsip etika dalam sistem hukum perdata dan hukum umum menganggap tugas kerahasiaan sebagai tugas inti pengacara. Secara umum, tugas kerahasiaan pengacara di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem hukum perdata disebut sebagai "rahasia/kerahasiaan profesional". Baik sistem hukum perdata maupun hukum umum mengakui hak istimewa pembuktian antara pengacara dan klien yang melindungi informasi rahasia dari pengungkapan dan penggunaan dalam proses sebagai bukti. Kode MBA memuat bagian terpisah yang mengatur rahasia profesional.

9.2 KERAHASIAAN DALAM PROFESI PENGACARA

Piagam CCBE menyatakan prinsip kerahasiaan sebagai hak dan tugas pengacara untuk menjaga kerahasiaan masalah klien dan menghormati kerahasiaan profesional. Komentar CCBE terhadap Piagam menjelaskan bahwa prinsip kerahasiaan memiliki sifat ganda: di satu sisi merupakan tugas pengacara untuk mematuhi kerahasiaan; di sisi lain itu adalah hak asasi manusia yang mendasar dari klien. Komentar CCBE menjelaskan bahwa hak istimewa pengacara-klien melarang komunikasi digunakan untuk melawan klien. Komentar tersebut lebih lanjut mencatat bahwa di beberapa yurisdiksi hak atas kerahasiaan hanya dimiliki oleh klien. Di yurisdiksi lain, kerahasiaan profesional juga dapat mengharuskan pengacara merahasiakan komunikasi dari pengacara pihak lain yang disampaikan atas dasar kepercayaan dari kliennya sendiri. Komentar tersebut juga mencatat bahwa tugas kerahasiaan pengacara tetap ada bahkan setelah berakhirnya hubungan pengacara-klien.

Kode Etik CCBE menetapkan bahwa hakikat fungsi pengacara adalah bahwa pengacara harus diberi tahu informasi yang tidak akan diberitahukan klien kepada orang lain, dan bahwa pengacara harus menerima informasi lain atas dasar kepercayaan. Tanpa kerahasiaan tidak akan ada kepercayaan.²²⁰ Menurut Kode CCBE, kerahasiaan adalah hak dan tugas utama dan mendasar dari pengacara. Kode Etik CCBE menetapkan bahwa karena kerahasiaan melayani kepentingan administrasi peradilan, kerahasiaan berhak atas perlindungan khusus dari negara. Kode Etik CCBE selanjutnya menambahkan bahwa tugas pengacara untuk menghormati kerahasiaan tidak terbatas waktunya. Ini berarti bahwa tugas kerahasiaan tetap mengikat pengacara bahkan jika ia berhenti bertindak untuk klien. Pengacara tidak hanya harus menghormati tugas kerahasiaan itu sendiri. Tugas ini meluas ke rekan pengacara, staf, dan siapa pun yang dipekerjakan oleh pengacara dalam rangka memberikan layanan

profesional.

9.3 Kerahasiaan Pengacara: Prinsip dan Tantangan Menurut IBA

Prinsip 4 dari Prinsip IBA menetapkan bahwa seorang pengacara harus menjaga dan diberikan perlindungan kerahasiaan mengenai urusan klien saat ini atau sebelumnya, kecuali hukum menetapkan sebaliknya. Komentar IBA menetapkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan fitur yang sangat diperlukan dari aturan hukum. Hal ini sama pentingnya untuk kepercayaan dan keyakinan publik dalam administrasi peradilan dan independensi profesi hukum.

Menurut Komentar IBA, prinsip kerahasiaan memiliki dua fitur utama. Pertama, prinsip ini adalah kewajiban kontraktual, etika, dan sering kali berdasarkan undang-undang di pihak pengacara untuk menjaga kerahasiaan rahasia klien. Menurut Komentar IBA, kewajiban berdasarkan undang-undang terkadang berbentuk hak istimewa pembuktian antara pengacara dan klien. Komentar IBA selanjutnya menjelaskan bahwa hak istimewa pembuktian berbeda dari kewajiban etika pengacara untuk menjaga kerahasiaan. Kewajiban etika pengacara untuk menjaga kerahasiaan melampaui pemutusan hubungan pengacara dan klien. Menurut Komentar IBA, sebagian besar yurisdiksi menghormati dan melindungi kewajiban kerahasiaan tersebut, misalnya, dengan membebaskan pengacara dari kewajiban memberikan kesaksian di depan pengadilan dan/atau dengan memberikan perlindungan khusus pada komunikasi pengacara dan klien. Kedua, menurut IBA, ada situasi di mana kerahasiaan komunikasi pengacara dan klien tidak lagi berlaku secara penuh atau sebagian. Komentar IBA menyatakan bahwa pengacara tidak dapat mengklaim perlindungan kerahasiaan saat membantu dan mendukung perilaku klien mereka yang melanggar hukum.

IBA menjelaskan bahwa beberapa yurisdiksi mengizinkan pengacara untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi sejauh yang menurut pengacara secara wajar diperlukan untuk mencegah cedera tubuh atau kematian yang serius, atau untuk mencegah klien melakukan kejahatan di mana klien telah menggunakan jasa pengacara. Komentar IBA mencatat bahwa undang-undang baru-baru ini yang memberlakukan tugas khusus kepada pengacara untuk membantu pencegahan fenomena kriminal seperti terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terorganisasi telah menyebabkan erosi lebih lanjut terhadap perlindungan tugas kerahasiaan pengacara. Banyak bar yang pada prinsipnya menentang ruang lingkup undang-undang ini.

Menurut Komentar IBA, saap pun pelanggaran terhadap tugas pengacara harus dibatasi pada informasi yang mutlak diperlukan untuk memungkinkan pengacara mematuhi kewajiban hukum mereka atau untuk mencegah pengacara disalahgunakan tanpa disadari oleh penjahat untuk membantu tujuan mereka yang tidak pantas. Jika seorang tersangka kejahatan masa lalu meminta nasihat dari seorang pengacara, tugas kerahasiaan harus sepenuhnya dilindungi. Namun, seorang pengacara tidak dapat bertindak sebagai kaki tangan kejahatan dan menggunakan kerahasiaan sebagai tameng.

Komentar IBA menunjukkan bahwa ruang lingkup perlindungan kerahasiaan berbeda

dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Di beberapa yurisdiksi, klien dapat melepaskan kewajiban kerahasiaan pengacara. Di yurisdiksi lain, klien tidak boleh. Di beberapa yurisdiksi, pengacara dapat melanggar kewajiban untuk tujuan membela diri dalam gugatan terhadapnya. Di semua yurisdiksi, kerahasiaan tidak terbatas waktunya. Kewajiban ini juga berlaku bagi asisten, pekerja magang, dan semua yang bekerja di pengacara atau firma hukum.

IBA mencatat bahwa pengacara harus memastikan kerahasiaan terjaga sehubungan dengan komunikasi elektronik, dan data yang disimpan di komputer bahwa standar terus berkembang dalam bidang ini seiring dengan berkembangnya teknologi itu sendiri, dan pengacara berkewajiban untuk terus memberi informasi tentang standar profesional yang diperlukan agar dapat mempertahankan kewajiban profesional mereka.

Yurisdiksi berbeda-beda dalam hal sejauh mana klien dapat melepaskan hak atas kerahasiaan. Menurut Komentar IBA, aturan yang membatasi kemampuan untuk melepaskan berpendapat bahwa klien sering kali tidak dapat menilai dengan tepat kerugian dari penerbitan pelepasan tersebut". IBA menjelaskan bahwa pembatasan pelepasan sangat penting untuk melindungi dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memberikan tekanan yang tidak pantas kepada klien untuk melepaskan haknya atas kerahasiaan. Terakhir, pengacara tidak boleh mendapatkan keuntungan dari rahasia yang dipelajari dari klien secara rahasia.

Kerahasiaan Profesional Pengacara: Aturan dan Kewajiban di Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia

Di Prancis, asas kerahasiaan disebut sebagai "kerahasiaan profesional". Pelanggaran terhadap tugas pengacara untuk menjaga kerahasiaan profesional merupakan tindak pidana, kecuali untuk kasus-kasus di mana hukum memaksakan atau mengizinkan pengungkapan rahasia tersebut. Berdasarkan RIN Prancis, pengacara merupakan orang kepercayaan yang diperlukan dari klien. Tugas kerahasiaan profesional bersifat umum, mutlak, dan tidak terbatas waktu. Pengacara tidak boleh mengungkapkan rahasia profesional dengan cara apa pun, dengan pengecualian terbatas ketika hal itu benar-benar diperlukan untuk pembelaan pengacara di hadapan pengadilan atau ketika pengungkapan diizinkan oleh hukum.

Kerahasiaan profesional di Prancis mencakup semua hal dalam ranah nasihat atau litigasi. RIN Prancis menetapkan bahwa hal ini mencakup konsultasi antara pengacara dan klien korespondensi yang dipertukarkan antara pengacara dan klien atau antara pengacara dan koleganya catatan arsip dan umumnya dokumen apa pun dalam berkas kasus, nama klien, dan penyelesaian moneter dan informasi yang diminta oleh auditor atau pihak ketiga mana pun. Demikian pula, pengacara harus memastikan bahwa stafnya atau siapa pun yang terlibat dalam bisnis hukumnya menghormati kerahasiaan profesional.

RIN Prancis menetapkan bahwa pengacara juga harus menghormati kerahasiaan penyelidikan kriminal. Untuk tujuan ini, mereka harus "menahan diri dari mengomunikasikan, kecuali kepada klien mereka untuk tujuan pembelaan mereka, informasi yang diambil dari berkas dan dari mempublikasikan dokumen, barang bukti, atau surat apa pun yang terkait

dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

RIN Prancis menetapkan bahwa jika pengacara bermaksud memberikan salinan materi yang dibuat setelah sidang pertama atau pemeriksaan pertama kepada klien mereka, mereka harus memberi tahu hakim pemeriksa tentang daftar salinan dokumen atau barang bukti yang ingin mereka serahkan. RIN Prancis menetapkan bahwa pelanggaran kewajiban kerahasiaan merupakan tindak pidana dan pelanggaran aturan perilaku profesional. Di Jerman, seperti di Prancis, pelanggaran "rahasia profesional" merupakan tindak pidana. Seorang pengacara Jerman harus mematuhi kerahasiaan profesional berdasarkan Undang-Undang Pengacara Federal. Ini mencakup segala sesuatu yang telah diketahui oleh pengacara dalam praktik profesionalnya. Aturan Praktik Profesional Jerman selanjutnya menetapkan bahwa pengacara memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi kerahasiaan. Ini berlaku untuk semua informasi yang dipelajari pengacara dalam kegiatan profesionalnya. Kewajiban tersebut tetap berlaku setelah pengacara berhenti bertindak untuk klien. Menurut Aturan Praktik Profesional Jerman, kewajiban kerahasiaan tidak berlaku jika penegakan atau pembelaan terhadap klaim yang timbul dari suatu kasus, atau jika pembelaan kepentingan pengacara sendiri, memerlukan pengungkapan informasi.

Aturan Praktik Profesional Jerman menetapkan bahwa pengacara harus secara tegas mengharuskan staf mereka dan siapa pun yang berpartisipasi dalam aktivitas profesionalnya untuk mematuhi kewajiban kerahasiaan. Di Belanda, Aturan Perilaku Belanda mengharuskan pengacara untuk menjalankan kehati-hatian sebesar mungkin dalam mematuhi kerahasiaan dan dalam memanfaatkan hak istimewa pengacara-klien mereka. Pengacara tidak boleh membocorkan rincian kasus yang mereka tangani, identitas klien mereka atau sifat dan luasnya kepentingan mereka. Aturan Perilaku Belanda, tidak seperti kode Prancis dan Jerman, mencakup pengungkapan informasi rahasia atas persetujuan klien dengan batasan yang ketat. Peraturan Perilaku Belanda menetapkan bahwa jika seorang pengacara berpendapat bahwa pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya mengharuskan pengetahuannya untuk dipublikasikan dengan cara apa pun, maka pengacara dapat mengungkapkan informasi rahasia dengan syarat bahwa klien tidak keberatan dan jika hal tersebut sesuai dengan praktik profesional yang baik.

Mirip dengan aturan etika di Prancis dan Jerman, di Belanda tugas kerahasiaan berlaku bagi staf pengacara dan tidak dibatasi waktu. Di Belgia, Kode Etik Flemish memberikan daftar ketentuan di mana seorang pengacara dapat memberikan informasi rahasia kepada pengadilan, majelis arbitrase, dan pihak ketiga. Seorang pengacara dapat merilis informasi rahasia jika:

- a. Rilis informasi tersebut relevan
- b. Rilis informasi tersebut adalah untuk kepentingan klien
- c. Klien menyetujui rilis informasi tersebut
- d. Pelepasan informasi tersebut tidak dilarang oleh hukum

Jika seorang pengacara menggunakan informasi rahasia yang diperlukan untuk pembelaannya sendiri, hal ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak istimewa profesional. Kewajiban

untuk menegakkan hak istimewa profesional berlaku tanpa batas waktu, dan seorang pengacara harus memastikan bahwa personelnnya, agen, dan orang lain yang bekerja dengan pengacara dalam kapasitas profesional menegakkan hak istimewa profesional tersebut. Tidak seperti Kode Etik Flemish, Kode Etik OBFG tidak mencantumkan kondisi khusus di mana rahasia profesional dapat dicabut. Berdasarkan Kode Etik OBFG, rahasia profesional melarang seorang pengacara pada tahap apa pun dari proses untuk mengungkapkan rahasia yang diterima dari kliennya. Kode Etik OBFG menetapkan bahwa korespondensi antara pengacara bersifat rahasia. Bahkan ketika para pengacara setuju, korespondensi tidak dapat diproduksi tanpa otorisasi dari bâtonnier. Ketentuan ini mencakup baik proses peradilan maupun ekstra-peradilan. Dalam mediasi, rahasia profesi hanya dapat dicabut atas persetujuan para pihak dan mediator yang menjadi penyebab perselisihan yang timbul dari perjanjian mediasi. Kode Etik OBFG menetapkan bahwa seorang pengacara yang mewakili anak di bawah umur sehubungan dengan rahasia profesi, hanya boleh berkomunikasi dengan pihak ketiga, termasuk orang tua atau perwakilan dari sektor psikologis atau pendidikan, sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan misinya.

Hukum Umum

Di AS, Aturan Model ABA 1.6 menetapkan bahwa seorang pengacara tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia, kecuali klien memberikan persetujuan yang diinformasikan, atau pengungkapan diizinkan untuk melaksanakan representasi.

Di AS, ada perbedaan antara tugas etika kerahasiaan dan hak istimewa pengacara-klien. Hak istimewa pengacara-klien memiliki cakupan yang lebih sempit daripada tugas etika kerahasiaan. Hak istimewa pengacara-klien adalah aturan pembuktian, yang melarang pemaksaan komunikasi rahasia pengacara-klien oleh pemerintah atau pengadilan. Sebaliknya, tugas etika kerahasiaan melindungi semua informasi yang berkaitan dengan representasi klien dari pengungkapan sukarela dan penggunaan terhadap klien. Tugas kerahasiaan mencakup komunikasi yang dilindungi oleh hak istimewa pengacara-klien, ditambah informasi lain yang berkaitan dengan representasi. Tidak seperti hak istimewa pengacara-klien, yang hanya melindungi komunikasi rahasia antara pengacara dan klien, tugas etika kerahasiaan melindungi informasi terlepas dari sumbernya.

Secara umum, hak istimewa pengacara-klien tidak berlaku dalam situasi ketika:

- a. Digunakan untuk terlibat atau membantu dalam kejahatan atau penipuan, yang umumnya disebut sebagai pengecualian kejahatan-penipuan
- b. Komunikasi rahasia relevan dengan perselisihan yang timbul dari pelanggaran hubungan pengacara-klien.

Pengecualian terhadap tugas etika kerahasiaan adalah:

- a. Klien memberikan persetujuan yang diinformasikan untuk mengungkapkan informasi rahasia
- b. Pengacara perlu melindungi dirinya sendiri terhadap klaim malpraktik, pelanggaran disiplin, atau sejenisnya
- c. Pengacara mencari nasihat etika hukum

- d. Pengungkapan diwajibkan oleh hukum atau pengadilan
- e. Pengacara secara wajar percaya bahwa pengungkapan diperlukan untuk mencegah kematian atau cedera tubuh yang serius
- f. Pengacara dapat mengungkapkan informasi terbatas (seperti nama, ringkasan singkat masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut) untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik kepentingan.

Yang terkait erat dengan hak istimewa pengacara-klien adalah doktrin produk kerja. Dalam persiapan kasus, pengacara sering kali harus menyusun dokumen hukum, laporan internal, dan memorandum lainnya, yang mungkin berisi komunikasi rahasia klien. Dokumen-dokumen ini, meskipun tidak selalu merupakan komunikasi antara pengacara dan klien, dilindungi berdasarkan doktrin produk kerja dan tidak boleh diungkapkan.

Di Inggris, seorang pengacara harus merahasiakan urusan masing-masing klien. Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa tugas kerahasiaan merupakan hal utama dalam administrasi peradilan. Buku pegangan tersebut menjelaskan bahwa klien yang menaruh kepercayaan mereka pada penasihat hukum mereka harus dapat melakukannya dengan pengetahuan bahwa informasi yang mereka berikan, atau yang diberikan atas nama mereka, akan tetap rahasia". Buku Pegangan BSB selanjutnya mencatat bahwa dalam keadaan normal, informasi ini akan dirahasiakan dan tidak diungkapkan ke pengadilan. Buku Pegangan BSB juga membahas hubungan antara tugas kerahasiaan dan tugas pengacara kepada pengadilan. Dijelaskan bahwa tugas kepada pengadilan tidak mengizinkan atau mengharuskan pengacara untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama instruksi dan tanpa otorisasi klien. Buku Pegangan BSB menginstruksikan bahwa jika ada risiko bahwa pengadilan akan disesatkan kecuali pengacara mengungkapkan informasi rahasia, ia harus meminta izin klien untuk mengungkapkannya ke pengadilan. Jika klien menolak untuk mengizinkan pengungkapan, pengacara harus berhenti bertindak, dan mengembalikan instruksinya. Dalam keadaan ini, pengacara tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut ke pengadilan.

Buku Pegangan BSB mengakui bahwa tugas kerahasiaan tunduk pada pengecualian jika pengungkapan diperlukan atau diizinkan oleh hukum, misalnya, pengacara mungkin diwajibkan untuk mengungkapkan hal-hal tertentu oleh Undang-Undang Hasil Kejahatan tahun 2002. Seperti di AS, pengecualian tindak pidana penipuan berkembang dalam yurisprudensi Inggris. Dalam kasus *Queen v. Cox dan Railton*, salah satu kasus paling awal yang membahas pengecualian tindak pidana penipuan terhadap hak istimewa klien pengacara, para hakim beralasan:

Agar aturan hak istimewa dapat diterapkan, harus ada kepercayaan profesional dan pekerjaan profesional, tetapi jika klien memiliki tujuan pidana dalam komunikasinya dengan pengacaranya, salah satu dari unsur-unsur ini harus absen. Klien harus bersekongkol dengan pengacaranya atau menipunya. Jika tujuan pidananya dinyatakan, klien tidak berkonsultasi dengan penasihatnya secara profesional, karena bukan urusan pengacara untuk memajukan tujuan pidana apa pun. Jika klien tidak menyatakan tujuannya, ia tidak memiliki kepercayaan, karena keadaan fakta, yang merupakan dasar dari kepercayaan yang seharusnya, tidak ada.

9.4 KERAHASIAAN PROFESIONAL MENURUT KODE MBA

Kode MBA memiliki bagian terpisah yang didedikasikan untuk masalah rahasia profesional. Berdasarkan Peraturan 20, rahasia profesi mencakup semua informasi yang diberikan klien kepada pengacara terkait dengan nasihat hukum, pembelaan, atau representasi hukum yang diminta, dan semua data rahasia yang diketahui pengacara dengan cara lain. Peraturan 20 menetapkan bahwa pelanggaran rahasia profesi oleh pengacara dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana atau disiplin. Berdasarkan Peraturan 31, tugas untuk menjaga rahasia profesi berlaku juga bagi peserta pelatihan pengacara.

Peraturan 21 menetapkan pengecualian yang memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia. Rahasia profesi hanya dapat diketahui jika klien secara sadar menyetujuinya, dan jika rahasia tersebut mendukung atau penting bagi pembelaan, serta jika permintaan pengacara untuk pengungkapan rahasia tersebut disetujui oleh MBA. Berdasarkan Peraturan 21, jika pengacara mengajukan permintaan persetujuan dari MBA, MBA berkewajiban untuk mengevaluasi semua keadaan yang ada.

Dalam praktiknya, kerahasiaan profesi mencakup informasi yang jika diungkapkan dapat merugikan klien. Berdasarkan Peraturan 20, tugas untuk menjaga kerahasiaan rahasia profesi berlaku baik selama proses pembelaan dan representasi hukum, dan selanjutnya, selama pengumuman publik dapat merugikan klien. Aturan 23 dari Kode MBA melarang penggunaan informasi rahasia yang dipelajari pengacara saat mewakili badan hukum atau menjadi anggota badan hukum tersebut yang merugikan badan hukum tersebut.

Pasal 3(a)(3) dari Undang-Undang Pengacara melarang penggunaan informasi rahasia oleh pengadilan. Ini termasuk komunikasi antara pengacara dan komunikasi antara pengacara dan klien, terlepas dari cara penyampaiannya. Informasi ini tidak boleh diperiksa, disalin, diperiksa, dan disita dan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam prosedur di pengadilan atau otoritas negara lainnya. Mirip dengan doktrin produk kerja di AS, berdasarkan Pasal 3(a)(2), buku dan kasus, berkas, data elektronik, dan sarana komunikasi lainnya milik pengacara tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh diperiksa, disalin, diperiksa, dan disita, kecuali dalam kasus yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Pengacara tidak secara eksplisit memberikan pengecualian kejahatan-penipuan. Namun, Pasal 21 UU Advokat menyebutkan bahwa penggeledahan terhadap kantor advokat atau firma hukum dapat dilakukan berdasarkan hal-hal yang secara tegas tercantum dalam surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh hakim yang berwenang dalam perkara pidana, sedangkan terhadap pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan melakukan penggeledahan terhadap bahan tertulis, akta, berkas, dan arsip lainnya.

Kesimpulan

Di semua yurisdiksi, kerahasiaan/kerahasiaan profesional komunikasi antara pengacara dan klien merupakan komponen penting dari pekerjaan pengacara. Klien harus merasa aman bahwa informasi yang sangat sensitif miliknya tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Pengacara harus menyadari parameter dan pengecualian terhadap tugas mereka terkait

kerahasiaan/kerahasiaan profesional, serta hak istimewa pengacara-klien agar dapat memberikan nasihat yang paling efektif kepada kliennya.

Aturan 20 dari Kode MBA melindungi semua informasi yang dipelajari pengacara dari klien atau melalui cara lain. Seperti di Prancis, Jerman, dan Belanda, Kode MBA menginformasikan tentang tanggung jawab pidana sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pelanggaran rahasia profesional. Tidak seperti kode hukum perdata lainnya yang dibahas di atas, Kode MBA secara eksplisit menyatakan bahwa tugas untuk menjaga rahasia profesional berlaku bagi peserta pelatihan pengacara berdasarkan Aturan 31.

Aturan 21 dari Kode MBA mengatur tentang pengabaian rahasia profesional. Jika klien setuju untuk melepaskan kerahasiaan, ia harus melakukannya "secara sadar" mirip dengan "persetujuan berdasarkan informasi" di AS dan Inggris. Selain itu, mirip dengan "doktrin produk kerja" AS, Pasal 3(a)(2) Undang-Undang Pengacara melindungi kerahasiaan buku, kasus, berkas, data elektronik, dan sarana komunikasi lain antara pengacara dan klien.

Di semua yurisdiksi, dan berdasarkan Aturan 20 Kode MBA, kerahasiaan profesional/kerahasiaan komunikasi pengacara-klien tidak terbatas waktu dan tetap berlaku setelah berakhirnya hubungan pengacara-klien.

BAB 10

KONFLIK KEPENTINGAN

10.1 KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PRAKTIK PENGACARA

Berdasarkan sifat praktik hukum, pengacara sering kali menemukan diri mereka dalam situasi di mana kepentingan klien berbenturan dengan tanggung jawab pengacara terhadap klien lain, mantan klien, pihak ketiga, atau bahkan terhadap kepentingan pribadi pengacara itu sendiri. Inilah yang dikenal sebagai konflik kepentingan. Definisi dan aturan yang mengatur konflik kepentingan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Semua kode internasional dan nasional menggabungkan tugas untuk menghindari konflik kepentingan dan menetapkan bahwa jika representasi melibatkan konflik kepentingan, pengacara menolak representasi. Undang-Undang Pengacara dan Kode MBA berisi ketentuan yang menawarkan panduan tentang cara menghindari konflik kepentingan. Secara umum, konflik kepentingan terjadi ketika kemampuan pengacara untuk mewakili klien secara material dibatasi oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak ketiga. Mungkin ada berbagai jenis konflik kepentingan, seperti konflik antara pengacara dan klien, di antara klien pengacara yang bekerja sama, di antara klien saat ini dan mantan klien, dan konflik karena tugas pengacara terhadap pihak ketiga.

Piagam CCBE menetapkan prinsip penghindaran konflik kepentingan, baik antara klien yang berbeda atau antara klien dan pengacara. Komentar CCBE tidak mendefinisikan konflik kepentingan. Menurut Komentar CCBE, seorang pengacara tidak boleh bertindak untuk dua klien dalam kasus yang sama jika ada konflik, atau risiko konflik antara kepentingan kedua klien tersebut. Seorang pengacara juga harus menahan diri untuk tidak bertindak untuk klien baru jika pengacara tersebut memperoleh informasi rahasia dari klien lain saat ini atau sebelumnya. Sama halnya, seorang pengacara harus menghindari konflik kepentingan antara klien dan pengacara. Jika konflik kepentingan muncul selama bertindak untuk klien, pengacara harus berhenti bertindak. Komentar CCBE menunjukkan bahwa konflik kepentingan terkait erat dengan prinsip kerahasiaan, independensi, dan loyalitas.

Kode Etik CCBE mencantumkan beberapa jenis konflik kepentingan yang harus dihindari oleh pengacara:

- a. Seorang pengacara tidak boleh memberikan nasihat, mewakili, atau bertindak atas nama dua atau lebih klien dalam perkara yang sama jika terdapat konflik, atau risiko konflik yang signifikan, antara kepentingan klien-klien tersebut.
- b. Seorang pengacara harus berhenti bertindak untuk kedua atau semua klien yang bersangkutan ketika konflik kepentingan muncul antara klien-klien tersebut dan juga setiap kali terdapat risiko pelanggaran kepercayaan atau ketika independensi pengacara dapat terganggu.

- c. Seorang pengacara juga harus menahan diri untuk tidak bertindak untuk klien baru jika ada risiko pelanggaran kepercayaan yang dipercayakan kepada pengacara tersebut oleh mantan klien atau jika pengetahuan yang dimiliki pengacara tersebut tentang urusan mantan klien akan memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada klien baru tersebut.

Jika pengacara berpraktik dalam suatu asosiasi, larangan ini berlaku sama untuk semua anggota asosiasi tersebut. Nota Penjelasan CCBE menetapkan bahwa seorang pengacara masih dapat bertindak untuk dua atau lebih klien dalam perkara yang sama jika kepentingan mereka sebenarnya tidak bertentangan dan tidak ada risiko signifikan dari konflik tersebut. Jika konflik muncul selama representasi, atau ada risiko pelanggaran kepercayaan atau keadaan lain yang merusak independensi pengacara, pengacara tersebut harus berhenti bertindak untuk semua klien dalam perkara tersebut.

CCBE menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu mungkin tepat bagi seorang pengacara untuk bertindak sebagai mediator antara klien yang berkonflik. Dalam keadaan seperti itu, pengacara harus: a. menjelaskan posisinya sebagai mediator, b. memperoleh kesepakatan dari para pihak, dan c. upaya untuk menyelesaikan perbedaan antara para pihak. Seorang pengacara harus menggunakan pertimbangannya sendiri untuk memutuskan apakah akan berhenti bertindak atau mencoba melakukan mediasi. Dan ketika seorang pengacara berusaha melakukan mediasi antara klien yang berkonflik dan mediasi tersebut gagal, CCBE memerintahkan pengacara tersebut untuk berhenti bertindak untuk klien tersebut.

10.2 PRINSIP PENGHINDARAN KONFLIK KEPENTINGAN IBA

Prinsip 3 IBA menetapkan bahwa seorang pengacara tidak boleh mengambil posisi yang di dalamnya kepentingan klien bertentangan dengan kepentingan pengacara, pengacara lain di firma yang sama, atau klien lain, kecuali jika diizinkan oleh hukum atau oleh otorisasi klien. IBA menjelaskan bahwa ada beberapa jenis konflik, seperti ketika representasi satu klien akan secara langsung merugikan klien lain, atau ada risiko bahwa representasi satu atau lebih klien akan dibatasi secara material oleh:

- a. Tanggung jawab pengacara kepada klien lain.
- b. Mantan klien.
- c. Orang ketiga.
- d. Kepentingan pribadi pengacara.

Menurut Komentar IBA, di beberapa yurisdiksi seorang pengacara dapat mewakili klien jika:

- a. Pengacara akan dapat memberikan representasi yang kompeten dan tekun kepada setiap klien yang terpengaruh.
- b. Representasi tersebut tidak dilarang oleh hukum.
- c. Representasi tersebut tidak melibatkan penegasan klaim oleh satu klien terhadap klien lain dari pengacara.
- d. Setiap klien memberikan persetujuan tertulis yang diinformasikan.

Informasi yang dipelajari pengacara dari klien yang sebelumnya diwakilinya tidak boleh

digunakan untuk merugikan klien sebelumnya kecuali jika diizinkan oleh hukum atau aturan etika yang berlaku.

Di yurisdiksi lain, jika ada potensi konflik kepentingan, pengacara masih dapat melakukan representasi jika ia mengungkapkan kemungkinan konflik tersebut kepada semua pihak yang terpengaruh dan memperoleh persetujuan mereka. Namun, pengungkapan tidak boleh melanggar tugas kerahasiaan pengacara. IBA menunjukkan bahwa di beberapa yurisdiksi, jika konflik menjadi jelas hanya setelah pengacara mulai bekerja, pengacara yang berkonflik harus menarik diri dari kasus tersebut secara keseluruhan dan sehubungan dengan semua klien yang bersangkutan. Beberapa yurisdiksi lain mengharuskan penarikan diri dari mewakili satu klien saja, tetapi tidak semua klien.

Komentar IBA membedakan antara konflik hukum/profesional dan konflik kepentingan komersial. Menurut IBA, konflik kepentingan komersial tidak menghalangi seorang pengacara untuk mewakili klien bahkan jika klien tersebut adalah pesaing atau kepentingannya bertentangan dengan kepentingan komersial klien lain saat ini atau sebelumnya, yang tidak terlibat atau terkait dalam kasus tertentu yang ditugaskan kepada pengacara tersebut.

Komentar IBA menetapkan bahwa seorang pengacara dapat membela kepentingan klien terhadap klien lain dalam keadaan apa pun di mana klien tersebut, baik dalam menegosiasikan perjanjian, atau dalam tindakan hukum atau arbitrase lainnya, telah memilih untuk menempatkan kepentingannya untuk kasus-kasus tersebut dengan pengacara lain. Namun, IBA menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, pengacara pertama harus mematuhi semua aturan perilaku profesional yang berlaku lainnya, dan khususnya, dengan aturan kerahasiaan, kerahasiaan profesional, dan independensi.

IBA selanjutnya menjelaskan bahwa pengacara hukum tidak boleh membiarkan kepentingan mereka sendiri bertentangan dengan atau menggantikan kepentingan klien mereka. Ini termasuk bahwa seorang pengacara tidak boleh memengaruhi klien secara tidak semestinya untuk keuntungannya sendiri. Demikian pula, ketika seorang pengacara menyadari adanya konflik antara kepentingan klien dan kepentingan pengacara itu sendiri, maka pengacara tersebut tidak boleh menerima instruksi atau terus bertindak untuk klien tersebut.

Hukum Perdata

Di Prancis, RIN Prancis membatasi kebebasan memilih pengacara dengan mempertimbangkan konflik kepentingan. RIN Prancis membedakan antara konflik kepentingan aktual dan potensial. Konflik kepentingan aktual terjadi:

- a. Terkait dengan nasihat hukum, ketika pengacara, yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada klien mereka, tidak dapat melakukannya tanpa mengorbankan kepentingan satu atau lebih pihak.
- b. Terkait dengan perwakilan dalam proses hukum, ketika perwakilan beberapa pihak akan menyebabkan pengacara mengajukan kasus yang berbeda, khususnya dalam perkembangan, argumen, dan tujuannya, dari kasus yang akan diajukan jika pengacara hanya mewakili satu pihak.

- c. Ketika perkembangan atau perubahan dalam kasus tersebut mengakibatkan salah satu kesulitan yang dijelaskan di atas.

Potensi konflik kepentingan terjadi ketika "perubahan atau perkembangan yang dapat diperkirakan" dalam kasus tersebut memberi pengacara alasan untuk memperkirakan bahwa salah satu kesulitan yang dijelaskan terkait dengan konflik kepentingan aktual dapat terwujud. RIN Prancis menjelaskan keadaan ketika konflik kepentingan tidak ada, atau dapat diabaikan. Tidak akan ada konflik kepentingan jika pengacara memberitahu klien tentang konflik kepentingan di antara mereka dan menerima kesepakatan yang mendamaikan konflik tersebut. Namun, jika pengacara gagal mendamaikan klien yang berkonflik, ia tidak boleh memberi nasihat atau bertindak atas nama salah satu dari mereka. Demikian pula, tidak akan ada konflik jika klien setuju bahwa pengacara akan memberi nasihat kepada mereka tentang strategi bersama, atau jika pengacara, yang merupakan anggota firma atau kelompok yang sama bertindak secara terpisah atas nama klien yang berbeda, yang mengetahui keanggotaan umum pengacara tersebut. Ada batasan tertentu pada kebebasan pengacara untuk bertindak. Misalnya, jika ada risiko pelanggaran rahasia profesi atau risiko independensi pengacara terganggu, pengacara harus berhenti bertindak untuk semua klien terkait, kecuali jika para pihak setuju. Demikian pula, pengacara tidak boleh menerima instruksi dari klien baru mana pun jika itu akan melanggar kewajiban kerahasiaannya terhadap mantan klien. RIN Prancis lebih lanjut menetapkan bahwa pengacara dapat bertindak untuk klien dalam masalah lain tanpa harus mengamankan persetujuan mereka jika masalah tersebut tidak terkait dengan konflik kepentingan dan keterlibatan pengacara di dalamnya tidak merugikan independensi pengacara dan tugas kerahasiaan profesional mereka.

Di Jerman, mewakili dua pihak dalam masalah yang sama merupakan tindak pidana, yang dapat dihukum dengan hukuman penjara tiga bulan hingga lima tahun. Undang-Undang Pengacara Federal melarang pengacara untuk mewakili kepentingan yang bertentangan. Aturan Praktik Profesional Jerman menetapkan bahwa pengacara harus menahan diri dari bertindak untuk pihak baru jika ia telah memberi nasihat atau mewakili pihak lain dalam masalah yang sama, jika ada konflik kepentingan atau jika ia telah ditangkap masalah tersebut dengan cara profesional lainnya. Larangan ini berlaku jika pengacara meninggalkan satu praktik bersama untuk bekerja di praktik bersama lainnya. Jika pengacara menyadari bahwa ada konflik kepentingan dalam proses representasi, ia harus segera memberi tahu kliennya dan berhenti bertindak untuk semua klien lain yang terlibat dalam masalah yang sama.

Konflik kepentingan dapat diabaikan jika klien telah secara tegas setuju, setelah mendapatkan informasi yang lengkap, untuk diwakili oleh pengacara dan jika hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan administrasi peradilan yang tepat. Aturan Praktik Profesional Jerman menetapkan bahwa dalam semua keadaan ketika menghadapi konflik kepentingan, pengacara harus menjaga tugas kerahasiaan.

Di Belanda, pengacara tidak boleh mewakili kepentingan lebih dari satu pihak jika kepentingan tersebut berbenturan atau jika ada kemungkinan nyata terjadinya benturan tersebut. Jika seorang pengacara mewakili kepentingan lebih dari satu pihak, ia pada

umumnya wajib menarik diri dari kasus tersebut segera setelah terjadi benturan yang tidak dapat segera diselesaikan. Aturan Perilaku Belanda menjelaskan bahwa mungkin ada keadaan khusus yang membenarkan aturan umum tersebut tidak diterapkan.

Aturan Perilaku Belanda menyatakan:

dari sudut pandang efisiensi, informasi, penghematan biaya, dll. Hal ini mewakili kepentingan lebih dari dua pihak pada umumnya tidak diinginkan, namun sangat mungkin terjadi benturan kepentingan antara kedua klien. Jadi, misalnya, mungkin ada ketidaksepakatan bahkan sebelum dimulainya proses mengenai pertanggungjawaban, meskipun merupakan kepentingan pihak tertanggung dan penanggung untuk tidak mengungkapkan hal ini secara terbuka hingga keputusan telah diambil atas klaim tersebut. Dalam beberapa keadaan, dapat juga dibayangkan bahwa seorang advokat terus bertindak untuk klien lama (pihak yang diasuransikan atau penanggung) terhadap pihak lain (pihak yang diasuransikan atau penanggung) ketika masalah secara bertahap muncul pada hal-hal seperti perlindungan asuransi atau penyelesaian.

Jika seorang advokat bertindak untuk salah satu dari dua pihak, sejak awal tidak boleh ada keraguan tentang kepentingan siapa yang diwakili oleh pengacara jika timbul konflik kepentingan. Pengacara tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang diterima dari salah satu pihak untuk melawan pihak lain. Ketika seorang pengacara mewakili kepentingan beberapa pihak dan memutuskan untuk menarik diri dari mewakili salah satu pihak tersebut, pengacara tidak boleh bertindak melawan klien yang ditinggalkannya. Aturan Perilaku Belanda menjelaskan bahwa aturan ini berlaku juga jika pengacara menarik diri karena alasan selain konflik kepentingan.

Aturan Perilaku Belanda mengatur bahwa pengacara tidak boleh bertindak melawan mantan klien atau klien seorang kolega dalam firma yang sama. Namun, dalam situasi ini konflik kepentingan dapat diabaikan jika:

- a. Masalah yang dipercayakan kepada pengacara terkait dengan masalah yang berbeda dalam kaitannya dengan representasi pengacara atau firma hukum terhadap klien saat ini atau sebelumnya.
- b. Kepentingan yang diamanahkan kepada advokat tersebut juga tidak terkait dengan masalah tersebut dan kecil kemungkinannya akan timbul hubungan tersebut.
- c. Advokat atau koleganya dalam firma hukum yang sama tidak memiliki informasi rahasia apa pun yang berasal dari klien lama atau klien lamanya, maupun informasi yang berkaitan dengan bisnis atau informasi lain yang berkaitan dengan pribadi atau bisnis klien lama atau klien lama, yang dapat dianggap penting dalam perkara terhadap klien lama atau klien lama.
- d. Tidak ada keberatan yang wajar yang diajukan oleh klien lama atau klien lama atau pihak yang meminta pengacara untuk mewakili kepentingan mereka.

Jika kondisi ini tidak terpenuhi, seorang pengacara dapat menyelesaikan konflik dengan memperoleh persetujuan yang diinformasikan dari semua pihak yang terpengaruh. Aturan Perilaku Belanda mencatat bahwa seorang pengacara tidak dilarang bertindak melawan klien

untuk memulihkan pembayaran atas tagihannya yang belum dibayar. Lebih lanjut dicatat bahwa alasan untuk ketentuan konflik kepentingan adalah bahwa "seorang klien harus memiliki keyakinan penuh bahwa informasi tentang kasus, dirinya sendiri atau bisnisnya yang ia berikan kepada advokat atau koleganya di dalam firma tidak akan digunakan untuk melawannya di masa mendatang". Berdasarkan Aturan Perilaku Belanda, seorang pengacara yang menghadapi konflik kepentingan mungkin ingin meminta nasihat dari Dekan. Keputusan apakah akan tetap menangani kasus atau menarik diri karena konflik kepentingan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pengacara itu sendiri, daripada bergantung pada keinginan klien.

Aturan Perilaku Belanda melarang "pembuatan dalam satu firma yang sama pemisahan administratif buatan atas representasi kepentingan dan berkas-berkas yang relevan yang dikenal sebagai "tembok Cina" sebagai cara untuk menghindari konflik kepentingan".

Di Belgia, seperti di Belanda, Kode Etik Flemish memiliki ketentuan serupa yang secara umum melarang bertindak untuk beberapa klien dengan konflik kepentingan. Namun, tidak seperti Aturan Perilaku Belanda, Kode Etik Flemish mengizinkan seorang pengacara untuk bertindak untuk beberapa klien dengan konflik kepentingan jika klien-klien tersebut juga memiliki kepentingan yang sama dan mendekati pengacara tersebut untuk membela kepentingan bersama tersebut. Representasi ganda atau jamak dari klien dimungkinkan jika klien-klien tersebut setuju secara tertulis dan pengacara tersebut mampu melindungi semua kepentingan klien tanpa melanggar hak istimewa dan independensi profesionalnya. Kode Etik Flemish menetapkan bahwa pengacara harus menahan diri dari bertindak dalam segala hal jika keterlibatannya akan menyiratkan pelanggaran terhadap tugas kerahasiaan atau independensinya.

Berdasarkan Kode Etik OBF, seorang pengacara memiliki tugas untuk mencegah konflik kepentingan. Peraturan Etika Brussels menetapkan bahwa seorang pengacara "tidak boleh membela kepentingan kerabat dekat, atau kolega yang menjadi mitra, kolaborator, atau tutornya atau yang bekerja sama dengannya dalam profesi tersebut". Dilarang pula mewakili pihak jika seorang pengacara telah mewakili pihak lawan dalam kasus yang sama". Larangan yang sama berlaku untuk kasus-kasus yang sebelumnya melibatkan pengacara atau yang diketahuinya dapat menguntungkan klien baru, kecuali ada keadaan luar biasa yang disetujui oleh batonier.

10.3 ATURAN MODEL ABA TENTANG KONFLIK KEPENTINGAN

Di AS, Aturan Model ABA memuat ketentuan-ketentuan terperinci yang membahas berbagai jenis konflik kepentingan. Menurut Aturan Model ABA, konflik kepentingan dibagi menjadi empat kategori:

- (i) Konflik antara klien saat ini.
- (ii) Konflik antara klien saat ini dan mantan klien.
- (iii) Konflik akibat kewajiban pengacara kepada pihak ketiga.

(iv) Konflik antara pengacara dan klien.

Berdasarkan Aturan Model ABA 1.7, konflik kepentingan terjadi ketika representasi dari satu klien akan secara langsung merugikan klien lain, atau ketika ada risiko signifikan bahwa representasi akan secara material dibatasi oleh kepentingan pengacara itu sendiri atau tanggung jawab pengacara kepada klien lain, mantan klien, atau pihak ketiga. Konflik kepentingan di antara klien saat ini dapat muncul dalam situasi seperti mewakili dua pihak atau lebih dalam litigasi perdata, mewakili terdakwa bersama dalam kasus pidana, atau pihak-pihak dalam transaksi bisnis yang sama.

Dalam situasi ini, pengacara dapat menerima representasi meskipun ada konflik jika:

- (I) Pengacara tersebut secara wajar yakin dapat memberikan representasi yang kompeten dan tekun kepada setiap klien.
- (II) Representasi tersebut tidak melanggar hukum.
- (III) Representasi tersebut tidak melibatkan penegasan klaim oleh satu klien terhadap klien lainnya.
- (IV) Setiap klien yang terpengaruh memberikan persetujuan tertulis.

Sehubungan dengan mantan klien, pengacara tidak boleh mewakili klien yang kepentingannya secara material berlawanan dengan kepentingan mantan klien dalam masalah yang sama atau sebagian besar terkait dengan masalah di mana pengacara mewakili mantan klien, kecuali mantan klien memberikan persetujuan tertulis, yang dikonfirmasi secara tertulis. Aturan yang sama berlaku untuk klien dari firma pengacara sebelumnya. Seorang pengacara yang firma hukumnya sebelumnya mewakili klien dalam suatu perkara dan yang memperoleh informasi rahasia atau informasi yang berkaitan dengan representasi tersebut, tidak boleh mewakili orang lain, jika kepentingan orang tersebut secara material merugikan kepentingan mantan klien. Berdasarkan Aturan Model ABA, pengacara memiliki kewajiban untuk menjaga informasi rahasia setelah representasi berakhir.³⁶⁵ Seorang pengacara tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk merugikan mantan klien, kecuali pengacara tersebut menerima persetujuan tertulis yang diinformasikan.

Untuk menghindari konflik yang melibatkan kepentingan pihak ketiga, pengacara tidak boleh menerima kompensasi dari pihak ketiga karena mewakili klien, kecuali: (I) klien memberikan persetujuan yang diinformasikan, (II) pihak ketiga tidak mengganggu hubungan pengacara-klien, dan (III) pengaturan tersebut tidak membahayakan tugas kerahasiaan pengacara.

Mengenai kepentingan pengacara itu sendiri, Aturan Model ABA menjelaskan tiga skenario umum ketika kepentingan pribadi pengacara bertentangan dengan kepentingan klien:

- a. Pengacara melakukan transaksi bisnis atau keuangan dengan klien.
- b. Kepentingan pribadi pengacara dapat memengaruhi representasi klien, seperti hubungan dengan pihak lawan atau ketika orang-orang yang terkait (pasangan hidup, saudara kandung, dll.) mewakili pihak lawan.

- c. Pengacara menyusun instrumen, misalnya, surat wasiat, di mana klien yang tidak terkait dengan pengacara memberikan hadiah kepada pengacara atau kerabat dekatnya.

Dalam beberapa situasi, konflik kepentingan dapat diabaikan dengan persetujuan klien yang diinformasikan. Persetujuan yang diinformasikan adalah "persetujuan oleh seseorang terhadap tindakan yang diusulkan setelah pengacara telah mengomunikasikan informasi dan penjelasan yang memadai tentang risiko material dan alternatif yang tersedia secara wajar terhadap tindakan yang diusulkan". Hal ini mengharuskan klien untuk tidak hanya menyadari semua keadaan yang relevan, tetapi juga bagaimana konflik tersebut berdampak buruk pada kepentingannya, dan alternatif yang tersedia.

Di Inggris, Buku Pegangan BSB menyatakan bahwa pengacara tidak boleh menerima instruksi dari klien dalam masalah tertentu jika:

- a. Terdapat konflik kepentingan antara kepentingan pribadi pengacara dan kepentingan calon klien sehubungan dengan masalah tertentu.
- b. Terdapat konflik kepentingan antara calon klien dan satu atau lebih klien lama atau lama pengacara sehubungan dengan masalah tertentu kecuali semua klien yang berkepentingan dalam masalah tertentu memberikan persetujuan yang diinformasikan kepada pengacara yang bertindak dalam keadaan tersebut.

Serupa dengan Aturan Model ABA, Buku Pegangan BSB menetapkan bahwa pengacara memiliki tugas kerahasiaan yang berkelanjutan. Seorang pengacara tidak boleh menerima perwakilan jika ada risiko nyata bahwa tugas untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi yang diperoleh dari klien lama atau lama lainnya, atau orang lain, akan mencegah pengacara untuk bertindak demi kepentingan terbaik calon klien. Juga serupa dengan Aturan Model ABA, seorang pengacara dapat menerima perwakilan jika orang yang kepadanya pengacara berutang tugas kerahasiaan memberikan persetujuan yang diinformasikan untuk pengungkapan informasi rahasia tersebut.

Untuk menerima persetujuan yang diinformasikan, seorang pengacara harus sepenuhnya mengungkapkan kepada klien yang relevan dan calon klien sejauh mana dan sifat konflik tersebut dan harus dapat bertindak secara independen dan demi kepentingan terbaik setiap klien.

10.4 PANDUAN KODE MBA TENTANG KONFLIK KEPENTINGAN

Kode MBA tidak menggunakan istilah "konflik kepentingan" dan tidak ada bagian terpisah dari Kode yang mendefinisikan atau mengatur konflik kepentingan. Namun, beberapa ketentuan Undang-Undang Pengacara dan Kode MBA menawarkan panduan dasar tentang cara menghindari konflik kepentingan.

Undang-Undang Pengacara memuat ketentuan yang mengatur representasi bersamaan dan berturut-turut. Pasal 17 Undang-Undang Pengacara menyatakan bahwa pengacara tidak dapat memberikan bantuan hukum pada masalah tertentu ketika pengacara atau kolega pengacara dari firma hukum yang sama telah memberikan bantuan hukum kepada

pihak lawan dalam perselisihan dalam masalah yang sama, atau ketika pengacara telah menangani kasus tersebut dalam kapasitas profesional lain (misalnya, sebagai hakim, jaksa penuntut atau sebagai pejabat administrasi publik). Menurut Pasal 17(4), ketika seorang pengacara menyiapkan kontrak bipartit atau masalah hukum lainnya, jika terjadi perselisihan, pengacara tersebut tidak boleh mewakili salah satu pihak. Demikian pula, Pasal 4 dari Kode MBA mengharuskan seorang pengacara untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, terlepas dari siapa yang membayar imbalan, dan dalam kasus perselisihan, pengacara tidak boleh mewakili salah satu pihak.

Kode MBA menyatakan kembali larangan ini. Berdasarkan Pasal 3, pengacara tidak diperbolehkan untuk “melaksanakan fungsi publik atau mewakili penggugat dan tergugat bersama jika kepentingan bersama saling bertentangan.” Pasal 3 selanjutnya menetapkan bahwa jika konflik muncul selama perwakilan, pengacara “wajib mencabut perwakilan atau pembelaan untuk salah satu pihak.”

Pasal 6 menetapkan bahwa pengacara tidak boleh menerima “tawaran perwakilan dari pihak lawan” dan melarang melakukan “kegiatan lain apa pun yang terkait dengan kasus tersebut tetapi bertentangan dengan kepentingan klien selama kasus tersebut berlangsung.” Berdasarkan Pasal 7, pengacara harus “mempelajari secara sadar setiap kasus yang dilakukan dan bertindak sesuai dengan itu”. Agaknya, ini berarti bahwa, tidak seperti beberapa hukum perdata yang dibahas dalam Bagian ini, Kode MBA mengharuskan pengacara untuk bersikap proaktif dan tekun dalam menghindari konflik kepentingan. Pengacara tidak boleh membatasi dirinya dengan informasi yang diberikan oleh klien, tetapi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memeriksa kasus dan kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Kesimpulan

Pengertian konflik kepentingan berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Secara umum, konflik kepentingan terjadi ketika representasi klien oleh pengacara dibatasi oleh kewajibannya kepada pihak ketiga, atau oleh kepentingan pribadi pengacara. Perbedaan utama dalam menyelesaikan konflik kepentingan dalam yurisdiksi hukum perdata dan hukum umum adalah apakah klien dapat mengesampingkan konflik tersebut, dan apakah hambatan informasi (seperti "tembok Cina" yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Belanda) diizinkan.

Seorang pengacara harus mempertimbangkan perbedaan yang ada dalam aturan nasional, terutama dalam praktik lintas batas. Meskipun CCBE menetapkan prinsip-prinsip tertentu untuk menentukan aturan mana yang berlaku dalam praktik lintas batas, selalu ada risiko aturan yang saling bertentangan antara yurisdiksi ketika menyangkut masalah yang lebih bernuansa jenis masalah yang bahkan praktik dan pengalaman tidak dapat dengan mudah diselesaikan dengan pasti. Itulah sebabnya sangat penting bagi seorang pengacara untuk mengetahui aturan yang berlaku dan memeriksa apakah ia mematuhi aturan tersebut di setiap yurisdiksi tempat ia memberikan layanan hukum.

Meskipun tidak ada bagian terpisah dalam Kode MBA yang membahas tentang konflik kepentingan seperti dalam kode yang dibahas di atas, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pengacara dan Kode MBA memberikan panduan minimum tentang cara

menyelesaikan konflik kepentingan. Pasal 17 Undang-Undang Pengacara dan Aturan 4 Kode MBA melarang pengacara untuk mewakili kepentingan yang secara langsung berlawanan dan menetapkan bahwa jika konflik tersebut muncul dari perjanjian yang disusun oleh pengacara untuk beberapa pihak, pengacara tersebut tidak boleh mewakili salah satu pihak.

Aturan 3 memastikan bahwa pengacara tidak melakukan representasi untuk penggugat atau tergugat bersama jika kepentingan mereka saling bertentangan, dan jika konflik tersebut muncul selama representasi, seorang pengacara harus menarik diri dari mewakili salah satu klien. Namun, muncul pertanyaan apakah seorang pengacara dapat melakukannya secara praktis tanpa melanggar tugasnya untuk menjaga kerahasiaan profesional. Jika konflik kepentingan muncul di tengah-tengah representasi dan pengacara memutuskan untuk menarik diri dari mewakili salah satu tergugat bersama saja, informasi yang ia pelajari dari mantan kliennya bermanfaat bagi klien yang tersisa. Dengan demikian, terus bertindak untuk salah satu klien akan melanggar kewajiban pengacara untuk menjaga kerahasiaan profesional dan tidak menggunakannya untuk kepentingan kasusnya.

Tidak seperti kode lain yang dibahas dalam Bagian ini, Aturan 7 dari Kode Etik MBA mewajibkan pengacara untuk mengambil tindakan yang wajar untuk memeriksa kasus dan kemungkinan adanya konflik kepentingan, dan bertindak sesuai dengan itu.

BAB 11

PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN

11.1 KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN

Untuk mempertahankan kompetensi, seorang pengacara harus selalu mengikuti perkembangan hukum dan terus meningkatkan keterampilan hukumnya, yang berarti bahwa ia harus melakukan semua upaya yang diperlukan untuk meningkatkan dan unggul. Pendidikan Hukum Berkelanjutan (CLE) pelatihan yang terus diterima pengacara setelah mereka lulus sangat penting. Banyak asosiasi pengacara nasional yang mewajibkannya, termasuk MBA. CLE memastikan bahwa pengacara mengetahui perubahan dalam hukum dan prosedur serta cara berperilaku etis dalam kode etik. CLE membekali pengacara dengan keterampilan dan pengalaman praktis yang diperlukan untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum yang efektif kepada klien mereka.

11.2 PENTINGNYA PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Piagam CCBE mencatat bahwa baru-baru ini, pelatihan pascakualifikasi (pengembangan profesional berkelanjutan) semakin ditekankan sebagai respons terhadap laju perubahan yang cepat dalam hukum dan praktik serta dalam lingkungan teknologi dan ekonomi. Banyak aturan profesional nasional menekankan bahwa seorang pengacara tidak boleh menangani kasus yang tidak kompeten untuk ditanganinya. Jelaslah bahwa pengacara tidak dapat membantu dan memberi nasihat kepada klien secara efektif tanpa pendidikan dan pelatihan yang sesuai.

Kode CCBE juga mewajibkan untuk mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Kode CCBE mencatat bahwa pengacara harus “memperhatikan dengan benar dimensi Eropa dari profesi mereka. Komentar CCBE tentang Piagam menjelaskan bahwa pengacara “harus menyadari dampak hukum Eropa yang semakin besar pada bidang praktik mereka.

Prinsip-prinsip IBA tidak menyebutkan CLE. Namun, kompetensi pengacara merupakan salah satu Prinsip-prinsip IBA. Menurut Prinsip-prinsip IBA, pekerjaan pengacara harus dilakukan dengan cara yang kompeten dan tepat waktu dan pengacara tidak boleh mengambil pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya dengan cara tersebut. Prinsip-prinsip IBA menyatakan bahwa pengacara dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam praktik hukum.

Dengan demikian, klien berasumsi bahwa pengacara memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menangani masalah klien secara memadai. Menurut IBA, kompetensi melibatkan lebih dari sekadar pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum. Artinya, pengacara memiliki pengetahuan yang memadai tentang praktik dan prosedur, serta mengetahui strategi manajemen klien, berkas, dan praktik yang efektif.

11.3 KEWAJIBAN PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN

CLE bersifat wajib di sebagian besar negara Eropa. Seringkali dasar untuk pendidikan hukum berkelanjutan yang wajib tercantum dalam dokumen selain kode etik atau tata tertib. Di Prancis, RIN Prancis mengatur kewajiban kompetensi pengacara. Untuk memenuhi kewajiban ini, pengacara harus mengikuti pelatihan khusus dalam hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas mereka. Pelatihan hukum berkelanjutan yang wajib dan modalitasnya ditetapkan dalam Keputusan 21 Desember 2004 tentang pendidikan profesional bagi pengacara.

Di Jerman, pelatihan profesional diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pengacara Federal. Undang-Undang Pengacara Federal menetapkan kewajiban hukum umum untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan, meskipun tidak ada ketentuan mengenai jenis dan ruang lingkup pelatihan yang diwajibkan. Aturan Praktik Profesional Jerman mewajibkan pengacara untuk melatih peserta pelatihan mereka. Berdasarkan Aturan 28, pengacara harus memastikan bahwa aktivitas peserta pelatihan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Di Belanda, selama pengacara terdaftar di Bar, ia wajib untuk unggul dalam keterampilan profesional. Pengacara Belanda dikenakan sanksi jika mereka mengabaikan kewajiban ini. Pelatihan berkelanjutan yang wajib diatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tetap dari Asosiasi Pengacara Belanda.

Di Belgia, pengacara juga wajib menjalani pelatihan profesional. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi wewenang kepada Dewan Advokat Flemish untuk mengadopsi peraturan tentang CLE. Seperti di Jerman, pengacara pengawas harus memastikan bahwa pengacara magang menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan etika dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan praktis.

Hukum umum

Di AS, berdasarkan Aturan Model ABA 1.1, dalam mewakili klien, seorang pengacara harus bertindak secara kompeten dan memiliki pengetahuan, keterampilan, ketelitian, dan persiapan hukum. Aturan Model ABA menetapkan bahwa dalam menentukan apakah seorang pengacara memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani suatu masalah, pengacara harus mempertimbangkan:

- a. Kompleksitas dan sifat khusus masalah tersebut.
- b. Pengalaman umum pengacara dan pelatihan serta pengalamannya di bidang khusus yang dimaksud.
- c. Jumlah persiapan dan pembelajaran yang akan diberikan pengacara untuk masalah tersebut.
- d. Apakah mungkin untuk merujuk suatu masalah ke pengacara kompeten lainnya.

Ketelitian dan persiapan dalam representasi berarti bahwa pengacara menyelidiki dan menganalisis fakta dan hukum untuk mempersiapkan masalah secara memadai. Berdasarkan Aturan Model ABA, pengacara juga harus mengikuti perubahan dalam hukum dan praktik serta mematuhi persyaratan pendidikan hukum berkelanjutan yang berlaku.

Di Inggris, “memberikan standar kerja dan layanan yang kompeten kepada setiap

klien” merupakan salah satu tugas inti berdasarkan Buku Pegangan BSB, yang memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan. Buku Pegangan BSB menunjukkan bahwa hanya mematuhi persyaratan Pengembangan Profesional Berkelanjutan minimum mungkin tidak cukup. Seorang pengacara juga harus memastikan bahwa ia mematuhi persyaratan pelatihan khusus dari Dewan Standar Pengacara sebelum melakukan kegiatan tertentu misalnya anda pengacara tidak boleh mendatangi kantor polisi untuk memberi tahu tersangka atau orang yang diwawancarai mengenai penanganan dan pelaksanaan wawancara polisi kecuali Anda telah mematuhi persyaratan pelatihan yang mungkin diberlakukan oleh Dewan Standar Pengacara sehubungan dengan pekerjaan tersebut. Demikian pula, seorang pengacara tidak boleh melakukan pekerjaan akses publik tanpa berhasil menyelesaikan pelatihan yang disyaratkan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Pengacara

Perundang-undangan Nasional

Pasal 15(3) Undang-Undang Pengacara menetapkan bahwa pengacara memiliki kewajiban untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan selama masa mandat profesionalnya melalui seminar pelatihan, lokakarya, dll. Aturan 24 Kode MBA menetapkan bahwa pengacara harus meningkatkan pengetahuan profesional dan umum dengan:

- a. Mengikuti pencapaian dan acara budaya, ilmiah, dan politik.
- b. Berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan organisasi profesi dan pakar, majalah, dan dalam kegiatan sosialnya.

Berbeda dengan kode-kode lainnya, Aturan 24 dari Kode MBA menetapkan bahwa pengacara harus berbagi pengetahuan tanpa pamrih. Aturan 25 mengharuskan pengacara untuk mengembangkan kemampuan intelektual, kegiatan profesional dan publik dalam kerangka profesi advokasi.

Aturan 26 menambahkan bahwa melalui peningkatan profesional berkelanjutan dan peningkatan martabat pribadi dan moral, seorang pengacara memenuhi kewajiban profesional dan memenuhi syarat untuk kinerja yang sukses dari fungsi tradisional untuk membela kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia, kemanusiaan, dan martabat manusia. Pengacara juga memiliki kewajiban untuk melatih peserta pelatihan. Berdasarkan Aturan 28, pengacara harus memberikan perhatian khusus untuk bekerja dengan peserta pelatihan pengacara dan untuk menjaga peningkatan dan pengembangan profesional mereka yang sukses. Pengacara memiliki tugas khusus terkait dengan pelatihan etika peserta pelatihan. Berdasarkan Aturan 30, pengacara berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus dalam menyajikan kepada peserta pelatihan prinsip-prinsip etika pengacara, yang tanpanya praktik profesional, maupun pengetahuan tidak akan memiliki nilai yang sesuai.

Kesimpulan

CLE memastikan bahwa sepanjang karier mereka, pengacara mengikuti perkembangan hukum dan yurisprudensi, menjaga etika profesi, dan meningkatkan standar praktik hukum. Hal ini penting bagi kemampuan pengacara untuk menangani secara kompeten semua masalah yang dilakukan atas nama klien, yang merupakan faktor utama dalam hubungan pengacara-klien.

Dalam konteks nasional, CLE bersifat wajib, mirip dengan negara-negara yang dibahas di atas. Tidak seperti kode lainnya, Kode MBA mengharuskan pendidikan berkelanjutan melampaui sekadar hukum. Berdasarkan Aturan 24, pengacara harus meningkatkan pengetahuan profesional dan umum. Selain itu, berbeda dengan kode yang dibahas dalam Bagian ini, Kode MBA secara eksplisit menyatakan tentang tugas etis untuk menyampaikan pengetahuan pengacara tanpa pamrih kepada pengacara lain, terutama kepada rekanan dan peserta pelatihan.

BAB 12

ETIKA DAN PERATURAN PERIKLANAN PENGACARA

12.1 PERIKLANAN PENGACARA: KETENTUAN DAN PEMBATAAN

Larangan dan pembatasan terkait periklanan bersifat khusus untuk setiap yurisdiksi. Secara umum, pengacara diizinkan untuk beriklan, dengan ketentuan yang berbeda-beda. Ketentuan Kode CCBE tentang periklanan menetapkan bahwa pengacara berhak untuk memberi tahu publik tentang layanan mereka. Informasi ini harus akurat dan tidak menyesatkan, dan tidak boleh melanggar tugas kerahasiaan.

Hal yang sama berlaku untuk publisitas pribadi oleh pengacara dalam bentuk media apa pun seperti pers, radio, televisi, dan komunikasi komersial elektronik. Nota Penjelasan Kode tersebut menetapkan bahwa istilah publisitas pribadi mencakup publisitas oleh firma pengacara, serta pengacara perorangan, yang berbeda dengan publisitas perusahaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara dan Hukum untuk seluruh anggotanya. Lebih lanjut, disebutkan bahwa aturan yang mengatur periklanan sangat bervariasi di antara negara bagian. Berdasarkan Kode CCBE, tidak ada keberatan yang lebih besar terhadap publisitas pribadi dalam praktik lintas batas. Namun demikian, para pengacara harus mematuhi pembatasan dan larangan yang ditetapkan dalam aturan profesi domestik mereka, serta pembatasan yang ditetapkan oleh aturan negara tuan rumah tempat mereka berpraktik.

Di Prancis, publisitas pribadi diizinkan sejauh menyediakan informasi yang diperlukan kepada publik. Publisitas pribadi harus benar, menghormati kerahasiaan profesional dan harus dilakukan dengan bermartabat dan berselera. RIN Prancis melarang tindakan menjajaki atau meminta pendapat. Menjajaki adalah tindakan menawarkan layanan dengan mengunjungi secara pribadi atau mengirim perwakilan ke tempat tinggal seseorang, atau ke tempat kerja atau tempat umum mana pun. Menjajaki adalah tawaran pribadi untuk melakukan layanan tanpa diundang untuk melakukannya.

RIN Prancis melarang pernyataan pujian atau perbandingan dan pernyataan apa pun yang berkaitan dengan identitas klien. Sarana publisitas yang diizinkan menurut RIN mencakup kolokium, seminar, pelatihan, dan kursus profesional. Pengacara juga diizinkan mencantumkan alamat, nama pengacara, dan Asosiasi Pengacara tempat pengacara tersebut bergabung, serta penghargaan profesional, gelar universitas, dan bidang praktik yang diperoleh secara sah.

Aturan serupa berlaku di Jerman. Aturan Praktik Profesional Jerman melarang publisitas terkait tingkat keberhasilan atau perputaran. Referensi ke kasus dan klien hanya dapat dilakukan jika klien terkait telah secara tegas memberikan persetujuannya. Di Jerman, iklan di surat kabar, serta penggunaan surat informasi dan brosur pada umumnya diizinkan. Pengacara diizinkan memberikan informasi pribadi dan informasi tentang layanan mereka asalkan informasi yang diberikan bersifat objektif dan berkaitan dengan kegiatan profesional

mereka.

Di Belanda, Aturan Perilaku Belanda tidak memuat aturan apa pun yang mengatur iklan. Peraturan khusus tentang Publisitas mengatur iklan. Publisitas komparatif, dengan menyebutkan nama pengacara lain, tidak diperbolehkan. Secara umum, pengacara diperbolehkan untuk bekerja sama dalam pembuatan iklan yang memiliki tujuan yang jelas untuk menarik perhatian secara komersial untuk menjalankan profesinya, meskipun ada batasan tertentu. Tidak diperbolehkan untuk menyebutkan nama klien dalam iklan pengacara. Peraturan tentang Publisitas menetapkan bahwa dalam iklan, harga untuk layanan hukum harus dinyatakan dengan jelas dan tidak ambigu. Tidak diperbolehkan untuk beriklan dengan hanya menyebutkan harga minimum.

Di Belgia, berdasarkan Kode Etik Flemish, pengacara tidak diperbolehkan untuk melakukan iklan yang menyesatkan. Seorang pengacara tidak boleh dengan sengaja dan tanpa undangan mencoba untuk mendapatkan klien dari pengacara lain melalui iklan. Dilarang juga mengiklankan berbagai layanan yang dipersonalisasi untuk kasus atau berkas tertentu tanpa diundang untuk melakukannya.

Menurut Kode Etik Flemish, pengacara tidak boleh mengiklankan keahlian khusus mereka dalam satu atau lebih bidang hukum kecuali ada dasar pengetahuan dan pengalaman yang meyakinkan di bidang tersebut. Selain itu, pengacara tidak boleh mengiklankan hasil apa pun yang dicapai atau jumlah kasus yang ditangani atau tingkat keberhasilan. Pengacara dapat memberikan informasi tersebut jika diminta atau jika diharapkan dalam studi perbandingan atau prosedur pemberian penghargaan. Pengacara diizinkan untuk mengiklankan kasus yang ditangani dan identitas klien atas persetujuan mereka.

Kode Etik OBFG membedakan antara:

- a. Iklan fungsional: komunikasi publik apa pun untuk tujuan mempromosikan profesi hukum
- b. Iklan pribadi (atau publisitas pribadi): komunikasi publik apa pun untuk tujuan mempromosikan penulis dan memberikan informasi tentang sifat dan kualitas praktik profesional
- c. Soliciting: segala bentuk komunikasi informasi untuk tujuan mencari klien baru, termasuk kontak pribadi antara pengacara dan calon klien untuk menawarkan layanan profesional.

Iklan fungsional hanya dilakukan oleh otoritas terkait. Pengacara wajib melakukan iklan pribadi dengan kesetiaan, martabat, kebijaksanaan, kejujuran dan rasa hormat terhadap rahasia profesional dan independensi pengacara. Pengacara harus memberikan hanya informasi objektif yang dapat diverifikasi oleh OBFG atau bâtonnier. Iklan komparatif dilarang. Berdasarkan Kode Etik OBFG, tidak diperbolehkan untuk mengidentifikasi klien dan mendasarkan iklan pribadi pada informasi tentang tarif dan janji tentang hasil representasi. Soliciting hanya diperbolehkan ketika pengacara secara pribadi menghubungi klien yang sudah ada, mantan klien atau seseorang yang terkait, dan dapat secara wajar mengharapkan bahwa orang tersebut mengharapkan tawaran layanan. Tidak diperbolehkan untuk menghubungi

klien potensial kecuali klien tersebut mengundang atau memberi wewenang untuk melakukannya. Dalam meminta bantuan, pengacara harus menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin akan mendistorsi atau memengaruhi kemampuan klien untuk membuat pilihan bebas.

12.2 PERATURAN PERIKLANAN UNTUK PENGACARA DI AS DAN INGGRIS

Di AS, berdasarkan Aturan Model ABA 7.1, seorang pengacara dapat dikenai sanksi atas pernyataan apa pun tentang pengacara atau layanannya yang salah atau menyesatkan. Secara umum, suatu pernyataan dianggap salah atau menyesatkan jika menghilangkan informasi material, menciptakan harapan yang tidak realistis, atau membuat perbandingan yang tidak berdasar. Aturan Model mengizinkan nama dagang firma hukum, selama tidak menyesatkan. Pengacara tidak diperbolehkan membayar orang untuk rekomendasi.

Di AS, sebelum menyebutkan contoh klien dalam sebuah iklan, seorang pengacara harus mendapatkan persetujuan klien. Berdasarkan Peraturan 7.3, seorang pengacara tidak boleh mencari pekerjaan berbayar dengan memulai kontak telepon pribadi atau langsung, atau kontak elektronik waktu nyata. Namun, pengacara tidak dilarang mengirim surat yang jujur dan tidak menipu kepada orang yang diketahui menghadapi masalah hukum tertentu.

Di Inggris, pengacara dapat terlibat dalam periklanan dan promosi praktik mereka. Iklan harus akurat dan tidak menyesatkan, sehingga tidak mengurangi kepercayaan pada profesi hukum. Iklan tidak boleh didasarkan pada perbandingan langsung atau kritik langsung terhadap pengacara lain. Pengacara juga diizinkan untuk memberikan informasi mengenai tarif pengacara dan sifat layanan hukum, serta informasi tentang kasus tertentu jika klien menyetujuinya.

Perundang-undangan Nasional

Kode MBA melarang pengacara membuat iklan yang menyesatkan dan tidak akurat. Berdasarkan Peraturan 25, pengacara tidak diperbolehkan untuk menggunakan kegiatan pribadi mereka yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dari kode tersebut, dan khususnya untuk menunjukkan profesi advokasinya, atau dengan cara lain untuk mengiklankannya.

Kode MBA membatasi penggunaan nama firma hukum untuk iklan. Berdasarkan Peraturan 32, firma kantor pengacara harus terlihat pada gedung tempat kantor tersebut berada, tetapi baik bentuk maupun isinya tidak boleh digunakan untuk iklan. Berdasarkan Pasal 13 Buku Aturan Tanggung Jawab Disiplin iklan tidak dilarang jika data umum pengacara dipublikasikan di situs WEB Internet dan surat kabar publik (media) seperti: nama, alamat, telepon, bidang pekerjaan, tanpa merilis biaya dan layanan, serta kualitas pribadi dan profesional.

Regulasi Periklanan untuk Pengacara di Indonesia

Di Indonesia, periklanan bagi pengacara diatur oleh kode etik profesi hukum yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Pengacara diperbolehkan mempromosikan layanan mereka, tetapi iklan harus memenuhi beberapa syarat, seperti kebenaran dan akurasi

informasi yang disampaikan, serta tidak menyingkap informasi klien tanpa izin. Iklan tidak boleh menyesatkan atau membandingkan tingkat keberhasilan antar pengacara, dan dapat dilakukan melalui berbagai media seperti cetak, elektronik, serta situs web dan media sosial. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi, termasuk pencabutan izin praktik atau tindakan disiplin dari organisasi profesi. Oleh karena itu, penting bagi pengacara untuk mematuhi kode etik dan regulasi yang berlaku agar menjaga reputasi profesi hukum dan melindungi kepentingan klien.

Selain itu, pengacara di Indonesia juga dilarang melakukan *soliciting* atau menghubungi calon klien secara langsung dengan cara yang tidak etis, seperti mengunjungi rumah atau tempat kerja mereka tanpa undangan. Pengacara harus menghormati privasi dan kebebasan calon klien dalam memilih penasihat hukum. Kode etik menekankan bahwa semua bentuk publikasi harus dilakukan dengan cara yang menjaga martabat profesi hukum. Ini termasuk larangan menggunakan teknik promosi yang berlebihan atau sensasional yang dapat merendahkan citra profesi.

Dalam konteks hukum yang lebih luas, pengacara juga diharapkan untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tetap kompeten dan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada klien. Kesadaran akan perkembangan hukum dan praktik terbaru juga akan membantu pengacara dalam menyusun strategi iklan yang tidak hanya menarik tetapi juga sesuai dengan etika profesi. Dengan mematuhi semua ketentuan ini, pengacara dapat mempromosikan praktik mereka secara efektif tanpa mengorbankan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Kesimpulan

Peraturan periklanan berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Seseorang harus menyadari larangan dan pembatasan, khususnya, ketika terlibat dalam praktik lintas batas. Seperti yang terlihat dalam peraturan nasional yang dibahas di atas, iklan yang menyesatkan tidak diperbolehkan dan pengacara yang membuat iklan tersebut akan dikenakan sanksi. Demikian pula, Kode MBA secara tegas melarang representasi yang menyesatkan dan salah dalam iklan. Berdasarkan Peraturan 25, pengacara tidak diperbolehkan menggunakan kegiatan apa pun, yang bertentangan dengan Kode MBA, untuk membedakan profesi pengacara atau mengiklankannya dengan cara apa pun. Mirip dengan negara-negara yang dibahas di atas, dalam praktik nasional, periklanan memungkinkan penyediaan nama, alamat, kontak, spesialisasi, serta kualitas pribadi dan profesional.

BAB 13

SISTEM DISIPLIN DAN ETIKA PENGACARA

13.1 PENDAHULUAN

Tindakan pelanggaran dan prinsip etika serta tugas dapat memicu tindakan disiplin. Menurut Pembukaan Kode Etik MBA, menghindari aturan dan prinsip Kode Etik merupakan pelanggaran disiplin.

Kemandirian dan ketidakberpihakan merupakan ciri utama dari setiap sistem disiplin. Menurut Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara, berbagai pendekatan dapat dilakukan proses disiplin terhadap pengacara harus diajukan ke komite disiplin yang tidak memihak yang dibentuk oleh profesi hukum, ke otoritas hukum yang independen, atau ke pengadilan. Seperti yang terlihat dari berbagai sistem disiplin yang dijelaskan di bawah ini, dan sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara, proses disiplin harus selalu tunduk pada tinjauan yudisial yang independen.

Umumnya, di negara-negara hukum perdata Eropa, asosiasi pengacara lokal bertugas menyelidiki pelanggaran yang dilakukan pengacara, sedangkan dalam sistem hukum umum, tugas ini diawasi oleh pengadilan.

13.2 PROSES DISIPLINER DAN TANGGUNG JAWAB PENGACARA

Kode Etik CCBE menyatakan bahwa kegagalan seorang pengacara untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Kode dapat mengakibatkan tindakan disipliner. Proses disipliner diserahkan kepada otoritas yang berwenang, yang bertanggung jawab atas administrasi disiplin pengacara. CCBE memiliki Kelompok Kerja tentang masalah disipliner yang menyusun Ringkasan Proses Disiplin dan Titik Kontak di Negara Anggota UE dan EEA, yang memberikan informasi singkat tentang badan disipliner, proses, sanksi, penegakan, dan komunikasi di sejumlah negara Eropa.

Pembukaan Prinsip IBA menunjukkan bahwa Prinsip IBA tidak boleh digunakan sebagai kriteria untuk mengenakan tanggung jawab, sanksi, atau tindakan disipliner dalam bentuk apa pun. Komentar IBA terhadap Prinsip 1 menyatakan bahwa disiplin profesional, dan pengawasan profesional secara umum, harus diatur dan dilaksanakan dengan cara yang menjamin bahwa administrasi profesi hukum bebas dari pengaruh yang tidak semestinya atau tidak pantas, baik dari pemerintah, pengadilan, atau lainnya.

IBA mengadopsi Panduan IBA untuk Menetapkan dan Memelihara Prosedur Pengaduan dan Disiplin. Mirip dengan Prinsip-prinsip IBA, Panduan IBA tidak mengikat dan dimaksudkan sebagai model untuk membantu asosiasi pengacara dalam mengadopsi atau mengadaptasi prosedur pengaduan dan disiplin dasar mereka sendiri. Secara umum, panduan ini merekomendasikan untuk mengadopsi kode etik lokal dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar penilaian perilaku pengacara Badan Penanganan Pengaduan yang adil, tidak memihak, dan independen dengan kewenangan mediasi dan penolakan; ketentuan

prosedural dan dokumenter untuk aturan saat menanggapi pengaduan yang dibuat persyaratan pendidikan dan informasi untuk memastikan klien mengetahui proses pengaduan terhadap pengacara, serta panduan tentang Pengadilan Disiplin dan Pengadilan Banding untuk mematuhi proses hukum yang semestinya.

13.3 SISTEM DISIPLIN DAN SANKSI BAGI PENGACARA

Di Prancis, asosiasi pengacara bertanggung jawab untuk mengadili proses pelanggaran. Setiap asosiasi pengacara lokal memiliki Dewan yang menjalankan fungsi disiplin. *Bâtonnier* adalah otoritas yang bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Pasal 1.4 RIN Prancis menyatakan bahwa pelanggaran profesional dapat mengakibatkan sanksi disipliner. Pengacara Prancis juga tunduk pada proses disipliner atas pelanggaran kehormatan di luar kehidupan profesional mereka. Sanksi disipliner dapat berupa peringatan, teguran resmi, penangguhan sementara yang tidak boleh melebihi tiga bulan, dan pengecualian dari profesi pengacara.

Di Jerman, Bagian 113 Undang-Undang Pengacara Federal menetapkan bahwa jika seorang pengacara melanggar tugasnya berdasarkan Undang-Undang Pengacara Federal atau Aturan Praktik Profesional, Pengadilan Disiplin Pengacara dapat menjatuhkan sanksi. Asosiasi Pengacara Federal Jerman tidak memiliki yurisdiksi disipliner. Masalah disipliner ditangani terlebih dahulu Asosiasi Pengacara regional, yang merupakan badan pengaturan mandiri yang diawasi oleh Kementerian Kehakiman di wilayah tertentu tempat asosiasi tersebut berada. Asosiasi Pengacara regional masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan profesional. Asosiasi Pengacara Daerah memastikan bahwa para pengacara yang menjadi anggota Asosiasi Pengacara mematuhi kewajiban profesional mereka, dan memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi tertentu jika seorang pengacara melanggar kewajibannya. Berdasarkan Bagian 114 Undang-Undang Pengacara Federal, sanksi disiplin dapat mencakup: peringatan, teguran, denda hingga dua puluh lima ribu euro, larangan bertindak sebagai perwakilan dan pengacara di bidang hukum tertentu untuk jangka waktu antara satu dan lima tahun, atau pengucilan dari profesi hukum.

Di Belanda, Aturan Perilaku Belanda menunjukkan bahwa isi proses disiplin ditentukan oleh Pengadilan Disiplin atas dasar sumpah advokat, anggaran dasar, dan tiga aturan yang disebutkan dalam pasal 46 Undang-Undang Advokat, yang dapat diringkas sebagai berikut: menjaga kepentingan klien, mematuhi anggaran dasar Asosiasi Pengacara Belanda, bertindak dengan cara yang sesuai dengan advokat yang baik. Aturan Perilaku Belanda juga menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya dimaksudkan sebagai pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesi mereka. Meskipun mereka juga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi Pengadilan Disiplin, mereka tidak akan mengikat mereka, seperti yang sering diputuskan oleh Pengadilan Banding Disiplin. Sanksi termasuk peringatan, teguran, larangan praktik (maksimal satu tahun dan mencakup setiap bidang hukum); pencabutan izin praktik, publikasi keputusan badan disipliner.

Di Belgia, mirip dengan Prancis, berbagai Asosiasi Pengacara lokal semuanya

merupakan badan disipliner yang mengatur diri sendiri. Ada Dewan Ordo (Conseil de l'Ordre/Raad van de Orde) di setiap Asosiasi Pengacara nasional. Di setiap bidang Pengadilan Banding, ada Dewan Banding Disiplin. Ini adalah pengadilan disipliner eksternal yang di hadapannya keputusan Dewan Ordo dapat diajukan banding. Sanksi termasuk peringatan, kecaman, teguran, penangguhan, pencabutan izin praktik, atau denda.

Di Indonesia, sistem disiplin bagi pengacara diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat (KEPA) yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi disipliner yang berkisar dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Proses disiplin biasanya ditangani oleh Majelis Kehormatan yang terdiri dari anggota PERADI dan dilaksanakan dengan prinsip independensi dan objektivitas. Pengacara juga dapat dikenai sanksi jika terlibat dalam tindakan yang merugikan martabat profesi atau melanggar hukum. Sanksi disipliner dapat berupa peringatan, teguran, penangguhan izin praktik, atau pencabutan izin praktik secara permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Hukum umum

Di AS, ABA mengadopsi Model Rules for Lawyer Disciplinary Enforcement (ABA Disciplinary Rules), yang mencerminkan kebijakan ABA tentang struktur yang tepat dari proses disipliner. Seperti halnya dengan ABA Model Rules, mayoritas negara bagian saat ini mengikuti ABA Disciplinary Rules. Pembukaan ABA Disciplinary Rules menetapkan bahwa pengadilan memiliki "tanggung jawab eksklusif di negara bagian ini untuk struktur dan administrasi disiplin pengacara, dan memiliki kewenangan yang melekat untuk mempertahankan standar perilaku profesional yang sesuai.

Pengacara juga dapat menegur pengacara, mengenakan denda, atau menangguhkan atau mencabut lisensi pengacara untuk menjalankan praktik hukum. Misalnya, jika seorang pengacara AS bertindak atas instruksi klien untuk tidak menghadiri persidangan, ia dapat dikenakan dua jenis sanksi: sanksi litigasi oleh pengadilan dan sanksi disipliner oleh pengacaranya. Pengadilan dapat mengenakan denda berat dari bangku pengadilan. Misalnya, dalam kasus *Fletcher v. HPN Holdings*, pengacara pembela dikenai sanksi \$6.000 untuk pelanggaran litigasi lainnya, yaitu tidak hadir dalam sidang dan tidak hadir dalam sidang terjadwal lainnya.

Di Inggris, pengacara dapat dikenakan denda administratif dan peringatan oleh Komite Perilaku Profesional (PCC), atau masalah tersebut dapat dirujuk ke Pengadilan Disiplin untuk sidang pelanggaran profesional formal. Pengadilan Disiplin berwenang untuk mencabut atau menangguhkan sertifikat praktik pengacara.

Perundang-undangan Nasional

Pasal 30(1) Undang-Undang Pengacara menetapkan bahwa pengacara bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi hukum secara profesional dan cermat serta untuk menegakkan reputasi profesi. Pasal 30(2) mencantumkan pelanggaran yang sangat serius terhadap profesi hukum:

- a. Tidak melaksanakan atau lalai secara nyata dalam urusan di bidang bantuan hukum dan pelaksanaan mandat publik.
- b. Tidak melaksanakan tindakan sesuai kewenangan dan tidak melaksanakan tindakan yang wajib dilakukan oleh pengacara dalam melindungi hak dan kepentingan klien.
- c. Pelanggaran kerahasiaan.

Pasal 30(3) selanjutnya menunjukkan bahwa MBA harus menentukan lebih cermat pelanggaran tugas profesional dan reputasi profesi hukum. Berdasarkan Pasal 31(1) Undang-Undang Pengacara, sanksi atas pelanggaran tugas dan prinsip etika dapat mencakup peringatan publik, denda hingga sepuluh kali biaya keanggotaan tahunan Bar atau penangguhan sementara hingga satu tahun. Berdasarkan Pasal 31(2), pengacara yang dikenai prosedur disipliner dapat diberikan larangan kerja sementara, sambil menunggu durasi prosedur disipliner, dan tidak melebihi tiga puluh hari. Pasal 31(3) menetapkan bahwa tata cara dan prosedur untuk larangan bekerja sementara ditetapkan dalam Undang-Undang.

Undang-Undang MBA menetapkan organisasi sistem disiplin. Berdasarkan Pasal 26, Jaksa Disiplin memulai dan mengajukan dakwaan disiplin terhadap anggota MBA atas pelanggaran disiplin. Jaksa Disiplin memiliki 3 deputi. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang MBA, Pengadilan Disiplin memutuskan permintaan Jaksa Disiplin. Pengadilan Disiplin terdiri dari 3 anggota, termasuk presiden. Pekerjaan Jaksa Disiplin dan Pengadilan Disiplin diatur lebih lanjut oleh Buku Peraturan Disiplin.

Menurut Pasal 1 Buku Peraturan Disiplin, sistem disiplin melindungi dan memastikan penghormatan terhadap advokat dan profesi, pelaksanaan kegiatan advokat secara sadar, melindungi warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan, dan mempromosikan keselamatan hukum dan supremasi hukum. Pasal 2 mencantumkan badan-badan disiplin MBA: Jaksa Disiplin, Pengadilan Disiplin dan Dewan Banding.

Berdasarkan Pasal 5, Jaksa Penuntut Umum menyelidiki fakta-fakta dalam pengaduan, mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan tersangka, serta yang menguntungkan tersangka, dan menyerahkan kasus lengkap ke Pengadilan Disiplin. Berdasarkan Pasal 7, Pengadilan Disiplin adalah instansi pertama yang memutus kasus tersebut. Pasal 9 menetapkan bahwa setiap anggota Pengadilan Disiplin wajib mempelajari tuntutan disiplin, dan bertindak serta memutusnya secara tidak memihak, sah, dan dapat dibenarkan. Majelis Banding meninjau banding atas keputusan instansi pertama. Berdasarkan Pasal 11, Majelis Banding terdiri dari lima anggota, termasuk presiden yang mengelola pekerjaan Majelis Banding.

Pasal 12 mencantumkan pelanggaran disiplin yang serius. Pasal 12(1) membahas pelanggaran berbagai aturan benturan kepentingan:

- a. Memberikan bantuan hukum atau menolak memberikan bantuan hukum secara melawan hukum, membahayakan kepentingan klien.
- b. Memberikan bantuan hukum dalam perkara yang sama di mana advokat pernah bertindak sebagai hakim, jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum, atau pegawai negeri sipil.

- c. Menyusun akta hukum bilateral yang hanya menguntungkan satu pihak.
- d. Memberikan bantuan hukum kepada klien, jika pada perkara sebelumnya advokat pernah menjadi kuasa hukum pihak lain dalam perkara hukum yang timbul dari perkara yang sama.
- e. Memberikan bantuan hukum kepada pihak lawan.

Pelanggaran berat lainnya yang dapat mengakibatkan tindakan disiplin berdasarkan Pasal 12 ayat (1) adalah kerja sama dengan advokat gadungan dan orang yang melakukan pekerjaan hukum secara melawan hukum.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa penolakan untuk memberikan bantuan hukum dapat dibenarkan jika terjadi benturan kepentingan, beban kerja yang berlebihan sehingga tidak dapat memberikan bantuan hukum yang layak, klien tidak memenuhi kewajibannya mengenai biaya perkara dan honorarium advokat, klien menolak untuk bekerja sama atau bersikap tidak hormat kepada advokat, atau dalam keadaan lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2), pelanggaran disiplin berat lainnya adalah tidak bertindak sesuai kepentingan klien atau bertindak melawan perintah klien, yang mengakibatkan kerugian pada klien. Pasal 12 ayat (3) mengatur tentang rahasia jabatan. Advokat melakukan pelanggaran disiplin berat jika: membocorkan rahasia tanpa izin klien, kecuali dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang; atau menyalahgunakan informasi rahasia tersebut terhadap salah satu pihak. Pasal 13 mencantumkan pelanggaran lain, seperti:

- a. Menawarkan jasa pengacara dan bantuan hukum dengan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Tarif Jasa Advokat.
- b. Menghina rekan sejawat, hakim, perwakilan badan negara dalam menjalankan tugas profesi.
- c. Menolak mengembalikan berkas yang diberikan oleh salah satu pihak, meskipun pihak tersebut telah membayar imbalan dan biaya.
- d. Tidak melaporkan orang yang secara melawan hukum memberikan bantuan hukum kepada Advokat.
- e. Bertindak melawan ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
- f. Tidak memberitahukan kepada Advokat tentang perubahan alamat kantor atau firma hukum.
- g. Tidak melaksanakan keputusan badan advokat.
- h. Melanggar kewajiban mengikuti ujian profesi advokat.
- i. Hadir di pengadilan tanpa mengenakan jubah advokat.
- j. Melakukan iklan yang bertentangan dengan Kode Etik Advokat dan mencari klien dengan cara yang tidak senonoh, Pasal 12 dan 13 berlaku bagi calon advokat.

Kesimpulan

Tidak seperti di AS, di mana pendisiplinan pengacara berada di bawah pengawasan cabang yudisial, di sebagian besar negara Eropa, asosiasi pengacara lokal bertanggung jawab atas tugas ini. Mirip dengan sebagian besar negara hukum perdata yang dibahas di atas, MBA bertugas melakukan proses pendisiplinan, dengan keputusan pendisiplinan tunduk pada

tinjauan banding.

Pasal-pasal dalam Buku Peraturan Disiplin, yang diadopsi oleh MBA menurut Undang-Undang Pengacara dan Statuta MBA, berkorelasi dengan prinsip-prinsip etika dasar yang dibahas dalam materi ini. Dengan demikian, Pasal 12 memastikan sanksi disiplin atas pelanggaran prinsip independensi dan aturan konflik kepentingan, prinsip kesetiaan kepada kepentingan klien, dan penghormatan terhadap rahasia dan kerahasiaan profesional. Pasal 13 mencakup prinsip-prinsip etika lainnya, seperti kewajaran biaya pengacara, CLE, ketekunan, kejujuran, integritas, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R. (2017). *The Law and Ethics of Lawyering*. New York, NY: Foundation Press.
- Banks, A. (2019). *Legal Ethics: The Role of Professional Conduct in Law Practice*. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Bauman, R. (2019). *Ethics and the Legal Profession: A Practical Guide*. New York, NY: Routledge.
- Bentham, J., & Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism and other essays*. Penguin UK.
- Bentham, Jeremy. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.
- Bing, J. (2020). *Legal Ethics in the 21st Century: A Global Perspective*. London, UK: Springer.
- Brown, S. (2020). *Ethics and the Practice of Law: A Comparative Analysis*. London, UK: Hart Publishing.
- Chasnoff, A. (2018). *Legal Profession and Ethics: Navigating Professional Responsibility*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Cohen, E. (2021). *Understanding Ethics in the Legal Profession: A Handbook for Lawyers*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Cummings, S. (2018). *Lawyers' Ethics: A Comprehensive Overview*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Decker, S. (2017). *Professional Responsibility: A Contemporary Approach*. St. Paul, MN: West Academic Publishing.
- DeMarco, M. (2020). *Lawyer Ethics: A Practical Guide to Professional Conduct*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Dzienkowski, J. (2016). *Legal Ethics: A Casebook*. Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Ethridge, J. (2019). *Legal Ethics and Professional Responsibility: A Textbook*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Farrow, J. (2021). *The Role of Ethics in Legal Practice: A Case Study Approach*. Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Flagg, B. (2016). *Professional Responsibility and Legal Ethics: A Global Perspective*. New York, NY: Routledge.
- Ginsberg, M. (2021). *Ethical Dilemmas in Legal Practice: A Guide for Lawyers*. Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Green, T. (2020). *Understanding Legal Ethics: Principles and Practice*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Hamner, K. (2020). *Legal Ethics: Theory and Practice*. Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Hart, H. (2018). *Legal Ethics and Professional Responsibility*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Henson, T. (2019). *The Ethics of Legal Practice: Balancing Justice and Professionalism*. Toronto, Canada: Thomson Reuters.
- Hobson, Charles F. (2006). Defining The Office: John Marshall As Chief Justice. *University Of Pennsylvania Law Review*. Vol. 154: 1421.

- Kant, I. (1998). Religion within the boundaries of mere reason. *Religion and rational theology*, 39, 83.
- Kant, Immanuel. (1997) *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge University Press.
- Kirby, Michael. (2006). *Judicial Independence: A Review of the Australian Experience*. Australian Bar Review, vol. 24, no. 1, pp. 1-13.
- Kuehn, D. (2018). *The Law and Ethics of Legal Practice: An Overview*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Lawrence, R. (2017). *Navigating Legal Ethics: Principles and Practice for Lawyers*. New York, NY: Oxford University Press.
- Levy, H. (2021). *Legal Profession and Ethics: A Global Overview*. London, UK: Cambridge University Press.
- Luppino, J. (2020). *Professional Responsibility and Ethics: Key Issues for Legal Practice*. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Mather, L. (2019). *Ethics and Lawyering: A Comparative Study of Global Practices*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- McCoy, L. (2019). *Lawyers and Ethics: A Comparative Study*. Toronto, Canada: Thomson Reuters.
- Merryman, J. (2016). *Legal Ethics and Professional Responsibility in the Modern World*. Washington, DC: National Legal Ethics Library.
- Miller, L. (2021). *Ethics in the Practice of Law: A Guide for Professionals*. New York, NY: Routledge.
- Moore, C. (2018). *Professional Responsibility: Legal Ethics in Practice*. Boston, MA: Cengage Learning.
- O'Brien, R. (2020). *Legal Ethics: A Comprehensive Approach to Professional Responsibility*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Peters, A. (2017). *The Role of Ethics in Law: Theory and Practice*. New York, NY: Foundation Press.
- Phillips, R. (2019). *Ethics for Lawyers: A Comprehensive Guide to Professional Conduct*. Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Redding, S. (2021). *Legal Ethics: Navigating Professional Responsibility in the Modern Era*. Toronto, Canada: Thomson Reuters.
- Rosen, H. (2020). *The Ethics of Legal Representation: Principles and Practices*. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Schwartz, S. (2018). *Professional Responsibility in Law: Ethics and Practice*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Shapiro, M. (2017). *Legal Ethics: A Comparative Analysis of Global Practices*. London, UK: Hart Publishing.
- Smith, J. (2019). *Ethics in the Legal Profession: Challenges and Opportunities*. New York, NY: Oxford University Press.
- Solomon, R. (2021). *Ethics for Lawyers: A Practical Guide to Professional Responsibility*. Washington, DC: National Legal Ethics Library.
- Thompson, R. (2020). *Legal Profession and Ethics: An Overview of Contemporary Issues*. Boston, MA: Cengage Learning.

- Turner, L. (2018). *Ethical Standards in Legal Practice: A Practical Guide*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Van Duzer, J. (2019). *Legal Ethics in the Digital Age: New Challenges and Opportunities*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Walker, T. (2021). *Understanding Legal Ethics: Theory and Practice for Lawyers*. New York, NY: Routledge.
- Weiner, D. (2018). *Lawyers and Ethics: A Global Perspective on Professional Responsibility*. London, UK: Cambridge University Press.
- Wilkins, D. (2020). *The Intersection of Law and Ethics: A Guide for Practitioners*. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Williams, K. (2019). *Legal Ethics and Professional Responsibility: A Comprehensive Overview*. Toronto, Canada: Thomson Reuters.
- Wilson, R. (2021). *Ethics for Legal Practitioners: Navigating Professional Conduct*. Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Wong, H. (2017). *Ethics in Law: A Comprehensive Examination of Professional Standards*. New York, NY: Foundation Press.
- Yates, J. (2020). *Professional Responsibility and Legal Ethics: A Practical Approach*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Young, A. (2019). *Legal Ethics: Principles and Practice for Today's Lawyers*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Zuckerman, A. (2021). *Ethics in the Legal Profession: A Guide for Lawyers and Law Firms*. New York, NY: Oxford University Press.
- Zwerling, N. (2018). *The Ethics of Lawyering: Navigating Challenges in Professional Conduct*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

ETIKA PROFESI HUKUM

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen, ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan

Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik), Ilmu Perpajakan.

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-40-3 (PDF)

